



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia



DEPUTI VII
Kerja Sama Ekonomi Internasional
Kemenko Bidang Perekonomian

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

2022





LAKIP 2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Koordinator Penyusunan:



Edi Prio Pambudi
Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi
Internasional



Bobby C Siagian
Asdep Kerja Sama
Ekonomi Asia



Fajar Wirawan Harijo
Asdep Kerja Sama
Ekonomi Eropa, Afrika,
dan Timur Tengah



Irwan Sinaga
Asdep Kerja Sama
Ekonomi Amerika dan
Pasifik



Ferry Ardiyanto
Asdep Kerja Sama
Ekonomi Multilateral



Netty Muharni
Asdep Kerja Sama
Ekonomi Regional dan
Sub Regional

Tim Penyusun:
Bidang Program dan Tata Kelola
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kontributor:
Seluruh Pegawai di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi Internasional & Sekretariat Kemendagri
Perekonomian Republik Indonesia

Jakarta – Februari 2023

KATA PENGANTAR



Jakarta, 13 Februari 2023

Edi Prio Pambudi

Deputi Bidang Koordinasi
dan Kerja Sama Ekonomi
Internasional

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang ikut berkontribusi dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

PERBANDINGAN CAPAIAN 2021 & 2022

2021

Indikator Kinerja Utama

2022

IKU 1



Persentase market share ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia



Jumlah kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral) yang disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian



Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara/ Menteri di forum ekonomi internasional yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian



Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian



Persentase ratifikasi/ perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang terselesaikan di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian,



IKU 2



Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional



Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Internasional



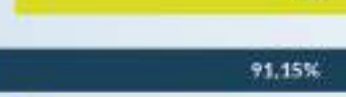
IKU 3



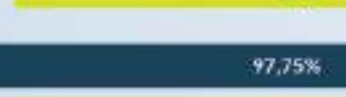
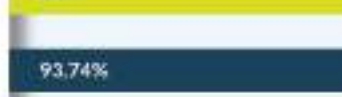
Persentase ASN di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi.
*Per 2022 menjadi:



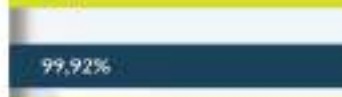
Persentase ASN di Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang memenuhi ketentuan JP ASN



Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional,



Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional



Realisasi Target

** Indikator Kinerja belum tersedia

PENUGASAN STRATEGIS YANG DIBERIKAN PRESIDEN - **TAHUN 2022**

Sebagai upaya memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, berikut adalah beberapa Penugasan Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2022:



**Ketua Bidang Sherpa Track pada
Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022**
Berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional
Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia



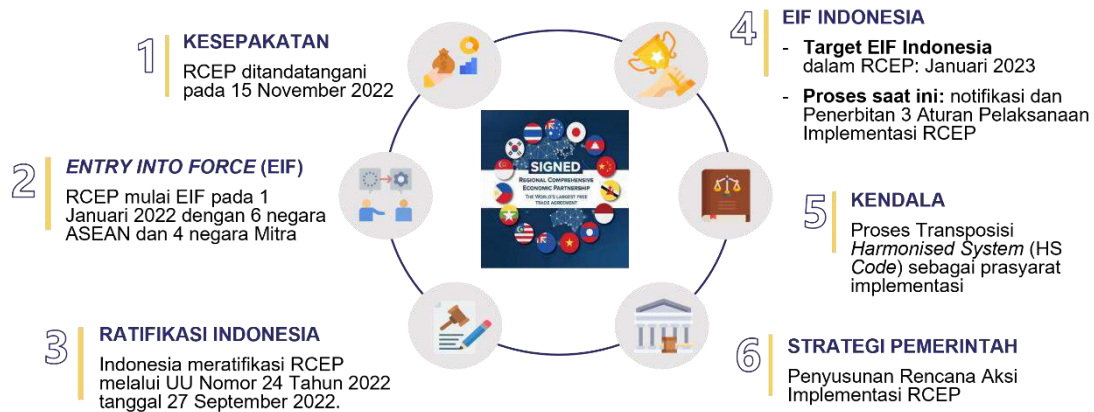
**Ketua Tim Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi Sub Regional**
Berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 13 Tahun 2001



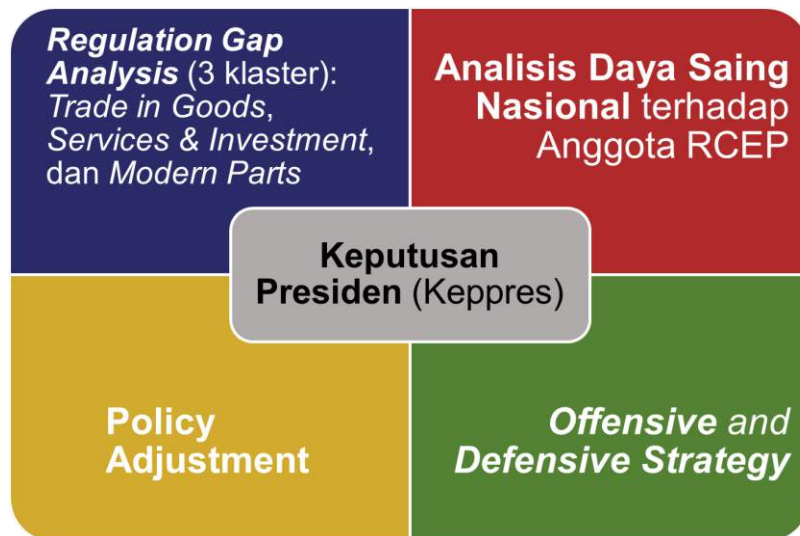
Koordinator Pilar Ekonomi ASEAN
Berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2020

RENCANA AKSI RCEP

Perjalanan Persetujuan RCEP



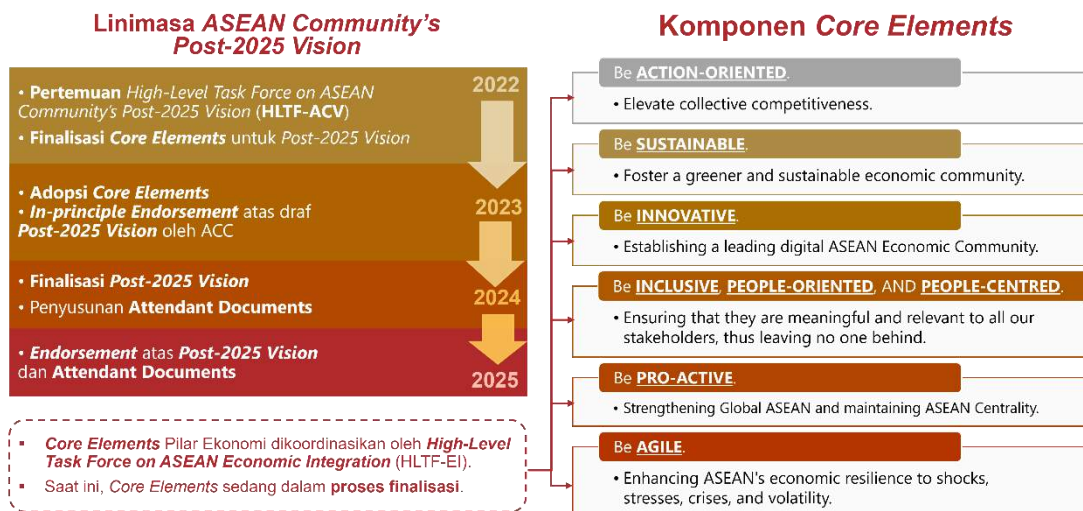
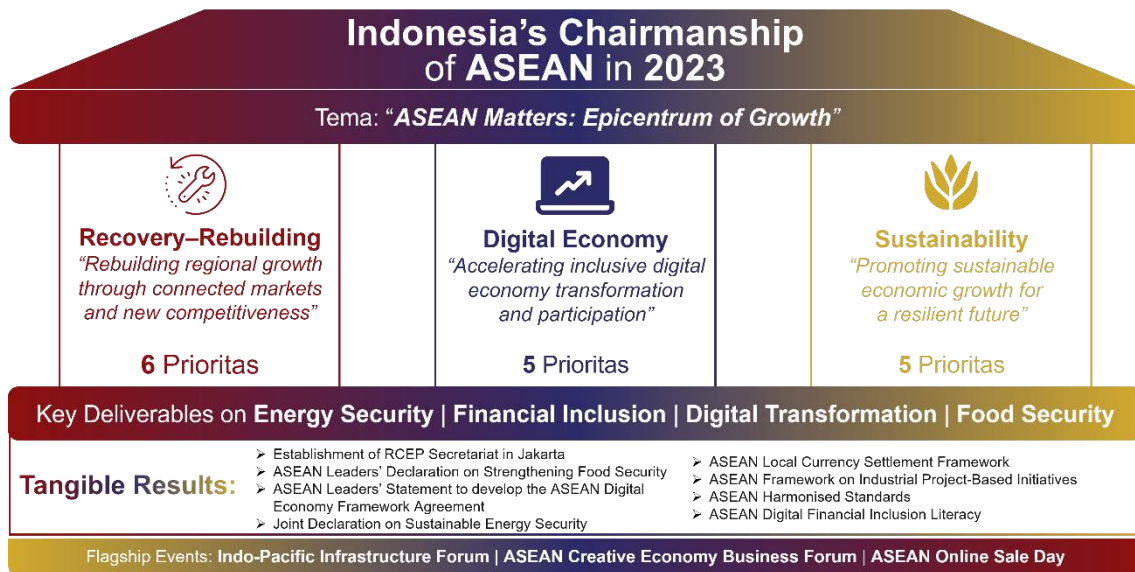
Substansi Renaksi Implementasi RCEP



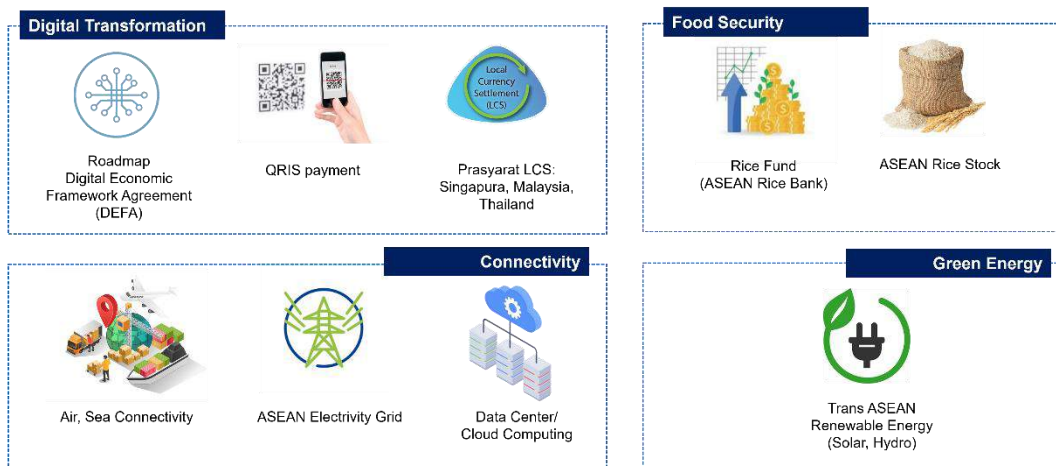
Linimasa Penyusunan Keppres Rencana Aksi Implementasi RCEP



ASEAN – Chairmanship Indonesia pada ASEAN 2023



Economic Deliverables pada Chairmanship ASEAN 2023



SIDANG KOMISI BERSAMA (SKB) RI - RUSIA

Sidang Komisi Bersama Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik*



Sidang Komisi Bersama ke-9



Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII)

Pertemuan terakhir dilaksanakan secara virtual tanggal 14 Oktober 2020.
Lead Pihak RI: Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
Note: Pertemuan ke-5 direncanakan pada akhir Januari 2023



Working Group on Transportation and Infrastructure (WGTI)

Pertemuan terakhir dilaksanakan secara virtual tanggal 6 Oktober 2021
Lead Pihak RI: Kementerian Perhubungan



Working Group on Legal Basis (WGLB)

Pertemuan terakhir dilaksanakan secara virtual tanggal 24 November 2020
Lead Pihak RI: Kementerian Luar Negeri



Working Group on Energy (WGE)

Pertemuan terakhir dilaksanakan di Jakarta tanggal 5 Februari 2020
Lead Pihak RI: Kementerian ESDM



Working Group on Culture and Tourist Exchange (WGCTE)

Preliminary Meeting secara Virtual tanggal 5 Oktober 2021
Lead Pihak RI: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sidang Komisi Bersama ke-12



Working Group on Banking and Finance (WGBF)

Pertemuan terakhir dilaksanakan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2022
Lead Pihak RI: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan



Working Group on Agriculture (WGA)

Belum melaksanakan pertemuan
Lead Pihak RI: Kementerian Pertanian



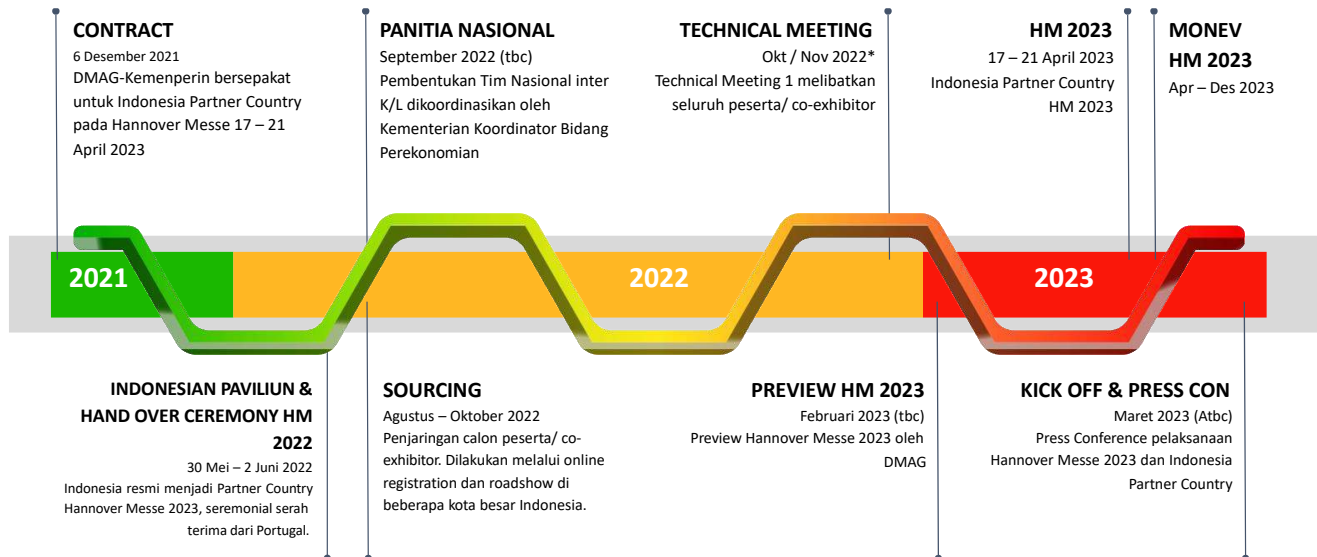
Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF)

Pertemuan terakhir dilaksanakan di Jakarta tanggal 23 - 25 Agustus 2022
Lead Pihak RI: Kementerian Kelautan dan Perikanan

INDONESIA - KOREA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA)



TIMELINE – Persiapan Indonesia Official Partner Country Hannover Messe 2023



KINERJA PERDAGANGAN Indonesia – MERCOSUR

KINERJA PERDAGANGAN Indonesia – MERCOSUR

Periode: 2015 s.d 2019
Nilai: USD Miliar



2019
USD 5,07 Miliar
TOTAL PERDAGANGAN
295+ million
Population of Mercosur

EKSPOR USD 1,27 Miliar

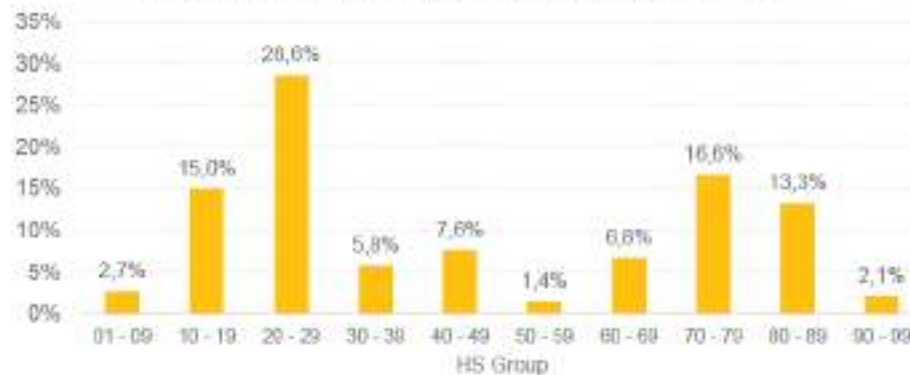


IMPOR USD 3,8 Miliar

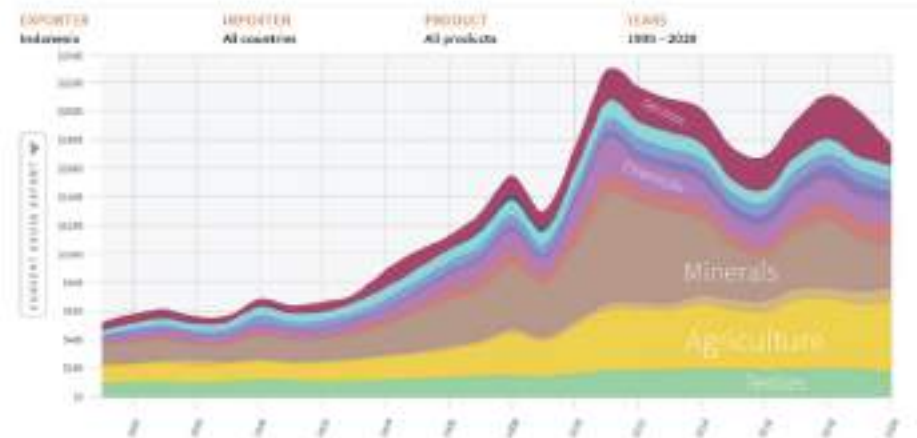
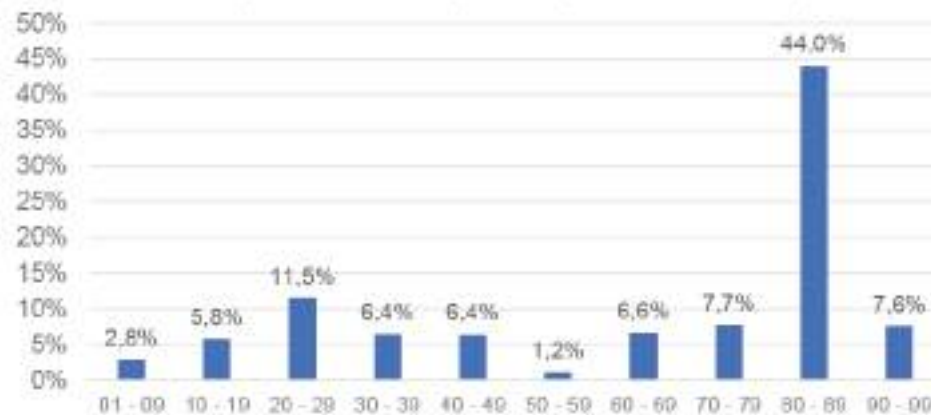


DATA EKSPOR INDONESIA

Porsi Ekspor Indonesia per Kelompok HS thd total Ekspor



Porsi Ekspor Produk ASEAN per kelompok HS thd total Ekspor



- Produk ekspor Indonesia masih didominasi barang dengan nilai tambah rendah (ekstraktif), ubiquity rate rendah. Sedangkan produk manufaktur dengan nilai tambah lebih tinggi bergantung pada impor bahan baku
- Market access pasar non-traditional masih tergantung ketersediaan logistik

DATA EKSPOR INDONESIA

Pengalaman dari Taiwan dan Korsel melakukan lompatan ekspor melalui Semiconductor Manufacturing. Saat ini export share Indonesia untuk Electronic IC 0,05% (\$340M), Semiconductor Devices 0,17% (\$175M)

Ekspor Semiconductor Devices



Ekspor Electronic IC



Peluang kerja sama manufacturing dengan Taiwan melalui AS, membuka kerja sama manufaktur melalui Digital Transformation

Sumber: Harvard - Atlas of Economic Complexity

Tren Impor Dunia (+)

- 09 – Kopi, teh, rempah-rempah
- 40 – Karet dan Barang dari Karet
- 55 – Serat Stafel Buatan
- 62 – Pakaian jadi (bukan rajutan)

Kontribusi Ekspor 5,58%

Tren Ekspor RI (-) | Tren Impor Dunia (+)
Losers in Increasing Global Market

Tren Ekspor RI (-)

Seluruh produk kuadran 4 berada di luar 30 produk teratas ekspor Indonesia

Kontribusi Ekspor 8,76%

Tren Ekspor RI (-) | Tren Impor Dunia (-)
Losers in Declining Global Market

Tren Impor Dunia (-)

Posisi Ekspor Produk Indonesia terhadap Permintaan Dunia

- 03 – Ikan dan Udang
- 15 – Lemak & Minyak Hewan/Nabati
- 16 – Daging dan Ikan Olahan
- 23 – Ampas/sisa Industri Makanan
- 26 – Bijih, Kerak, dan Abu Logam
- 27 – Bahan Bakar Mineral
- 28 – Bahan Kimia Anorganik
- 38 – Berbagai Produk Kimia
- 39 – Plastik dan Barang dari Plastik
- 44 – Kayu, barang dari kayu
- 47 – Bubur kayu/Pulp
- 48 – Kertas/karton

Kontribusi Ekspor 79,62%

Tren Ekspor RI (+) | Tren Impor Dunia (+)
Winners in Increasing Global Market

- 81 – Barang-barang Rajutan
- 84 – Alas kaki
- 71 – Perhiasan/Permata
- 72 – Besi dan Baja
- 73 – Benda-benda dari Besi dan Baja
- 74 – Tembaga
- 75 – Nikel
- 80 – Timah
- 84 – Mesin-mesin/Pesawat Mekanik
- 85 – Mesin/Peralatan Listrik
- 94 – Perabot, penerangan rumah

Tren Ekspor RI (+)

- 21 – Berbagai Makanan Olahan
- 29 – Bahan Kimia Organik
- 87 – Kendaraan Bermotor dan bagiannya

Kontribusi Ekspor 6,04%

Tren Ekspor RI (+) | Tren Impor Dunia (-)
Winners in Declining Global Market

Daftar Isi

	Kata Pengantar	ii
	Daftar Isi	xii
	Daftar Tabel	xx
	Daftar Gambar	xxiii
INFOGRAFIS	Perbandingan Capaian 2021 & 2022	iii
	Penugasan Strategis yang Diberikan Presiden Tahun 2022	iv
	Rencana Aksi RCEP	v
	ASEAN – Chairmanship Indonesia pada ASEAN 2023	vi
	Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Rusia	vii
	Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA)	viii
	Timeline – Persiapan Indonesia Official Partner Country Hannover Messe 2023	ix
	Kinerja Perdagangan Indonesia - Mercosur	ix
	Data Ekspor Indonesia	x
	Data Ekspor Indonesia	x

1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. ORGANISASI DAN FUNGSI	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok	2
3. Fungsi	2

Daftar Isi

	4. Struktur Organisasi	3
	C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS	6
	D. SISTEMATIKA PELAPORAN	9
2 PERENCANAAN KINERJA	A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI VII TAHUN 2020 - 2024	10
	1. Visi	10
	2. Misi	12
	3. Sasaran Program Strategis	14
	4. Indikator Kinerja	16
	5. Target Kinerja	17
	B. PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KERJA (RENJA) 2022	19
	Prioritas Nasional 2022	19
	Rencana Kerja 2022	20
	C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	32
3 AKUNTABILITAS KINERJA	A. PENGUKURAN KINERJA	43
	1. Metode Pengukuran	43
	2. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	48
	3. Nilai Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	50
	4. Nilai Kinerja Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	52
	B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2022	53
	1. Sasaran Strategis Pertama	54
	Capaian IKU 1.1 Persentase Market Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/PTA/CEPA terhadap Total Ekspor Indonesia	55
	Capaian IKU 1.2 Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional, dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	58

Daftar Isi

1. Kesepakatan pada <i>the 2nd Senior Official Meeting joint Committee on Economic Cooperation Republic of Indonesia – Republic of Korea</i>	64
2. Kesepakatan pada <i>the 2nd Ministerial Meeting Joint Committee on Economic Cooperation Republic of Indonesia - Republic of Korea</i>	77
3. Penandatanganan MoU terkait Ekonomi Digital RI-Korea dalam Rangkaian KTT G20	81
4. Kesepakatan pada <i>the 2nd Ministerial Meeting Joint Committee on Economic Cooperation Republic of Indonesia - Republic of Korea</i>	83
5. Kesepakatan pada <i>the 10th Senior Official Meeting 6 Working Group RI –Singapura</i>	86
6. Kesepakatan pada <i>Ministerial Meeting RI-Singapura ke-12</i>	96
7. Kesepakatan pada Sidang Komisi Bersama ke-13 RI-Rusia	99
8. Kesepakatan pada <i>Public Private Dialogue Track 1.5 Indonesia – Jepang</i>	104
9. Kesepakatan pada Pertemuan Tingkat Menteri <i>Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC) 2022</i>	107
10. Kesepakatan pada <i>Board Meeting PROSPERA</i>	111
11. Penandatanganan Amandemen <i>Subsidiary Arrangement</i> Perpanjangan Program PROSPERA	114
12. Finalisasi <i>Mid-Term Review</i> Program Kerja Sama Indonesia – Australia untuk Perekonomian (PROSPERA)	118
13. Peningkatan Capaian Implementasi MEA 2025	123
14. Kesepakatan pada <i>High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI)</i>	130
15. Kesepakatan pada Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA	136
16. Kesepakatan pada <i>BIMP-EAGA Senior Official Meeting</i>	143
17. Kesepakatan pada <i>CIMT Advisory Committee Meeting</i>	146
18. Kesepakatan pada Indonesia – Malaysia – Thailand <i>Growth Triangle (IMT-GT) Senior Official Meeting</i>	149
19. Kesepakatan pada Indonesia-Malaysia-Thailand <i>Growth Triangle (IMT-GT) Senior Official Meeting</i>	153
20. Kesepakatan pada Indonesia-Malaysia-Thailand <i>Growth Triangle (IMT-GT) Ministerial Meeting</i>	163
21. Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Indonesia	169
22. Kesepakatan pada <i>Strategic Planning Meeting</i> Indonesia-Malaysia-Thailand <i>Growth Triangle (SPM IMT-GT)</i>	177

Daftar Isi

23. Kesepakatan pada BIMP-EAGA <i>Strategic Planning Meeting</i> (SPM)	181
24. Kesepakatan pada Pertemuan ke-3 Sherpa G20 Presidensi Indonesia	185
25. Kesepakatan pada Pertemuan ke-3 Sherpa G20 Presidensi Indonesia	192
26. Kesepakatan pada <i>Senior Official Meeting</i> Trilateral RI – Timor Leste - Australia	196
Capaian IKU 1.3 Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	197
1. <i>Joint Statement</i> KTT IMT-GT	199
2. <i>G20 Leaders' Declaration</i> Presidensi Indonesia	203
Capaian IKU 1.4 Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional, dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	211
1. Kesepakatan <i>Joint Committee Meeting</i> ke-17 GR IJEPA	215
2. Perundingan <i>Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement in Services</i> (ICA-CEPA)	218
3. Pelaksanaan Perundingan Kedua Indonesia-Chile CEPA Trade in Services (IC CEPA TIS)	231
4. ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA)	239
5. Upgrading ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)	242
6. Pembentukan Komite Bersama JCM Indonesia	248
7. Kesepakatan Usulan Proyek Baru JCM	251
8. Kesepakatan Kerja Sama RI - Kazakhstan	253
9. Perundingan Pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)	256
10. <i>Preliminary Meeting</i> Indonesia MERCOSUR CEPA	264
11. Perundingan Indonesia – EU CEPA Putaran ke-12	268
12. Penyelesaian JFSG FTA RI – EAEU	272
13. Perundingan Indonesia-Mauritius Putaran ke-3	273
14. Indonesia-United Arab Emirates <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>	280
15. Upgrading ATIGA	283
16. Kesepakatan Kerja Sama <i>Committee on Economic Cooperation</i> Indonesia – Korea CEPA	286

Daftar Isi

17. Negosiasi Preferensial Perdagangan Barang antara RI – Pakistan (IP-Tiga) dan RI-Bangladesh (IB-PTA)	288
Capaian IKU 1.5 Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	289
1. Penyelesaian Proses Ratifikasi Indonesia – Korea CEPA	293
2. Penyelesaian Proses Ratifikasi ASEAN <i>Protocol to Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i> (EDSM)	296
3. Penyelesaian Capaian Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan Indonesia - Angola	299
4. Penyelesaian Proses Ratifikasi Protokol ASEAN <i>Framework Agreement on Services</i> (AFAS) Paket ke-10	301
5. Penyelesaian Proses Ratifikasi Perjanjian Regional <i>Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)	304
6. Penyelesaian Proses Ratifikasi ASEAN <i>Trade in Services Agreement</i> (ATISA)	309
1. Sasaran Strategis Kedua	312
Capaian IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Ditindaklanjuti	315
1. Monitoring dan Evaluasi Hasil Kerja Sama dalam Forum/Kesepakatan Indonesia dengan Negara di Kawasan Eropa Barat	315
2. Rapat Koordinasi Posisi Pemri atas Kasus Sengketa DS477/478 untuk Pertemuan Reguler Dispute Settlement Body (DSB) dan Pertemuan Bilateral AS dan SB	316
3. Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi Pemri dalam Memitigasi Rencana Retalisasi Brasil terkait Sengketa Dagang DS484	322
4. Persiapan <i>Trade and Investment Framework Agreement Ministerial Meeting</i> (TIFA MM) RI-Amerika Serikat Tahun 2022	323
5. Rakortas terkait dengan Potensi Ekspor Pupuk Urea ke Australia	325
6. Koordinasi, Sinkronisasi Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023	325
7. Rencana Aksi Implementasi Perjanjian RCEP	329
8. Pengusulan Proyek yang Memanfaatkan BKCF dalam Kerangka Kerja Sama BIMP-EAGA	332
9. Pelaksanaan IMT-GT <i>Flagship Projects</i> dalam IB 2022-2026	334
10. APEC Project di Indonesia	336

Daftar Isi

11. Laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM) pada Proyek “6MW Mini Hydro Power Plant Project in West Pasaman, West Sumatera”	338
12. Dukungan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan	338
13. Dukungan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>	338
14. Tindak lanjut dari K/L dalam menyampaikan usulan daftar kerja sama potensial	339
15. Tindak lanjut dari K/L dalam menyampaikan agenda prioritas <i>Working Group</i> dan <i>Engagement Group</i> serta <i>pending matters</i> Presidensi G20 Indonesia	339
16. Tindak lanjut dari K/L untuk mengusulkan kegiatan <i>side event</i> , kegiatan <i>road to G20 summit</i>	339
17. Proses Penetapan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Perjanjian AFAS Paket ke-10	340
18. Laporan Hasil Pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Korea	340
19. Endorsement of the Terms of Reference of the Committee of the Whole (CoW)	340
20. Siaran Pers	341
21. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indonesia-Jepang pada CEVEST BBPLK Bekasi	374
22. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha Jawa Barat	375
23. Monitoring dan Evaluasi Hasil Kerja Sama dalam Forum/Kesepakatan Indonesia dengan Negara di Kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur	375
24. Penandatanganan dan Tindak Lanjut Implementasi Plan of Action RI-Kanada 2022-2025	376
25. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Form Surat Keterangan Asal (SKA) GSP AS, IC-CEPA, dan IA-CEPA	377
26. Rapat Persiapan <i>the 1st Technical Working Group Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement</i>	378
27. Perkembangan PTA RI-Papua Nugini	379
28. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Membahas Pemanfaatan Form Surat Keterangan Asal (SKA) IC-CEPA dan SKA IA-CEPA	381

Daftar Isi

29. Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Kerja Sama Pernakan Indonesia-Selandia Baru	382
30. Monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama ekonomi ASEAN	383
31. Dukungan Paraf atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan ASEAN <i>Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i>	386
32. Dukungan Paraf Persetujuan pada Naskah Rancangan Undang-Undang tentang <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea</i>	386
33. <i>Bilateral Economic Cooperation Forum</i> RI-Jerman	387
34. Monitoring dan evaluasi hasil kerja sama dalam forum/kesepakatan Indonesia dengan negara di Kawasan Afrika	387
35. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Importasi Daging Sejenis Lembu dari Zona Bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	389
36. Monitoring dan Evaluasi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor dan PT Yongjin Java Suka Garment Factory	390
37. Monitoring dan Evaluasi ke Balai Inseminasi Buatan Lembang dan Koperasi Peternak Susu Bandung Utara	392
38. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Proyek JCM dan Penyelenggaraan Webinar	393
39. Monitoring dan Evaluasi hasil kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Asia Tenggara dan Asia Selatan	394
40. Monitoring dan evaluasi hasil kerja sama antara Indonesia dengan negara di Kawasan Timur Tengah	394
41. Pelaksanaan Site Visit ke KEK dan Industri di KPBPB Batam pada 4 November 2022	394
42. Monitoring dan Evaluasi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dan CV Coconut Internasional Indonesia	396
43. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Pembangunan Fasilitas Iradiator Kalimantan Timur di Kawasan Industri Kariangau pada 22 Desember 2022	398
44. Pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) Indonesia-Ekuador ke-2	400
45. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama APEC dan Sub Regional	400
46. Kunjungan Lapangan Proyek "Introduction of High- Efficiency Thermal Oil Heater System in Chemical Factory"	401

Daftar Isi

	47. Kunjungan Lapangan Proyek <i>“Reducing GHG emission at textile factories by upgrading to air-saving loom”</i>	402
	48. Survei indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan	403
	Capaian IKU 2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	315
	3. Sasaran Strategis Ketiga	419
	Capaian IKU 3.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	315
	C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	428
4	EVALUASI KINERJA	
	A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA	435
	A.1. Evaluasi Pelaksanaan serta Perubahan pada Renstra Deputy 2020-2024	439
	A.2. Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2022	443
	A.3. Rekomendasi Arah Kebijakan PK 2023 (Sasaran, Indikator, Target, dan Rencana Aksi)	453
	B. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT	467
	1. Evaluasi AKIP	468
	2. Rekomendasi Inspektorat untuk Menyempurnakan AKIP Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	471
	3. Tindak Lanjut Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional atas Evaluasi AKIP	472
	C. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA	477
5	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	480
	B. HARAPAN DAN TINDAK LANJUT	482
	C. RENCANA PERTEMUAN TINGKAT DEPUTI, MENTERI DAN PRESIDEN TAHUN 2023	483
6	REFERENSI	

Daftar Tabel

1 PENDAHULUAN

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Deputi VII Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan	3
Tabel 1.2. Pagu Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 2022	5
Tabel 1.3. Sistematika Penyajian Pelaporan	9

2 PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1. Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Deputi VII Tahun 2022	16
Tabel 2.2. Target Kinerja pada Sasaran Strategis di Renstra Deputi VII Tahun 2020 - 2024	17
Tabel 2.3. Sasaran Kegiatan Asdep KSE Asia 2022	20
Tabel 2.4 rincian Kegiatan Asdep KSE Asia 2022	21
Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan Asdep KSE Eropa, Afrika, dan Timur Tengah 2022	23
Tabel 2.6 Rincian Kegiatan Asdep KSE Eropa, Afrika, dan Timur Tengah 2022	23
Tabel 2.7 Sasaran Kegiatan Asdep KSE Amerika dan Pasifik 2022	25
Tabel 2.8 Rincian Kegiatan Asdep KSE Amerika dan Pasifik 2022	25
Tabel 2.9 Sasaran Kegiatan Asdep KSE Regional dan Sub Regional 2022	27
Tabel 2.10 Rincian Kegiatan Asdep KSE Regional dan Sub Regional 2022	27
Tabel 2.11 Sasaran Kegiatan Asdep KSE Multilateral	29
Tabel 2.12 Rincian Kegiatan Asdep KSE Multilateral 2022	29
Tabel 2.13 Target Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja 2022	33
Tabel 2.14 Rencana Aksi pada Perjanjian Kinerja 2022	35

3 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	43
Tabel 3.2 Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama	45
Tabel 3.3 Kriteria Nilai Sasaran Strategis	47

Daftar Tabel

Tabel 3.4 Capaian IKU Deputi VII 2022	48
Tabel 3.5 Nilai Sasaran Strategis (NSS) Deputi VII 2022	50
Tabel 3.6 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi VII 2022	52
Tabel 3.7 Kriteria Warna (NKO) Deputi VII 2022	52
Tabel 3.8 Capaian IKU Market Share FTA 2021 - 2022	56
Tabel 3.9 Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 dan 2022	59
Tabel 3.10 Target Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral	62
Target 3.11 Kontribusi Deputi VII dalam Pencapaian Target Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Disepakati pada RPJMN 2020 – 2024 selama tahun 2021 dan 2022	62
Tabel 3.12 Tabel Capaian IKU 3.1 T.A 2021 dan 2022	198
Tabel 3.13 Capaian IKU 1.4 T.A 2021 - 2022	212
Tabel 3.14 Target PTA/FTA/CEPA yang disepakati pada RPJMN 2020-2024	213
Tabel 3.15 Kontribusi Deputi VII dalam Pencapaian Target PTA/FTA/CEPA yang Disepakati pada RPJMN 2020-2024	214
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU 1.5 T.A 2021 dan 2022	290
Tabel 3.17 Target RPJMN 2021 untuk Indikator Capaian Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional (Ratifikasi)	291
Tabel 3.18 Kontribusi Deputi VII dalam Pencapaian Target Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional (Ratifikasi) yang Disepakati pada RPJMN 2020 – 2024 selama tahun 2021	291
Tabel 3.19 Rincian Indeks Tata Kelola	420
Tabel 3.20 Rincian Nilai Per Komponen SAKIP	421
Tabel 3.21 Rincian Nilai Per Komponen RB	422
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran 2022	424

Daftar Tabel

	Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Deputy VII 2017 - 2022	428
	Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Per Keasdepan Tahun Anggaran 2022	430
	Tabel 3.25 Anggaran dan Realisasi per Output Tahun Anggaran 2022	430
	Tabel 3.26 Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2022	433
4	EVALUASI KINERJA	
	Tabel 4.1 Perbandingan Perencanaan dan Realisasi, Capaian dari Renstra 2020-2024 dan PK TA 2020, 2021, 2022	436
	Tabel 4.2 Evaluasi Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 2020 - 2024	439
	Tabel 4.3 Perubahan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 2023 - 2024	442
	Tabel 4.4 Evaluasi pada Perjanjian Kinerja 2022	443
	Tabel 4.5 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 2023	453
	Tabel 4.6 <i>Cross Cutting</i> dengan Unit Kerja Internal Kemenko Perekonomian	454
	Tabel 4.7 Rencana Kebutuhan Anggaran pada Unit Kerja Eselon II TA 2023	455
	Tabel 4.8 Besaran <i>Automatic Adjustment</i> Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional T.A 2023	456
	Tabel 4.9 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	458
	Tabel 4.10 Hasil Evaluasi SAKIP Deputy VII Tahun 2021	468
	Tabel 4.11 Komponen Perencanaan Kinerja	469
	Tabel 4.12 Komponen Pengukuran Kinerja	469
	Tabel 4.13 Komponen Pelaporan Kinerja	470

Daftar Gambar & Grafik

1 PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy VII berdasarkan Permenko No. 8 Tahun 2021	3

2 PERENCANAAN KINERJA

Gambar 2.1 Peta Strategi 2022 Deputy VII	15

Gambar 2.2 Sesi 1 KTT G20 di Hotel the Apurva Kempinski Bali, 15 November 2022	19

3 AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.1 Proses Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi	45

Gambar 3.2 Polarisasi <i>Maximize</i>	46

Gambar 3.3 Polarisasi <i>Minimize</i>	46

Gambar 3.4 Pertemuan <i>the 2nd SOM JCEC RI-ROK – Virtual</i> , 27 Januari 2022	64

Gambar 3.5 Notula Rapat Pertemuan SOM dan Working Group (WG) Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri <i>JCEC Republic of Indonesia - Republic of Korea</i>	65

Gambar 3.6 Pertemuan <i>Ministerial Meeting JCEC RI-Korea – Jakarta</i> , 22 Februari 2022	65

Gambar 3.7 Agreed Minutes The 1 st Ministerial Meeting of the Korea – Indonesia on joint Committee on Economic Cooperation yang ditandatangani pada 22 Februari 2022 di Jakarta	78

Gambar 3.8 <i>Amendment to MOU</i> terkait Ekonomi Digital RI-Korea	81

Gambar 3.9 Kunjungan Menko Perekonomian ke Jepang, 25-26 Juli 2022	83

Gambar 3.10 Laporan Menko Perekonomian kepada Presiden RI terkait kunjungan ke Jepang pada tanggal 25 dan 26 Juli 2022	85

Gambar 3.11 <i>Senior Officials' Meeting of the Six Bilateral Economic Working Groups (SOM 6WG)</i> Republik Indonesia – Republik Singapura ke-10 di Belitung, Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2022	86

Gambar 3.12 <i>Chairman Note the SOM for 6 WG on Bilateral Economic Cooperation</i>	87

Daftar Gambar & Grafik

Gambar 3.13 <i>12th Ministerial Meeting</i> Singapore – Indonesia <i>Six Bilateral Economic Working Groups</i>	96
Gambar 3.14 Dokumen <i>Joint Report to Leaders</i> yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Singapura.	97
Gambar 3.15 Pertemuan ke-2 <i>Working Group on Marine and Fisheries</i> (WGMAF) RI – Rusia (Jakarta 23-25 Agustus 2022)	100
Gambar 3.16 Pertemuan ke-2 Working Group on Banking and Finance (WGBF) RI – Rusia	101
Gambar 3.17 MoM Pertemuan ke-2 Working Group on Banking and Finance (WGBF) RI – Rusia	102
Gambar 3.18 Laporan Hasil Pertemuan PPDT 1.5 Indonesia-Jepang, 25 April 2022	104
Gambar 3.19 Pertemuan <i>Public Private Dialogue Track 1.5</i> Indonesia-Jepang (Jakarta, 25 April 2022)	105
Gambar 3.20 The 10th Ministerial Meeting of CPOPC (Bali, 19 Juli 2022)	107
Gambar 3.21 <i>Press Conferencethe 10th Ministerial Meeting of CPOPC</i> (Bali, 19 Juli 2022)	107
Gambar 3.22 Protocol to Amend The Chapter of The Establishment of the CPOPC	108
Gambar 3.23 PP RI No. 107 Tahun 2022 tentang Pengesahan <i>Protocol to Amend the Chapter of Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries</i> (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit)	109
Gambar 3.24 Deskripsi ringkas tentang PROSPERA	111
Gambar 3.25 Pelaksanaan <i>Board Meeting</i> Prospera 2022 Tanggal 21 April secara Virtual	111
3.26 Dokumen 1. Surat terkait kesepakatan prinsip untuk memperpanjang Program PROSPERA	112
Gambar 3.27 Dokumen 2. Surat terkait Review Deputi VII Kemenko Perekonomian terhadap Program Prospera serta Pertimbangan Perpanjangan Program	112
Gambar 3.28 Penandatanganan <i>Amandemen Subsidiary Arrangement</i> Perpanjangan Program PROSPERA antara Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional, Kemenko Perekonomian dan Michelle Chan, <i>Deputy Secretary for Southeast Asia and Global Partners Group</i> , DFAT di Canberra, Australia tanggal 9 Desember 2022	115

Daftar Gambar & Grafik

Gambar 3.29 Dokumen <i>Subsidiary Arrangement</i> Prospera Phase II dan <i>Exchange of Letter</i>	116
Gambar 3.30 Pelaksanaan Finalisasi Mid-Term Review Prospera Deputy Bidang Koordinasi Internasional dengan Deputy Charge of Mission Australia tanggal 5 Oktober 2022	119
Gambar 3.31 Rapat Teknis Finalisasi Mid-Term Review Prospera dengan Co-Chair Prospera tanggal 29 November 2022	119
Gambar 3.32 Dokumen Final Prospera Mid-Term Review	120
Gambar 3.33 Pertemuan 21st AEC Council, 9-10 November 2022, Phnom Penh, Kamboja	126
Gambar 3.34 Report of the Twenty First ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting	127
Gambar 3.35 Pertemuan HLTF-EI ke-41 pada 2 Maret 2022 secara virtual	130
Gambar 3.36 Pertemuan HLTF-EI ke-42 pada 18-19 Agustus 2022 di Siem Reap	132
Gambar 3.37 The 25 th Ministerial Meeting BIMP-EAGA di Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 23-26 November 2023	136
Gambar 3.38 Joint Statement Twenty-Five BIMP EAGA Ministerial Meeting	140
Gambar 3.39 The 30th BIMP-EAGA Senior Officials' Meeting di Pontianak, Kalimantan Barat tanggal 24 November 2022	144
Gambar 3.40 Advisory Committee Meeting, 14 September 2022, Phuket-Thailand	147
3.41 Konsep Laporan 21 st CIMT Advisory Committee Meeting (ACM)	147
Gambar 3.42 The 29th IMT-GT Senior Officials' Meeting di Phuket, Thailand pada 14 September 2022	150
Gambar 3.43 Laporan the 29 th IMT-GT Senior Officials' Meeting	151
Gambar 3.44 Pertemuan Pleno APEC Economic Committee ke-1 2022 secara virtual pada 21-22 Februari	153
Gambar 3.45 Report by the Chair of the Economic Committee (EC) on EC1 2022	154
Gambar 3.46 Pertemuan Pleno APEC Economic Committee ke-2 2022. Chiang Mai, 26-27 Agustus 2022	156

Daftar Gambar & Grafik

Gambar 3.47 <i>15th Conference on Good Regulatory Practices (GRP15) di Chiang Mai, 24 Agustus 2022</i>	157
Gambar 3.48 <i>Report by the Chair of the Economic Committee on EC2 2022</i>	158
Gambar 3.49 <i>Capacity Building to Formulate Policy Response to Stimulate MSMEs' Demand in the Wake of the COVID-19 Pandemic di Bali, 19-20 Oktober 2022</i>	159
Gambar 3.50 <i>Laporan Workshop Capacity Building to Formulate Policy Response to Stimulate MSMEs' Demand in the Wake of the COVID-19 Pandemic, Policy Responses to Stimulate MSME Demand in the Wake of COVID-19 Pandemic in APEC Economies</i>	160
Gambar 3.51 <i>APEC Workshop on Enhancing Implementation of Online Dispute Resolution (ODR) through the APEC ODR Collaborative Framework and other fora including courts di Tokyo, 7-9 Desember 2022</i>	161
Gambar 3.52 <i>the 28th IMT-GT Ministerial Meeting di Phuket, Thailand tanggal 16 September 2022</i>	166
Gambar 3.53 <i>MoU on Rubber Cities and Rubber Industry Cooperation</i>	167
Gambar 3.54 <i>Pertemuan ke-2 Sherpa G20 Presidensi Indonesia Labuan Bajo 10 - 12 Juli 2022</i>	169
Gambar 3.55 <i>Pertemuan ke-2 Sherpa G20 Presidensi Indonesia Labuan Bajo 10 - 12 Juli 2022</i>	170
Gambar 3.56 <i>Forum SPM, 31 Maret 2022, Virtual</i>	177
Gambar 3.57 <i>15th IMT-GT SPM Opening Session</i>	178
Gambar 3.58 <i>dokumentasi dari beberapa dokumen kesepakatan di tingkat working group yang dipaparkan dalam pertemuan BIMP-EAGA SPM</i>	181
Gambar 3.59 <i>Strategic Planning Meeting/Senior Officials Meeting BIMP-EAGA secara virtual tanggal 28 April 2022</i>	182
Gambar 3.60 <i>Pertemuan ke-3 Sherpa G20 Presidensi Indonesia di Yogyakarta, 27 - 30 September 2022</i>	185
Gambar 3.61 <i>Pertemuan ke-4 Sherpa G20 Presidensi Indonesia di Bali, 11 - 16 November 2022</i>	192
Gambar 3.62 <i>The 14th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Summit diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 10 November 2022</i>	200
Gambar 3.64 <i>Pelaksanaan KTT G20 di Bali, 15-16 November 2022</i>	203

Daftar Gambar & Grafik

Gambar 3.65 Penyerahan Palu G20 dari Presiden RI, Joko Widodo kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi (Bali, 15-16 November 2022)	205
Gambar 3.66 Bali Leaders' Declaration	207
Gambar 3.67 The 17th Joint Committee Meeting of Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (Jepang, 9-10 November 2022)	215
Gambar 3.68 Laporan Pembahasan Rapat GR IJEPA yang telah dilaksanakan pada 26 Juli 2022	216
Gambar 3.69 Perundingan Pertama Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) - 14 Maret 2022	218
Gambar 3.70 Perundingan Kedua Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) - 15 Agustus 2022	219
Gambar 3.71 Perundingan Ketiga Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) - 2 November 2022	222
Gambar 3.72 <i>The 1st Round of Negotiations Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>	228
Gambar 3.73 Dokumen <i>Summary of Discussion</i> Perundingan Keempat IC-CEPA in Services	236
Gambar 3.74 Penandatanganan Protokol Perdagangan Jasa atau Trade in Service Agreement (TIS) dalam Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) - 21 November 2022	237
Gambar 3.75 <i>The 19th ASEAN-India Summit to Commemorate the 30th Anniversary of ASEAN-India Dialogue Relations</i> yang diadakan dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan 41 di Phnom Penh, Kamboja pada 12 November 2022	239
Gambar 3.76 <i>the Scope of the Review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement</i>	240
Gambar 3.77 <i>Announcement of the Substantial Conclusion of AANZFTA Upgrade</i> pada Rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan 41 di Phnom Penh, Kamboja pada 13 November 2022	245
Gambar 3.78 <i>Joint Statement on the substantial conclusion of the AANZFTA upgrade negotiations</i>	246
Gambar 3.79 Pertemuan dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia: <i>Update</i> terkini implementasi JCM dan perpanjangan bilateral kerjasama JCM antara Indonesia dan Jepang Jakarta, 8 Februari 2022	248

Daftar Gambar & Grafik

Gambar 3.80 Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Komite Bersama Mekanisme Kredit Bersama Indonesia dengan Jepang	249
Gambar 3.81 Rapat Internal Tim JCM Persiapan JC Meeting 2022 di Jakarta, 20 Oktober 2022	250
Gambar 3.82 Pertemuan dengan Takuya Nomoto (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia) di Jakarta, 1 Juli 2022	251
Gambar 3.83 <i>Project Idea Note for the JCM Model Project</i>	252
Gambar 3.84 Rapat Koordinasi Pembahasan Kerja Sama RI-Kazakhstan (Virtual, Jakarta-21 Juni 2022)	253
Gambar 3.85 Surat kepada Kedubes Kazakhstan perihal kesiapan untuk memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan JCEC RI- Kazakhstan (kiri) dan daftar proyek potensi kerja sama bilateral	254
Gambar 3.86 Usulan Konsep Daftar Struktur IPEF	256
Gambar 3.87 Perundingan Pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)	258
Gambar 3.88 Perundingan Pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)	259
Gambar 3.90 Laporan Hasil Kunjungan Kerja dalam Rangka Perundingan Pertama dan SOM Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity	260
Gambar 3.91 Infografis Kinerja Perdagangan Indonesia - MERCOSUR	264
Gambar 3.92 Dokumen Laporan Analisa Potensi dan Manfaat Pembentukan Indonesia – MERCOSUR (IM-CEPA) pada Perdagangan Barang untuk Indonesia	265
Gambar 3.93 <i>Preliminary Meeting</i> Indonesia-Mercosur CEPA secara virtual (7 Juni 2022)	266
Gambar 3.94 Opening Plenary IEU - CEPA Putaran Ke-12, Virtual 16 Desember 2022	268
Gambar 3.95 Perundingan Putaran Ke-12 IEU - CEPA Working Group ECCB	268
Gambar 3.94 Perundingan Putaran Ke-12 IEU - CEPA Working Group Government Procurement	269
Gambar 3.95 Summary of Discussions Chapter Economic Cooperation and Capacity Building Perundingan IEU	269

Daftar Gambar & Grafik

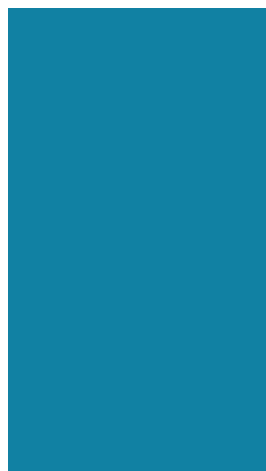
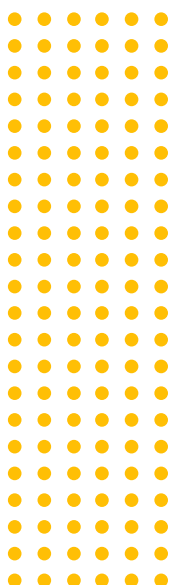
Gambar 3.95 Summary of Discussions Chapter Economic Cooperation and Capacity Building Perundingan IEU	272
Gambar 3.96 Joint Feasibility Study Group Report on Free Trade Agreement Indonesia - EAEU	273
Gambar 3.97 <i>Agreed Minutes</i> Indonesia - Mauritius PTA 1st <i>Intersessional Meeting</i> pada 24 Maret 2022 (<i>kiri</i>) dan <i>Agreed Minutes</i> Indonesia – Mauritius PTA 2 nd <i>Intersessional Meeting</i> pada 31 Oktober – 01 November 2022 (<i>Kanan</i>)	274
Gambar 3.98 Perundingan Intersesi Putaran Kedua Indonesia - Mauritius <i>Preferential Trade Agreement</i> (31 Oktober - 1 November 2022) - Virtual	275
Gambar 3.99 Perundingan Putaran Ketiga Indonesia - Mauritius PTA (21 - 22 Desember 2022) - Hybrid	275
Gambar 3.100 <i>Agreed Minutes</i> Indonesia - Mauritius PTA 3rd <i>Round of Negotiations</i> (21 - 22 Desember 2022)	277
Gambar 3.101 Penandatanganan Indonesia-UAE CEPA pada 1 Juli 2022 di Abu Dhabi, PEA	280
Gambar 3.102 <i>Summary of Discussion (SOD)</i> Perundingan Putaran Pertama dan Kedua IUAE - CEPA: <i>WG on Economic Cooperation</i>	281
Gambar 3.103 <i>Pertemuan 28th ASEAN Economic Minister Retreat</i> , 16 Maret 2022, <i>Video Conference</i>	283
Gambar 3.104 Dokumen <i>Guiding Principles for Negotiating the Upgrade of the ASEAN trade in goods agreement (upgraded ATIGA)</i>	284
Gambar 3.105 Rapat Pembahasan Proposal Kerja Sama IKCEPA (Jakarta, 5 Desember 2022)	286
Gambar 3.106 surat kepada Kedubes Korea perihal Penyampaian 16 proposal kerja sama IKCEPA	287
Gambar 3.107 Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Indonesia dan Pemerintah Republik Korea	293
Gambar 3.108 Infografis Manfaat Utama IK-CEPA bagi Indonesia	294
Gambar 3.109 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pengesahan ASEAN <i>Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i>	297
Gambar 3.110 Perpres Nomor 57 Tahun 2022	299
Gambar 3.111 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022	302

Daftar Gambar & Grafik

Gambar 3.113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>	306
Gambar 3.114 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023	310
Grafik 3.1 Tingkat Realisasi Anggaran Deputi VII 2017-2022	428



1 PENDAHULUAN



1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kerja sama ekonomi internasional tidak dapat dilepaskan sebagai pendukung perekonomian negara. Kerja sama ekonomi baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral diperlukan untuk kemudahan perdagangan dan investasi. Hubungan baik yang terjalin antar negara ini diharapkan dapat menguntungkan bagi masing-masing pihak melalui perjanjian yang disepakati bersama. Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap isu-isu di bidang kerjasama ekonomi Internasional juga sangat penting untuk dapat dilakukan. Peran ini diemban oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional disusun ke dalam sebuah laporan kinerja. Penyusunan laporan kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini juga sebagai wujud untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Laporan kinerja tahun anggaran 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus memberikan informasi terkait hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

B. ORGANISASI DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, sebagai berikut:

1. Kedudukan (Pasal 172)

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Tugas Pokok (Pasal 174)

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional

3. Fungsi (Pasal 175)

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 juga menyebutkan Susunan Organisasi dari Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional (Pasal 175) terdiri atas:

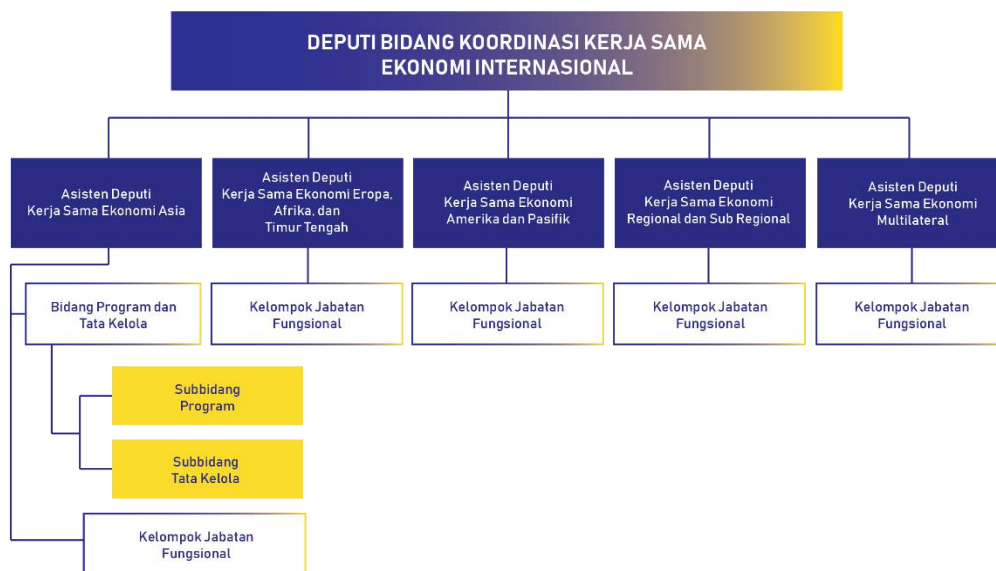
- a. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Asia;
- b. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah;
- c. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik;

- d. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional;
- e. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

4. Struktur Organisasi

Terkait Struktur Organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditandatangani pada 28 Oktober 2021 maka Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy VII berdasarkan Permenko No.8 Tahun 2021



Secara keseluruhan komposisi pegawai Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Deputy VII Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

Gender	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Staf Pelaksana
Laki – laki	1	4	-	1	8	11	14
Wanita	-	1	1	1	2	3	23
Jumlah	1	5	1	2	10	14	37
Total	70 Pegawai						

Berdasarkan matriks diatas, maka dapat dilihat bahwa hingga akhir tahun 2022 jumlah Pegawai Negeri Sipil di unit Deputy VII mencapai sebanyak 70 orang. Sementara itu, pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Deputy VII pada awal tahun 2022 sebesar Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan pagu anggaran di dokumen Perjanjian Kinerja Deputy VII T.A. 2022, yang kemudian mengalami 2 (dua) kali *refocusing*. Pada *Refocusing* pertama pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 43.230.260.000,- (Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu rupiah).

Selanjutnya pada bulan Juni dilakukan *Refocusing* ke-2 pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 40.858.696.000,- (Empat Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu) dan pada bulan Desember terjadi penyesuaian anggaran pada 2 (dua) kegiatan, yaitu untuk mendukung Kegiatan Presidensi G20 pada anggaran Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral untuk acara dan Kegiatan PTM BIMP EAGA pada anggaran Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Regional untuk acara Pertemuan Tingkat Menteri BIMP EAGA. Sehingga pagu anggaran Kedeputan VII menjadi Rp. 56.634.177.000,- (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Adapun rincian anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Pagu Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 2022

NO	KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REFOCUSING	PAGU REFOCUSING	PAGU PENYESUAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2510	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Amerika dan Pasifik	1,500,000,000	1,441,018,000	1,361,958,000	1,361,958,000
2	2511	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Asia				
		Rekomendasi Kebijakan KSE Asia	1,500,000,000	1,441,019,000	1,361,958,000	1,361,958,000
		Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy	500,000,000	480,339,000	450,939,000	446,778,000
		Layanan Dukungan Kegiatan Deputy VII	2,500,000,000	2,401,698,000	2,272,978,000	2,277,139,000
3	2512	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	1,500,000,000	1,441,018,000	1,361,959,000	1,361,959,000
4	2513	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Multilateral dan Pembiayaan	35,500,000,000	34,104,110,000	32,233,029,000	46,629,981,000
5	2514	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Regional dan Sub Regional	2,000,000,000	1,921,358,000	1,815,875,000	3,194,404,000
TOTAL			45,000,000,000	43,230,560,000	40,858,696,000	56,634,177,000

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Dari ketujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN IV tahun 2020- 2024, peran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional secara langsung berada pada pilar pertama yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Oleh sebab itu, dalam upaya mewujudkan agenda pertama ini, Pemerintah menetapkan bahwa salah satu arah kebijakan untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas adalah melalui upaya meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020–2024 merumuskan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional akan mendukung terwujudnya sasaran strategis pertama yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan bahwa arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan diplomasi ekonomi ke pasar non tradisional yang akan dilakukan melalui strategi, antara lain:**
 - a. Pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan Negara-negara Pasifik Selatan (Fiji dan Papua New Guinea), Afrika (Aljazair, Mauritius, Djibouti, Tunisia, Maroko, *Economic Community of West African/ States/ ECOWAS* dan *East African Community/ EAC*), dan Amerika Selatan (Kolombia); dan
 - b. Perundingan Indonesia-Pakistan *in Goods Agreement* (IP-TIGA) yang merupakan perluasan dari IP-PTA.
- 2. Penyelesaian kasus sengketa perdagangan bilateral dan multilateral yang akan dilakukan melalui strategi, antara lain:**
 - a. Penyelesaian kasus sengketa dagang Indonesia dengan Selandia Baru (DS477), Amerika Serikat (DS478), Brasil (DS484), Uni Eropa (DS592 dan DS593) di *World Trade Organization* (WTO); dan
 - b. Pelaksanaan koordinasi dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan bilateral dan multilateral.

3. Percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain:

- a. Penyelesaian dan pemilihan proyek kerja sama ekonomi prioritas, evaluasi, dan monitoring perkembangan proyek kerja sama ekonomi internasional (IK-CEPA);
- b. Pembahasan *General Review Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (GR-IJEPA) untuk perluasan liberalisasi dan peningkatan komitmen dari IJEPA yang saat ini berlaku;
- c. Pertemuan *Sub-Komite Investment Business Environment and Promotion Business Confidence* (IBE and PBC) dan penyusunan rekomendasi perbaikan dan kebijakan perbaikan iklim bisnis dan investasi (SubCommittee IJEPA);
- d. Percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa (UE) CEPA dan Indonesia-Turki CEPA, serta ratifikasi kesepakatan *Indonesia European Free Trade Association* (EFTA) CEPA untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan investasi dari Eropa;
- e. Penyusunan *Policy Adjustment Regional Comprehensive Economics Partnership* (RCEP); dan
- f. Implementasi Rencana Aksi Nasional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025.

4. Implementasi *Joint Crediting Mechanism* (JCM) dalam rangka mendorong investasi, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia melalui strategi, antara lain:

- a. Promosi dan peningkatan peran implementasi JCM dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, khususnya pada sektor energi dan industri;
- b. Pengintegrasian implementasi JCM dengan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) lainnya di Indonesia, khususnya terkait efisiensi energi dan energi terbarukan; dan
- c. Peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas selain partisipan proyek.

5. **Penguatan kepemimpinan Indonesia di forum internasional yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:**
 - a. Pengusulan Presidensi G20 Indonesia 2022 dan pergiliran Keketuaan ASEAN 2023;
 - b. Persiapan dan koordinasi Presidensi G20 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023; dan
 - c. Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Format laporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika Pelaporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2022 terdiri dari 5 Bab yaitu:

Tabel 1.3. Sistematika Penyajian Pelaporan

BAB I	PENDAHULUAN Menyajikan penjelasan umum organisasi, kedudukan, identifikasi aspek strategis dan isu strategis/permasalahan utama yang merupakan masalah yang dihadapi organisasi di tahun 2022.
Bab II	PERENCANAAN KINERJA Menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator – indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari Rencana Strategis 2020 - 2024, Prioritas Nasional 2022 dan Renja 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Menjabarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dan Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	EVALUASI KINERJA Menjabarkan evaluasi capaian kinerja 2022 dengan Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Peningkatan Kinerja yang terdiri dari Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat, dan Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
BAB V	PENUTUP Sebagai penutup diuraikan simpulan umum dan lampiran dari capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

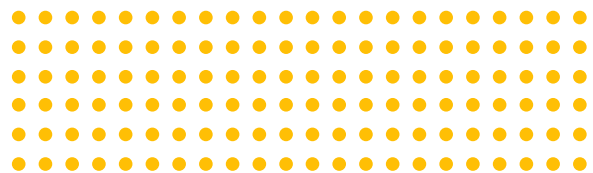


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia



DEPUTI VII
Kerja Sama Ekonomi Internasional
Kemenko Bidang Perekonomian

2 PERENCANAAN KINERJA



2 PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI VII TAHUN 2020 – 2024

Perumusan Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tidak terlepas dari upaya mendukung Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I RPJMN 2020-2024. Sebagai tambahan, kondisi umum, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan juga menjadi acuan dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang selaras sebagaimana berikut:

1. Visi

“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”

Visi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pertumbuhan ekonomi nasional diupayakan dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama ekonomi internasional yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Visi tersebut juga menjadi landasan bagi organisasi dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional merupakan salah satu unit Eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga visi tersebut tidak dapat terpisahkan dari *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” dan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

- 1) **Berorientasi Pelayanan**, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) **Akuntabel**, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) **Kompeten**, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) **Harmonis**, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) **Loyal**, Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) **Adaptif**, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.
- 7) **Kolaboratif**, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2. Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden dapat diwujudkan dengan Misi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 antara lain;

“

- 1) *Peningkatan kualitas manusia Indonesia;*
- 2) *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;*
- 3) *Pembangunan yang merata dan berkeadilan;*
- 4) *Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;*
- 5) *Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;*
- 6) *Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;*
- 7) *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;*
- 8) *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;*
- 9) *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.*

”

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merumuskan misi “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas; Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan; Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.”

Berdasarkan Misi Presiden, Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, serta sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, dirumuskan misi sebagai berikut:

“

- 1) *Meningkatkan Implementasi Hasil Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional secara Berkelanjutan; dan*
- 2) *Meningkatkan Peran Aktif Indonesia dalam Forum Ekonomi Internasional.*

”

Misi tersebut menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga serta pelaku usaha dan akademisi agar Misi tersebut dapat dicapai dengan optimal.

3. Sasaran Program Strategis

Sasaran program strategis adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Adapun sasaran program strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesepakatan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif; dan
3. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Keterkaitan antara Sasaran Program, Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional digambarkan dalam rumusan peta strategi seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1. Peta Strategi 2022 Deputy VII



4. Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional juga menetapkan langkah selanjutnya yaitu menetapkan indikator kinerja sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Deputi VII Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Perspektif Stakeholder		
1	Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1. Persentase <i>market share</i> ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia
		1.2. Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
		1.3. Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
		1.4. Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
		1.5. Jumlah Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
Perspektif Internal Business Process		
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif	2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional
		2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Perspektif Learning and Growth		
3	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3.1. Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

5. Target Kinerja Periode 2020-2024

Selain indikator kinerja, Menyusun target kinerja juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan dapat rangka mewujudkan tercapainya sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. Di bawah ini adalah perbandingan target kinerja pada Renstra periode 2020-2024:

Tabel 2.2. Target Kinerja pada Sasaran Strategis di Renstra Deputy VII Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perspektif Stakeholder						
1.	Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1. Persentase <i>market share</i> ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia ----- *Per 2023 mengalami perubahan menjadi: Persentase Dampak FTA/PTA/CEPA/Kesepakatan an Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra	65-67%	65,5-67,5%	66-68%	30%	32%
		1.2. Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	16	21	26	23	25
		1.3. Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2	2	2	3	2
		1.4. Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	6	8	17	14	10
		1.5. Jumlah Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian *Khusus indikator kinerja tahun 2022 dan 2024	5	9	80-90%	14	15 (Kumulatif)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		menggunakan target berikut: Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian					
Perspektif Internal Business Process							
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif	2.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan dalam Kerja Sama Ekonomi Internasional (Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) yang Diterima Menko Perekonomian *Per 2022 mengalami perubahan menjadi: Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	100%	100%	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
		*Per 2022 terdapat penambahan Indikator Kinerja pada SS 2 sebagai berikut: 2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	-	-	75	75	75
Perspektif Learning and Growth							
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi	75%	75%	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
		Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	85%	85%			
		Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	85%	85%			
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	90%	90%			
		*Per 2022, 4 indikator kinerja pada SS 3 mengalami perubahan menjadi 1 indikator yaitu: 3.1 Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	-	-			

B. PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KERJA (RENJA) 2022

Prioritas Nasional 2022

Berdasarkan Keputusan Presiden No.18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 dan Keputusan Presiden No.92/P Tahun 2021 tentang Pengakhiran Penunjukan Sherpa G-20 Indonesia dan Penunjukan C0-Sherpa G-20 Indonesia maka Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mengampu tugas tambahan sebagai Sherpa G20 sekaligus Wakil Koordinator Harian Bidang *Sherpa Track*.

Gambar 2.2 Sesi 1 KTT G20 di Hotel the Apurva Kempinski Bali, 15 November 2022



Dalam hal ini semakin mengukuhkan tanggung jawab Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai salah satu pengemban amanah penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022. Presidensi G20 Indonesia meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia, yang terdiri atas:

- a. Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20;
- b. Pertemuan Tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral;
- c. Pertemuan Tingkat Sherpa;
- d. Pertemuan Tingkat Deputy;
- e. Pertemuan Tingkat *Working Group*;
- f. Pertemuan Tingkat *Engagement Group*;
- g. Program *Side Events*.

Rencana Kerja (Renja) 2022

Sasaran Program pada Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun Anggaran 2023 adalah “Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Berkualitas”. Dimana Sasaran Program Deputy VII tersebut dibagi menjadi 5 Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1) Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia yang Berkualitas

Tabel 2.3. Sasaran Kegiatan Asdep KSE Asia 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/IKK	Target 2022	Alokasi 2021 (ribu)
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia yang Berkualitas		1.500.000,00
01.01	Jumlah Kerja Sama Ekonomi Asia yang disepakati	3	
01.02	Jumlah Forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian	8	
01.03	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia	75	
02	Terwujudnya Dukungan Administrasi dan Kegiatan Kedeputian yang Optimal		3.000.000
02.01	Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	87%	
02.02	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	92%	
02.03	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	82	
02.04	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	85	
02.05	Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputy serta Administrasi Program dan Tata Kelola	3 dari 4	
TOTAL			4.500.000,00

Rincian Kegiatan Kerja Sama Ekonomi Asia

Tabel 2.4. Rincian Kegiatan Asdep KSE Asia 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia yang Berkualitas			1.500.000
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
01.ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	2	Rekomendasi Kebijakan	968.042
01.ABA.001.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	330.184
01.ABA.001.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda	1.0	Kegiatan	41.000
01.ABA.001.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	414.860
01.ABA.001.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	154.600
01.ABA.001.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	26.746
01.ABA.001.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	652
01.ABA.002	Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral Asia	2	Rekomendasi Kebijakan	138.130
01.ABA.002.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	8.400
01.ABA.002.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	23.980
01.ABA.002.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	15.790
01.ABA.002.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	78.090
01.ABA.002.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	11.470
01.ABA.002.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	400
01.ABA.003	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan	1	Rekomendasi Kebijakan	393.828

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
	Implementasi Perundingan Perdagangan			
01.ABA.003.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	4.200
01.ABA.003.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda	1.0	Kegiatan	20.370
01.ABA.003.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	293.798
01.ABA.003.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	66.200
01.ABA.003.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	8.860
01.ABA.003.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	400
02	Terwujudnya Dukungan Administrasi dan Kegiatan Kedeputian yang Optimal			3.000.000
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan/ Laporan/ Dokumen	3.000.000
02.EBA.001	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	1	Layanan	500.000
02.EBA.001.051	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola	1.0	Kegiatan	199.890
02.EBA.001.052	Identifikasi Permasalahan dan Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola	1.0	Kegiatan	300.110
02.EBA.002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	1	Layanan	2.500.000
02.EBA.002.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan dalam rangka Dukungan Kegiatan Deputy VII	1.0	Kegiatan	810.900
02.EBA.002.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan dalam rangka	1.0	Kegiatan	1.549.300

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
	Dukungan Kegiatan Deputi VII			
02.EBA.002.053	Pemantauan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Deputi VII	1.0	Kegiatan	139.800
TOTAL				4.500.000

2) Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang Berkualitas

Tabel 2.5. Sasaran Kegiatan Asdep KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/IKK	Target 2022	Alokasi 2022 (ribu)
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang Berkualitas		1.500.000,0
01.01	Jumlah Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang disepakati	4	
01.02	Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang Disupervisi Kemenko Perekonomian	1	3.000.000,0
01.03	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Kemenko Perekonomian	2	
01.04	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	75	
TOTAL			1.500.000,0

Rincian Kegiatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, Timur Tengah

Tabel 2.6. Rincian Kegiatan Asdep KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang Berkualitas			1.500.000
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
01.ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	2	Rekomendasi Kebijakan	766.480

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01.ABA.001.051	Persiapan Kegiatan dan Identifikasi Permasalahan Kebijakan	1.0	Kegiatan	132.250
01.ABA.001.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	576.028
01.ABA.001.053	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	56.028
01.ABA.001.054	Penyusunan Laporan	1.0	Kegiatan	2.100
01.ABA.002	Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral Eropa, Afrika dan Timur Tengah	1	Rekomendasi Kebijakan	199.954
01.ABA.002.051	Persiapan Kegiatan dan Identifikasi Permasalahan Kebijakan	1.0	Kegiatan	4.200
01.ABA.002.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	165.954
01.ABA.002.053	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	26.932
01.ABA.002.054	Penyusunan Laporan	1.0	Kegiatan	2.100
01.ABA.003	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan	1	Rekomendasi Kebijakan	534.334
01.ABA.003.051	Persiapan Kegiatan dan Identifikasi Permasalahan Kebijakan	1.0	Kegiatan	4.200
01.ABA.003.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	498.864
01.ABA.003.053	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	29.170
01.ABA.003.054	Penyusunan Laporan	1.0	Kegiatan	2.100
TOTAL				1.500.000

3) Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang Berkualitas

Tabel 2.7. Sasaran Kegiatan Asdep KSE Amerika dan Pasifik 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/IKK	Target 2022	Alokasi 2022 (ribu)
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang Berkualitas		1.500.000,0
01.01	Jumlah Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang disepakati	1	
01.02	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Kemenko Perekonomian	3	
01.03	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	75	
TOTAL			1.500.000,0

Rincian Kegiatan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

Tabel 2.8. Rincian Kegiatan Asdep KSE Amerika dan Pasifik 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang Berkualitas			1.500.000
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
01.ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	2	Rekomendasi Kebijakan	1.025.561
01.ABA.001.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	652
01.ABA.001.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	36.468
01.ABA.001.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	64.758
01.ABA.001.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	545.057
01.ABA.001.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	53.850
01.ABA.001.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	324.758
01.ABA.002	Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral Amerika dan Pasifik	1	Rekomendasi Kebijakan	251.733
01.ABA.002.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	400
01.ABA.002.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	16.896

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01.ABA.002.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	32.200
01.ABA.002.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	190.647
01.ABA.002.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	3.910
01.ABA.002.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	7.680
01.ABA.003	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan	1	Rekomendasi Kebijakan	133.320
01.ABA.003.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	400
01.ABA.003.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	10.146
01.ABA.003.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	73.740
01.ABA.003.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	17.000
01.ABA.003.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	28.194
01.ABA.003.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	3.840
01.ABA.004	Rekomendasi Penyelesaian Kasus Sengketa Dagang Perdagangan Bilateral	1	Rekomendasi Kebijakan	89.386
01.ABA.004.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	400
01.ABA.004.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	10.440
01.ABA.004.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	26.180
01.ABA.004.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	21.446
01.ABA.004.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	23.240
01.ABA.004.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	7.680
TOTAL				1.500.000

4) Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang Berkualitas

Tabel 2.9. Sasaran Kegiatan Asdep KSE Regional dan Sub Regional 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/IKK	Target 2021	Alokasi 2021 (ribu)
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang Berkualitas		2.000.000,0
01.01	Jumlah Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang disepakati	3	
01.02	Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang Disupervisi Kemenko Perekonomian	2	
01.03	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Kemenko Perekonomian	8	
01.04	Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara di Forum Ekonomi Regional dan Sub Regional yang Dikoordinasi Kemenko Perekonomian	1	
01.05	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	75	
TOTAL			2.000.000,0

Rincian Kegiatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

Tabel 2.10. Rincian Kegiatan Asdep KSE Regional dan Sub Regional 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang Berkualitas			2.000.000
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
01.ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	1	Rekomendasi Kebijakan	1.435.562
01.ABA.001.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	368.142
01.ABA.001.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	44.010
01.ABA.001.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	900.806
01.ABA.001.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	109.320

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01.ABA.001.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	12.984
01.ABA.001.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	300
01.ABA.002	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Internasional	1	Rekomenda si Kebijakan	160.644
01.ABA.002.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	4.140
01.ABA.002.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	31.400
01.ABA.002.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	55.320
01.ABA.002.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	39.730
01.ABA.002.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	29.304
01.ABA.002.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	750
01.ABA.003	Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional	3	Rekomenda si Kebijakan	403.794
01.ABA.003.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	2.070
01.ABA.003.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	7.140
01.ABA.003.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	370.830
01.ABA.003.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	1.500
01.ABA.003.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	21.754
01.ABA.003.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	500
TOTAL				2.000.000

5) Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Berkualitas

Tabel 2.11 Sasaran Kegiatan Asdep KSE Multilateral 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/IKK	Target 2022	Alokasi 2022 (ribu)
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Berkualitas		35.500.000,0
01.01	Jumlah Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Disepakati	1	
01.02	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Kemenko Perekonomian	1	
01.03	Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara di Forum Ekonomi Multilateral yang Dikoordinasi Kemenko Perekonomian	1	
01.04	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	75	
TOTAL			35.500.000,0

Rincian Kegiatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Tabel 2.12 Rincian Kegiatan Asdep KSE Multilateral 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Berkualitas			35.500.000
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5	Rekomendasi Kebijakan / Kajian	35.500.000
01.ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	2	Rekomendasi Kebijakan	1.355.110
01.ABA.001.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	187.760
01.ABA.001.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	109.100
01.ABA.001.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	837.730
01.ABA.001.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	168.020
01.ABA.001.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	51.900

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01.ABA.001.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	600
01.ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Implementasi <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM)	1	Rekomendasi Kebijakan	132.040
01.ABA.002.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	2.450
01.ABA.002.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	2.250
01.ABA.002.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	2.380
01.ABA.002.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	91.360
01.ABA.002.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	33.000
01.ABA.002.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	600
01.ABA.003	Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Internasional	1	Rekomendasi Kebijakan	12.850
01.ABA.003.051	Persiapan Kegiatan	1.0	Kegiatan	2.450
01.ABA.003.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan	1.0	Kegiatan	2.450
01.ABA.003.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	2.450
01.ABA.003.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	2.450
01.ABA.003.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	2.450
01.ABA.003.056	Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan	1.0	Kegiatan	600
01.ABA.004	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Sherpa Track Indonesia pada Forum Presidensi G-20	1	Rekomendasi Kebijakan	34.000.000
01.ABA.004.051	Persiapan Kegiatan dalam Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara	1.0	Kegiatan	2.005.020
01.ABA.004.052	Identifikasi Permasalahan dan Agenda Kebijakan Penyelenggaraan Pertemuan Sherpa G20 Tahun 2022 Presidensi Indonesia	1.0	Kegiatan	5.850

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Target		Alokasi (Rp ribu)
		Volume	Satuan	
01.ABA.004.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	1.0	Kegiatan	2.985.650
01.ABA.004.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan	1.0	Kegiatan	2.450
01.ABA.004.055	Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1.0	Kegiatan	29.000.000
01.ABA.004.056	Penyusunan Laporan	1.0	Kegiatan	600
TOTAL				35.500.000

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, pada dasarnya Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Perjanjian Kinerja wajib dibuat oleh setiap Satuan Kerja di lingkungan instansi Pemerintah. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Oleh karena itu, Indikator kinerja dan target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah merupakan IKU tingkat Eselon I (Deputi) yang telah ditetapkan serta merupakan penjabaran Rencana Strategis Renstra Deputi dan Renja. Perjanjian Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional ditetapkan mulai dari level Eselon I hingga level Eselon IV. Adapun Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Target Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Perspektif: <i>Stakeholder</i>			
1.	Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1. Persentase market share ekspor Indonesia ke Negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia	66-68%
		1.2. Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	26
		1.3. Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2
		1.4. Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	17
		1.5. Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	80-90%
Perspektif: <i>Internal Business Process</i>			
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif	2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Baik (3 dari 4)
		2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	75
Perspektif: <i>Learning and Growth</i>			
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3.1. Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4

Program: Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja diatas, dibutuhkan rencana aksi yang berfungsi membantu menentukan langkah-langkah penting mulai dari perencanaan sampai ke aksi. Sehingga untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja tersebut diatas, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut:

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2022

Tabel 2.14 Rencana Aksi pada Perjanjian Kinerja 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Persentase Market Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra PTA/FTA/CEPA terhadap Total Ekspor Indonesia	66-68%		Monitoring data ekspor Indonesia pada triwulan I	Monitoring data ekspor Indonesia pada triwulan II	Monitoring data ekspor Indonesia pada triwulan III	Mengumpulkan dan mengolah data ekspor Indonesia pada triwulan IV
		Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian	26	Peningkatan manfaat kerja sama ekonomi internasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional	• Penyelenggaraan SOM JCEC RI – ROK • Penyelenggaraan MM JCEC RI – ROK • Penyelenggaraan TF Baja ke-5 • Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan ETIMM Indonesia-Australia • Rapat koordinasi persiapan SKB ke-13 RI-Rusia • Pertemuan HLTF ke-40 • Rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA • Pertemuan IMT-GT Prep Summit (SOM) • Pertemuan ACM ke-21 • Pertemuan IMT-GT SPM ke-15 • Pertemuan APEC EC ke-1 2022	• Penyelenggaraan forum konsultasi Indonesia – Jepang • Pelaksanaan ETIMM Indonesia-Australia • Rapat koordinasi pelaksanaan SEOM Indonesia-Australia • SKB ke-13 RI-Rusia • Pameran Industri INNOPROM • Pertemuan AEC Council ke-21 dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-40 • Penyusunan laporan kepada Presiden hasil pertemuan AEC Council • Rapat koordinasi penyelesaian <i>pending matters</i> implementasi berbagai arahan Menteri dan Kepala Negara • Pertemuan BIMP-EAGA Plenary Session/SOM	• Penyelenggaraan <i>Senior Official Meeting 6 Working Group</i> RI-Singapura ke-10 • Rapat Koordinasi 6 <i>Working Group</i> RI-Singapura untuk persiapan <i>Ministerial Meeting 6 Working Group</i> RI-Singapura • Pelaksanaan SEOM Indonesia-Australia • Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC 2022 • Pertemuan HLTF ke-41 • Rapat koordinasi persiapan IMT-GT MM ke-28 • Penyusunan bahan posisi Indonesia dalam IMT-GT MM ke-28 • Pelaksanaan pertemuan IMT-GT MM ke-28 • Rapat koordinasi penyelesaian <i>pending matters</i> implementasi berbagai arahan	• Penyusunan <i>draft joint report to leader</i> • Penyelenggaraan <i>Ministerial Meeting 6 Working Group</i> RI-Singapura ke – 12 • Penyelenggaraan SOM Trilateral RI - Timor Leste – Australia • Rapat Koordinasi Persiapan <i>Public and Private Track 1.5: Japan-Indonesia Co-creation Partnership for Innovation and Sustainable Economic Society</i> • Penyelenggaraan <i>Public and Private Track 1.5: Japan-Indonesia Co-creation Partnership for Innovation and Sustainable Economic Society</i> • Pelaksanaan Board Meeting Prospera • Rapat Koordinasi Perkembangan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					• Rapat koordinasi internal oleh Sekretariat G20 • Rapat koordinasi eksternal oleh Sekretariat G20	• Rapat koordinasi internal Sekretariat G20 • Rapat koordinasi eksternal oleh Sekretariat G20 • Pertemuan ke-2 Sherpa G20 Presidensi Indonesia	Menteri dan Kepala Negara dalam kerja sama ekonomi sub-regional • Koordinasi masukan dalam Ministerial Joint Statement • Pertemuan IMT-GT SOM ke-29/MM Prep • Pertemuan APEC EC ke-2 2022 • Rapat koordinasi internal Sekretariat G20 • Rapat koordinasi eksternal oleh Sekretariat G20 • Pertemuan ke-3 Sherpa G20 Presidensi Indonesia	Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Rusia • Rapat koordinasi persiapan AEC Council Meeting ke-22 • Pertemuan AEC Council ke-22 dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-41 • Penyusunan laporan hasil AEC Council • Rapat koordinasi persiapan BIMP-EAGA MM ke-25 • Penyusunan bahan posisi Indonesia dalam BIMP EAGA MM ke-25 • Pelaksanaan pertemuan BIMP-EAGA MM ke-25 • Pertemuan BIMP-EAGA SOM ke-25/MM Prep • Rapat koordinasi internal Sekretariat G20 • Rapat koordinasi eksternal oleh Sekretariat G20 • Pertemuan ke-4 Sherpa G20 Presidensi Indonesia.
		Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan	2	Arahan kepala negara dalam memanfaatkan kerja sama ekonomi internasional	• Penyusunan matriks tindak lanjut arahan Kepala Negara dalam Joint Statement KTT	• Rapat koordinasi persiapan rangkaian KTT IMT-GT • Rapat koordinasi masukan dalam	• Penyusunan rencana aksi implementasi arahan Kepala Negara dalam KTT IMT-GT	• Rapat koordinasi pembahasan pending matters dalam tindak lanjut arahan Presiden

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian		untuk mendukung perekonomian nasional	• Rapat koordinasi internal oleh Sekretariat G20 • Rapat koordinasi eksternal oleh Sekretariat G20	• Joint Statement KTT IMT-GT • Pelaksanaan pertemuan KTT IMT-GT • Rapat koordinasi internal Sekretariat G20 • Rapat koordinasi eksternal oleh Sekretariat G20 • Pertemuan ke-2 Sherpa G20 Indonesia	• Rapat koordinasi internal Sekretariat G20 • Rapat koordinasi eksternal oleh Sekretariat G20 • Pertemuan ke-3 Sherpa G20 Indonesia	• Rapat koordinasi internal Sekretariat G20 • Rapat koordinasi eksternal oleh Sekretariat G20 • Pertemuan ke-4 oleh Sherpa G20 Indonesia • KTT G20
		Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian	17	Capaian forum kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi oleh Menko Perekonomian	• Perundingan ke-1 Indonesia-Kanada CEPA • Perundingan ke-1 Indonesia-Mercosur CEPA • Perundingan Indonesia-UAE CEPA Putaran ke-3 • Perundingan Indonesia-Mauritius Putaran ke-3 • Finalisasi <i>scoping exercise</i> komponen <i>review</i> ASEAN-India Trade in Goods Agreement • Perundingan <i>upgrading</i> AANZFTA • Pembahasan Awal <i>Draft Text Upgrading</i> ATIGA • Koordinasi substansi antara sekretariat JCM Indonesia dan Jepang terkait	• Keikutsertaan dalam perundingan <i>Joint Negotiating Committee</i> (JNC) Indonesia-Pakistan TIGA dan/atau Indonesia-Bangladesh PTA • Perundingan ke-2 Indonesia-Chile CEPA in Services • Perundingan Indonesia-EU CEPA Putaran ke-12 • Perundingan <i>upgrading</i> AANZFTA • Keputusan komite bersama tercapai sehingga proses validasi dan verifikasi secara elektronik terhadap proyek JCM dapat dilakukan	• Penyelenggaraan JCM GR IJEPA • Terselenggaranya Pertemuan Committee on Economic Cooperation Indonesia-Korea CEPA 2022 • Disepakatinya <i>Economic Cooperation</i> Indonesia-Korea CEPA 2022 • Perundingan ke-3 Indonesia-Chile CEPA in Services • Pelaksanaan SOMET RI-NZ • Perundingan <i>upgrading</i> AANZFTA • Koordinasi Sekretariat JCM Indonesia dan Jepang terkait substansi Pertemuan Komite Bersama	• Disepakatinya GR IJEPA • Negosiasi Indonesia-Pakistan TIGA dan/atau Indonesia-Bangladesh PTA • Disepakatinya kerja sama ekonomi RI – Kazakhstan • Perundingan ke-4 Indonesia-Chile CEPA in Services • Penyelesaian JFSG FTA RI-EAEU • Pelaksanaan Pertemuan Komite Bersama

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					proses persetujuan elektronik • Pelaksanaan persetujuan elektronik dari Komite Bersama JCM.			
		Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian	80-90%	Rekomendasi penyelesaian proses ratifikasi	• Pembahasan substansi, kajian, dan masukan Rapat/FGD pembahasan IK-CEPA dengan DPR • Rapat Koordinasi Ratifikasi KSEITK Indonesia-Angola • Pembahasan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang pengesahan ASEAN Protocol on ESDM • Penetapan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>ASEAN Protocol to Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i> (EDSM) • Pembahasan draft UU pengesahan perjanjian RCEP oleh Tim PAK	• Pengesahan UU ratifikasi IK-CEPA • Rapat Koordinasi Ratifikasi KSEITK Indonesia-Angola • Rapat Koordinasi Anggota PAK Menyusun Dokumen Pendukung Ratifikasi (Naskah Akademik, Naskah Terjemahan, Rancangan Peraturan Presiden)	• Monitoring Penyelesaian Ratifikasi KSEITK Indonesia-Angola • Finalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden • Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden ATISA	• Monitoring Penyelesaian Ratifikasi KSEITK Indonesia-Angola • Pengesahan Rancangan Peraturan Presiden ATISA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					• Pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan RCEP • Pengesahan UU Ratifikasi RCEP • Permohonan Anggota Panitia Antar Kementerian pada proses ratifikasi ATISA • Rapat Koordinasi Proses Penetapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Protokol ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket ke-10 • Paraf Menko Perekonomian pada RPerpres AFAS Paket ke-10 • Pengesahan RPerpres AFAS Paket-10			
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Baik (3 dari 4)	• Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan Kerja Sama	• Rapat koordinasi/ pembahasan terkait isu kerja sama ekonomi internasional, antara lain posisi Pemri atas	• Rapat koordinasi/ pembahasan terkait isu kerja sama ekonomi internasional, antara lain posisi Pemri atas	• Rapat koordinasi/ pembahasan terkait isu kerja sama ekonomi internasional, antara lain posisi Pemri atas	• Rapat koordinasi/ pembahasan terkait isu kerja sama ekonomi internasional, antara lain posisi Pemri

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif			Ekonomi Internasional Monitoring dan evaluasi kebijakan Kerja Sama Ekonomi Internasional	kasus sengketa DS477/478, strategi mitigasi Pemri atas putusan banding AB dalam penyelesaian sengketa DS484, pelaksanaan TIFA Ministerial led RI-AS ke-18, rakortas potensi ekspor pupuk urea ke Australia, penyusunan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain hasil kerja sama ekonomi dengan Asia Tenggara (Singapura), hasil kerja sama dalam forum/kesepakatan dengan negara di Kawasan Eropa Barat, kerja sama peternakan Indonesia-New Zealand, proyek kerja sama JCM	kasus sengketa DS477/478, finalisasi Plan of Action Indonesia-Kanada, penetapan PED, penetapan tema keketuaan ASEAN 2023 Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain hasil kerja sama dalam forum/kesepakatan dengan negara di Kawasan Eropa Tengah dan Timur, potensi kerja sama energi terbarukan dengan Amerika Serikat, penanganan logistik ekspor hortikultura, implementasi kerja sama ekonomi ASEAN, implementasi rencana aksi RCEP, proyek kerja sama JCM	kasus sengketa DS477/478, peluang kerja sama Indonesia dengan negara Asia Tengah (Kazakhstan), bilateral economic cooperation forum RI-Jerman, finalisasi concept note PED Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain hasil kerja sama dalam forum/kesepakatan dengan negara di Kawasan Afrika, potensi ekspor ke pasar Kanada, implementasi rencana aksi RCEP, proyek kerja sama JCM	kasus sengketa DS477/478, pelaksanaan forum konsultasi bilateral Indonesia-Kanada, persiapan Partner Country Hannover Messe 2023, penetapan <i>concept note</i> PED, rekomendasi dalam <i>trade policy review/joint statement initiative</i> WTO Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain hasil kerja sama ekonomi dengan Asia Timur (Korea), hasil kerja sama dalam forum/kesepakatan dengan negara di Kawasan Timur Tengah, implementasi kerja sama APEC dan Sub Regional, implementasi rencana aksi RCEP, proyek kerja sama JCM
		Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi	75	Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper/Monograf Kebijakan	Pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta Penyusunan Karya Tulis Kedinasan	Pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta Penyusunan Karya Tulis	Pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta Penyusunan Karya Tulis Kedinasan	Pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta Penyusunan Karya Tulis Kedinasan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Kerja Sama Ekonomi Internasional		tentang kerja sama ekonomi internasional	(naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional	(naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional • Publikasi Karya Tulis Kedinasan maupun Ilmiah tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4	• Menanamkan nilai-nilai integritas melalui Dialog Kinerja antara Pimpinan dan jajarannya beserta bawahan • Melakukan Rapat Pimpinan dalam penyusunan perencanaan hingga	• Rapat Pimpinan terkait perencanaan dan pelaporan kinerja unit • Monitoring capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan pelaksanaan anggaran • Pelaporan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	• Rapat Pimpinan terkait perencanaan dan pelaporan kinerja unit • Monitoring capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan pelaksanaan anggaran • Pelaporan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	• Rapat Pimpinan terkait perencanaan dan pelaporan kinerja unit • Monitoring capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan pelaksanaan anggaran • Pelaporan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	• Dialog kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional • Rapat Pimpinan terkait perencanaan dan pelaporan kinerja unit • Monitoring capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategi	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				pelaporan kinerja unit kerja • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan hingga realisasi anggaran di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	• Evaluasi capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	• Evaluasi capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	Kerja Sama Ekonomi Internasional • Evaluasi capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	pelaksanaan anggaran • Pelaporan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional • Evaluasi capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional



3 AKUNTABILITAS KINERJA



3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan pada awal tahun, apakah sudah sesuai dengan dokumen yang diperjanjikan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2022, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran dari unit kerja. Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan warna merah/ kuning/ hijau, ditentukan oleh besaran NKO tersebut. Status NKO ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

	Hijau	$NKO \geq 100\%$	<i>Memenuhi Ekspektasi</i>
	Kuning	$80\% \leq NKO < 100\%$	<i>Belum Memenuhi Ekspektasi</i>
	Merah	$NKO < 80\%$	<i>Tidak Memenuhi Ekspektasi</i>

Nilai Capaian Kinerja dihitung berdasarkan penilaian capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari data realisasi berdasarkan rumusan pada manual IKU. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (N/A), bukan diberikan nilai 0 (nol). Meski demikian, harus disertakan alasan atas kondisi tersebut. Selanjutnya, capaian IKU dilakukan indeksasi capaian IKU,

yaitu dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU.

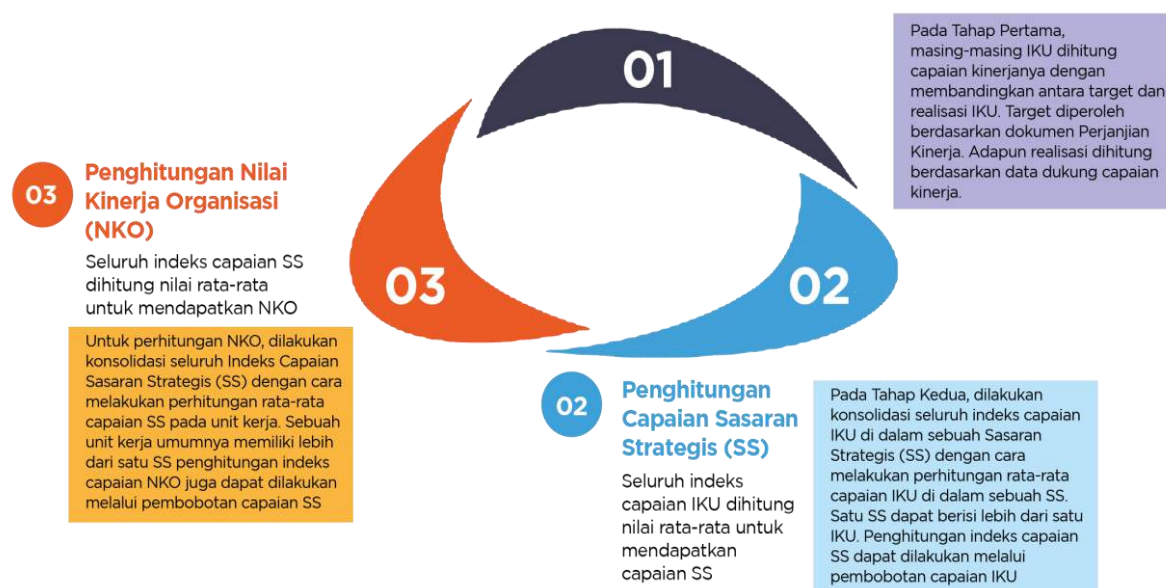
Terdapat tiga jenis polarisasi IKU, sebagai berikut: i) Polarisasi *Maximize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU dengan kata lain realisasi capaian lebih tinggi dari target yang diharapkan; ii) Polarisasi *Minimize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU dengan kata lain realisasi capaian lebih kecil dari target yang diharapkan; iii) Polarisasi *Stabilize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU atau realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU, maka dapat diperoleh Nilai Perspektif (NP). NP adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NP adalah dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (n/a), maka SS tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam sebuah organisasi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit yang memiliki peta strategi sehingga menggambarkan pula kinerja pejabat yang memimpin unit kerja yang bersangkutan. Perhitungan NKO mengacu pada realisasi target-target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Bobot perspektif peta strategi ditentukan sesuai jumlah perspektif: *Stakeholder Perspective* sebesar 30%; *Customers Perspective* sebesar 30%; *Internal Process Perspective* sebesar 20%; dan *Learning and Growth* sebesar 20%. Untuk Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, karena tidak memiliki Sasaran Strategis *Customers Perspective*, maka pembobotan menjadi 40% *Stakeholder Perspective*, 30% *Internal Business Process Perspective*, dan 30% *Learning and Growth Perspective*.

Komponen Perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu: a) Capaian IKU; dan b) Nilai Sasaran Strategis (NSS). Adapun proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Proses Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi



Berikut penjelasan detilnya:

a. Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.2. Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

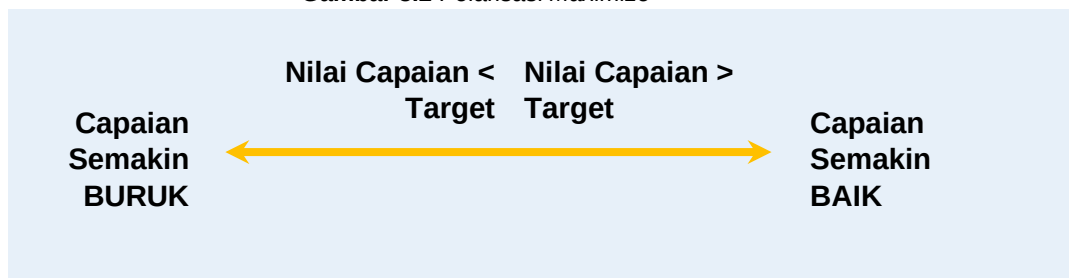
	Hijau	$IKU \geq 100\%$	<i>Memenuhi Ekspektasi</i>
	Kuning	$80\% \leq IKU < 100\%$	<i>Belum Memenuhi Ekspektasi</i>
	Merah	$IKU < 80\%$	<i>Tidak Memenuhi Ekspektasi</i>

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

i. **Polarisasi *Maximize***

Pada polarisasi *maximize* kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh: Persentase Pertumbuhan Ekonomi.

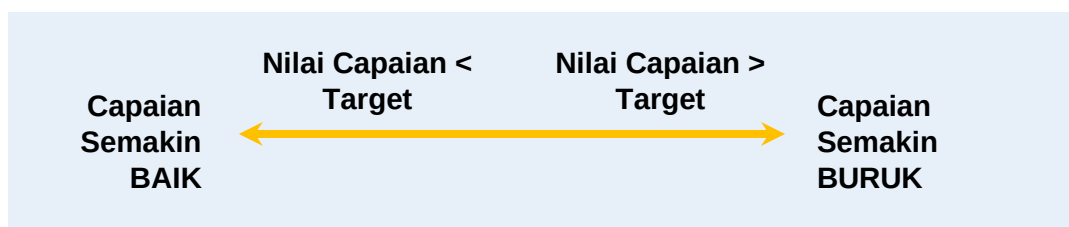
Gambar 3.2 Polarisasi *Maximize*



ii. **Polarisasi *Minimize***

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh: Persentase Jumlah Temuan Pemeriksaan.

Gambar 3.3. Polarisasi *Minimize*



iii. **Polarisasi *Stabilize***

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU dimana realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau Semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Contoh: Persentase deviasi asumsi makro ekonomi.

b. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu SS. Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh NSS. Status SS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.3. Kriteria Nilai Sasaran Strategis

	Hijau	$NSS \geq 100\%$	<i>Memenuhi Ekspektasi</i>
	Kuning	$80\% \leq NSS < 100\%$	<i>Belum Memenuhi Ekspektasi</i>
	Merah	$NSS < 80\%$	<i>Tidak Memenuhi Ekspektasi</i>

Penghitungan NSS Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2022 dilakukan atas dua sasaran sebagaimana dilaporkan dalam tabel di atas, dengan besaran bobot yang sama pada setiap sasaran.

2. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Capaian Indikator Kinerja Utama didapat berdasarkan perhitungan capaian kinerja sesuai manual IKU masing-masing. Berikut adalah perhitungan Capaian IKU Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional:

Tabel 3.4. Capaian IKU Deputy VII 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan/ Polarisasi	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional				
1.1	Indikator 1.1 Persentase market share ekspor Indonesia ke Negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia	Persentase/ <i>Maximize</i>	66-68%	69,2%	101,76% (Memenuhi Ekspektasi)
1.2	Indikator 1.2 Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	Jumlah / <i>Maximize</i>	26	25	96,15% (Belum Memenuhi Ekspektasi)
1.3	Indikator 1.3 Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	Jumlah / <i>Maximize</i>	2	2	100% (Memenuhi Ekspektasi)
1.4	Indikator 1.4 Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L	Jumlah / <i>Maximize</i>	17	16	94,12% (Belum Memenuhi Ekspektasi)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan/ Polarisasi	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
	di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian				
1.5	Indikator 1.5 Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	Persentase/ <i>Stabilize</i>	80- 90%	83%	100% (Memenuhi Ekspektasi)
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif				
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Indeks	Baik (3 dari 4)	4	133,33% (Memenuhi Ekspektasi)
2.1	Indikator 2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	Persentase/ <i>Stabilize</i>	75	100	133.33% (Memenuhi Ekspektasi)
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional				
3.1	Indikator 3.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	Indeks	3 dari 4	4	133.33% (Memenuhi Ekspektasi)

Nilai Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional pada tahun 2022 secara umum telah memenuhi ekspektasi. Namun, masih ada 2 (dua) indikator yang belum memenuhi ekspektasi yaitu Indikator 1.2 Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub

Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian dan Indikator 1.4 Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian.

3. Nilai Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Nilai Sasaran Strategis dihitung berdasarkan hasil konsolidasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis tersebut yang dapat diperoleh dari rata-rata capaian IKU tersebut.

Tabel 3.5. Nilai Sasaran Strategis (NSS) Deputi VII 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)	NSS(%)
1.1	Indikator 1.1 Persentase market share ekspor Indonesia ke Negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia	101,76% (Memenuhi Ekspektasi)	
1.2	Indikator 1.2 Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	96,15% (Belum Memenuhi Ekspektasi)	
1.3	Indikator 1.3 Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	100% (Memenuhi Ekspektasi)	
1.4	Indikator 1.4 Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	94,12% (Belum Memenuhi Ekspektasi)	
1.5	Indikator 1.5 Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	100% (Memenuhi Ekspektasi)	
Sasaran Program 1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional			98% Belum Memenuhi Ekspektasi
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	133,33% (Memenuhi Ekspektasi)	

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)	NSS(%)
2.2	Indikator 2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	133.33% (Memenuhi Ekspektasi)	
Sasaran Program 2. <i>Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif</i>			133,33% Memenuhi Ekspektasi
3.1	Indikator 3.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	133,33% (Memenuhi Ekspektasi)	
Sasaran Program 3. <i>Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional</i>			133,33% Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel tersebut, maka Nilai Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional belum berhasil memenuhi ekspektasi.

4. Nilai Kinerja Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Tabel 3.6. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy VII 2022

No	Sasaran Strategis	NSS	Perspektif	Bobot	NKO(%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	98% Belum Memenuhi Ekspektasi	Stake holder	40%	39,2
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif	133,33% (Memenuhi Ekspektasi)	Internal Business	30%	40
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	133,33% (Memenuhi Ekspektasi)	Learning and Growth	30%	40
Nilai Kinerja Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional				119,2% Memenuhi Ekspektasi	

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah 100% yang terbagi menjadi 40% pada NKO Stakeholder, 30% pada NKO *Internal Business*, dan 30% pada NKO *Learning and Growth*. Dengan demikian, NKO secara keseluruhan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional masuk ke dalam kriteria **HIJAU** yaitu warna yang diberikan apabila nilai NKO diantara $NKO \geq 100\%$. Hal itu juga yang berarti **NKO Memenuhi Ekspektasi**.

Tabel 3.7. Kriteria Warna (NKO) Deputy VII 2022

NKO Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama EKonomi Internasional 2022			
	Hijau	$NKO \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi

Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional pada tahun ini berhasil mencapai NKO 119,2% atau Memenuhi Ekspektasi.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian target ekonomi dan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Tahun 2022, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional memiliki misi yaitu meningkatkan implementasi hasil kesepakatan kerjasama ekonomi internasional secara berkelanjutan dan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam forum ekonomi internasional. Misi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tersebut memiliki tujuan yaitu mewujudkan peningkatan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Renstra Deputy, 2020-2024).

Salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menetapkan sasaran program strategis. Sasaran program kinerja ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Adapun sasaran program strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesepakatan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif; dan
3. Terwujudnya tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Berdasarkan sasaran program strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional di atas, hasil capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama

Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Adapun pencapaian kinerja pada sasaran program strategis “Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional” ditunjukkan oleh pencapaian 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia;
2. Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketaui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian;
3. Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian;
4. Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian;
5. Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian.

Lebih lanjut, pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berdasarkan target kinerja pada 5 (lima) IKU selama periode tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

CAPAIAN IKU 1.1.**Persentase *Market Share* Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/PTA/CEPA terhadap Total Ekspor Indonesia**

Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu “Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan serta Peningkatan Daya Saing”, terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) “Pertumbuhan Ekonomi”, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional turut berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penetapan “Persentase *Market Share* Ekspor Indonesia ke Negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap Total Ekspor Indonesia” sebagai IKU Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya selalu berupaya meningkatkan serta memperkuat jumlah kerja sama ekonomi internasional baik dalam bentuk kesepakatan *Free Trade Agreement* (FTA), *Preferential Trade Agreement* (PTA), ataupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral. Dengan memiliki kesepakatan FTA/PTA/CEPA tersebut, maka produk ekspor Indonesia bisa mendapatkan tarif ekspor yang lebih rendah ke negara yang telah memiliki FTA/PTA/CEPA dengan Indonesia. Tarif ekspor yang lebih rendah dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor. Kesepakatan FTA/PTA/CEPA tersebut turut membantu kinerja ekspor Indonesia. Hal ini tercermin pada persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra. Oleh karena itu, penting kemudian untuk menganalisa dampak dari implementasi kerja sama di bidang ekonomi Internasional tersebut dalam mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Negara-negara mitra utama yang dapat turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui analisa *market share*.

Persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia adalah persentase ekspor Indonesia ke negara-negara mitra yang memiliki kesepakatan FTA/PTA/CEPA dengan Indonesia dibandingkan dengan total ekspor Indonesia. Persentase tersebut dapat mencerminkan hasil kinerja dari kesepakatan kerja sama Indonesia dengan negara mitra melalui FTA/PTA/CEPA.

Target kinerja *market share* FTA/PTA/CEPA Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 66-68% dengan periode pengukuran target kinerja adalah tahunan. Hingga Triwulan IV Tahun 2022, *market share* FTA/PTA/CEPA Indonesia yang telah terealisasi sebesar 69,2% atau mencapai 101,76% dari target tahun 2022 sebesar 66-68% dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.8. Capaian IKU Market Share FTA 2021-2022

PERSENTASE MARKET SHARE FTA	2021 (%)	2022 (%)
Realisasi	66,3%	69,2%
Target Capaian	65,5-67,5%	66-68%
CAPAIAN IKU Market Share FTA	100%	101,76%

Keterangan: *) Data per Januari s.d. November 2022

Market share FTA ekspor Indonesia di tahun 2022 mencapai 69,2%. Ini berarti 69,2% produk ekspor Indonesia dikirim ke negara mitra yang sudah memiliki perjanjian FTA dengan Indonesia dimana eksportir Indonesia bisa mendapatkan tarif preferensi yang lebih rendah dengan menggunakan skema FTA. Indonesia kini memiliki FTA dengan 22 yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, Cina, India, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Chili dan Hong Kong, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein.

Jika dibandingkan dengan Persentase *Market Share* FTA tahun 2021, maka realisasi *Market Share* FTA tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 2,6% yaitu dari 66,3% menjadi 68,9%. Meskipun target tahun 2022 telah ditingkatkan dari *range* persentase 65,5-67,5% pada 2021 menjadi *range* persentase 66-68%

pada 2022, namun Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Capaian Kinerja Tahun 2021 maupun Capaian Kinerja Tahun 2022 pada IKU 1.1: Persentase *Market Share* Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/PTA/CEPA terhadap Total Ekspor Indonesia telah tercapai hingga 101% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun anggaran 2022 yang telah mencapai 101 persen, maka Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sangat optimis dapat meraih capaian kinerja lebih baik lagi pada periode kinerja tahun berikutnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Peningkatan efektivitas implementasi kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara mitra melalui kesepakatan FTA/PTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral dapat menjadi kunci keberhasilan. Indonesia dapat menarik negara tujuan ekspor dan mendorong peningkatan ekspor karena tarif ekspor yang lebih rendah.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Deputi VII melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya pencapaian target dengan dilaksanakan pemantauan rutin setiap triwulan terhadap data ekspor Indonesia.

Analisis Atas Efisiensi Anggaran

Analisis persentase *market share* dilakukan secara mandiri oleh pegawai di kemenko perekonomian tanpa adanya pembayaran honorarium tim. Hal ini dikarenakan pegawai di kemenko perekonomian masih memiliki kapabilitas yang cukup mumpuni dalam melakukan analisa tersebut, sehingga dapat menghemat penggunaan anggaran.

CAPAIAN IKU 1.2.**Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian**

Jumlah kesepakatan pada forum yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tingkat bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral merupakan penyelenggaraan pertemuan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Deputi maupun Menteri. Forum tersebut mendorong partisipasi aktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator dan pengembangan kerja sama ekonomi internasional. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah forum yang terselenggara. Forum-forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian tersebut diharapkan menjadi wadah menyampaikan aspirasi Indonesia di dunia internasional.

Target yang telah ditetapkan pada IKU 1.2. ini adalah 26 (dua puluh enam) Kesepakatan. Adapun rincian kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan pada SOM Ke-2 JCEC RI-ROK;
2. Kesepakatan pada JCEC RI-ROK (Tingkat Menteri);
3. Kesepakatan pada Pertemuan Ke-5 TFT Baja RI – Korea;
4. Kesepakatan pada SOM Ke-10 RI – Singapura;
5. Kesepakatan pada Ministerial Meeting Ke-12 RI – Singapura;
6. Kesepakatan pada SOM Trilateral RI - Timor Leste – Australia;
7. Kesepakatan pada Forum Konsultasi Bilateral RI – Jepang;
8. Kesepakatan pada *Public and Private Track 1.5: Japan-Indonesia Co-creation; Partnership for Innovation and Sustainable Economic Society*;
9. Kesepakatan pada *Board Meeting PROSPERA*;
10. Kesepakatan pada RI-Australia *Senior Economic Officials Meeting (SEOM)*;
11. Kesepakatan pada RI-Australia *Economic Trade and Investment Ministerial Meeting (ETIMM)*;
12. Kesepakatan pada Diplomasi Kelapa Sawit ke Negara-Negara Kawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah;

13. Kesepakatan pada Sidang Komisi Bersama ke-13 RI-Rusia;
14. Kesepakatan pada ASEAN *Economic Community (AEC) Council Meeting*;
15. Kesepakatan pada *High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI)*;
16. Kesepakatan pada BIMP-EAGA *Ministerial Meeting*;
17. Kesepakatan pada IMT-GT *Ministerial Meeting*;
18. Kesepakatan pada BIMP-EAGA *Senior Official Meeting*;
19. Kesepakatan pada IMT-GT *Senior Official Meeting*;
20. Kesepakatan pada CIMT *Advisory Committee Meeting*;
21. Kesepakatan pada BIMP-EAGA SPM;
22. Kesepakatan pada IMT-GT SPM;
23. Kesepakatan pada APEC *Economic Committee*;
24. Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Indonesia;
25. Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-3 G20 Presidensi Indonesia;
26. Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-4 G20 Presidensi Indonesia.

Hingga akhir tahun 2022, jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral yang telah terealisasi sebanyak 25 (dua puluh lima) forum atau mencapai 96% dari target Tahun 2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian IKU 1.2. Tahun 2021 dan 2022

No	Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2021	2022
1	Pertemuan Tindak Lanjut <i>Joint Committee on Economic Cooperation</i> RI-ROK	1	
	Kesepakatan pada SOM Ke-2 JCEC RI-ROK		1
2	Forum Konsultasi Indonesia-Jepang (Jetro & JJC)	1	
	Kesepakatan pada JCEC RI-ROK (Tingkat Menteri)		1
3	<i>Senior Official Meeting High Level Dialogue and Cooperation Mechanism</i> RI-RRT	1	
	Kesepakatan pada Pertemuan Ke-5 TFT Baja RI – Korea Diganti:		1

No	Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2021	2022
	Kesepakatan dalam Penandatanganan MOU RI – Korea bidang Ekonomi Digital		
4	Forum Bilateral Indonesia-Jepang (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kedutaan Besar Jepang)	1	
	Kesepakatan pada Forum Konsultasi Bilateral RI-Jepang		1
5	<i>Senior Official Meeting</i> RI-Singapura	1	
	Kesepakatan pada SOM ke-10 RI-Singapura		1
6	<i>Ministerial Meeting</i> RI-Singapura	1	
	Kesepakatan pada <i>Ministrial Meeting</i> Ke-12 RI – Singapura		1
7	Pertemuan Konsultasi Tingkat Ahli (PKTA) Bidang Pertanian dan Perikanan RI-Rusia	1	
	Kesepakatan pada Sidang Komisi Bersama ke-13 RI-Rusia		1
8	<i>Indonesia-Partner Country</i> Hannover Messe	1	
	Kesepakatan pada <i>Public and Private Track 1.5: Japan-Indonesia Co-creation; Partnership for Innovation and Sustainable Economic Society</i>		1
9	Diplomasi Kelapa Sawit ke Negara-Negara Kawasan Eropa	1	
	Kesepakatan pada Diplomasi Kelapa Sawit ke Negara-Negara Kawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah		1
10	<i>Board Meeting</i> PROSPERA	1	
	Kesepakatan pada <i>Board Meeting</i> PROSPERA		1
11	RI-Australia <i>Senior Economic Officials Meeting</i> (SEOM)	1	
	Kesepakatan pada RI-Australia <i>Economic Trade and Investment Ministerial Meeting</i> (ETIMM) Diganti: Kesepakatan dalam Penandatanganan <i>Exchange of Letter</i> No.2 tentang PROSPERA		1
12	RI-Australia <i>Economic Trade and Investment Ministerial Meeting</i> (ETIMM)	1	
	Kesepakatan pada RI-Australia <i>Senior Economic Officials Meeting</i>		1

No	Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2021	2022
	Diganti: Finalisasi MTR PROSPERA		
13	ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting	1	
	Kesepakatan pada ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting		1
14	High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI)	1	
	Kesepakatan pada High Level Task Force on Economic Integration		1
15	BIMP-EAGA dan IMT-GT Ministerial Meeting	1	
	Kesepakatan pada BIMP-EAGA Ministerial Meeting		1
16	BIMP-EAGA dan IMT-GT Senior Official Meeting	1	
	Kesepakatan pada BIMP-EAGA Senior Official Meeting		1
17	CIMT Advisory Committee Meeting	1	
	Kesepakatan pada CIMT Advisory Committee Meeting		1
18	BIMP-EAGA dan IMT-GT Strategic Planning Meeting	1	
	Kesepakatan pada IMT-GT Senior Official Meeting		1
19	APEC Economic Committee	1	
	Kesepakatan pada APEC Economic Committee		1
20	Structural Reforms Ministerial Meeting (SRMM)	1	
	Kesepakatan pada IMT-GT Ministerial Meeting		1
21	Pertemuan Forum G20	1	
	Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Indonesia		1
22	Kesepakatan pada IMT-GT SPM		1
23	Kesepakatan pada BIMP-EAGA SPM		1
24	Kesepakatan pada SOM Trilateral RI - Timor Leste – Australia		-

No	Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2021	2022
25	Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-3 G20 Presidensi Indonesia		1
26	Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-4 G20 Presidensi Indonesia		1
Realisasi		21	25
Target Capaian		21	26
CAPAIAN IKU: Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian		100%	96%

Sesuai Kegiatan Prioritas: **Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global pada** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, target Jumlah Forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat Regional dan Multilateral dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10. Target Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral

Indikator	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	10	11	13	14	16

Tabel 3.11. Kontribusi Deputi VII dalam Pencapaian Target Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Disepakati pada RPJMN 2020 – 2024 Selama Tahun 2021 dan 2022

Indikator	Target 2021 RPJMN 2020 - 2024	Realisasi dari Deputi VII Tahun 2021
Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	21	25

Dari 13 target jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral yang disepakati pada RPJMN 2024, Deputi VII telah berkontribusi dalam mewujudkan target jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral yang disepakati pada RPJMN 2024 yang disepakati sebanyak 25 Forum.

Jika dibandingkan dengan target 2021 yang terdiri dari 21 (dua puluh satu), pada tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menaikkan targetnya menjadi 26 (dua puluh enam) Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketaui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian. Meski demikian, Deputi Bidang Koordinasi tetap berhasil memenuhi 25 dari 26 target 2022 dengan baik.

Sehingga dengan demikian, Capaian Kinerja Tahun 2022 pada IKU 1.2. Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketaui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian memenuhi Capaian 96% pada tahun 2022 dari target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan lebih lanjut terhadap laporan realisasi dari 25 (dua puluh lima) target tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Kesepakatan pada the 2nd *Senior Official Meeting Joint Committee on Economic Cooperation Republic of Indonesia - Republic of Korea*

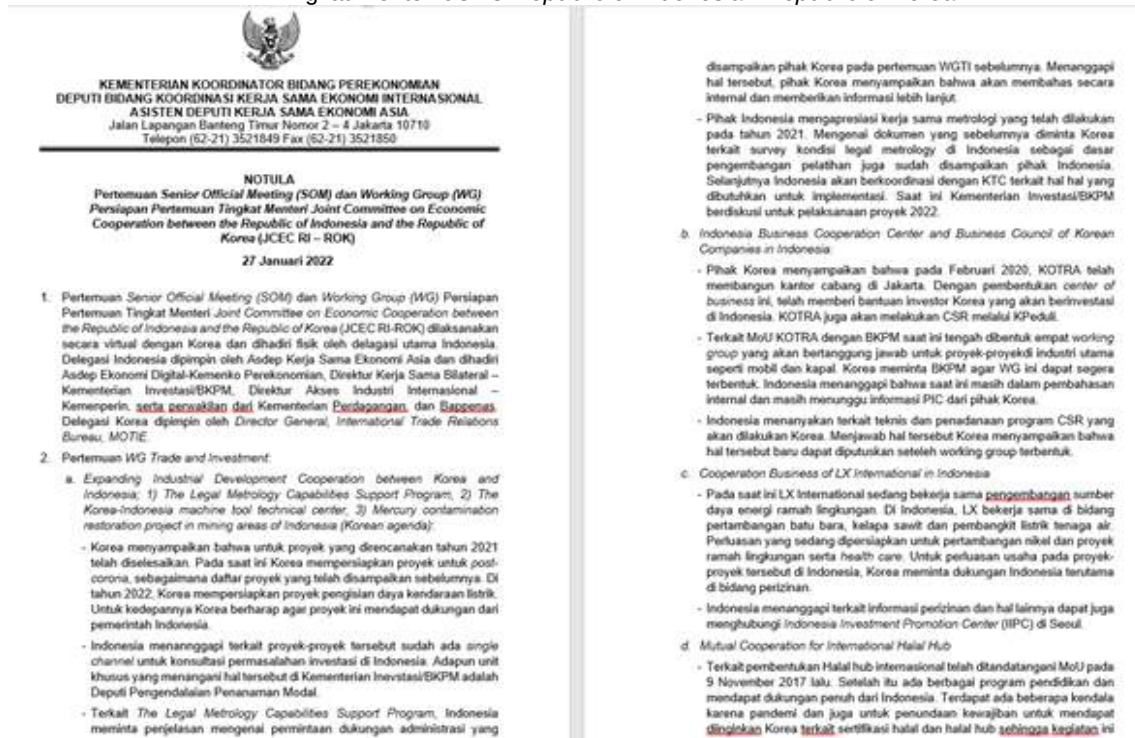
Pertemuan SOM dan WG *Joint Committee on Economic Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea (JCEC RI-ROK)* dilaksanakan pada 27 Januari 2022. Pertemuan SOM dan WG JCEC RI – ROK dilaksanakan dalam rangka membahas substansi kerja sama dan persiapan pertemuan tingkat Menteri JCEC RI – ROK yang akan dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian dan Minister of Trade Industry and Energy (MOTIE) Korea yang direncanakan diselenggarakan pada 22 Februari 2022 di Jakarta.

Gambar 3.4 Pertemuan the 2nd SOM JCEC RI-ROK – Virtual, 27 Januari 2022



Menteri MOTIE Korea akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 20-22 Februari 2022. Dalam kunjungan ini Menteri MOTIE dijadwalkan bersama Bapak Menko Perekonomian untuk memimpin pertemuan tingkat Menteri JCEC RI – ROK pada 22 Februari 2022 pagi di Hotel Borobudur Jakarta.

Gambar 3.5 Notula Rapat Pertemuan SOM dan Working Group (WG) Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri JCEC Republic of Indonesia - Republic of Korea



Dalam pertemuan SOM JCEC ke-2 juga direncanakan akan dilakukan acara *Business Forum* yang akan dihadiri oleh Bapak Menko Perekonomian bersama Menteri MOTIE Korea, serta direncanakan juga kunjungan ke Pabrik Mobil Hyundai di Cikarang, Jawa Barat.

Dalam forum JCEC RI-ROK ini terdiri dari empat WG, yaitu *WG on Trade and Investment*, *WG on Industry Cooperation*, *WG on Energy and Mineral Resources*, dan *WG on E-Commerce*. Dari empat WG tersebut, *WG on Energy and Mineral Resources* telah secara terpisah telah melaksanakan pertemuan pada bulan Oktober 2021 yang lalu. Sehingga dalam pertemuan ini terdapat tiga WG yang melaksanakan pertemuan yaitu: *WG Trade and Investment*, *WG Industrial Cooperation* dan *WG Ecommerce*.

Hasil-hasil pertemuan SOM JCEC untuk ketiga *Working Group* adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan *WG Trade and Investment*:

- Expanding Industrial Development Cooperation between Korea and Indonesia; 1) The Legal Metrology Capabilities Support Program, 2)*

The Korea-Indonesia machine tool technical center, 3) Mercury contamination restoration project in mining areas of Indonesia (Korean agenda):

- Korea menyampaikan bahwa untuk proyek yang direncanakan tahun 2021 telah diselesaikan. Pada saat ini Korea mempersiapkan proyek untuk *post-corona*, sebagaimana daftar proyek yang telah disampaikan sebelumnya. Di tahun 2022, Korea mempersiapkan proyek pengisian daya kendaraan listrik. Untuk kedepannya Korea berharap agar proyek ini mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia.
- Indonesia menanggapi terkait proyek-proyek tersebut sudah ada *single channel* untuk konsultasi permasalahan investasi di Indonesia. Adapun unit khusus yang menangani hal tersebut di Kementerian Investasi/BKPM adalah Deputy Pengendalian Penanaman Modal.
- Terkait *The Legal Metrology Capabilities Support Program*, Indonesia meminta penjelasan mengenai permintaan dukungan administrasi yang disampaikan pihak Korea pada pertemuan WGTI sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, pihak Korea menyampaikan bahwa akan membahas secara internal dan memberikan informasi lebih lanjut.
- Pihak Indonesia mengapresiasi kerja sama metrologi yang telah dilakukan pada tahun 2021. Mengenai dokumen yang sebelumnya diminta Korea terkait survey kondisi legal metrologi di Indonesia sebagai dasar pengembangan pelatihan juga sudah disampaikan pihak Indonesia. Selanjutnya Indonesia akan berkoordinasi dengan KTC terkait hal hal yang dibutuhkan untuk implementasi. Saat ini Kementerian Investasi/BKPM berdiskusi untuk pelaksanaan proyek 2022.

b) *Indonesia Business Cooperation Center and Business Council of Korean Companies in Indonesia:*

- Pihak Korea menyampaikan bahwa pada Februari 2020, KOTRA telah membangun kantor cabang di Jakarta. Dengan

pembentukan *center of business* ini, telah memberi bantuan investor Korea yang akan berinvestasi di Indonesia. KOTRA juga akan melakukan CSR melalui KPeduli.

- Terkait MoU KOTRA dengan BKPM saat ini tengah dibentuk empat *working group* yang akan bertanggung jawab untuk proyek-proyek di industri utama seperti mobil dan kapal. Korea meminta BKPM agar WG ini dapat segera terbentuk. Indonesia menanggapi bahwa saat ini masih dalam pembahasan internal dan masih menunggu informasi PIC dari pihak Korea.
- Indonesia menanyakan terkait teknis dan pendanaan program CSR yang akan dilakukan Korea. Menjawab hal tersebut Korea menyampaikan bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah *working group* terbentuk.

c) *Cooperation Business of LX International in Indonesia*

- Pada saat ini LX International sedang bekerja sama pengembangan sumber daya energi ramah lingkungan. Di Indonesia, LX bekerja sama di bidang pertambangan batu bara, kelapa sawit dan pembangkit listrik tenaga air. Perluasan yang sedang dipersiapkan untuk pertambangan nikel dan proyek ramah lingkungan serta *health care*. Untuk perluasan usaha pada proyek-proyek tersebut di Indonesia, Korea meminta dukungan Indonesia terutama di bidang perizinan.
- Indonesia menanggapi terkait informasi perizinan dan hal lainnya dapat juga menghubungi *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) di Seoul.

d) *Mutual Cooperation for International Halal Hub*

- Terkait pembentukan Halal hub internasional telah ditandatangani MoU pada 9 November 2017 lalu. Setelah itu ada berbagai program pendidikan dan mendapat dukungan penuh dari Indonesia. Terdapat ada beberapa kendala karena pandemi dan juga untuk penundaan kewajiban untuk mendapat diinginkan Korea terkait sertifikasi halal dan halal hub sehingga kegiatan ini

masih mengalami penundaan. Korea meminta data informasi terkait sertifikasi halal dan kerja sama teknis.

- Pihak Indonesia akan menyampaikan dan mendiskusikan dengan BPJPH terkait permintaan Korea tersebut.

e) *Investment of Korea to Indonesia in Defense, Bio and Nano Industries, Knowledge Transfer of the Fourth Industrial Revolution and Digitization, Relocation of Korea Companies in China*

- Pihak Indonesia menyampaikan bahwa terkait isu *Expansion of Supply Chain Between Korea and Indonesia*, proposal kerja sama telah disampaikan ke Korea melalui Korea International Trade Association (KITA) pada awal 2021, namun pihak KITA belum menanggapi proposal tersebut. Proposal tersebut terkait keikutsertaan UMKM Indonesia untuk mendukung industri Korea.
- Terkait relokasi perusahaan Korea dari China, Indonesia meminta daftar perusahaan yang berpotensi melakukan relokasi ke Indonesia. Menanggapi hal tersebut Korea menyampaikan bahwa kesulitan untuk mendapatkan datanya, namun untuk perusahaan yang sudah mempunyai rencana spesifik relokasi dan investasi di Indonesia seperti Lotte Chemical, Posco, dan Hyundai Korea bisa memberikan informasi tersebut.
- Terkait *Knowledge Transfer of the Fourth Industrial Revolution and Digitization* Indonesia meminta dukungan transfer teknologi *fourth industrial revolution* termasuk *bio and nano technology*. Pihak Korea meminta adanya kerja sama yang lebih detail dan spesifik terkait isu ini. Industri yang berinvestasi di Indonesia cukup banyak, isu terpenting yaitu terkait *electric vehicle* (EV) pengembangan baterai di wilayah Asia Tenggara berpusat di Indonesia.

f) *Cooperation in Mango and Poultry Product Exports to Korea:*

- Indonesia menyampaikan bahwa Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati, telah menerima dokumen draft persyaratan ekspor mangga ke Korea. Saat ini Kementan tengah

mempersiapkan fasilitas *hot water treatment* dan menyusun tanggapan draft tersebut. Indonesia meminta dukungan Korea untuk dapat memfasilitasi ekspor buah mangga ke Korea.

- Korea menyambut baik ekspor buah mangga Indonesia dan akan memberi tanggapan untuk merealisasi ekspor mangga ke Korea.

g) *Cooperation on Korea Companies Entering the Market*

- Pihak Korea menyampaikan di bidang usaha retail yakni terkait pembatasan investasi retail untuk luas area di bawah 1200 meter persegi, bea cukai dan visa pekerja.
- Terkait dengan persyaratan minimal investasi retail lebih dari 1200 meter persegi, pihak Korea meminta kelonggaran dimana untuk perdagangan kecil luas yang dibutuhkan hanya 700 – 800 meter persegi dan untuk grosir hanya sekitar 1000 meter persegi.
- Terkait bea cukai, pihak Korea menyampaikan bahwa terdapat jangka waktu inspeksi yang cukup panjang, hal tersebut mengakibatkan ekspor produk segar akan terlalu lama dan mendekati waktu kadaluarsa. Korea meminta untuk menyederhanakan inspeksi sehingga dapat mempersingkat waktu.
- Terkait visa bisnis jangka panjang, pihak Korea menyampaikan bahwa visa bisnis jika terkait proyek, visa yang diberikan paling panjang 3 bulan, dan apabila diperpanjang ada prosedur yang dinilai rumit. Korea meminta kelonggaran dalam visa bisnis dapat diperpanjang dan dapat disimplifikasi khususnya untuk sektor retail.
- Terkait industri kosmetik, pihak Korea menyampaikan untuk mendapatkan izin BPOM diperlukan waktu hingga satu tahun yang dinilai cukup lama. Korea meminta adanya penyesuaian dalam prosedur sertifikasi BPOM
- Pihak Korea mengusulkan agar diberikan *guideline* untuk mempersiapkan sertifikasi halal dan BPOM untuk meminimalisir kendala ekspor produk kosmetik kedepannya.

- Menanggapi isu-isu yang disampaikan pihak Korea, pihak Indonesia menjelaskan bahwa aturan minimal luas area sudah diatur dalam aturan pemerintah. Hal tersebut mengingat usaha retail tidak ditujukan untuk pihak asing dan ditujukan untuk koperasi dan UMKM di Indonesia. Adapun terkait isu bea cukai, visa dan jangka waktu perizinan BPOM, termasuk *guideline* akan dibahas lebih lanjut dengan instansi terkait.

h) *Investment of Korea to Indonesia in Defense*

- Indonesia menyampaikan tambahan usulan kerja sama yakni terkait investasi Korea ke Indonesia di sektor pertahanan. Pihak Korea menerima usulan tersebut dan akan disampaikan ke Kementerian Pertahanan di Korea untuk ditindaklanjuti.

2. Pertemuan *WG E-commerce*:

a. *Cooperation between Indonesian & Korean E-Commerce Platform*

- Terkait dengan sertifikasi halal, perusahaan Korea harus membayar biaya tambahan 10 ribu dollar dengan waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Selain itu, mulai oktober 2024 untuk produk pangan dan minuman juga akan diwajibkan sertifikasi halal.
- Indonesia menanggapi bahwa peraturan nasional setiap barang yang dikonsumsi dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat perizinan oleh BPOM dan sertifikasi halal, hal ini berlaku untuk seluruh negara tidak hanya Korea. Hal tersebut merupakan peraturan yang perlu dipatuhi dalam rangka penjualan online atau offline. Pihak Indonesia akan menindaklanjuti untuk membahas proses dan waktu sertifikasi.

b. *Cooperation Regarding Indonesian Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Export Products to Korea through E-Commerce*

- Pihak Indonesia telah mengusulkan proposal untuk mengembangkan perluasan produk UMKM. Indonesia mengusulkan inisiatif untuk memfasilitasi kemudahan mekanisme ekspor ke Korea serta pelatihan dari praktisi Korea dalam bentuk

sharing knowledge dan *capacity building* termasuk strategi-strategi memanfaatkan *e-commerce* di kedua negara.

- Korea mengusulkan untuk membentuk *working group* khusus termasuk dengan Indonesia Trade Promotion Center (ITCP) guna membahas lebih teknis dan lebih mengetahui kebutuhan konsumen dalam negeri masing-masing.
- Pihak Indonesia mengusulkan agar tidak terjadi tumpang tindih maka sebaiknya dilaksanakan dalam bentuk FGD karena *working group e-commerce* sudah ada.

c. *Adjustment for E-Commerce Personal Import Duty-free Limit and Import Tariff*

- Sejak tahun 2019, nilai pabean barang kiriman yang diimpor turun dari 7 dolar sampai 3 dolar, sehingga produk dari Korea yang lebih dari 3 dolar dikenakan bea masuk 7,5%. Termasuk produk pakaian dan aksesoris dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Pada bulan April yang akan datang juga akan diimplementasikan peningkatan PPN dari 10 % menjadi 11% sehingga produk *fashion* diperkirakan akan sulit bersaing di pasar Indonesia. Korea mengajukan untuk perdagangan *e-commerce* skala pajak bisa dipulihkan menjadi 7 dolar.
- Indonesia menanggapi bahwa pada pertemuan JCEC tahun 2020, telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa aturan perpajakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019 (199/PMK.010/2019) tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman yang telah berlaku pada 30 Januari 2020. Dalam aturan tersebut besaran nilai yang sebelumnya 7 dolar menjadi 3 dolar per pengiriman. Ketentuan ini dikenakan pada semua barang untuk menciptakan *fair competition* termasuk peningkatan PPN dari 10% menjadi 11%.
- Pihak Korea menyampaikan bahwa perubahan aturan bea masuk dan pajak tersebut menjadi beban untuk perusahaan korea yang perlu dipertimbangkan.

d. *Building Indonesia-Korea Center of Excellence for Digital Start-up Development*

- Indonesia menyampaikan inisiatif untuk memperkuat *startup* kedua negara. Inisiatif ini tidak hanya meliputi bangunan fisik namun juga untuk memaksimalkan pengembangan ekosistem *start up*.
- Proposal ini adalah satu dari tiga yang sudah diimplementasikan oleh kedua negara secara teknis dijalankan oleh BRIN Indonesia dan Science and Technology Policy Institute (STEPI) Korea. Kegiatan pertama yang telah dilakukan adalah *joint workshop* pada November 2021. Workshop ini bertujuan memetakan potensi ekosistem *startup* masing-masing negara dan rencana *sharing best practice*. Rencana selanjutnya menyusun report dari hasil penelitian yang akan dipublikasikan pada 2022.
- Indonesia mengusulkan pengembangan ekosistem *startup* dengan peningkatan investasi, menyusun *roadmap* untuk *center of excellence* dan melaksanakan *pilot project* pada 2023 serta peningkatan *capacity building* di bidang *start up*.
- Pihak Korea menanggapi bahwa pembahasan e-commerce juga aktif dibahas di ASEAN termasuk pembuatan *roadmap* dalam ASEAN-Korea di bidang e-commerce. Terkait *capacity building* korea memiliki center di Jakarta. Adapun terkait investasi, di Korea telah dibentuk *Global Fund* untuk UKM dan akan disalurkan melalui Kejora Ventures di Indonesia.

e. *Indonesia-Korea Telemedicine Service Cooperation*

- Indonesia menyampaikan dengan adanya pandemi semakin mendorong *contactless services* termasuk pada sektor kesehatan. Indonesia berharap mendapat *sharing knowledge* dari Korea namun belum mendapat respon pihak Korea terkait proposal ini.
- Adapun usulan yang diajukan Indonesia yaitu Indonesia siap bekerja sama dalam sektor *telemedicine*, dalam hal ini untuk bertukar informasi, *best practice*, aspek regulasi, standar

kesehatan dan data termasuk *startup* layanan Kesehatan. Indonesia juga mengajukan kolaborasi bantuan sosial, mendorong kerja sama pengembangan teknologi *internet of things*, *artificial intelligence*, *cloud computing*, pengembangan features *telemedicine*.

- Setelah pandemi diharapkan dapat dilaksanakan kerja sama *medical tourism*. Selain itu juga meningkatkan kerja sama desain produk digital Korea untuk mempromosikan gerakan hidup sehat dan menggunakan aplikasi *telemedicine* di Indonesia.
- Pihak Korea berharap dapat mendapatkan informasi spesifik proyek-proyek yang dibutuhkan Indonesia. Terkait Pendidikan tenaga medis, *Korea Medical Academy* memberi kesempatan pelatihan secara online.
- Indonesia meminta respon tertulis atas proposal-proposal yang diajukan Indonesia dan Korea akan mengirimkan melalui Kedubes Korea di Indonesia.

3. Pertemuan *WG Industrial Cooperation*:

- a. Korea juga menyampaikan bahwa Hyundai akan mulai memproduksi mobil Ioniq 5 tahun ini di Indonesia dan menyatakan ketertarikannya untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan event-event G20 di Indonesia. Pihak Indonesia menyampaikan bahwa kebijakan terkait tersebut sedang dalam proses pembahasan dan akan segera difinalisasi. Indonesia menyambut baik terkait rencana produksi Ioniq 5 dan keinginan Hyundai untuk berpartisipasi dalam G20.

- b. *Cooperation in the Field of Micro Electric Vehicles*

Korea menyampaikan bahwa kendaraan listrik mini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dapat mendukung peralihan Indonesia menuju energi terbarukan.

Pihak Indonesia menyambut baik usulan ini dan sedang mengkaji peluang kerja sama dalam pengembangan kendaraan listrik mini dengan Korea.

c. *Lotte Chemical Expansion of Petrochemical Plant*

Korea meminta dukungan pemerintah Indonesia terkait kebijakan insentif fiskal (termasuk pembebasan bea masuk impor peralatan pabrik) dan fasilitasi TKA professional dalam pembangunan pabrik petro chemical Lotte.

Indonesia akan membahas hal ini dengan Kementerian Keuangan dan satgas COVID-19 untuk dapat menyampaikan tanggapan resmi kepada Korea.

d. *POSCO-Krakatau Steel Joint Steel Project*

Perwakilan POSCO Korea mengapresiasi dukungan Pemri terhadap POSCO dan mengharapkan Pemri untuk tetap mendukung perkembangan industri baja Krakatau-Posco ke depannya.

e. *Cooperation in the Shipbuilding Industry*

Indonesia mengusulkan adanya kerja penelitian dan pengembangan serta *capacity building* di sektor pembangunan kapal dengan kerumitan tinggi seperti industri kapal tanker minyak dan kapal *crane*. Pihak Korea meminta Indonesia untuk dapat menyampaikan proposal detail kerja sama sehingga dapat dipelajari dan dibahas secara internal oleh pihak Korea.

f. *Discussion on Korea-Indonesia Start-up Cooperation Project*

Pihak Indonesia menyampaikan usulannya terkait kerja sama peningkatan kapasitas, internship serta dukungan investasi dan promosi untuk *start-up* industri Indonesia.

Pihak Korea menyampaikan bahwa telah ada *Green Business Center* di Jakarta yang dikembangkan oleh Korea. Bentuk fasilitas yang dibutuhkan oleh *start-up* sebagaimana diminta telah ada di center tersebut.

Selain itu, Pihak Indonesia mengusulkan untuk adanya kerja sama dalam pengembangan *start-up* terkait teknologi semi konduktor.

Pihak Korea meminta detail usulan kerja sama terkait ini dapat disampaikan untuk dipelajari lebih lanjut.

g. *Trade And Investment Vitalization through Excavation and Execution of Technology Transfer*

Indonesia mengapresiasi telah dibentuknya *Machine Tools Technical Center* kerja sama dengan Korea di ITB Bandung. Untuk berikutnya Indonesia berharap kerja sama transfer teknologi tersebut dapat dikembangkan ke sector teknologi pertanian dengan dibentuk pusat studi dan penelitian mesin pertanian di IPB Bogor.

Pihak Korea menyambut baik masukan ini dan meminta detail kerja sama dapat disampaikan secara formal kepada MOTIE Korea untuk dibahas bersama.

h. *The Supply Chain Cooperation between Indonesia and Korea*

Dalam pertemuan ini Korea menyampaikan dua usulan kerja sama baru salah satunya terkait kerja sama rantai pasok perdagangan dan industri. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut atas kerja sama pengadaan urea dan distribusinya ke Korea pada akhir 2021.

Pihak Indonesia akan mendalami proposal kerja sama baru ini sebelum menyampaikan tanggapan kepada Korea.

i. *The Secondary Battery Cooperation*

Usulan kerja sama baru ini terkait dengan rencana investasi LG Energy Solution bekerja sama dengan PT. Antam pada industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Pihak Korea meminta percepatan proses evaluasi nilai dan pembangunan pertambangan LG ES yang tengah dalam proses.

Selain itu Korea juga meminta dukungan Indonesia dalam kebijakan terkait insentif pajak industri baterai serta pembangunan pembangkit listrik untuk keperluan pertambangan.

j. Pihak Indonesia akan mendalami proposal kerja sama baru dan memahasnya secara internal dengan K/L terkait sebelum menyampaikan tanggapan kepada Korea.

Selain kerja sama dalam empat WG tersebut, terdapat empat MoU yang akan menjadi *deliverables* pada pertemuan Tingkat Menteri JCEC yaitu:

- *MOU on Special Economic Zone* yang rencananya akan ditandatangani oleh Menko Perekonomian dan MOTIE Korea;
- *MOU on Automotive* yang rencananya akan ditandatangani oleh Institut Otomotif Indonesia dan KATECH Korea;
- *MOU on Charging System for e-Vehicle* akan ditandatangani oleh Kemen ESDM dengan *Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)*;
- MOU payung Kerja Sama *Electric Vehicle* antara BAPPENAS dan MOTIE.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pelaksanaan pertemuan SOM JCEC ke-2 RI-ROK dilakukan secara hybrid, dimana seluruh Delegasi RI berkumpul di satu tempat sedangkan Delegasi Korea melakukan pertemuan melalui zoom meeting. Hal ini dilakukan mengingat masih adanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Korea.

Walaupun dilakukan secara virtual, namun pertemuan SOM JCEC ini tetap berjalan dengan lancar dan produktif serta menghasilkan kesepakatan kedua Negara. Kesepakatan dalam setiap WG ini akan dibahas dan dilaporkan dalam pertemuan tingkat Menteri JCEC RI-ROK.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Karena rapat koordinasi persiapan pertemuan SOM JCEC dilakukan secara virtual dan pertemuan SOM JCEC ke-2 RI-ROK dilakukan secara hybrid dengan menggunakan teknologi zoom meeting maka pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien, serta frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Karena rapat koordinasi persiapan pertemuan SOM JCEC dilakukan secara virtual dan pertemuan SOM JCEC ke-2 RI-ROK dilakukan secara *hybrid* maka efisiensi penggunaan anggaran dapat ditekan.

2. Kesepakatan pada *the 2nd Ministerial Meeting Joint Committee on Economic Cooperation Republic of Indonesia - Republic of Korea*

Pertemuan *Joint Committee on Economic Cooperation* (JCEC) Indonesia – Korea Selatan merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman Kerja Sama Ekonomi yang ditandatangani pada saat kunjungan Bapak Presiden RI ke Korea Selatan tahun 2018. Pertemuan MM JCEC RI-ROK telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022 di Hotel Borobudur Jakarta. Pada pertemuan JCEC Indonesia – Korea, telah dibahas dan disepakati kerja sama ekonomi yang terbagi dalam empat kelompok kerja (*working group*) yaitu perdagangan dan investasi; industri; energi dan sumber daya mineral; dan *e-commerce*.

Gambar 3.6 Pertemuan *Ministerial Meeting* JCEC RI-Korea - Jakarta, 22 Februari 2022



Hasil-hasil konkret forum JCEC di antaranya adalah pembentukan *Indonesia Business Cooperation Center*, kerja sama pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik, kerja sama investasi bio-nano, kerja sama restorasi wilayah tambang di Indonesia, kerja sama industri kapal dengan kerumitan tinggi seperti kapal tanker dan kapal *crane*, dan pengembangan pusat transfer teknologi *Machine Tools Technical Center* di ITB Bandung. Pada pertemuan juga dibahas isu-isu terkait dukungan pada investasi Hyundai, Posco, Lotte Chemical dan LX Energy Solution di Indonesia, pengembangan start-up industri, industri semi-konduktor dan mobil listrik mini, akses pasar produk buah terutama mangga ke Korsel, kerja sama fasilitasi ekspor UMKM melalui *e-commerce*, pembentukan *Indonesia - Korea Center of Excellence* untuk kolaborasi start-up dan kerja sama sektor *telemedicine*, kerja sama proyek demonstrasi *EV charging*, sharing kebijakan pada pengembangan infrastruktur *smart grid* dan *EV charging*,

pengembangan hidrogen dan pembangkit listrik tenaga air, serta kerja sama pengembangan teknologi *shale gas*-CO₂ EGR.

Gambar 3.7 Agreed Minutes The 1st Ministerial Meeting of the Korea – Indonesia on joint Committee on Economic Cooperation yang ditandatangani pada 22 Februari 2022 di Jakarta



Pada pertemuan JCEC juga telah ditandatangani beberapa MoU kerja sama pemerintah (G to G) maupun swasta (B to B). MoU G to G yang ditandatangani yaitu:

1. *MoU on Cooperation Regarding Indonesia Special Economic Zones and Korean Free Economic Zones* yang kami tanda tangani bersama dengan Menteri MOTIE;
2. *MoU regarding Cooperation on Pilot Projects of Charging System for E-Vehicle* yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM dengan *Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)*;
3. *MoU on Critical Mineral Supply Chain* antara Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM dan *Director General for Resources Industry Policy, MOTIE*.

Selain itu pada kegiatan forum bisnis, Menko Perekonomian bersama MOTIE juga menyaksikan penandatanganan MoU kerja sama B to B, yaitu sebagai berikut:

1. *MoU on Joint Study Related to Potential Cooperation in Hydrogen, CCS Development, LNG Infrastructure & Terminal Utilization and LNG Businesses Development Opportunities in Korea antara PGN and SK E&S;*
2. *MoU on Cooperation in Human Resources Development* yang ditandatangani oleh *Indonesian Chamber of Commerce and Industry* dengan *Korea Chamber of Commerce and Industry*;
3. *MoU to Enhance Industrial Technology Cooperation in the Electric Vehicle (4W, 3W, 2W, Bus, Train)* yang ditandatangani oleh Presiden Institut Otomotif Indonesia dengan Presiden *Korea Automotive Technology (KATECH)*.

Kemudian pada tanggal 15 November 2022 disela-sela acara KTT G20 di Bali dilakukan penandatanganan *Amendment to Memorandum of Understanding between the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea on Economic Cooperation*, dimana perubahan mendasar dalam MoU tersebut adalah mengganti nomenklatur *e-commerce* menjadi ekonomi digital (*digital economy*).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor kedekatan, kepercayaan dan kemitraan yang sangat erat antara kedua Negara menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan pertemuan MM JCEC RI-ROK ke-1.

Program-program kerja sama yang menguntungkan kedua Negara dan disepakati dalam forum MM JCEC menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kerja sama bilateral RI-ROK.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Karena rapat koordinasi persiapan pertemuan MM JCEC dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi zoom meeting maka pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Karena rapat koordinasi persiapan pertemuan MM JCEC dilakukan secara virtual sedangkan pertemuan MM JCEC ke-1 RI-ROK dilakukan secara fisik maka efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih ditekan.

3. Penandatanganan MoU terkait Ekonomi Digital RI-Korea dalam Rangkaian KTT G20

Pada capaian ini terdapat perubahan target karena menyesuaikan prioritas pimpinan pada tahun ini yaitu target semula adalah pelaksanaan Pertemuan ke-5 TFT Baja RI-Korea diganti menjadi Penandatanganan MoU terkait Ekonomi Digital RI-Korea dalam Rangkaian KTT G20. Pada tanggal 14 November 2022 telah dilaksanakan penandatanganan MoU terkait perluasan kerja sama ekonomi pada sektor digital ekonomi antara Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea (MOTIE). Penandatanganan MoU tersebut dilakukan pada acara *Indonesia-Korea Business Roundtable* dalam rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 Presidensi Indonesia di Bali. MoU ini akan menjadi payung hukum kerja sama bilateral RI-Korea Selatan dalam bidang ekonomi dan perdagangan khususnya bidang ekonomi digital.

Gambar 3.8 Amendment to MoU terkait Ekonomi Digital RI-Korea



Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor ini sebagai salah satu keunggulan dalam menunjang transformasi ekonomi. Pada tahun 2021 terdapat 21 juta konsumen ekonomi digital di Indonesia dengan pertumbuhan yang terus meningkat dengan signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Tercatat 72 persen konsumen ekonomi digital baru ada di wilayah pedesaan. Selain itu, Indonesia juga memiliki tingkat pemanfaatan ekonomi digital yang tinggi, dengan 98 persen pedagang telah menggunakan pembayaran digital dan 59 persen memanfaatkan pembiayaan digital.

Dengan MoU baru tersebut, kerja sama sektor ini akan memiliki wadah pembahasan antara pemerintah dan sektor swasta Indonesia dan Korea selatan melalui *Joint Committee on Economic Cooperation* (JCEC). Forum ini dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan. Terdapat empat sektor utama dalam pembahasan forum ini yaitu, perdagangan dan investasi, industri, energi sumber daya mineral dan ekonomi digital.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Potensi yang sangat besar yang dimiliki Indonesia di sektor ekonomi digital menjadi salah satu faktor keberhasilan terlaksananya penandatanganan MoU dibersamai dengan rangkaian pertemuan KTT G20 menjadi *deliverable* yang baik bagi Indonesia dan Korea.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rapat koordinasi penyusunan draft MoU serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait dilakukan dengan menggunakan teknologi zoom meeting maka pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penandatanganan MoU terkait ekonomi digital RI-Korea dilaksanakan dalam rangkaian pertemuan KTT G20 Presidensi Indonesia di Bali maka efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih ditekan.

4. Kesepakatan pada *the 2nd Ministerial Meeting Joint Committee on Economic Cooperation Republic of Indonesia - Republic of Korea*

Menko Perekonomian melakukan kunjungan ke Jepang pada tanggal 25 dan 26 Juli 2022. Menko Perekonomian melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri (METI) dan Gubernur *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) Jepang pada tanggal 25 Juli 2022. Pada tanggal 26 Juli 2022, Menko Perekonomian melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang (MAFF), Tatsuo Fukuda dan Taro Kono (pimpinan Partai LDP), Ketua KEIDANREN merangkap CEO Marubeni, CEO Mitsubishi serta CEO Toyota. Menko Perekonomian juga turut mendampingi Bapak Presiden dalam kegiatan kunjungan ke Jepang yaitu: pertemuan bilateral dengan PM Jepang, pertemuan dengan JAPINDA, pertemuan dengan JBIC, KEIDANREN serta *CEO Group Meeting*.

Gambar 3.9 Kunjungan Menko Perekonomian ke Jepang, 25-26 Juli 2022



Beberapa poin penting hasil dari kunjungan Menko Perekonomian ke Jepang antara lain:

- a) Bidang Ekonomi dan Perdagangan: disepakatinya penyelesaian protokol amandemen IJEPA pada KTT G20 di Bali, disegerakannya ratifikasi dan implementasi RCEP, usulan perbaikan terhadap pilar dan konsep kerja sama IPEF serta diterimanya sertifikasi New ISPO sebagai sertifikat persyaratan *sustainability* ekspor produk sawit ke Jepang. Selain itu, kami sampaikan usulan perluasan akses pasar untuk produk Indonesia

diantaranya tuna kaleng, kopi, produk laut serta buah tropis seperti mangga, nanas dan pisang.

b) Bidang Investasi:

- Komitmen Mitsubishi Motors untuk menjadikan Indonesia sebagai *hub* ekspor kendaraan, terutama untuk memproduksi kendaraan yang berbasis EV (Expander EV). Rencana tambahan investasi IDR 10 triliun dari 2022 s/d 2025;
- Toyota Group merencanakan tambahan investasi IDR 27,1 triliun 2022-2026. (Sejak pertemuan Presiden RI dengan CEO Toyota di Osaka 2019 telah investasi sebesar IDR 14 triliun s/d 2021);
- Komeda Coffee, jaringan kedai kopi Jepang, sebesar 10,1 miliar rupiah mulai beroperasi di Bali tahun depan

c) Bidang Infrastruktur: kerja sama untuk proyek-proyek strategis seperti Pelabuhan Patimban, MRT Jakarta dan *Bekasi Proving Ground* dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu juga kerja sama pendanaan proyek Kereta Semi-Cepat Jakarta-Surabaya.

d) Bidang Kesehatan: rencana investasi baru bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan dan pusat *stem cell* oleh Rise Holding Ltd di Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan di Bali senilai USD 25 juta.

e) Bidang Energi: kerja sama akses *clean cooking* dan listrik; pembiayaan energi yang berkelanjutan terutama memastikan ekosistem pendanaan hijau melalui pertukaran praktik terbaik serta mengatasi disparitas pendanaan; transfer teknologi energi bersih melalui pengembangan *smart grid*, pembangunan *Electric Vehicle* dan integrasi *energy storage*; kerja sama Jepang pada *innovative technology* seperti hidrogen dan amonia.

Gambar 3.10 Laporan Menko Perekonomian kepada Presiden RI terkait kunjungan ke Jepang pada tanggal 25 dan 26 Juli 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Faktor kedekatan, kepercayaan dan kemitraan yang sangat erat antara kedua Negara menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan Kunjungan Menko Perekonomian ke Jepang.

Program-program kerja sama yang menguntungkan kedua Negara menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kerja sama bilateral RI-Jepang.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rapat koordinasi persiapan kunjungan Menko Perekonomian dilakukan di Kantor Kemenko Perekonomian dan koordinasi dengan KBRI Tokyo dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi zoom meeting. Kunjungan Menko Perekonomian dapat berjalan dengan lancar karena koordinasi dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rapat koordinasi persiapan kunjungan Menko Perekonomian dilakukan di Kantor Kemenko Perekonomian dan koordinasi dengan KBRI Tokyo dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi *zoom meeting* maka efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih ditekan.

5. Kesepakatan pada *the 10th Senior Official Meeting 6 Working Group RI - Singapura*

Pertemuan SOM 6 WG RI - Singapura yang ke-10 telah terlaksana pada tanggal 10 Juni 2022 bertempat di Sheraton Hotel Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Pertemuan ini diselenggarakan secara luring dihadiri oleh seluruh perwakilan WG kedua negara. Dalam pelaksanaan SOM 6 WG kali ini, dilakukan kegiatan kunjungan lapangan oleh kedua *Co-Chairs* bersama Delri dan delegasi Singapura, setelah pelaksanaan *plenary meeting*. Kunjungan dilakukan ke beberapa tujuan wisata di kepulauan Belitung untuk melihat langsung peluang investasi dan pariwisata di Belitung. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini tidak hanya meningkatkan peluang bagi masuknya investasi asal Singapura ke Belitung di sektor pariwisata, tapi juga menambah kedatangan wisatawan mancanegara asal Singapura. Hal ini bisa diangkat dalam bidang kerja sama *Cruise Line* dan *Twinning Destinations* pada WG Pariwisata.

Gambar 3.11 *Senior Officials' Meeting of the Six Bilateral Economic Working Groups (SOM 6WG)*
Republik Indonesia – Republik Singapura ke-10 di Belitung, Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2022

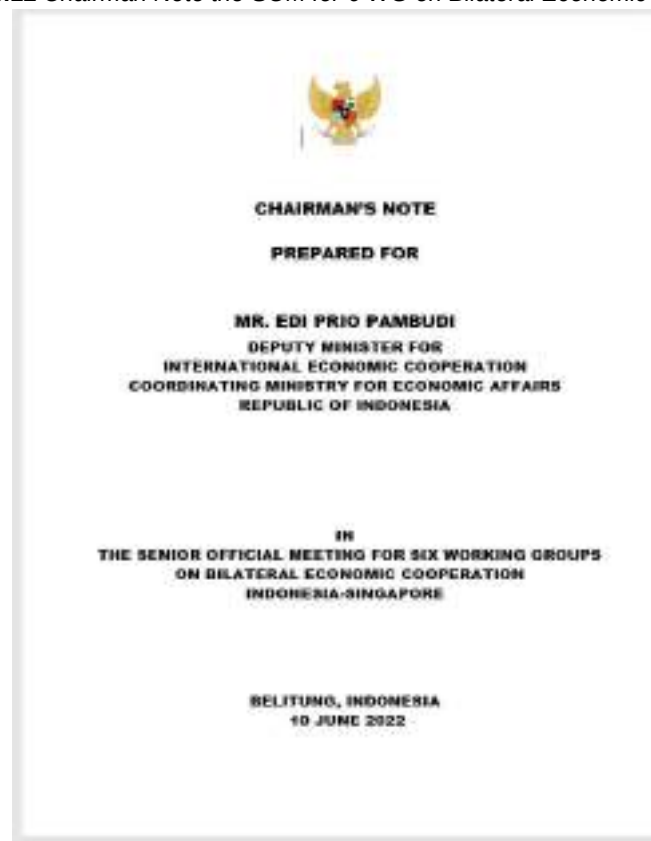


Selain itu, sektor energi baru terbarukan (EBT) dan berkelanjutan (*sustainability*) merupakan salah satu bidang kerja sama kedua negara yang menjadi fokus perhatian. Seperti pada WG BBK dan KEK lainnya, dapat dilaporkan terdapat investasi baru sektor EBT di wilayah Batam sebesar USD 9.2 miliar. Untuk saat ini, Kementerian ESDM sedang merumuskan regulasi terkait EBT tersebut.

Selain daripada itu pada WG Investasi, dalam bidang infrastruktur dan *sustainability*, terdapat perkembangan positif terhadap 5 (lima) proyek infrastruktur publik yang diidentifikasi pada tahun 2021.

Co-chair RI menyampaikan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren positif terhadap pemulihan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01% pada kuartal pertama tahun 2022 di tengah tekanan kondisi geopolitik dunia. Pertumbuhan didukung oleh tingkat inflasi stabil pada 3,47% yoy pada April 2022 serta indikator utama lainnya yang juga menunjukkan tren positif diantaranya peningkatan PMDN dan PMA serta peningkatan indeks PMI, CCI dan penjualan ritel. Adapun penyelenggaraan pertemuan di Belitung dimaksudkan untuk turut memberikan kesempatan delegasi Singapura untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata di Indonesia yang memiliki potensi untuk digarap dari sisi pariwisata dan investasi.

Gambar 3.12 *Chairman Note the SOM for 6 WG on Bilateral Economic Cooperation*



Co-Chair Singapura menyampaikan apresiasi kepada pemri yang telah memfasilitasi pertemuan SOM di Belitung dan untuk pertama kalinya melakukan pertemuan tatap muka antara kedua *Co-Chair* sejak pandemi. Dalam situasi pandemi yang telah dilalui, menjadi penting untuk tetap menjaga kerja sama yang erat antara kedua negara. Sehingga Kerja Sama 6WG merupakan platform yang penting untuk terus melakukan koordinasi dalam upaya memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan serta menghasilkan output yang konkret dan nyata. *Co-Chair* Singapura memandang bahwa terdapat minat yang besar dari perusahaan asing terhadap peluang investasi di Kawasan Asia Tenggara yang perlu dimanfaatkan oleh kedua negara. Singapura juga menyampaikan dukungan terhadap tema Presidensi G20 Indonesia, yaitu “*Recover Together, Recover Stronger.*”

Adapun hasil kesepakatan pada SOM 6WG adalah sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian selaku Ketua *Working Group* Kerja Sama Ekonomi BBK dan KEK Lainnya dari pihak RI menyampaikan laporan WG BBK berdasarkan pertemuan WG yang dilaksanakan pada Mei 2022. Adapun hasil yang dilaporkan adalah sebagai berikut:
 - i. Terkait RPP *BBK Development Master Plan*, telah dilakukan proses harmonisasi di Kemenkumham dan saat ini menunggu keputusan Presiden RI.
 - ii. Terkait pengembangan Jembatan Batam-Bintan, studi kelayakan sudah dilakukan dan sekarang dalam proses negosiasi antara Kementerian PUPR dan AIIB terkait pendanaan pemerintah untuk proyek tersebut.
 - iii. Dalam sektor energi baru terbarukan (EBT), terdapat investasi baru di wilayah Batam sebesar USD 9.2 miliar. Saat ini Kementerian ESDM sedang merumuskan regulasi terkait EBT.
 - iv. Dalam upaya akselerasi investasi di Kawasan BBK, sedang dilakukan upaya *debottlenecking* terhadap izin berusaha melalui Perpres No. 41 tahun 2021.
 - v. Dari Januari hingga April 2022, EDB telah memfasilitasi komunikasi antara stakeholder di BBK dengan 20 perusahaan.

Sebagai salah satu hambatan yang disampaikan, yaitu pembuatan visa bisnis memasuki wilayah BBK, pemri sedang dalam proses memberikan fasilitas *visa on arrival* (VOA) sebagaimana diberikan kepada wisatawan yang memasuki wilayah BBK.

- vi. Nongsa Digital Park (NDP) terus berkembang didukung oleh komunitas bisnis kedua negara dan kini memiliki kurang lebih 1300 jumlah pegawai yang bekerja untuk kurang lebih 250 perusahaan lokal dan asing. Terdapat 3 investasi data center di Nongsa, yaitu:
 - 40 MW Tier 4 oleh Kemkominfo RI
 - 26 MW Tier 3 oleh Data Center First
 - 28 MW Tier 3 oleh GDS Holdings
 - vii. Menindaklanjuti *Joint Study on Singapore-BBK Logistics Ecosystem* adalah pembahasan hasil studi dan pembahasan MoU antara PSA dengan KEK Batam terkait pengembangan logistik.
- b. *Deputy Director Southeast Asia, Enterprise Singapore* mewakili Ketua *Working Group* Investasi dari pihak Singapura menyampaikan laporan WG Investasi sebagai berikut:
- i. WG Investasi akan fokus terhadap 3 (tiga) area dalam upaya pemulihan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan yaitu:
 - Infrastruktur dan *sustainability*
 - Kesehatan
 - Ekonomi Digital
 - ii. Dalam bidang infrastruktur dan *sustainability*, terdapat perkembangan positif terhadap 5 (lima) proyek infrastruktur publik yang diidentifikasi oleh IWG pada tahun 2021.
 - iii. Kendal Industrial Park (KIP) terus menarik minat investasi dan berkontribusi pada industri manufaktur Indonesia. Jumlah *tenants* di KIP sejumlah 74 perusahaan dengan nilai investasi sekitar USD 1,7 miliar dengan potensi pembukaan lapangan kerja sebanyak 12.030.

- iv. Dalam bidang kesehatan, sejumlah penyedia layanan kesehatan Singapura tertarik berinvestasi di sektor kesehatan Indonesia. Selanjutnya akan difasilitasi MoU dalam bidang investasi antara Kemenkes RI dengan beberapa perusahaan layanan kesehatan Singapura, antara lain Raffles Medical Group (RMG) dan TalkMed.
 - v. Dalam bidang ekonomi digital, Indonesia dan Singapura sudah bermitra dalam berbagai bidang, diantaranya regulasi digital, perbankan digital, infrastruktur digital serta pendidikan dan pelatihan. WG Investasi berencana untuk memperdalam kerja sama dalam ekonomi digital, khususnya dalam bidang yang meningkatkan nilai Indonesia sebagai tujuan investasi diantaranya melalui pengembangan *smart city* dan *industrial park* serta penguatan kapasitas digital perbankan Indonesia. Selebihnya, terus mendorong *cross-border technology sharing* dengan memanfaatkan platform inovasi dan teknologi milik Singapura, diantaranya forum SWITCH, ITAPI dan Sustainability Tech Showcase.
- c. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan selaku Ketua *Working Group* Ketenagakerjaan dari pihak RI menyampaikan laporan WG Ketenagakerjaan sebagai berikut:
- i. WG Ketenagakerjaan fokus terhadap 4 (empat) area kerja sama yaitu:
 - Kolaborasi antar institusi pendidikan tinggi, lembaga vokasi, dan kementerian terkait pengembangan SDM
 - Kolaborasi pengembangan *tech talent*
 - Kolaborasi dalam pembangunan kapasitas dan pertukaran pelatihan antara Kemnaker RI dengan *Ministry of Manpower* Singapura
 - Kolaborasi dalam *Regional Center for the Future of Work* (RCFW)
 - ii. Dalam bidang pengembangan SDM, terdapat 11 kesepakatan MoU baru dengan jumlah keseluruhan 36 MoU dan *exchange program*, mencakup berbagai bidang, diantaranya *supply chain*

management, social innovation, data analytics, tourism and hospitality, kepemimpinan, kebudayaan dan kesehatan.

- iii. Kemdikbud RI dan *Ministry of Education* Singapura sedang memfinalisasi MoU terkait *Singapore-Indonesia Youth Mobility Agreement* yang bermaksud memfasilitasi program *cross-border internship* selama 6 bulan untuk 300 siswa Indonesia dan Singapura.
 - iv. Dalam bidang pengembangan *tech talent*, lembaga pendidikan tinggi Singapura tertarik berkolaborasi dengan lembaga pendidikan di Indonesia dalam pengembangan dan penyelenggaraan program ToT. Pada tingkat lembaga pendidikan saat ini terdapat beberapa kerja sama yang sedang berjalan diantaranya:
 - ITB - Singapore Management University (*Software Analytics*)
 - ITB - Singapore Management University (*Student Exchange Programme*)
 - v. Dalam bidang pembangunan kapasitas dan pelatihan, Civil Service College (CSC) Singapura sudah menyampaikan proposal awal untuk menyelenggarakan *Virtual Programme* bagi pegawai Kemnaker terkait *digital transformation*. Program akan dijalankan oleh CSC didukung Temasek Foundation.
 - vi. Terkait *Regional Center for the Future of Work* (RCFW), telah dilaksanakan Konferensi ASEAN Future of Work setiap tahunnya dan terakhir dilaksanakan pada Mei 2022. Sekjen Kemnaker RI turut berpartisipasi sebagai pembicara pada 2 (dua) kegiatan.
- d. *Senior Director (Air & Sea) Ministry of Transport* Singapura mewakili Ketua *Working Group* Perhubungan dari pihak Singapura menyampaikan laporan WG Perhubungan sebagai berikut:
- i. Konektivitas antara Singapura dan Indonesia telah meningkat secara signifikan, terlihat dari kenaikan jumlah penumpang penerbangan mingguan sebesar 300% pada Mei 2021 dibandingkan dengan Mei 2022 dan jumlah penumpang pelayaran *ferry* sebesar 725% pada periode yang sama.

- ii. Kolaborasi dalam bidang perhubungan tetap terjalin diantaranya melalui:
 - Kesepakatan FIR yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan kedua negara pada 25 Januari 2022
 - Perpanjangan MoU dalam Program Pelatihan antara DGST dan MPA selama 3 (tiga) tahun, yang sudah terjalin selama 17 tahun dan telah menjalankan lebih dari 100 program dan workshop untuk lebih dari 1600 pejabat.
- iii. Terdapat kerja sama baru lintas sektor perhubungan pemerintah dan sektor perhubungan swasta yaitu:
 - Pelatihan untuk sebanyak 1300 orang oleh Singapore Aviation Academy
 - Partisipasi pejabat tinggi pemri dalam Singapore Airshow dan Changi Aviation Summit di Singapura
 - MoU antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines dalam hal kerja sama komersil dan peluang pertumbuhan
- e. Perwakilan dari Sekditjen Hortikultura Kementerian Pertanian mewakili Ketua *Working Group* Agribisnis dari pihak RI menyampaikan laporan WG Agribisnis sebagai berikut:
 - i. Pada *Agriculture Sub Working Group* dilaporkan sebagai berikut:
 - Merencanakan kegiatan promosi *in-store* sebanyak 3 (tiga) kali akan dilakukan di Singapura pada tahun 2021-2025, dengan rencana pelaksanaan pertama kali pada *2nd Half* tahun 2022.
 - Indonesia akan melakukan studi kelayakan mengenai “*viability of establishing wholesale presence*” di Singapura, untuk diselesaikan pada tahun 2023/2024. Saat ini dalam proses review ruang lingkup oleh pihak Indonesia.
 - Fasilitasi pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali antara *e-grocer* Indonesia dengan mitra bisnis Singapura untuk membahas fasilitasi akses pasar. Saat ini dalam proses identifikasi *e-grocer* dari pihak Indonesia.

- ii. Pada *Seafood Sub Working Group*, dilaporkan sebagai berikut:
 - Merencanakan 5 (lima) kegiatan fasilitasi bisnis dalam bentuk *info sharing session* atau *business matching* untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2025. Saat ini sudah dilaksanakan kegiatan fasilitasi bisnis sebanyak sekali secara virtual pada September 2021 dengan 45 peserta. Direncanakan sesi *business matching* pada 2nd Half tahun 2022.
 - Pelaksanaan 2 (dua) program pembangunan kapasitas terkait rantai pasok *seafood* untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2025. Saat ini dalam proses penentuan topik oleh pihak Indonesia.
- iii. Pada *SPS (Import and Export Requirement) Sub Working Group*, dilaporkan sebagai berikut:
 - Merencanakan 2 (dua) *information exchange session* untuk daging dan produk daging dilaksanakan pada tahun 2021-2025 dan 2 (dua) kegiatan fasilitasi bisnis dalam bentuk *info sharing session* atau *business matching* untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2025. Sudah terlaksana *information sharing session* sebanyak sekali pada tanggal 30 Agustus 2021, terkait persyaratan impor Indonesia terhadap *processed meat products* dan persyaratan impor Singapura terhadap *fresh pork*.
 - Rencana pengembangan sistem *e-certification*, diselesaikan tahun 2023.
 - Pelaksanaan program pembangunan kapasitas terkait *workshop fish disease diagnostic* yang telah dilaksanakan. Sudah terlaksana *workshop* 3 hari program pembangunan kapasitas secara virtual pada tanggal 16-18 November 2021 dengan 150 peserta dari Indonesia.
 - Rencana pelaksanaan *study trip* ke Singapura dalam rangka mengunjungi *ornamental fish quarantine facilities* dilaksanakan hingga 2023.

f. *Executive Director (International Group HQ & Oceania), Singapore Tourism Board* mewakili Ketua *Working Group* Pariwisata dari pihak Singapura menyampaikan laporan WG Pariwisata sebagai berikut:

- Pada bidang *Cruise* dilaporkan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan diskusi sejak tahun 2021 dalam rangka akselerasi *port call resumption* diantaranya melalui harmonisasi protokol *cruise* dan kemudahan persyaratan *travel entry* ke pelabuhan di Indonesia. Pada tanggal 1 Juni, Menteri Pariwisata RI bertemu dengan perusahaan *cruise line* Royal Caribbean/Silversea and Resorts World Cruises dan menyampaikan dukungan kelanjutan perjalanan *cruise ship* di lebih banyak pelabuhan di Indonesia.
 - Terdapat minat besar dari *cruise line* asing ke Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Perusahaan Silversea dan Marella Cruises milik Royal Caribbean telah menambahkan Bali sebagai salah satu destinasi pada *itinerary* kuartal ke-4 tahun 2022. *Genting Dream* Resorts World Cruises juga sedang dalam tahap diskusi dengan Bintan Resorts dan Pemprov Kepri untuk melanjutkan *port call* ke Bintan pada tanggal 2 Juli 2022.
- Pada bidang *Twinning Destination* dilaporkan sebagai berikut:
 - *Twinning Destination* dapat diawali dengan tujuan Eropa yaitu pasar Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda.
 - *Twinning Destination* di Indonesia direncanakan melalui udara dan *ferry* dengan tujuan Bali dan Bintan.
 - Terdapat potensi kolaborasi melalui *joint marketing* dan *familiarization trips*.
- Pada bidang *Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions* (MICE) dilaporkan sebagai berikut:
 - Melalui SACEOS, Singapura berkomunikasi dengan INACEB dalam rangka *sharing best practices* di tengah pandemi Covid-19.

- Akan melanjutkan pembahasan oleh Satgas MICE dipimpin oleh sektor swasta.
 - Melihat potensi pembangunan kapasitas MICE pasca pemulihan pandemi Covid-19.
- g. Pembahasan lainnya adalah terkait perkembangan perumusan *Joint Report to Leaders*, serta rencana penyelenggaraan *Ministerial Meeting* berikutnya di Singapura.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor kedekatan, kepercayaan dan kemitraan yang sangat erat antara kedua Negara menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan pertemuan SOM 6 WG RI-Singapura ke-10.

Program-program kerja sama yang menguntungkan kedua Negara dan disepakati dalam forum SOM 6 WG RI-Singapura menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kerja sama bilateral RI-Singapura.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan pertemuan SOM 6 WG RI-Singapura dilaksanakan di salah satu tujuan wisata dalam negeri Indonesia, diharapkan dengan menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan negara mitra di kawasan pariwisata dapat membangkitkan perekonomian serta kunjungan wisatawan di daerah.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam pelaksanaannya, beberapa rangkaian kegiatan sampingan dari pertemuan SOM 6 WG RI-Singapura, seperti kegiatan penampilan atraksi budaya yang disambung ramah tamah dalam kesempatan makan malam untuk seluruh delegasi pertemuan, serta transportasi untuk panitia dan peserta rapat, dilaksanakan bekerja sama dengan bantuan dari pihak pemda Belitung, sehingga bisa menghemat anggaran.

6. Kesepakatan pada *Ministrial Meeting* RI – Singapura ke-12

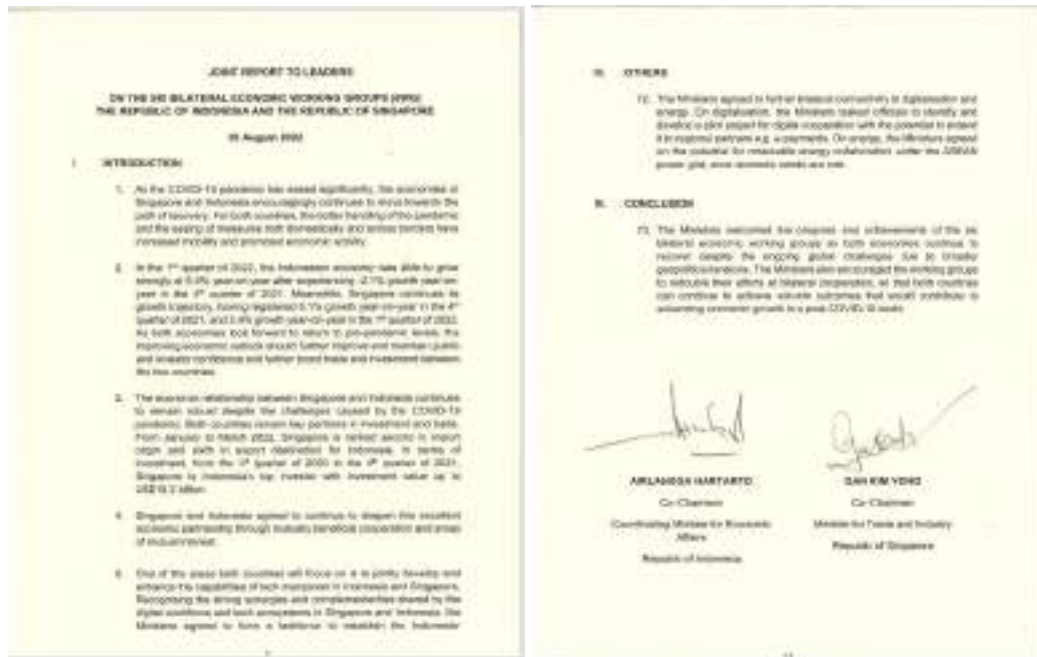
Menko Perekonomian memimpin Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan *the 12th Ministerial Meeting of of the Singapore-Indonesia Six Bilateral Economic Working Groups* (6WG MM) pada tanggal 30 Agustus 2022 di Singapura dengan didampingi anggota delegasi dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kemenko Perekonomian.

Gambar 3.13 *12th Ministerial Meeting* Singapore – Indonesia *Six Bilateral Economic Working Groups*



Kedua Menteri menyepakati untuk meningkatkan konektivitas digital dan energi antar kedua negara diantaranya melalui pembentukan *pilot project* kerja sama digital seperti e-payment yang dapat diperluas ke wilayah regional serta kerja sama energi baru terbarukan di bawah jaringan listrik ASEAN.

Gambar 3.14 Dokumen *Joint Report to Leaders* yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Singapura.



Kedua Menteri menandatangani Joint Report to Leaders sebagai laporan kepada Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura atas capaian dan perkembangan dalam kerangka kerja sama ekonomi 6WG. Terkait rencana penyelenggaraan Leaders' Retreat di Singapura, Delri menyampaikan harapan dapat terlaksana pada bulan Desember 2022, setelah pelaksanaan rangkaian pertemuan G20 dan KTT G20 di Bali.

Pada kesempatan yang sama, kedua Menteri menandatangani *Joint Declaration on Indonesia-Singapore Tech:X Programme* sebagai dasar payung kerja sama dalam pengembangan *tech talent* muda kedua negara melalui program magang di ekosistem teknologi masing-masing negara. Dalam hal ini, masing-masing negara akan membentuk Satgas Khusus untuk menyusun program kerja sama serta implementasinya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Faktor kontinuitas pertemuan bilateral kedua negara yang ditunjukkan dengan serangkaian pertemuan yang berlangsung tiap tahun, dimulai dari pertemuan di tingkat Senior Official (SOM 6 WG), kemudian di tingkat Menteri kedua negara (MM 6 WG) dan dilanjutkan dengan pertemuan pimpinan kedua negara melalui

pertemuan Leaders Retreat, telah berhasil meningkatkan perdagangan, investasi, serta kerja sama di berbagai bidang lainnya di antara kedua negara.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rapat-rapat koordinasi persiapan pelaksanaan forum Ministerial Meeting 6 WG Indonesia - Singapura dilaksanakan seluruhnya melalui rapat secara virtual melalui aplikasi zoom, sehingga dapat melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat karena memudahkan hadirnya pihak-pihak yang terlibat tanpa harus hadir langsung, terutama untuk koordinasi dengan pihak KBRI dan perwakilan Kementerian/Lembaga yang bertugas di Singapura.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rapat-rapat koordinasi persiapan forum Ministerial Meeting 6 WG Indonesia – Singapura dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi *zoom meeting* maka efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih ditekan.

7. Kesepakatan pada Sidang Komisi Bersama ke-13 RI-Rusia

Pelaksanaan *Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF)*

Pada tanggal 23 – 25 Agustus 2022, telah dilaksanakan Pertemuan ke-2 Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) RI – Rusia secara offline di Jakarta. Adapun hasil kesepakatan pada Pertemuan ke-2 WGMAF RI – Rusia adalah sebagai berikut:

- I. Kedua pihak telah bertukar informasi mengenai kebijakan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di negara masing – masing.
- II. Kedua pihak bertukar pandangan dan berdiskusi mengenai beberapa topik kerjasama potensial, di antaranya pengembangan perikanan dan budidaya perikanan yang berkelanjutan (*sustainable aquaculture*), pemberantasan IUU Fishing, rantai pasokan sumber daya dan produk perairan yang berkelanjutan, hingga partisipasi delegasi dari kedua negara dalam forum dan pameran internasional.
- III. Kedua pihak menyetujui bahwa agenda teknis terkait pertukaran informasi dan update mengenai ekspor dan impor ikan dan produk perikanan (*market access*); *quality control, hygiene, safety, and health assurance*; serta pembahasan draft Mutual Recognition Arrangement (MRA) akan didiskusikan secara terpisah pada tanggal yang disetujui oleh kedua pihak karena ketidakhadiran pihak *Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance of the Russian Federation* (Rosselkhoznadzor) pada pertemuan dimaksud.

Gambar 3.15 Pertemuan ke-2 *Working Group on Marine and Fisheries* (WGMAF) RI – Rusia (Jakarta 23-25 Agustus 2022)



- IV. Kedua pihak telah mendiskusikan draft MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan *Federal Agency for Fishery of the Russian Federation* dan mencatat kemungkinan/opsi jadwal penandatanganan MoU sebagai berikut:
 - Di sela – sela *the Fifth Global Fishery Forum and Seafood Expo* Russia pada bulan September 2022 di St. Petersburg, Federasi Rusia.
 - Di sela – sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 di Bali, Indonesia
 - Di sela – sela Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI – Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang untuk sementara direncanakan akan dilaksanakan pada semester I 2023 di Indonesia
- V. Kedua pihak sepakat untuk membentuk Joint Technical Committee sebagai platform untuk mendiskusikan, melakukan review, serta memonitor implementasi kerja sama di sektor kelautan dan perikanan.
- VI. Kedua pihak sepakat untuk menyelenggarakan Pertemuan ke-3 WGMAF RI – Rusia pada tahun 2023 di Federasi Rusia.
- VII. Protokol Pertemuan ke-2 WGMAF RI – Rusia akan ditandatangani oleh kedua pihak secara sirkuler melalui saluran diplomatik.

Gambar 3.16 Pertemuan ke-2 Working Group on Banking and Finance (WGBF) RI – Rusia

Pelaksanaan *Working Group on Banking and Finance* RI-Rusia

Pada tanggal 5 Oktober 2022, telah diselenggarakan Pertemuan ke-2 *Working Group on Banking and Finance* (WGBF) RI – Rusia secara fisik di Jakarta. Adapun hasil kesepakatan pada Pertemuan ke-2 WGBF RI-Rusia sebagai berikut:

- I. Pihak Rusia mempresentasikan ruang lingkup sanksi sepihak pada bank dan perusahaan Rusia oleh negara ketiga, serta implikasinya pada praktik penyelesaian pembayaran. Saat ini, ada dua sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia oleh negara ketiga yaitu: *Specially Designated Nationals* (SDN) *List* dan *Sectoral Sanctions Identifications* (SSI) *List*.
- II. Pihak Rusia juga menginformasikan bahwa sanksi hanya mempengaruhi bank-bank Rusia dalam porsi kecil. Sementara 89,2% bank Rusia tidak berada di bawah sanksi apa pun, oleh karena itu bank-bank Rusia siap memfasilitasi transaksi antara Rusia dan Indonesia.
- III. Pihak Rusia menyampaikan efek konflik saat ini terhadap ekonomi Rusia. Menanggapi efek tersebut, Pemerintah Rusia telah menetapkan berbagai langkah dan kontrol terhadap mata uangnya.
- IV. Pihak Rusia juga mengusulkan beberapa opsi kerja sama yang memungkinkan untuk memudahkan transaksi antara kedua negara.
- V. Sistem Pesan Keuangan CBR (SPFS) dapat digunakan sebagai alternatif untuk SWIFT. Pihak Rusia juga memperkenalkan MIR, sebuah sistem pembayaran nasional yang dikembangkan sebagai alternatif untuk sistem kartu pembayaran internasional.

- VI. Pihak Indonesia akan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang disebutkan di atas untuk meningkatkan kerja sama pembayaran antara kedua negara.
- VII. BI dan CBR mengangkat isu terkait mekanisme transaksi G-to-G, khususnya untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah Indonesia.
- VIII. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, OJK menyambut baik rencana kehadiran bank komersial Rusia di Indonesia untuk sesi konsultasi, maupun pembahasan mengenai implementasi perbankan lintas batas di Indonesia. OJK mendukung pembukaan bank komersial Rusia di industri perbankan Indonesia.
- IX. Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama formal antara otoritas berwenang.
- X. Kerja sama yang disebutkan di atas dapat diperluas menjadi isu-isu yang lebih spesifik berdasarkan prinsip saling menguntungkan

Gambar 3.17 MoM Pertemuan ke-2 Working Group on Banking and Finance (WGBF) RI – Rusia



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

SKB ke-13 RI Rusia tidak dapat terlaksana pada tahun 2022, dikarenakan terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun, hubungan kerja sama bilateral RI - Rusia tetap terjalin dengan diselenggarakannya Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) RI – Rusia secara offline di Jakarta pada tanggal 23 – 25 Agustus 2022 dan Pertemuan ke-2 Working Group on Banking and Finance (WGBF) RI – Rusia secara offline di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam kerangka SKB RI-Rusia.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan beberapa rapat koordinasi Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) RI – Rusia dan Working Group on Banking and Finance (WGBF) RI – Rusia dilaksanakan secara virtual sehingga memaksimalkan penggunaan teknologi.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan beberapa rapat koordinasi Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) RI – Rusia dan Working Group on Banking and Finance (WGBF) RI – Rusia dilaksanakan secara virtual sehingga anggaran Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah dapat digunakan secara efisien.

8. Kesepakatan pada *Public Private Dialogue Track 1.5* Indonesia – Jepang

Public Private Dialogue Track 1.5 Indonesia-Jepang merupakan kerja sama baru yang diusulkan oleh Jepang pada saat Menko Perekonomian menerima kunjungan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang. Melalui forum ini diharapkan kedua negara akan meningkatkan kerja sama dalam rantai pasok regional dan global, pembangunan infrastruktur, ekonomi digital, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan industri berkelanjutan yang merupakan prioritas pembangunan Indonesia. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk mempromosikan pengembangan UMKM dan ekonomi digital.

Gambar 3.18 Laporan Hasil Pertemuan PPDT 1.5 Indonesia-Jepang, 25 April 2022



Pertemuan PPDT 1.5 Indonesia-Jepang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022 di Kemenko Perekonomian. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Jepang mendiskusikan proyek kerja sama konkret di bidang pengembangan SDM, teknologi digital, rantai pasok, industri hijau, peningkatan kerja sama regional (ASEAN, RCEP dan IPEF), serta isu lainnya terkait kebijakan sertifikat radioaktif produk Jepang, akses pasar produk perikanan ke Jepang dan pembatasan impor baja. Hasil-hasil utama pertemuan PPDT 1.5 diantaranya yaitu:

- Jepang melalui Komite SDM JJC akan mempromosikan program Pemagangan untuk meningkatkan jumlah peserta magang Indonesia di Jepang.

- b) Ocean Eyes perusahaan *artificial intelligence* (AI) kelautan asal Jepang berminat untuk berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi AI di sektor perikanan.
- c) Indonesia mengusulkan kerja sama kemitraan dengan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok global perusahaan Jepang.
- d) Jepang akan meningkatkan jumlah proyek kerja sama *Joint Credit Mechanism* dengan salah satu proyek potensial yaitu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- e) Indonesia juga mendorong BIMP-EAGA untuk dapat dikembangkan sebagai bagian dari kerja sama kawasan Indo-pasifik.
- f) Indonesia menyampaikan bahwa saat ini kebijakan sertifikat bebas radioaktif untuk produk makanan, perikanan dan pertanian Jepang sedang dalam pembahasan untuk revisi peraturannya.

Gambar 3.19 Pertemuan *Public Private Dialogue Track 1.5* Indonesia-Jepang (Jakarta, 25 April 2022)



Indonesia juga menyampaikan terkait akses pasar tuna kaleng Indonesia ke Jepang, dimana Indonesia meminta Jepang untuk mengeliminasi 4 pos tarif tuna Indonesia.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Faktor kedekatan, kepercayaan dan kemitraan yang sangat erat antara kedua Negara menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan forum PPDT 1.5 RI - Jepang. Program-program kerja sama yang menguntungkan kedua Negara menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kerja sama bilateral RI-Jepang.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rapat persiapan pertemuan PPDT 1.5 serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait dilakukan dengan menggunakan teknologi *zoom meeting* maka pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pertemuan PPDT 1.5 dilakukan secara fisik di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian maka penggunaan anggaran dapat lebih ditekan.

9. Kesepakatan pada Pertemuan Tingkat Menteri *Council of Palm oil Producing Countries* (CPOPC) 2022

Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC 2022 diadakan secara *offline* di Nusa Dua, Bali pada tanggal 19 Juli 2022. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditi Malaysia, Y.M. Datuk Zuraida Kamaruddin, serta wakil dari *Observer Countries* yang turut menyampaikan pidato secara virtual.

Gambar 3.20 The 10th Ministerial Meeting of CPOPC (Bali, 19 Juli 2022)

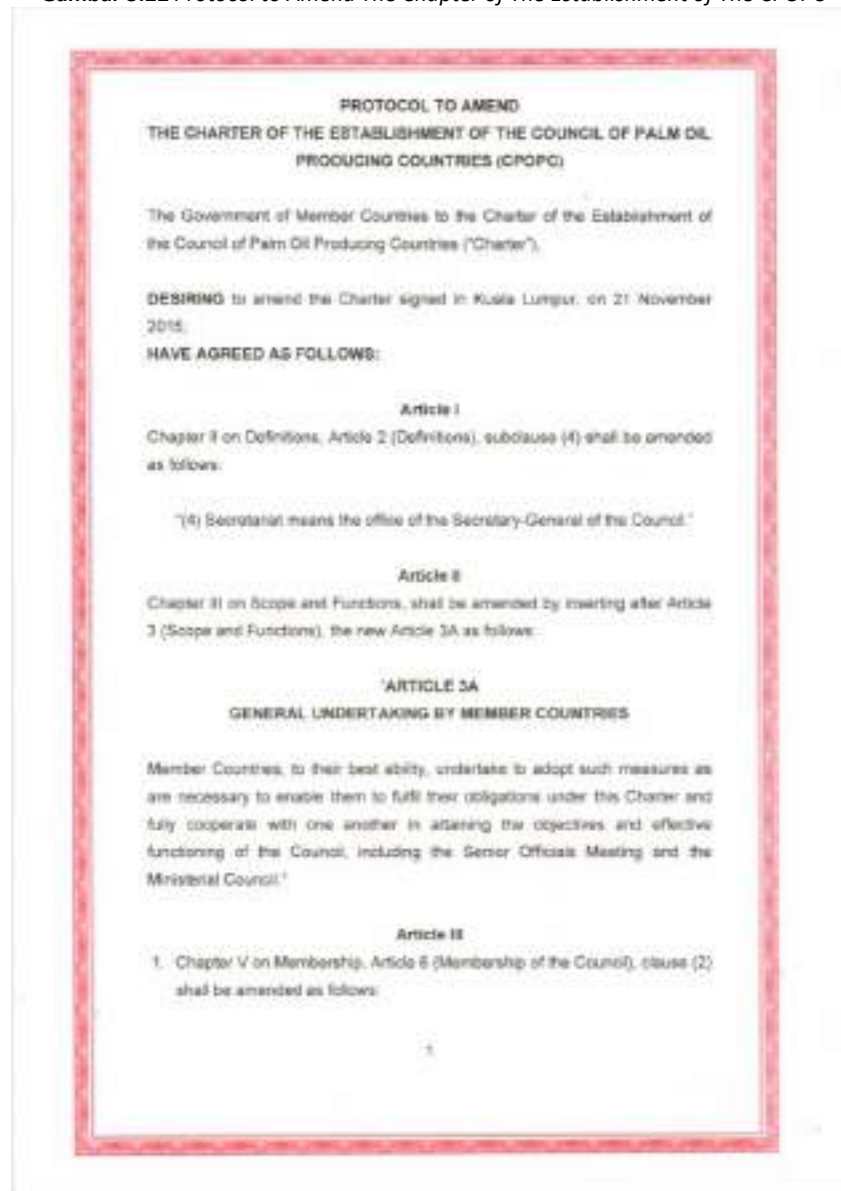


Gambar 3.21 Press Conference The 10th Ministerial Meeting of CPOPC (Bali, 19 Juli 2022)



Beberapa poin utama yang dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri kali ini antara lain: (i) Dinamika dan tren peluang serta tantangan dalam pasar minyak nabati global di tengah konflik geopolitik global; (ii) Dukungan kepada upaya CPOPC membantu Honduras mengatasi kerusakan perkebunan kelapa sawit; (iii) Apresiasi Menko Perekonomian terhadap promosi Global Framework of Principles of Sustainable Palm Oil; (iv) Proses ratifikasi Protokol perubahan piagam CPOPC; (v) Menunjuk Dr. Rizal Affandi Lukman sebagai Direktur Eksekutif sebagai salah satu Pejabat Sekretariat CPOPC periode 1 Juni 2022 - 31 Mei 2025.

Gambar 3.22 *Protocol to Amend The Chapter of The Establishment of The CPOPC*



Gambar 3.23 PP RI No. 107 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Protocol to Amend the Charter of Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries* (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit)



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pertemuan telah berjalan dengan baik dan lancar. Dalam hal ini, peran, pengalaman dan latar belakang Executive Director CPOPC yang baru (Rizal A. Lukman) dalam penyelenggaraan Sidang Internasional banyak membantu dan mendukung kelancaran jalannya pertemuan. Terkait dengan proses ratifikasi Protocol amandemen Piagam sudah dilakukan oleh pihak Indonesia dengan Perpres 107 tahun 2022.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Agenda Pertemuan 10th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diselenggarakan dengan menerapkan metode hybrid dimana Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditi Malaysia, dan pejabat terkait industri sawit menghadiri secara langsung di Bali dan perwakilan dari negara-negara observer CPOPC (Ghana, Honduras, Kolombia, dan Papua New Guinea) hadir secara virtual.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka menghadiri agenda The 10th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah sudah efisien menggunakan anggaran karena biaya akomodasi penginapan menggunakan anggaran pihak Sekretariat CPOPC sehingga anggaran Keasdepan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah dapat diefisiensikan.

pelaksanaan Program Prospera akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2023. Lebih lanjut, Kedubes Australia melalui surat tanggal 22 April 2022 telah mengajukan perpanjangan program Prospera untuk tiga tahun kedepan kepada Deputi VII Kemenko Perekonomian.

Gambar 3.26 Dokumen 1. Surat terkait kesepakatan prinsip untuk memperpanjang Program Prospera



Gambar 3.27 Dokumen 2. Surat terkait Review Deputi VII Kemenko Perekonomian terhadap Program Prospera serta Pertimbangan Perpanjangan Program



Laporan MTR Prospera menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kedua negara untuk memperpanjang program tersebut. Sebagai catatan, berdasarkan ketentuan *Article 5.1. Subsidiary Arrangement* Prospera, kegiatan Prospera dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun melalui evaluasi dan persetujuan dari Pemerintah Indonesia dan Australia.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pelaksanaan Board Meeting Prospera telah terealisasi dengan baik pada Triwulan II dengan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik antar K/L serta dengan Pemerintah negara mitra terkait (baik DFAT maupun Prospera).
2. Tim teknis melaksanakan beberapa pertemuan baik secara virtual maupun fisik dengan tim teknis dari DFAT dan Prospera terkait untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan Board Meeting tersebut.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan Board Meeting Prospera, Kedeputan telah memanfaatkan berbagai Sumber Daya yang ada untuk digunakan dalam mencapai target yang ditetapkan melalui:

1. Pemanfaatan Aplikasi Zoom untuk melakukan pertemuan teknis secara virtual dengan pihak DFAT dan Prospera.
2. Pemanfaatan teknologi *onedrive* untuk menyusun bahan dan materi keperluan Board Meeting secara digital dan online.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan Prospera Board Meeting dilakukan secara virtual mengingat para pihak yang terlibat berada di negara yang berbeda sehingga terlaksana efisiensi anggaran. Anggaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya yang membutuhkan kehadiran secara fisik seperti ketika dilakukannya penandatanganan *Subsidiary Arrangement* Perpanjangan Program PROSPERA di Canberra, Australia.

11. Penandatanganan Amandemen *Subsidiary Arrangement* Perpanjangan Program PROSPERA



Menindaklanjuti penugasan Bapak Menko Perekonomian kepada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Surat Pendelegasian Wewenang No. PH.3.2/2/SES.M.EKON/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 untuk menandatangani Amandemen *Subsidiary Arrangement* (SA) Program Kerja Sama Indonesia – Australia untuk Perekonomian (PROSPERA), Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional bersama Michelle Chan, *Deputy Secretary for Southeast Asia and Global Partners Group*, DFAT Australia telah menandatangani *Exchange of Letters* No.2 PROSPERA pada Jumat, 9 Desember 2022 di Canberra, Australia.

Exchange of Letter No. 2 PROSPERA merupakan mekanisme yang disepakati antara Indonesia dan Australia untuk mengamandemen ketentuan yang diatur pada SA PROSPERA, sebagaimana diatur dalam Paragraph 15 SA PROSPERA. Sebagai catatan, SA merupakan perikatan antara kedua negara untuk kerja sama pembangunan PROSPERA.

Gambar 3.28 Penandatanganan *Amandemen Subsidiary Arrangement* Perpanjangan Program PROSPERA antara Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional, Kemenko Perekonomian dan Michelle Chan, *Deputy Secretary for Southeast Asia and Global Partners Group*, DFAT di Canberra, Australia tanggal 9 Desember 2022.



Beberapa ketentuan SA PROSPERA yang diamandemen dalam *Exchange of Letter* No.2 PROSPERA, antara lain sebagai berikut:

- Kedua pihak sepakat bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun (Maret 2018 s.d Februari 2026) dengan total kontribusi Pemerintah Australia (hibah langsung) mencapai AUD 259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dolar Australia).
- Prospera akan mengkonsultasikan secara berkala baik rencana kegiatan maupun perkembangan implementasi kegiatan Prospera. Lebih lanjut,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat mengusulkan kegiatan yang menjadi kepentingan Pemerintah Indonesia.

- *Subsidiary Arrangement* ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PROSPERA, yang terdiri dari *Technical Advisory Services* (asistensi) dan Kemitraan APS (G to G).

Dalam hal Pemerintah Indonesia mengetahui bahwa setiap anggota staf Prospera atau pejabat Australia yang diperbantukan/ditugaskan di suatu lembaga Indonesia mengungkapkan informasi atau data rahasia kepada seseorang atau organisasi yang tidak berwenang, Pemerintah Indonesia dapat melakukan terminasi terhadap Program PROSPERA.

Gambar 3.29 Dokumen *Subsidiary Arrangement Prospera Phase II* dan *Exchange of Letter*



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pelaksanaan Penandatanganan Amandemen Subsidiary Arrangement Perpanjangan Program PROSPERA telah terealisasi dengan baik dengan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik antar K/L serta dengan Pemerintah negara mitra terkait (baik DFAT maupun Prospera).
2. Tim teknis dari Kemenko Perekonomian telah melaksanakan beberapa pertemuan baik secara virtual maupun fisik dengan tim teknis dari DFAT dan Prospera untuk membahas perkembangan Perpanjangan Program PROSPERA untuk kemudian dilakukan Penandatanganan Amandemen *Subsidiary Arrangement* tersebut.

Adapun Target Penandatanganan Amandemen *Subsidiary Arrangement* Perpanjangan Program PROSPERA merupakan target yang diubah dari target awalnya yaitu Pertemuan RI-Australia Economic Trade and Investment Ministerial Meeting (ETIMM). Target tersebut diganti dikarenakan pada tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian yang merupakan Sherpa G20 lebih memfokuskan kegiatan pembahasan proyek-proyek konkrit G20. Lebih lanjut, di sela-sela agenda G20, Kedeputan juga melaksanakan pertemuan bilateral meeting salah satunya dengan Australia, dengan fokus pembahasan isu bilateral kedua negara dan proyek konkrit dalam kerangka G20. Atas dasar tersebut, target kami ganti menjadi Penandatanganan Amandemen *Subsidiary Arrangement* Perpanjangan Program PROSPERA.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Penandatanganan Amandemen *Subsidiary Arrangement* Perpanjangan Program PROSPERA telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada melalui:

- Pemanfaatan Aplikasi Zoom untuk melakukan pertemuan teknis secara virtual dengan pihak DFAT dan Prospera.
- Pemanfaatan teknologi *onedrive* untuk menyusun bahan dan materi keperluan Penandatanganan Amandemen *Subsidiary Arrangement* Perpanjangan Program PROSPERA secara digital dan online

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan Koordinasi terkait Perpanjangan Program PROSPERA telah dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan yaitu dengan melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat teknis di kantor. Adapun kegiatan Pelaksanaan Penandatanganan Amandemen *Subsidiary Arrangement* Perpanjangan Program PROSPERA telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan, namun tidak melupakan perhitungan ekonomi sehingga Keasdepan mencapai efisiensi kualitas pelaksanaan anggaran yang baik.

12. Finalisasi *Mid-Term Review* Program Kerja Sama Indonesia – Australia untuk Perekonomian (PROSPERA)



Sebagaimana diketahui, Board Meeting Prospera telah membahas hasil kegiatan Prospera 2021-2022, Rencana Kerja Prospera 2022-2023, dan laporan Prospera Mid-Term Review (MTR). Mengingat program Prospera akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, Kedubes Australia telah mengajukan permohonan perpanjangan program Prospera pada Board Meeting Tahun 2022. Laporan Mid-Term Review menjadi bahan pertimbangan bagi kedua negara untuk memperpanjang program Prospera.

Gambar 3.30 Pelaksanaan Finalisasi Mid-Term Review Prospera Deputi Bidang Koordinasi Internasional dengan Deputy Charge of Mission Australia tanggal 5 Oktober 2022



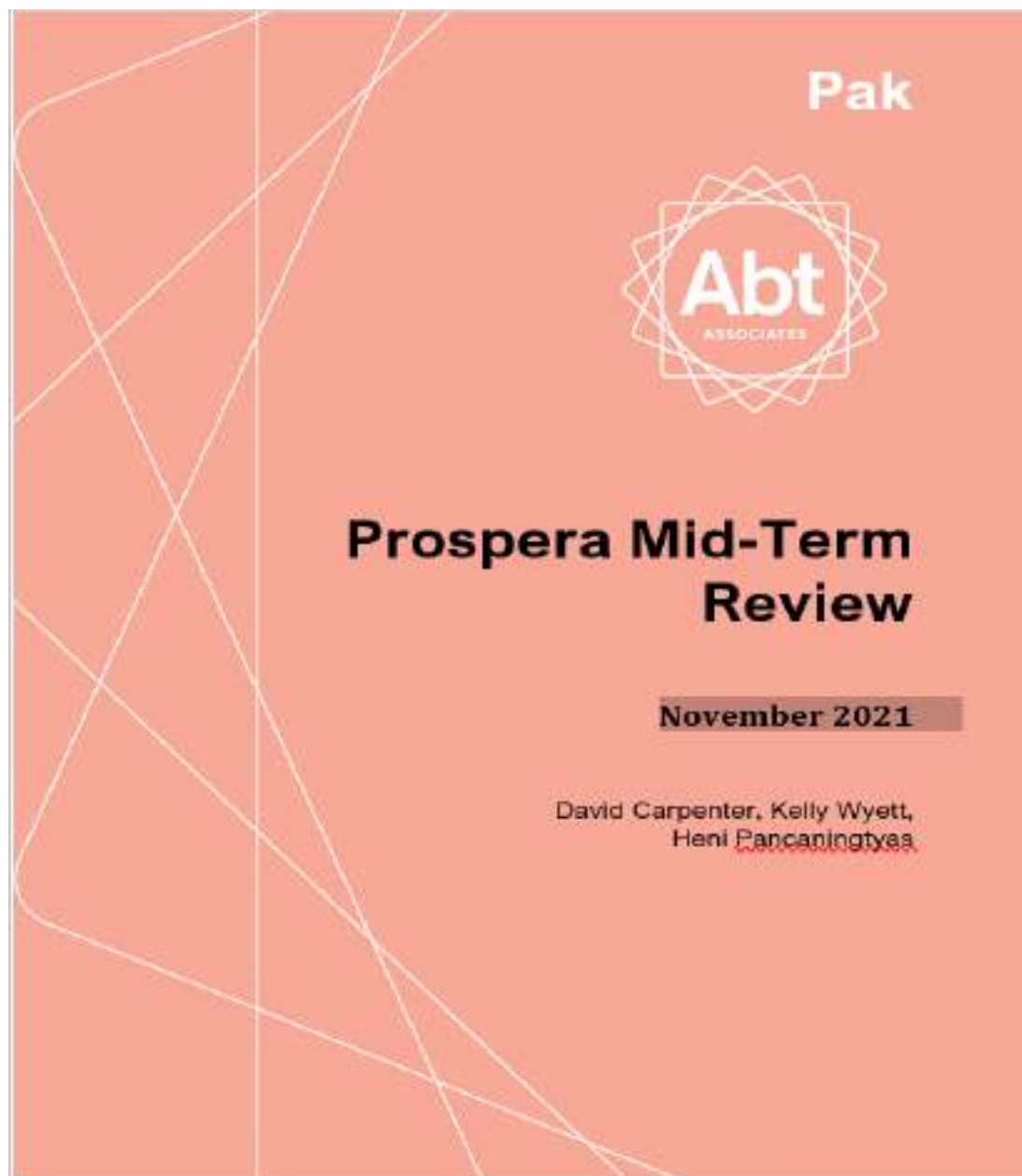
Pada tanggal 5 Oktober 2022, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional telah bertemu dengan Deputy Ambassador Kedutaan Besar Australia untuk membahas perpanjangan program Prospera Fase II dari DFAT untuk tiga tahun kedepan (Maret 2023 s.d Februari 2026) dengan fokus utama yaitu finalisasi Mid-Term Review Prospera.

Gambar 3.31 Rapat Teknis Finalisasi Mid-Term Review Prospera dengan Co-Chair Prospera tanggal 29 November 2022



Pada tingkat teknis, pada tanggal 29 November 2022, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik dan Minister-Counsellor, Economic, Investment and Infrastructure telah membahas beberapa hal dalam mempersiapkan fase ke-2 PROSPERA. Salah satu tindak lanjutnya yaitu dihapusnya Prospera Mid-Term Review (MTR) dari website resmi Department of Foreign Affairs and Trade Australia dan telah finalnya Prospera Mid-Term Review (MTR) sebagai bahan pertimbangan kedua negara untuk memperpanjang program Prospera.

Gambar 3.32 Dokumen Final Prospera Mid-Term Review



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pelaksanaan Finalisasi Mid-Term Review Prospera telah terealisasi dengan baik dengan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik antar K/L serta dengan Pemerintah negara mitra terkait (baik DFAT maupun Prospera).
2. Tim teknis melaksanakan beberapa pertemuan baik secara virtual maupun fisik dengan tim teknis dari DFAT dan Prospera terkait untuk membahas perkembangan Finalisasi Mid-Term Review tersebut.

Adapun Target Finalisasi Mid-Term Review Prospera merupakan target yang diubah dari target awalnya yaitu Pertemuan RI-Australia Senior Economic Officials Meeting (SEOM). Target tersebut diganti dikarenakan pada tahun 2022, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian yang merupakan Sherpa G20 lebih memfokuskan kegiatan pembahasan proyek-proyek konkrit G20. Lebih lanjut, di sela-sela agenda G20, Kedeputan juga melaksanakan pertemuan bilateral meeting salah satunya dengan Australia, dengan fokus pembahasan isu bilateral kedua negara dan proyek konkrit dalam kerangka G20. Atas dasar tersebut, target kami ganti menjadi Finalisasi Mid-Term Review Program Kerja Sama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera)

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Finalisasi Mid-Term Review Prospera telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada melalui:

1. Pemanfaatan Aplikasi Zoom untuk melakukan pertemuan teknis secara virtual dengan pihak DFAT dan Prospera.
2. Pemanfaatan teknologi *onedrive* untuk menyusun bahan dan materi keperluan Finalisasi Mid-Term Review secara digital dan online

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan Finalisasi Mid-Term Review Prospera telah dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan yaitu dengan melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat teknis di kantor. Adapun kegiatan Pelaksanaan Finalisasi Mid Term Review menggunakan anggaran DFAT sehingga terjadinya efisiensi

anggaran Kedeputian. Anggaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan lainnya yang lebih prioritas seperti kehadiran secara fisik ketika dilakukannya penandatanganan Subsidiary Arrangement Perpanjangan Program PROSPERA di Canberra, Australia.

13. Peningkatan Capaian Implementasi MEA 2025

Finalisasi *Upgrading* STORMEA

Sistem *E-Monitoring* Implementasi MEA Indonesia (STORMEA) disempurnakan dengan beberapa penyesuaian yaitu: sisi tampilan, optimasi arsitektur database, maupun dari sisi modul dan fitur sistem. Penyesuaian ini dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan user sehingga akan memberikan kemudahan bagi K/L pengampu untuk memberikan update implementasi MEA di Indonesia. *Annual Priority* (Prioritas Tahunan) 2021 dan 2022 telah selesai dilaksanakan, dan ditargetkan pada TW II masing-masing K/L sudah dapat mulai melakukan update implementasi AP untuk periode 2022.

Dalam rangka penyempurnaan, dilakukan berbagai testing baik dari sisi fitur, *security*, maupun *stress test* (*case overload* user/input bersamaan dalam sejumlah user), selanjutnya dilakukan reviu internal untuk mendapatkan *feedback* dan penyesuaian *timeline* sosialisasi *launching pilot project* oleh user K/L.

Rapat Koordinasi Penentuan *Focal Point* Prioritas Tahunan AEC 2022

Penentuan *Focal Point* atas prioritas tahunan AEC Tahun 2022 dilakukan secara internal oleh tim ASEAN. Beberapa hal yang dilakukan adalah melihat keterkaitannya dengan prioritas tahun sebelumnya dan melihat badan sektoral pengampu prioritas tersebut. *Assessment* internal dilakukan untuk memudahkan dalam proses penentuan unit kerja yang akan mengisi monitoring melalui STORMEA.

Sosialisasi Pengisian STORMEA kepada K/L Pembina Sektor

Sosialisasi pengisian kepada K/L sampai dengan TW III belum dapat dilakukan mengingat proses pengembangan STORMEA masih berjalan sehingga belum siap digunakan secara lebih luas.

Monitoring Prioritas Tahunan Melalui Portal STORMEA

Pada tahun 2022, sejumlah 152 telah diidentifikasi sebagai prioritas tahunan. Jumlah AP ini juga termasuk 19 *Priority Economic Deliverables* (PED) di bawah keketuaan Kamboja Tahun 2022. Hampir 95% Prioritas tahunan merupakan aktivitas regional yang ditargetkan untuk diimplementasikan oleh 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN. Dari total 152 prioritas yang ditetapkan ini, 3 (tiga) prioritas ditargetkan selesai pada TW I, 16 prioritas ditargetkan selesai pada TW 2, 19 prioritas ditargetkan selesai pada TW III, 76 prioritas ditargetkan selesai pada TW IV, dan 38 prioritas sisanya ditargetkan selesai pada tahun 2022 tanpa waktu spesifik.

Adapun ilustrasinya adalah sebagai berikut:



Hingga Triwulan IV, terdapat sembilan belas (19) PED, dengan perkembangan per Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) PED berstatus *fully completed*, 3 (tiga) berstatus *substantially completed*, dan 14 (empat belas) PED lainnya masih masih berjalan. Lima PED yang telah selesai adalah:

- *Work Programme to Support Implementation of the Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community*
- *Launching of the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Upgrade Negotiation*
- *Policy Toolkit for Integrating Provisions Focused on Women's Entrepreneurship in ASEAN MSME Policies*
- *Launch Negotiations for an ASEAN Framework Agreement on Competition*
- *Signing of the Protocol to Amend the ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons*

Persiapan dan Penyusunan Bahan Pertemuan AEC Council

Pertemuan AEC Council merupakan pertemuan tingkat Menteri Dewan MEA yang dilaksanakan dalam rangkaian KTT ASEAN yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada April dan November. Untuk itu, dalam bulan Maret 2022 diagendakan untuk penyiapan bahan posisi Indonesia dalam AECC, namun demikian berdasarkan beberapa pertimbangan KTT ASEAN digabung menjadi 1 (satu) pada bulan November 2022. Oleh karenanya kegiatan persiapan dan penyusunan bahan pertemuan AEC Council akan dilaksanakan pada TW IV tahun 2022.

Rapat Koordinasi Persiapan AECC ke-21

Rapat Koordinasi Penyiapan Posisi Indonesia dalam the 21st ASEAN Economic Community (AEC) Council telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022. Pada pertemuan bulan November nanti juga diagendakan Quad Ministerial Interface Meeting on Sustainability untuk membahas isu – isu terkait keberlanjutan. Adapun agenda pada quad ministerial meeting ini antara lain terkait ASEAN Strategy on Carbon Neutrality, Way forward for Cross Sectoral Sustainable Initiatives, dan Consideration Joint Media Statement.

Posisi Indonesia yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan antara lain 2022 Priority Economic Deliverables (PED), AEC Cross-Sectoral/Pillar Work, Follow Up on Action to the MTR Recommendation, Preparation for Post-2025, dan Indonesia's Chairmanship of ASEAN 2023. Adapun hasil rapat berupa posisi Indonesia yang nantinya dituangkan dalam Kertas Posisi Indonesia pada Pertemuan AECC ke-21 tanggal 10 November 2022.

Pertemuan AECC ke-21

Rangkaian Pertemuan ASEAN Economic Rangkaian Pertemuan ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meeting dilaksanakan pada tanggal 9-10 November 2022 di Phnom Penh, Kamboja dan terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 9 November 2022 yaitu Ministerial Interface Meeting on Sustainable Agenda antara para menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council Ministers) dengan para Menteri Sektorial yaitu Energi, Pertanian, dan Transportasi dengan agenda khusus terkait

pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertemuan menyepakati penyusunan ASEAN Strategy on Carbon Neutrality dengan beberapa poin penting yaitu inventori Gas Rumah Kaca, pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 3.33 Pertemuan 21st AEC Council, 9-10 November 2022, Phnom Penh, Kamboja



Pertemuan kedua adalah the 21st AEC Council (AECC) yg dilaksanakan pada 10 November 2022, dengan agenda utama pembahasan adalah perkembangan PED Kamboja 2022, MTR AEC Blueprint 2025, penyusunan Post-2025 Vision, koordinasi lintas sektor, laporan AECC kepada Kepala Negara, dan persiapan Chairmanship Indonesia pada ASEAN 2023. Dalam kesempatan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Delegasi RI, menyampaikan kesiapan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023.

Gambar 3.34 Report of the Twenty First ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting



Prioritas Ekonomi pada masa Keketuaan fokus pada peningkatan pertumbuhan regional, percepatan transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Sementara, beberapa gagasan prioritas yang akan diusung adalah penguatan ketahanan pangan yang komprehensif mencakup produksi, fasilitasi dan pembiayaan; keterjangkauan dan kemudahan akses terhadap energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan; perluasan kerjasama *Local Currency Settlement* sebagai landasan integrasi keuangan berbasis digital; dan pemanfaatan potensi ekonomi digital kawasan melalui percepatan negosiasi *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA). Selain itu *blue*

economy diusulkan sebagai prioritas mempertimbangkan potensinya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru dan akan ditugaskan kepada HLTF-EI.

Secara detail, pertemuan AECC ke-21 dan pertemuan terkait dikeluarkan dalam Brafaks Nomor B-00357/PHNOMPENH/221117 bulan November 2022.

Penyusunan Laporan hasil AECC ke-21

Laporan Hasil Pertemuan AECC ke-21 telah ditandatangani oleh Bapak Menko Perekonomian melalui nomor KSI/297/M.EKON/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 kepada Presiden RI dengan laporan pokok terkait Pertemuan Tingkat Menteri untuk Agenda Keberlanjutan tanggal 9 November 2022 dan Pertemuan Tingkat Menteri oleh Menteri Dewan MEA yang telah dilaksanakan tanggal 10 November 2022.

Penyusunan Matriks Tindak Lanjut AECC ke-21

Tindak lanjut dari Pertemuan AECC 21 juga telah sekaligus dituangkan dalam Brafaks Nomor B-00357/PHNOMPENH/221117 bulan November 2022.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pertemuan AEC Council ke-21 menyepakati beberapa poin penting yang diperlukan dalam penyusunan *ASEAN Strategy on Carbon Neutrality* yaitu inventori Gas Rumah Kaca, pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk mendukung kredit karbon dan menciptakan pasar karbon; mengedepankan inklusivitas dengan perluasan kerja sama di berbagai sektor. Meskipun demikian, beberapa negara masih perlu melakukan konsultasi domestik terlebih dahulu sebelum sepakat untuk mengesahkan *Concept note of ASEAN Strategy on Carbon Neutrality*.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Seluruh Sumber Daya Manusia dalam Tim Koordinasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional terlibat aktif dan efektif baik dalam mempersiapkan substansi dan logistik, maupun mendampingi Bapak Menko Perekonomian dalam pertemuan

dimaksud. Koordinasi dilakukan secara intensif dan berkala baik fisik maupun secara virtual dengan memanfaatkan platform teknologi yang ada.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

- Rangkaian pertemuan AEC Council ke-21 diselenggarakan secara hybrid dengan para Menteri AEC hadir secara fisik dan para Menteri pada badan sektoral lain yang diundang, menghadiri secara virtual. Bapak Menko Perekonomian selaku AEC Lead Indonesia, hadir secara fisik di Phnom Penh, Kamboja.
- Dalam kegiatan pertemuan AEC Council ke-21, Bapak Menko Perekonomian didampingi oleh Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Koordinator Tim Kerja Sama Ekonomi ASEAN, dan satu orang Analis Perekonomian.

14. Kesepakatan pada *High Level Task Force on Economic Integration* (HLTF-EI)

Sepanjang tahun 2022, setidaknya telah terselenggara 2 (dua) kali pertemuan *High Level Task Force on Economic Integration* (HLTF-EI), yaitu pertemuan HLTF-EI ke-41 dan pertemuan HLTF-EI ke-42. Pertemuan *the 41st High Level Task Force on ASEAN Economic Integration* (HLTF-EI) telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022 dengan dipimpin oleh Dr. Rizal Affandi Lukman, selaku Ketua Delegasi Indonesia sekaligus *Chair ASEAN HLTF-EI* dan dihadiri oleh *HLTF Leads* atau yang mewakili dari seluruh anggota ASEAN serta H.E. Satvinder Singh selaku *Deputy Secretary General for AEC*.

Gambar 3.35 Pertemuan HLTF-EI ke-41 pada 2 Maret 2022 secara virtual



Adapun beberapa hasil kesepakatan pada pertemuan pada *HLTF-EI* ke-41 di setiap agenda antara lain:

- I. Kamboja mengajukan 19 PED yang akan dicapai pada masa *Chairmanship*-nya dengan tema ASEAN A.C.T: *Addressing, Challenges, Together*. Tercatat 4 (empat) *concept note* masih perlu dilakukan finalisasi sebelum di-*endorse* pada pertemuan ASEAN Economic Minister Retreat (AEMR) ke-28 tanggal 16-17 Maret 2022

- II. Pertemuan mencatat perkembangan implementasi *ASEAN Comprehensive Recovery Framework* sebagai *collaborative actions* dalam proses pemulihan ekonomi kawasan. Perkembangan capaian sampai dengan akhir Januari 2022 adalah 68 dari 185 inisiatif telah terimplementasi, 62 inisiatif berstatus *on-going* dan 5 (lima) inisiatif lainnya masih belum dilaksanakan
- III. Pertemuan mencatat perkembangan tindak lanjut dan rencana implementasi *Consolidated Strategy on the Fourth Industrial Revolution for ASEAN (CS4IR)* dan rencana penyusunan ASEAN Digital Economy Framework (DEFA) untuk mendukung percepatan transformasi digital di kawasan.
- IV. Terkait Framework for Circular Economy saat ini sedang disusun *implementation plan* untuk *framework for Circular Economy for the AEC*.
- V. Saat ini sedang disusun *concept note on ASEAN Strategy for Carbon Neutrality* yang bertujuan untuk mengurangi *carbon footprint* ASEAN dan menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- VI. Terkait HLTF on Post 2025 Vision akan melakukan pertemuan pertama pada tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2022. Sementara itu, HLTF-EI bertindak sebagai *focal point* penyusunan visi di pilar ekonomi.
- VII. Agenda lain yang dibahas adalah *G-20 Related Matters*, *World Economic Forum (WEF)*, *Potential Joint Feasibility Study on a FTA/PTA with Bangladesh*.

Sementara itu pertemuan HLTF-EI ke-42 dilaksanakan secara fisik pada tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2022 secara fisik di Siem Reap Kamboja. Pertemuan dipimpin oleh Bapak Edi Prio Pambudi selaku Deputy Bidang Koordinasi Kerja Ekonomi Internasional yang sekaligus menjadi Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Gambar 3.36 Pertemuan HLTF-EI ke-42 pada 18-19 Agustus 2022 di Siem Reap



Adapun beberapa hasil kesepakatan pada pertemuan pada *HLTF-EI* ke-42 disetiap agenda antara lain:

- I. *Priority Economic Deliverables* (PED) Tahun 2022 Keketuaan Kamboja
Pertemuan mencatat perkembangan pelaksanaan PED tahun 2022 dimana saat ini tercatat baru 2 (dua) dari 19 PED yang selesai. Untuk itu, forum mendorong agar badan sektoral terkait dapat mempercepat progres implementasi sehingga dapat selesai dalam periode Keketuaan Kamboja.
- II. *Mid-Term Review* (MTR) *AEC Blueprint 2025*
Forum mendorong agar badan sektoral terkait dapat segera menyelesaikan target-target jangka pendek dan memulai persiapan implementasi target jangka menengah. Forum merekomendasikan agar implementasi juga dapat fleksibel dan lebih inovatif, mengingat adanya perbedaan kesiapan dari negara anggota ASEAN.
- III. *ASEAN Post-2025 Vision*
Forum mencatat perkembangan penyusunan *ASEAN Post-2025 Vision*, khususnya penyusunan *zero draft core* elements pilar ekonomi oleh Sekretariat ASEAN. Indonesia dan Thailand menjadi negara pertama yang sudah menyampaikan masukan tertulis terhadap *zero draft* dimaksud.
- IV. *ASEAN Comprehensive Recover Framework* (ACRF)
Forum menyepakati agar masing-masing badan sektoral mempercepat penyelesaian berbagai inisiatif dalam ACRF, juga menyepakati eksplorasi pengembangan ruang lingkup ACRF dan mengkoordinasikannya dengan pilar yang lain dalam rangka mendukung pemulihan dari krisis multidimensi serta selaras dengan agenda *Post-2025*.

- V. *Concept Note on Carbon Neutrality*
Forum mencatat perkembangan yang telah dilakukan oleh Sekretariat ASEAN dalam penyusunan *Concept Note* dan masing-masing negara anggota diberikan waktu untuk melakukan konsultasi internal guna memberikan masukan terhadap *Concept Note* sebelum disampaikan dalam pertemuan ASEAN *Economic Ministers* (AEM) ke-54 pada September 2022.
- VI. *ASEAN's Economic Engagement with External Parties*
Sekretariat ASEAN telah melakukan asesmen terhadap proposal Bangladesh dengan menggunakan kriteria yang sudah ada dan diambil kesimpulan bahwa partisipasi Bangladesh yang dapat disepakati saat ini adalah kerja sama sektoral atau PTA.
- VII. *ASEAN Economic Partnership Criteria Framework (EPCF)*
Sebagai panduan bagi ASEAN dalam melakukan hubungan kerja sama ekonomi dengan pihak eksternal. EPCF ini diharapkan dapat di-endorse pada saat Pertemuan AEM ke-54 mendatang.
- VIII. *ASEAN on Good Regulatory Practices (GRP)*
Forum mencatat perkembangan penyusunan *draft ASEAN Handbook on Good Regulatory Practices* yang selanjutnya akan dilaksanakan diseminasi/sosialisasi secara virtual kepada seluruh institusi yang bertanggung jawab terhadap implementasi GRP di masing-masing negara anggota ASEAN pada 17 Oktober 2022 untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- IX. *The Fourth Industrial Revolution (4IR)*
Forum mencatat perkembangan penyusunan dan rencana peluncuran *Implementation Plan of the Consolidated Strategy on the 4IR* yang ditargetkan pada akhir tahun 2022. Dalam rangka implementasinya telah disepakati dibentuk ASEAN 4IR Task Force Group (A4IR-TFG) dan masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan menyampaikan nominasi yang akan menjadi anggota TFG.
- X. *Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023*
Indonesia menyampaikan perkembangan persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 secara umum dari sisi kesiapan substansi maupun

logistik. Forum menyambut baik persiapan yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia dan akan mendukung penuh pelaksanaannya di tahun 2023.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Indonesia selaku Chair HLTF-EI untuk periode 2022-2023 secara proaktif memimpin dan mengarahkan pembahasan secara efektif sehingga isu-isu yang menjadi agenda pertemuan dapat diselesaikan.
- Pada saat dilaksanakan the 42nd HLTF-EI Meeting, Negara-negara Anggota ASEAN belum dapat menyepakati *endorsement* untuk *Concept Note on the Carbon Neutrality* sebagai salah satu target capaian HLTF-EI di tahun 2022 karena perwakilan Malaysia yang belum memiliki mandat mengingat pemerintahan pada saat itu masih dipegang oleh *caretaker*.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Jumlah SDM di Bidang ASEAN pada Keasdepan Regional dan Sub-Regional dioptimalkan untuk persiapan dan penyelenggaraan HLTF-EI, baik pada pertemuan ke-41 yang dilaksanakan secara virtual maupun pada pertemuan ke-42 yang dilaksanakan secara fisik di Siem Reap, Kamboja. Koordinasi, persiapan awal, dan dukungan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan teknologi baik dalam bentuk pertemuan/rapat virtual dan korespondensi via email/WhatsApp.
- Pertemuan HLTF-EI ke-41 diadakan secara virtual mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang belum memungkinkan. Pertemuan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom yang difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN. Indonesia sebagai *Chair* HLTF-EI mengadakan pertemuan secara *hybrid* di Kantor Kemenko Perekonomian dengan turut mengundang perwakilan K/L sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia.
- Pertemuan HLTF-EI ke-42 yang diadakan secara fisik di Kamboja masih menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta di sisi lain telah dilakukan efisiensi anggaran di Keasdepan Regional dan Subregional. Oleh sebab itu, Delegasi RI yang berangkat untuk menghadiri pertemuan juga diefektifkan di mana Ketua Delegasi RI (Deputi Koordinasi Kerjasama

Ekonomi Internasional) didampingi oleh dua anggota Delegasi RI saja (Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional dan staf).

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

- Pertemuan HLTF-EI ke-41 dilaksanakan secara virtual sehingga dapat mengefisienkan penggunaan anggaran untuk biaya perjalanan dinas luar negeri. Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pertemuan ini adalah biaya konsumsi rapat dalam kantor.
- Pertemuan HLTF-EI ke-42 dilaksanakan secara fisik di Siem Reap, Kamboja, secara terbatas. Untuk menjaga protokol kesehatan, Delegasi RI yang berangkat ke Siem Reap dioptimalkan dalam jumlah minimal serta dukungan lainnya dilakukan dari Jakarta dengan memanfaatkan teknologi.

15. Kesepakatan pada Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA

Capaian TW I

- a) Pada tahun 2022, Indonesia mendapat giliran untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-25
- b) Sebelumnya telah dilakukan peninjauan awal dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- c) Melalui surat tanggal 4 Februari 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyampaikan Kesediaan Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- d) Rangkaian Pertemuan PTM BIMP-EAGA ke-25 tahun 2022 telah ditetapkan akan dilaksanakan pada 23-26 November 2022.
- e) Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan beberapa kali koordinasi pada tingkat teknis serta kunjungan *advance* dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan.

Gambar 3.37 *The 25th Ministerial Meeting BIMP-EAGA* di Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 23 - 26 November 2023



Capaian TW II**a. Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Penyelenggaraan Tuan Rumah Rangkaian PTM BIMP-EAGA.**

Beberapa Hasil dari Rapat koordinasi ini antara lain:

- Persiapan venue pertemuan, agenda rangkaian kegiatan, rencana side event, penyusunan SK Tim Pusat dan Daerah, persiapan logistik dan rencana pembahasan substansi setiap main events.
- Venue pertemuan direncanakan diadakan di Mercure Pontianak pada tanggal 23 November dan di Qubu Resort Convention Centre 24 - 26 November 2022
- Even utama dalam rangkaian pertemuan tersebut adalah NS Meeting, BEBC Board Meeting, Senior Official Meeting ke-30, BIMP-EAGA – ROK Senior Official Meeting (SOM), BIMP-EAGA Chief Minister, Governor, and Local Government Forum (CMGLF), BIMP-EAGA Ministerial Retreat, dan BIMP-EAGA Ministerial Meeting ke-25.
- Beberapa side event yang diadakan antara lain: Pameran & Showcase potensi Kalimantan Barat seperti UMKM, FGD, BIMP-EAGA Business Forum, Site Visit, Penanaman mangrove, dll.
- Site visit Menteri direncanakan akan diadakan di Galeri Galeri Hasil Hutan. Pilihan Site visit delegasi direncanakan diadakan di Tugu Khatulistiwa/Waterfront Front River Cruise/Sentra Oleh-Oleh.
- Saat ini Kemenko Perekonomian dan Pemprov Kalimantan Barat sedang berkoordinasi dengan para pihak terkait seperti Sekretariat Nasional, K/L, dan pihak lainnya dalam penyusunan deliverables PTM BIMP-EAGA ke-25 tahun 2022
- Pertemuan tingkat *senior official* dengan negara mitra yakni Korea.

Capaian TW III**a. Monitoring Implementasi arahan Menteri dalam PTM ke-25**

Implementasi arahan Menteri yang sedang dalam proses antara lain:

- Penyusunan *Mid Term Review* BEV 2025 sedang dalam proses penyusunan dan akan di-endorse pada PTM ke-25

- Persiapan penandatanganan LOI *One Borneo Quarantine* sedang dalam proses finalisasi *legal scrubbing*
- Penyelesaian beberapa proyek terkait pengembangan digitalisasi UMKM dengan sedang disusunnya rencana business centre virtual;
- penyelesaian proyek infrastruktur prioritas (PIPs) dan proyek prioritas yang tertunda akibat pandemic

b. Rapat koordinasi penyelesaian *pending matters* implementasi berbagai arahan Menteri dan Kepala Negara dalam Kerja sama ekonomi sub-regional

Telah diadakan beberapa pertemuan koordinasi penyelesaian *pending matters* arahan Kepala Negara dan Menteri sebagai berikut:

- Kemenko Perekonomian telah mengadakan beberapa pertemuan koordinasi dengan Kemlu dan Barantan pada tanggal 20 Juli 2022 membahas proses *legal scrubbing* *LoI One Borneo Quarantine Initiative*.
- Pada tanggal 15 Agustus 2022 telah dilaksanakan pertemuan virtual dengan ADB untuk membahas tindak lanjut GCAP Pontianak.

Capaian TW IV

a. Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Tuan Rumah Penyelenggara Ministerial Meeting BIMP EAGA Ke-25

Rapat diselenggarakan pada 3 November 2022 dengan peserta dari Kemenko Perekonomian meliputi Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Organisasi, Biro KLIP, Biro Umum, Klinik Pratama, dan seluruh Keasdepan di Deputi VII. Selain itu juga hadir perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Kalimantan Barat, Kadin, dan Pihak Penyedia.

Pada rapat ini, dibahas isu logistik seperti: undangan, proses perijinan, public outreach dan promosi, *liaison officer*, petugas MC, Penyiapan *handbook* dan link registrasi, kendaraan VVIP dan VIP, *Shuttle* Kendaraan Delegasi, Daftar Tamu VVIP, VIP, dan Delegasi, petugas protokol dan pengamanan, alur kedatangan delegasi, VIP Room di bandara, penyambut tamu VIP VVIP,

Hotel, Protokol kesehatan, logistik site visit, logistik ruang pertemuan, welcome dinner, dan interpreter.

b. Rapat koordinasi substansi persiapan BIMP-EAGA MM ke-25

Rapat Koordinasi persiapan substansi penyelenggaraan PTM BIMP-EAGA ke-25 dilaksanakan pada 8 November 2022 dan mengundang seluruh *focal point* BIMP-EAGA, Perwakilan RI, Asisten Deputi Kemenko Perekonomian yang menangani isu terkait, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Substansi yang dibahas meliputi perkembangan proyek masing-masing Cluster dan Working Group, antara lain *Agribusiness Cluster, Joint Tourism Development Cluster, Power and Energy Infrastructure Cluster, Transport Cluster, ICT Cluster, Trade and Investment Facilitation Cluster, Socio Cultural Education Cluster, Environment Cluster, dan BIMP-EAGA Business Council*.

c. Penyusunan bahan posisi Indonesia dalam MM ke-25

Bahan yang disusun untuk Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-25 meliputi bahan posisi untuk BIMP-EAGA *National Secretariat Meeting, BEBC Board Meeting, Senior Officials Meeting, CMGLF, dan BIMP-EAGA Business Forum, BIMP-EAGA Ministerial Retreat, dan BIMP-EAGA Ministerial Meeting*. Penyusunan bahan posisi bersumber dari beberapa rapat koordinasi dan jaring masukan dari K/L *Focal Point* yang diadakan sebelumnya.

d. Pelaksanaan Pertemuan BIMP-EAGA MM ke-25

Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-25 diselenggarakan pada 23-26 November 2022 di Pontianak, Kalimantan Barat. Delegasi yang hadir merupakan perwakilan seluruh pemangku kepentingan dari keempat negara BIMP-EAGA, BIMP-FC, ADB dan ASEC.

Rangkaian pertemuan ini terdiri dari BIMP-EAGA *National Secretariats' Meeting* dan BIMP-EAGA *Business Council (BEBC) Board Meeting* pada 23 November 2022, 30th BIMP-EAGA *Senior Officials' Meeting* pada 24 November 2022, 4th BIMP-EAGA *Chief Minister, Governor, Local Government Forum (CMGLF)* dan *Business Forum* pada 25 November 2022, Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah dan 8th BIMP-EAGA *Ministerial*

Retreat pada 25 November 2022, 25th BIMP-EAGA Ministerial Meeting pada 26 November 2022.

Gambar 3.38 Joint Statement Twenty-Five BIMP EAGA Ministerial Meeting



**JOINT STATEMENT
TWENTY FIFTH
BRUNEI DARUSSALAM–INDONESIA–MALAYSIA–PHILIPPINES
EAST ASEAN GROWTH AREA MINISTERIAL MEETING**

25TH BIMP-EAGA MM

**26 NOVEMBER 2022
Pontianak, West Kalimantan, Indonesia**

1. We, the Ministers of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and the Philippines gather in Pontianak, West Kalimantan, Indonesia on the 26th November 2022 for the 25th Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Ministerial Meeting chaired by H.E. Airlangga Hartarto, Coordinating Minister for Economic Affairs, Indonesia.
2. We are encouraged by BIMP-EAGA's economic performance, despite challenging global and regional circumstances. The BIMP-EAGA economy is currently showing signs of recovery as it grew by 2.4% in 2021 compared to 3.3% contraction in 2020. Our combined BIMP-EAGA Gross Domestic Product current prices stood at USD359.7 billion and total trade in goods increased by USD27.5 billion. While Foreign Direct Investment expanded by almost USD1 million, we still need to exert more effort to mobilise domestic investment. Tourism remains the hardest hit sector, but we are optimistic that the industry is on the way to recovery considering that we have lessened the decrease in tourist arrivals by 36% compared to 76% in 2020 to 40.1% in 2021 with the ease of travel restrictions.
3. We are grateful that despite the unprecedented challenges and socioeconomic impact brought about by the coronavirus disease (COVID-19) crisis, our cooperation remains unwavering. We commend and sincerely appreciate the collective efforts of our Senior Officials, BIMP-EAGA Business Council (BEBC), National Secretariats (NS), Clusters and Working Groups (CWGs), BIMP-Facilitation Centre (BIMP-FC), Asian Development Bank (ADB), Information Communication and Technology (ICT) Chief Executive Officer (CEO) Forum, and the private sector for working tirelessly to achieve the goals set out in BIMP-EAGA Vision (BEV) 2025.
4. We commend the reinvigorated interest to strengthen participation of the BIMP-EAGA local governments in the subregion's programs and initiatives as highlighted in the recently held 4th BIMP-EAGA Chief Ministers, Governors, and Heads of Local Government Forum (CMGLF) on 25th November 2022. We took note the proposal to explore a parallel BIMP-EAGA parliamentary forum as venue for dialogue and cooperation among legislators in the focus areas. We encourage the states and provincial governments to mainstream BIMP-EAGA's development agenda in their policies, plans and initiatives.

e. Penyusunan Matriks Tindak Lanjut Arahan Menteri dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-25

Penyelenggaraan Rangkaian PTM BIMP-EAGA ke-25 di Pontianak, Kalimantan Barat berjalan dengan baik serta menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bermanfaat nyata bagi perekonomian BIMP-EAGA.

Kemenko Perekonomian akan melanjutkan koordinasi dan kolaborasi dengan CWGs dan K/L terkait lainnya, BEBC, CMGLF di wilayah Indonesia-EAGA untuk mendorong implementasi proyek-proyek yang telah dilaporkan dalam setiap pertemuan.

Seluruh stakeholders BIMP-EAGA akan berkoordinasi lebih lanjut untuk menindaklanjuti arahan SO dan para Menteri baik dalam proyek CWGs, CMGLF maupun BEBC. Kemenko perekonomian selaku Sekretariat Nasional BIMP-EAGA akan berkoordinasi lebih lanjut menindaklanjuti arahan para Menteri untuk mempercepat proses legalisasi BIMP-FC. Saat ini penyusunan matriks masih dalam tahap kompilasi update perkembangan proyek dari masing-masing CWGs.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Indonesia selaku chair secara proaktif memimpin jalannya pertemuan dan menghasilkan beberapa deliverables seperti pengesahan dokumen Acceleration Cooperation Together Mid-Term Review BIMP-EAGA Vision (ACT MTR-BEV) 2025, revitalisasi Chief Ministers, Governors, and Heads of Local Government Forum (CMGLF), Peningkatan proyek konektivitas BIMP-EAGA, dari US\$ 24,3 miliar pada tahun 2021 menjadi US\$ 32,8 miliar pada tahun 2022, naik sebesar 82%.
- Pameran showcase UMKM dan proyek-proyek konektivitas BIMP-EAGA, BIMP-EAGA Business Council (BEBC) Business Forum, dan Penanaman mangrove secara virtual turut diadakan dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25.
- Sebelum dilaksanakannya kegiatan Pertemuan Tingkat Menteri ini, masing-masing Clusters/*working group* sudah melaksanakan meeting tersendiri untuk pembahasan progress update yang dapat dilaporkan kepada *Signing Ministers*.
- Penandatanganan *Letter of Intent One Borneo Quarantine Initiative* belum dapat dilaksanakan pada pertemuan tingkat menteri 2022 dikarenakan belum selesainya proses internal legal scrubbing dari pihak Malaysia. Penandatanganan akan ditunda pada tahun 2023.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-25 turut dihadiri oleh Signing MInister BIMP-EAGA Brunei Darussalam Dato Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Signing Minister BIMP-EAGA Malaysia Ybhg. Dato' Nor Azmie Bin Diron, dan Signing Minister BIMP-EAGA Filipina Secretary Maria Belen S. Acosta. Turut pula dihadiri Director General ADB Ramesh Subramaniam dan Direktur ASEAN Secretariat Ahmad Zafarulla.
- Jumlah SDM di Keasdepan Regional dan Sub-Regional dioptimalkan untuk persiapan dan penyelenggaraan PTM BIMP-EAGA ke-25 di Pontianak, Kalimantan Barat. Koordinasi, persiapan awal, dan dukungan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan teknologi baik dalam bentuk pertemuan/rapat virtual dan korespondensi via email/WhatsApp.
- Delegasi yang hadir dalam rangkaian PTM BIMP-EAGA ke-25 ini sekitar 400 orang dari Filipina, Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Delegasi Indonesia yang hadir kurang lebih dari 250 orang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan sektor swasta.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kemenko Perekonomian selaku penyelenggara rangkaian PTM BIMP-EAGA ke-25 tahun 2022 ini bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pendanaan (cost sharing) pelaksanaan seluruh rangkaian pertemuan.

16. Kesepakatan pada BIMP-EAGA *Senior Official Meeting*



Dalam rangka persiapan pertemuan SOM, telah dilaksanakan BIMP-EAGA SOM dalam rangkaian Strategic Planning Meeting pada tanggal 28 April 2022. Agenda pembahasan antara lain: Laporan *Cluster/Working Groups* dalam *Mini Strategic Planning Meeting*; Perkembangan kerjasama BIMP-EAGA dengan beberapa *development partner*; Diskusi *Mid Term Review BIMP-EAGA Vision 2025*; Persiapan 2023 *Strategic Planning Meeting* dan Persiapan PTM BIMP-EAGA ke-25 tahun 2022 di Pontianak.

BIMP-EAGA SOM rencananya akan dilaksanakan pada Rangkaian PTM BIMP-EAGA ke-25 tahun 2022, yakni pada tanggal 24 November 2022. Pada pertemuan NS tanggal 27 September 2022 telah dibahas agenda SOM. Beberapa topik yang rencananya akan didiskusikan pada pertemuan tersebut antara lain hasil MTR, *deliverables* proyek, dan usulan dari CWGs. Pada 1 September hingga Oktober 2022 dilaksanakan pertemuan masing-masing *Cluster/Working Groups* dengan agenda utama yakni penyusunan laporan kepada SO dalam pertemuan BIMP-EAGA SOM.

Gambar 3.39 *The 30th BIMP-EAGA Senior Officials' Meeting* di Pontianak, Kalimantan Barat tanggal 24 November 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pertemuan berjalan dengan lancar dan sukses dihadiri oleh *Senior Officials* negara anggota BIMP-EAGA. Pertemuan menghasilkan Laporan *Senior Officials* kepada para Menteri BIMP-EAGA yang berisikan capaian program kerja *Cluster/Working groups* selama tahun 2021-2022. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian selaku *Chair Senior Officials* berhasil memimpin jalannya pertemuan dan berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional negara anggota BIMP-EAGA lainnya, pihak swasta/BEBC, dan pemerintah daerah.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah SDM di Keasdepan Regional dan Sub-Regional dioptimalkan untuk persiapan dan penyelenggaraan *Senior Officials Meeting* (SOM) dalam rangkaian PTM BIMP-EAGA ke-25 di Pontianak, Kalimantan Barat. Koordinasi, persiapan awal, dan dukungan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan teknologi baik dalam bentuk pertemuan/rapat virtual dan korespondensi via email/WhatsApp.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kemenko Perekonomian selaku penyelenggara *Senior Official Meeting* BIMP-EAGA ke-30 bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pendanaan (*cost sharing*) pelaksanaan seluruh rangkaian pertemuan.

17. Kesepakatan pada CIMT *Advisory Committee Meeting*

Pada tanggal 25 Januari 2022 telah dilaksanakan *Special* ACM yang merupakan tindak lanjut dari ACM ke-20 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan pembahasan utama yaitu mengenai masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur IMT yang akan habis pada tahun 2022 dan finalisasi dari *Amandement Policy and Practical Manual* (PPM). Selain itu, CIMT telah mengajukan *proposal budget* yang dibahas pada *special* SOM tanggal 25 Januari 2022. Di mana meeting pada prinsipnya menyetujui budget yang diajukan oleh CIMT, tetapi meminta revisi pada beberapa *point*. *Proposal budget* dengan perubahan ini akhirnya mendapat persetujuan dari negara-negara anggota IMT pada periode Februari-Maret 2022.

Terkait dengan masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur, disepakati bahwa pejabat sekarang akan diperpanjang masa jabatannya sampai September 2022, dan akan dilakukan penilaian kinerja setelah itu. Apabila kinerja dinilai bagus, maka masa jabatan akan diperpanjang 1 tahun lagi sampai akhir 2023.

Pada bulan Juni 2022, CIMT telah meminta persetujuan negara-negara anggota untuk menunjuk BDO *Governance Advisory* Sdn Bhd sebagai audit eksternal untuk Laporan Keuangan 2021 dengan penyerapan anggaran senilai MYR 56.180 yang masih di bawah total alokasi anggaran senilai MYR 75.000. Perusahaan tersebut merupakan auditor eksternal yang ditunjuk untuk periode tahun sebelumnya. Negara anggota menyetujui penunjukan tersebut.

Gambar 3.40 Advisory Committee Meeting, 14 September 2022, Phuket-Thailand



Pada *Advisory Committee Meeting* 14 September 2022 yang dilaksanakan dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri, Rapat mengesahkan laporan audit CIMT Tahun Anggaran 2021. Rapat juga meminta CIMT untuk mengambil tindakan perbaikan atas temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor. Rapat juga meminta CIMT untuk: 1. mengubah gaya laporan dari *output-oriented* menjadi *outcome-based outlook* dengan menggunakan penganggaran berbasis kinerja; menyiapkan matriks tindak lanjut untuk negara-negara anggota sebelum pertemuan ACM berikutnya.

Gambar 3.41 Konsep Laporan 21st CIMT Advisory Committee Meeting (ACM)

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

ACM berhasil dilaksanakan dengan baik. Pada kesempatan tersebut CIMT melaporkan realisasi penggunaan anggaran yang telah disetujui sebesar 34% per bulan Juni 2022 dengan proyeksi penyerapan hingga 80% pada akhir 2022. AC menerima laporan tersebut, dan mengarahkan agar memperhatikan asas penghematan dan kebermanfaatan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah SDM yang menjadi delegasi pada ACM sebanyak 4 orang (terdiri dari 1 orang level *Senior Official*, 1 orang level *National Secretary*, dan 2 staf). Karena ACM merupakan rapat terbatas, Kemenko Perekonomian selaku *National Secretariat* tidak mengundang *stakeholders* lain dalam pertemuan ACM ini.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dengan waktu yang terbatas, biaya tiket perjalanan menjadi meningkat karena pembelian sudah mendekati keberangkatan. Namun, di samping itu, delegasi yang berangkat dari Kemenko Perekonomian (Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional) hanya 4 orang.

18. Kesepakatan pada Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) *Senior Official Meeting*

Pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan *Special Senior Official Meeting* mengenai Cetak Biru Implementasi IMT-GT 2022-2026 tepatnya pada tanggal 25 Januari 2022 di mana pada pertemuan tersebut telah disetujui untuk meng-*endorse draft* IB 2022-2026 secara intersesi setelah dokumen yang direvisi mendapat persetujuan dari *Senior Officials*. Selanjutnya pada forum tersebut turut ditetapkan rencana pelaksanaan SOM IMT-GT berikutnya dalam rangka persiapan rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT (*SOM Preparatory for MM*) pada bulan Agustus 2022.

Adapun rencana pelaksanaan pertemuan tingkat SOM dalam rangka persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IMT-GT/IMT-GT *Summit* belum dapat dilaksanakan mengingat rencana pertemuan IMT-GT *Summit* yang diasumsikan pada bulan April, pelaksanaannya tertunda karena mengikuti jadwal pertemuan ASEAN *Summit*.

Pada Triwulan II telah dilaksanakan pertemuan IMT-GT SPM pada tingkat SOM dengan agenda utama adalah penyampaian rencana kerja dari masing-masing WG/SWG pada tahun 2022 untuk mendapat masukan dan arahan dari SOM. Saat ini terindikasi sebanyak 68 *ongoing projects*, 12 *postponed projects*, dan 16 *new projects*.

Menindaklanjuti *Strategic Planning Meeting* tingkat SOM pada 25 Mei 2022, masing-masing *Working Group* pada kerja sama IMT-GT telah melaksanakan *WG meeting* pada periode Juli-Agustus 2022 untuk dijadikan bahan intervensi *Senior Official* pada SOM terkait Pembahasan Perkembangan Sektoral.

Selain itu, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka penyusunan bahan posisi Indonesia untuk pertemuan tingkat pejabat senior IMT-GT ke-29 dan untuk pertemuan tingkat menteri ke-28 yakni (1) Permohonan pembaharuan data Proyek Konektivitas Fisik (PCPs) kepada K/L terkait pada 1-7 September 2022; (2) Rapat koordinasi dengan Pusat Fasilitas Kerjasama Kemendagri pada

5 September 2022; (3) rapat koordinasi Persiapan Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-28 secara daring pada 7 September 2022.

Kemenko Perekonomian telah mengirimkan surat permohonan masukan atas draft *Ministerial Joint Statement* kepada para *stakeholder*. Masukan yang didapat antara lain dari: Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan.

Gambar 3.42 *The 29th IMT-GT Senior Officials' Meeting* di Phuket, Thailand pada 14 September 2022



Pertemuan IMT-GT *Senior Official* ke-19 dilaksanakan pada 14 September 2022 dalam Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri ke-28 di Phuket, Thailand. Dalam pertemuan ini dilakukan perpindahan Keketuaan dari Malaysia selaku *standing chair* kepada Thailand.

Perwakilan dari *Working Group*, JBC dan UNINET menyampaikan hasil pertemuan masing-masing kepada SO yang berisi capaian proyek selama tahun 2022 dan usulan proyek baru yang akan dikerjasamakan, terutama proyek di bawah kerangka *Implementation Blueprint 2022-2026*. CIMT juga menyampaikan program dan kegiatan yang telah dilakukan sampai Bulan September. Dari laporan yang disampaikan ini, SO memberikan tanggapan dan

arahan dimana dibutuhkan. Di akhir pertemuan juga dibahas rencana KTT IMT-GT ke-14 dan SOM ke-30, dimana Indonesia yang akan menjadi host pertemuan 2023 dan rencananya akan dilaksanakan di Kepulauan Riau.

Gambar 3.43 Laporan *the 29th IMT-GT Senior Officials' Meeting*



INTRODUCTION

The Senior Officials' Meeting was held on 14 September 2022 in Phuket, Thailand. The meeting was chaired by Hon. Mr. Danucha Pichayanon, Secretary General of the Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) Thailand. The Indonesia delegation was led by Hon. Dr. Edi Prio Pambudi, Deputy Minister for International Economic Cooperation, Coordinating Ministry for International Economic Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, whilst Malaysia delegation was led by Hon. Datuk Seri Saiful Anuar bin Lebai Hussien, Director General of the Economic Planning Unit (EPU), Prime Ministers Department of Malaysia. The meeting was also attended by Mr. Alfredo Perdiguero, Director of Regional Cooperation and Operations Coordination Division, Southeast Asia Department of Asian Development Bank (ADB), Dr. Lim Chze Cheen, Director of ASEAN Connectivity Division

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Kegiatan berjalan relatif lancar tanpa kendala. Kemenko Perekonomian sebagai *National Secretariat* berkoordinasi dengan intens khususnya dengan *National Secretariat* Thailand yang menjadi Tuan Rumah. Kemenko Perekonomian juga mendapat support dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri, serta Sekretariat Negara.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dokumen-dokumen terkait perjalanan dinas luar negeri disiapkan dalam waktu yang sangat terbatas karena padatnya kesibukan. Ke depannya, perlu dipersiapkan lebih matang dengan waktu yang lebih memadai. Khususnya terkait surat undangan DELRI dan sirkulasinya kepada *stakeholders* terkait.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

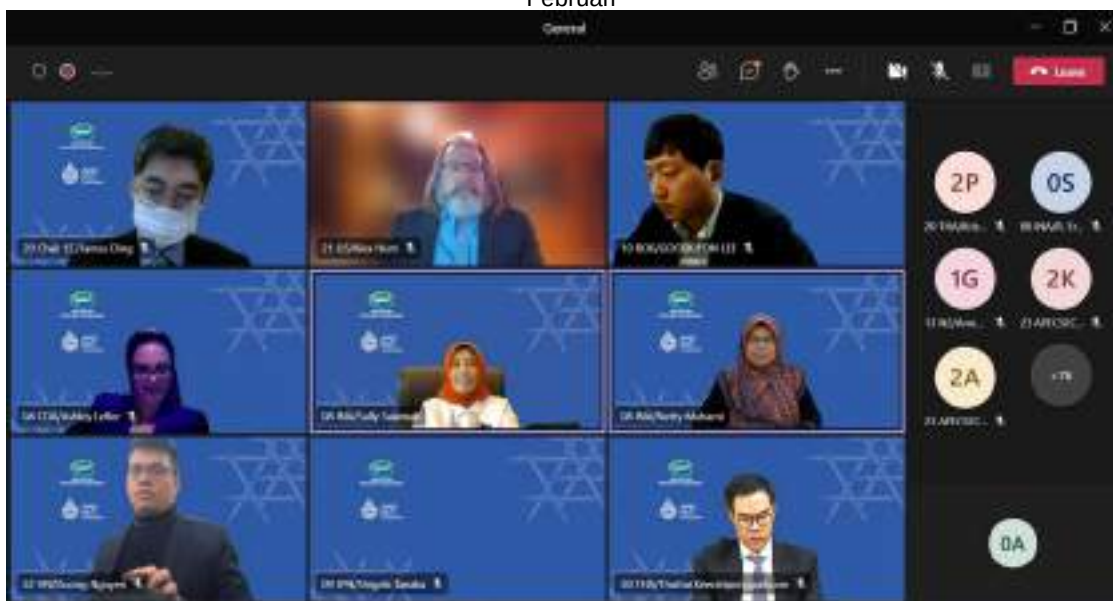
Dengan waktu yang terbatas, biaya tiket perjalanan menjadi meningkat karena pembelian sudah mendekati keberangkatan. Namun, di samping itu, delegasi yang berangkat dari Kemenko Perekonomian (Kedeputan Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional) hanya 4 orang.

19. Kesepakatan pada Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) *Senior Official Meeting*

Pertemuan APEC EC ke-1 2022

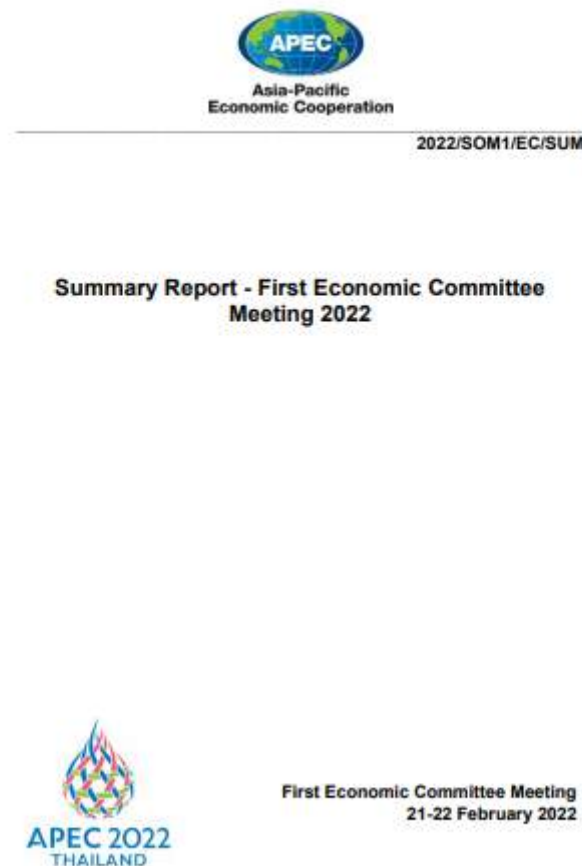
Pertemuan yang dihadiri Kementerian Investasi/BKPM, BPKP, MA, KPPU, dan Lembaga Hukum terkait sebagai delegasi RI ini telah dilaksanakan pada 21-22 Februari 2022 secara daring. Pertemuan bertujuan untuk memaparkan dan mendiskusikan: (i) *AEPR 2021* dan *AEPR 2022*; (ii) *Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR)*; (iii) *Laporan Competition Policy and Law Group (CPLG)* dan *EC Friends of the Chair (FotC)*; (iv) *Policy Dialogue on Structural Reform and the Future of Work – Tripartism*; dan (v) *Policy Dialogue on the Launch of the APEC Collaborative Framework for Online Dispute Resolution*.

Gambar 3.44 Pertemuan Pleno APEC Economic Committee ke-1 2022 secara virtual pada 21-22 Februari



Hasil Kesepakatan pada pertemuan tersebut antara lain:

- I. Indonesia menjadi bagian dari *core team* AEPR 2021 dan AEPR 2022. Untuk AEPR 2021, Indonesia telah menyerahkan *case study* dengan tema Kartu Pra-Kerja dan telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan utama AEPR 2021. Sedangkan untuk AEPR 2022, Indonesia akan menyusun *case study* dan ikut serta dalam pengisian kuesioner.

Gambar 3.45 Report by the Chair of the Economic Committee (EC) on EC1 2022

- II. Indonesia telah menyerahkan IAP Indonesia 2021 – 2025 dengan mengusung 4 tema, yaitu: (1) *Creative Economy and Digital Economy Improvement*; (2) *MSMEs development and financial inclusion*; (3) *Bureaucratic and regulatory reform*; dan (4) *Green Growth and Green Economy*. Disamping itu, Indonesia akan menyelenggarakan *Capacity Building to formulate Better Policy Responses to increase MSMEs Demand in the Wake of Covid-19 Pandemic in APEC Economies* secara luring di Bali pada November 2022.
- III. Indonesia sebagai Convenor FotC CLG, diwakili oleh BPKP telah melaporkan program kerja FotC CLG dengan tema *Enhancing Good Corporate Governance (GCG) assessment criteria for more sustainable practice*. Disamping itu, Indonesia sedang dalam proses persiapan kuesioner untuk memetakan kondisi *Corporate Governance Assessment* pada Ekonomi APEC.

Finalisasi APEC Individual Action Plan (IAP) Indonesia

Indonesia telah menyerahkan IAP Indonesia 2021 – 2025 dengan mengusung 4 tema sebagaimana di atas. IAP tersebut merupakan hasil konsultasi dan diskusi dengan K/L terkait dan juga sejalan dengan program RPJMN 2020 - 2024. IAP telah melewati proses *review dan proofread* dan sedang dalam tahap penyusunan untuk dipublikasikan oleh APEC Secretariat.

Implementasi APEC Project Capacity Building to Formulate Better Policy

Responses to Increase MSMEs Demand in the Wake of COVID-19 Pandemic in APEC Economies

Telah dilakukan penandatanganan kontrak dan dilaksanakan *Kickoff Meeting* pada 15 Maret 2022. Sebagai hasil dari *desk study dan literature review*, kuesioner disusun dan telah disirkulasikan kepada ekonomi APEC.

Penyusunan laporan APEC Economy Policy Report 2022

Case Study dan Individual Economy Report (IER) Indonesia telah disusun dan diserahkan kepada *APEC Secretariat*. *Case Study* dengan judul *Reducing Carbon Emission through Joint Crediting Mechanism in Indonesia* dan *IER Questionnaire* yang telah diisi akan menjadi bagian dari *APEC Economy Policy Report (AEPR) 2022*.

Implementasi APEC Project Capacity Building to Formulate Better Policy Responses to Increase MSMEs Demand in the Wake of COVID-19 Pandemic in APEC Economies

Telah dilakukan rapat tindak lanjut bersama konsultan pada 23 Mei 2022 dengan hasil rapat:

- a) *Progress Report 1* telah sesuai dengan persyaratan APEC dan konsultan akan menyusun *Progress Report 2*.
- b) Konsultan akan melakukan *interview* kepada beberapa instansi pusat dan daerah mengenai kebijakan di bidang UMKM, jika tidak memungkinkan dilaksanakan FGD. Kemenko Perekonomian akan membantu menyusun surat resmi untuk dikirimkan kepada instansi terkait.
- c) Meminta *APEC Secretariat* untuk memperpanjang waktu pengisian kuesioner.
- d) Diseminasi Draf Studi kepada Ekonomi akan dilakukan pada bulan Juli

Gambar 3.46 Pertemuan *Pleno APEC Economic Committee ke-2 2022*. Chiang Mai, 26-27 Agustus 2022



Pertemuan APEC EC ke-2 tahun 2022

Pertemuan Pleno APEC Economic Committee ke-2 (EC2) telah diselenggarakan pada tanggal 26 s.d 27 Agustus di Chiang Mai, Thailand, sebagai bagian dari Rangkaian Pertemuan APEC Senior Officials' Meeting ke-3 (SOM3) APEC 2022, tanggal 16 s.d 31 Agustus 2022. Pertemuan dihadiri secara fisik oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia.

Gambar 3.47 15th Conference on Good Regulatory Practices (GRP15) di Chiang Mai, 24 Agustus 2022



Hasil kesepakatan pada pertemuan tersebut antara lain:

- I. EC telah mengendorse topik *APEC Economic Policy Report (AEPR) 2023* yaitu '*Structural Reform and an Enabling Environment for Inclusive, Resilient and Sustainable Businesses*' dan *core team AEPR 2023* yang terdiri dari Australia, Canada, China, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Russia, dan Chinese Taipei. Core team dipimpin oleh Thailand dan US.
- II. EC telah mendukung *timeline* dan *template EAASR mid-term review* yang akan menjadi topik utama Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi Reformasi Struktural yang akan diselenggarakan pada margin SOM3 2023.
- III. Beberapa ekonomi telah menyampaikan presentasi pada *agenda EAASR Individual Action Plans (IAP) Showcase*, salah satunya Indonesia, disampaikan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, dan mendapat tanggapan positif dalam sesi diskusi.

Gambar 3.48 Report by the Chair of the Economic Committee on EC2 2022

- IV. Selaku Convenor FotC CLG, Indonesia, diwakili oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional telah menyampaikan laporan FotC CLG terkait update program kerja FotC CLG serta menyelenggarakan *Policy Dialogue ‘Sustainable Corporate Governance Practices’* dan pemetaan praktek *Corporate Governance* di Ekonomi APEC.
- V. Perwakilan Indonesia juga telah menyampaikan paparan kebijakan secara daring pada agenda: (i) *Policy Dialogue on “Ease of Doing Business (EoDB): Easier Access to Credit*; dan (ii) *Policy Dialogue on Regulatory Reform (RR): Agile Governance and Innovation*.
- VI. APEC ODR akan mereview implementasi ODR melalui *Courts and Arbitration Centers*
- VII. Pada hosting year 2023, US akan mengembangkan *APEC Blueprint* yang berisi panduan mengenai cara menerapkan GRP untuk kebijakan tertentu.

Gambar 3.49 *Capacity Building to Formulate Policy Response to Stimulate MSMEs' Demand in the Wake of the COVID-19 Pandemic di Bali, 19-20 Oktober 2022*



Penyelenggaraan APEC Workshop on Capacity Building to Formulate Better Policy Responses to Increase MSMEs Demand in the Wake of COVID-19 Pandemic in APEC Economies

Workshop akan diselenggarakan pada 19-20 Oktober 2022. Telah dilakukan Rapat Persiapan APEC Workshop on MSMEs bersama Keasdepan KUKM, Kemenko Perekonomian, KemenkopUKM, dan Svara Institute pada 16 September 2022. Pertemuan membahas penjajakan dukungan dan koordinasi penyelenggaraan workshop, dan menghasilkan daftar narasumber, persiapan logistik, serta pembagian peran antara Kemenko Perekonomian, KemenkopUKM, dan Svara Institut. Tindak lanjut pertemuan tertuang pada surat nomor: KSI.04.01/79.S/D.VII.M.EKON.4/09/2022 tanggal 23 September 2022.

Gambar 3.50 Laporan *Workshop Capacity Building to Formulate Policy Response to Stimulate MSMEs' Demand in the Wake of the COVID-19 Pandemic, Policy Responses to Stimulate MSME Demand in the Wake of COVID-19 Pandemic in APEC Economies*



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

1. Indonesia berperan aktif dalam forum APEC Economic Committee antara lain sebagai *EC Vice Chair, Convenor FotC CLG*, terus terlibat dan berpartisipasi aktif pada penyusunan AEPR dalam beberapa tahun terakhir, serta berkontribusi pada seluruh kegiatan APEC EC lainnya. Hal ini menimbulkan kepercayaan dari peserta forum APEC EC kepada Indonesia dan mempermudah kerja sama Indonesia dengan ekonomi APEC lainnya dalam forum APEC EC.
2. Sebagai koordinator nasional untuk forum APEC EC, Kemenko Perekonomian berperan aktif dalam merangkul dan melibatkan K/L terkait dalam menyusun posisi Indonesia dalam forum APEC EC. Hal ini membuat Indonesia memiliki posisi yang kuat ketika berpartisipasi dalam forum APEC EC.

Gambar 3.51 APEC Workshop on Enhancing Implementation of Online Dispute Resolution (ODR) through the APEC ODR Collaborative Framework and other fora including courts di Tokyo, 7-9 Desember 2022



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Dengan jumlah SDM yang sangat terbatas, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional telah menunjukkan efisiensi kerja yang maksimal dengan tetap dapat berkontribusi nyata dan memanfaatkan forum APEC EC dengan sebaik-baiknya, terbukti dengan besarnya peran Indonesia dalam forum APEC EC
2. Dari sisi teknologi, Indonesia telah memanfaatkan teknologi *video conference* dalam berpartisipasi pada beberapa kegiatan pengembangan kapasitas, antara lain:
 - *Virtual Workshop on Implementing the APEC ODR Collaborative Framework* pada 16-17 Januari 2022
 - *Going Digital to Build Resilience and Sustainable Growth in Response to COVID-19*, diikuti secara virtual pada 14 April 2022
 - APEC-BAC Virtual Roundtable: Effective Carbon Emissions Trading and Markets-Pricing Mechanisms in the Asia-Pacific Region, diikuti secara virtual pada 13 Juli 2022

- *Workshop Strengthening Supply Chain Resilience and Economic Recovery*, diikuti secara virtual pada 2 November 2022.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional melakukan efisiensi dengan memanfaatkan pendanaan APEC sebesar USD 81,774 untuk penyelenggaraan *Capacity Building to Formulate Policy Response to Stimulate MSMEs' Demand in the Wake of the COVID-19 Pandemic* di Bali yang telah berlangsung pada tahun 2022.
2. Pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional kembali mendapat pendanaan APEC sebesar USD 100,000 untuk menyelenggarakan *Capacity Building on the APEC Collaborative Framework on ODR to Improve Cross Border Trade in Indonesia* yang direncanakan akan diselenggarakan di Bali pada bulan Juni.
3. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional juga ikut serta di berbagai program pengembangan kapasitas dengan pendanaan APEC secara fisik dengan keseluruhan pembiayaan dari kerja sama APEC, antara lain:
 - *15th Conference on Good Regulatory Practices (GRP15)* dihadiri fisik di Chiang Mai, 24 Agustus 2022
 - *APEC Workshop on Enhancing Implementation of Online Dispute Resolution (ODR) through the APEC ODR Collaborative Framework and other fora including courts*, dihadiri fisik di Tokyo, pada 7-9 Desember 2022

Pada awal 2023, akan diselenggarakan *Regulatory Impact Analysis (RIA) Training Workshop* untuk meningkatkan pemahaman mengenai implementasi dan simulasi RIA selama 4 hari. Workshop ini akan didanai seluruhnya oleh the *US Support for Economic Growth in Asia (US-SEGA)* selaku lembaga yang menawarkan bantuan asistensi teknis terkait *Program Good Regulatory Practice (GRP)* yang inisiasi awal dilakukan atas hubungan baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan partisipasi aktif Delegasi Indonesia pada Kerja Sama APEC EC.

20. Kesepakatan pada Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) *Ministerial Meeting*

Dalam rangka finalisasi Cetak Biru Implementasi IMT-GT 2022-2026, telah dilaksanakan pertemuan pada tingkat Pejabat Senior IMT-GT yang dilaksanakan pada 25 Januari 2022. Pertemuan menyepakati untuk persetujuan akhir terhadap dokumen akan dilaksanakan secara intersesi setelah CIMT melakukan penyesuaian berdasarkan masukan para Pejabat Senior dan setiap negara telah menyampaikan daftar *flagship projects* dan *Priority Connectivity Projects* (PCPs).

Adapun dalam rangka memfinalisasi daftar *flagship projects* Indonesia, telah dilakukan pembahasan bilateral dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan keputusan terhadap proyek konektivitas Dumai-Melaka. Indonesia memutuskan untuk tetap melanjutkan komitmen penyelesaian proyek tersebut akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam daftar *flagship project*.

Telah dilakukan pula rapat finalisasi Proyek Connectivity Projects (PCPs) 2022-2026 yang telah dilaksanakan pada 25 Maret 2022. Cetak Biru Implementasi IMT-GT 2022-2026 masih terus mengalami perbaikan selama periode triwulan I tahun 2022 dan masih akan mendapat masukan mengingat masih terdapat pembahasan pada tingkat *working group* dalam rangkaian SPM.

Adapun dalam mempersiapkan implementasi Cetak Biru IMT-GT, telah disusun Matriks Tindak Lanjut Arahan Menteri dalam PTM ke-27 dan Kepala Negara dalam Summit ke-13, dimana telah dilakukan koordinasi dan monitoring dengan WG dan SWG dalam persiapan pelaksanaan SPM.

- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Arahan Menteri dan Kepala Negara.

Arahan Kepala Negara dan Menteri yang penting adalah penyelesaian penyusunan IMT-GT IB 2022-2026, yang ditargetkan dapat disahkan pada saat Pertemuan Tingkat Menteri MT-GT bulan September 2022 mendatang. Perkembangan sampai saat ini, IMT-GT IB 2022-2026 pada tahap finalisasi dengan mengakomodir berbagai masukan dari seluruh

negara setelah dilakukan penyelarasan dengan IB 2017-2022 dalam rangkaian SPM pada April-Mei 2022 yang lalu. Untuk memperkuat implementasi draft IB 2022-2026 disusun *Term of Reference* bagi masing-masing *working groups*.

- Rapat Koordinasi Penyelesaian *Pending Matters* Implementasi berbagai arahan Menteri dan Kepala Negara

Dalam rangka finalisasi IB 2022-2026 telah dilakukan beberapa rapat koordinasi pelaksanaan *pending matters* sebagai berikut:

- Pembahasan bilateral dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas keberlangsungan proyek konektivitas Dumai Malaka. Baik Indonesia dan Malaysia tetap berkomitmen untuk melaksanakan proyek konektivitas Dumai-Malaka. Kementerian Perhubungan menyatakan saat ini sedang dalam tahap finalisasi rancangan pembangunan Pelabuhan Sri Junjungan.
- Pada 9 Juni 2022 telah dilakukan rapat pembahasan inisiatif *Halal Blockchain* antara internal Kemenko Perekonomian, USK, dan BPJPH. USK memaparkan mengenai proposal pengembangan sistem *halal blockchain* digitalisasi rantai pasok produk kopi. BPJPH menyebutkan proyek ini potensial dan dapat diselaraskan dengan kebijakan pengembangan industri halal yang saat ini sedang dirancang oleh Pemerintah Indonesia.
- Pembahasan penandatanganan MoU Rubber Cities yang telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk mempersiapkan hal tersebut. Pada tanggal 2 Juni 2022 telah dilakukan pembahasan antara Kemenko Perekonomian, Kemenperin, dan Kemendag untuk pembahasan inisiatif pengembangan *Rubber Cities* di IMT-GT. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 dilakukan Rakor penandatanganan MoU Rubber Cities yang memfinalkan posisi Indonesia untuk pejabat penandatanganan MoU yang akan disepakati pada pertemuan PIT Rubber Cities berikutnya dengan Malaysia dan Thailand. MoU Rubber Cities rencananya akan ditandatangani pada pertemuan KTT IMT-GT 2022.

- Rapat Koordinasi Persiapan IMT-GT MM ke-28

Untuk mempersiapkan bahan menteri dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-28, telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 7 September 2022. Rapat tersebut menghasilkan dokumen berupa matriks intervensi dan menjaring masukan dari masing-masing *focal points*.

Selain itu, juga diadakan rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan *Chief Minister and Governors Forum* (CMGF) yang akan turut dilaksanakan di Thailand dalam rangkaian PTM IMT-GT ke-28. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa *Head of Delegation* CMGF dari Indonesia adalah Gubernur Kepulauan Riau. Presentasi yang ditampilkan terdiri dari kompilasi bahan yang turut dikirimkan oleh provinsi lain di Sumatera.

Telah dilaksanakan juga rapat terkait rencana penandatanganan *MoU on Rubber Cities and Rubber Industry*, di mana Pejabat Penandatanganan yaitu Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil masih merupakan Pejabat Plt, maka diputuskan bahwa pejabat penandatanganan akan digantikan oleh Ditjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional.

Turut dilakukan beberapa rapat terkait *pending matters*, antara lain:

- a. Finalisasi indikator 2.1 pada *Focus Area Trade and Investment* menjadi Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Palembang, serta indikator 2.2 menjadi KEK Sei Mangkei dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 - b. Persetujuan India sebagai negara *development partner* pertama akan dilakukan pada pertemuan Summit IMT-GT. Sementara itu, telah dilakukan rapat untuk menjaring *early harvest projects* dan mendiskusikan *Plan of Action*.
- Penyusunan Bahan Posisi Indonesia dalam MM ke-28
- Setelah dilakukan rapat koordinasi untuk menjaring masukan dari K/L terkait selaku *focal points* pada kerja sama IMT-GT, didapatkan bahan posisi antara lain sebagai berikut:
- a. Menyetujui Implementation Blueprint 2022-2026 untuk disahkan pada IMT-GT Summit ke-14

- b. Beberapa area kunci untuk pemulihan rantai pasok yaitu: pangan dan energi, digitalisasi, industri halal, kawasan ekonomi khusus, dan konektivitas
- c. Sinergi antara IMT-GT dengan platform kerja sama kawasan lainnya seperti: ASEAN, RCEP, dan IPEF
- d. Kerja sama lebih erat dengan dunia usaha (IMT-GT *Joint Business Council* JBC) dan University Network (UNINET)

Gambar 3.52 the 28th IMT-GT Ministerial Meeting di Phuket, Thailand tanggal 16 September 2022



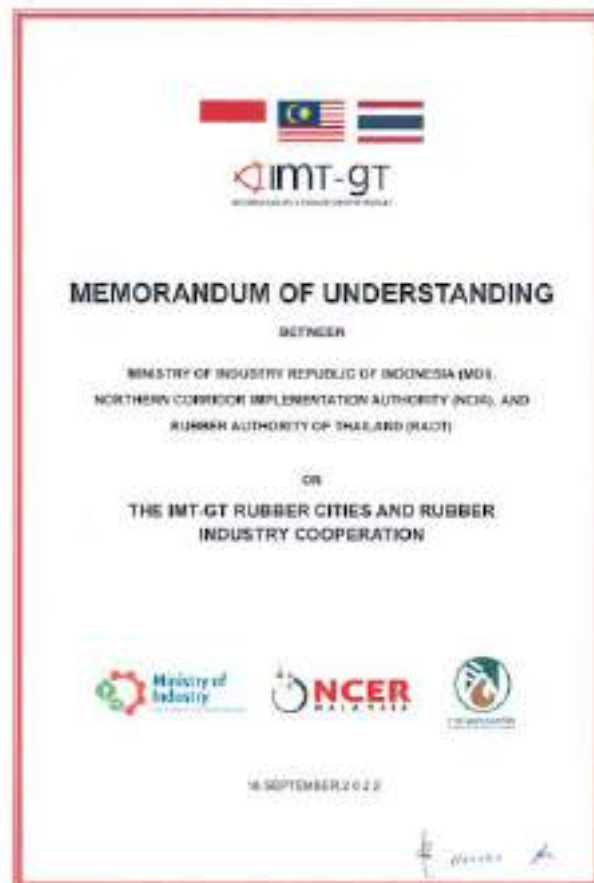
- Pelaksanaan Pertemuan IMT-GT MM ke-28

Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-28 dilaksanakan di Phuket, Thailand pada tanggal 13-16 September 2022. Dalam pertemuan ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perindustrian, dengan didampingi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian. Rangkaian acara dalam pertemuan ini antara lain: *National Secretariat Meeting, Joint Business Council Meeting, 28th Senior Officials Meeting, 21st Advisory Committee Meeting, 19th Chief Ministers & Governors Forum, 8th Ministerial Meeting, 28th Ministerial Meeting.*

Dalam pertemuan ini ada beberapa isu yang menjadi *highlight* pertemuan, antara lain:

- a. Penandatanganan *MoU on Rubber Cities and Rubber Industry Cooperation* oleh para pejabat terkait, dari Indonesia diwakili oleh Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;
- b. *Implementation Blueprint 2022-2026* yang sudah disetujui oleh para Menteri yang kemudian akan disahkan pada KTT;
- c. Program *IMT-GT Visit Year 2023* yang menjadi salah satu program pemulihan ekonomi pasca pandemi di sektor pariwisata, sekaligus untuk memperingati 30 tahun Kerjasama IMT-GT.

Gambar 3.53 *MoU on Rubber Cities and Rubber Industry Cooperation*



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Kemenko Perekonomian selaku *National Secretariat* berkoordinasi dengan banyak *stakeholders*, termasuk dengan Kementerian

Perindustrian, di mana bapak Menteri Gumiwang Kartasasmita mewakili bapak Airlangga Hartarto selaku *signing ministers*.

- Sebelum dilaksanakannya kegiatan Pertemuan Tingkat Menteri ini, masing-masing *working group* sudah melaksanakan meeting tersendiri untuk pembahasan progress update yang dapat dilaporkan kepada *Signing Ministers*.
- *Framework of Cooperation on Customs, Immigrations, and Quarantine*, yang rencananya akan ditandatangani pada kesempatan ini, tidak dapat dilaksanakan karena ada permintaan dari pihak Malaysia terkait pergantian kekuasaan dalam negeri.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Bapak Menko Perekonomian berhalangan datang dalam kegiatan *28th Ministerial Meeting*, sehingga menunjuk Bapak Menteri Perindustrian sebagai yang mewakili. Kemenko Perekonomian bekerja sama dan berkomunikasi intens dengan Kementerian Perindustrian terkait hal tersebut sehingga kehadiran *Signing Minister* Indonesia pada kesempatan tersebut berjalan dengan baik.
- Pada *28th Ministerial Meeting*, Kemenko Perekonomian hanya mengirim 4 delegasi. Namun, selaku *National Secretary*, Kemenko Perekonomian telah mengirimkan Surat permohonan DELRI yang ditindaklanjuti dengan kedatangan sekitar 80 Delegasi dari Daerah maupun K/L terkait selaku *focal points*. Ke depannya, jumlah ini dapat lebih diefektifkan dengan lebih selektif terhadap *stakeholders* mana yang sebaiknya dikirimkan undangan menjadi anggota DELRI.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kemenko Perekonomian (dalam hal ini Kedeputian Kerja Sama Ekonomi Internasional) hanya mengirim empat delegasi untuk kegiatan ini termasuk satu *Senior Official*. Di mana delegasi tersebut berkontribusi penuh sesuai *role*-nya pada masing-masing pertemuan. Dukungan lain terhadap pelaksanaan kegiatan, dilakukan secara daring, berkoordinasi dengan tim di Jakarta.

21. Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Indonesia

Gambar 3.54 Pertemuan ke-2 Sherpa G20 Presidensi Indonesia Labuan Bajo 10 - 12 Juli 2022



Telah dilaksanakan pertemuan ke-2 Sherpa G20 Presidensi Indonesia di Labuan Bajo, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Juli 2022 hingga 13 Juli 2022. Pertemuan ke-2 Sherpa dihadiri hampir semua delegasi dari anggota G20 beserta negara undangan lainnya. Selama rapat berlangsung telah terselenggara beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembahasan mengenai *Global Health Architecture, Digitalisation, Energy Transitions*, dan *Concrete Deliverables*.
- b. Seminar dengan tema “*Blue, Green, and Circular Economy*” yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2022.
- c. *Side events* yang memperkenalkan keanekaragaman Hayati Indonesia (Komodo) dan juga ekosistem yang hidup di Indonesia.

Gambar 3.55 Pertemuan ke-2 Sherpa G20 Presidensi Indonesia Labuan Bajo 10 - 12 Juli 2022

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis Penyebab Keberhasilan pada Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Indonesia yang membahas 4 (empat) sesi yang menjadi prioritas G20 Presidensi Indonesia di Pertemuan Sherpa ke-2:

- Pada awal pertemuan Sherpa turut diadakan pertemuan *Emerging Economies* anggota G20 (EMEs) untuk mendorong penguatan posisi bersama negara berkembang. Pertemuan secara umum membahas posisi negara berkembang terhadap solusi terkait tensi geopolitik yang mewarnai bahasan working group.
- Terdapat inovasi sesi Sherpa Talk di atas kapal yang merupakan media untuk bernegosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama.

4 (empat) sesi yang dibahas pada Pertemuan Sherpa ke-2:

Sesi 1. Global Health Architecture

- Mendukung G20 untuk menghasilkan hasil konkret dan nyata serta Mendorong pembaruan fokus dari SDGs.
- Mendukung upaya PBB untuk mengakses biji-bijian di Ukraina, mencatat kerawanan pangan pangan yang semakin meningkat akibat Africa dan Timur Tengah
- Terkait ketahanan pangan, G20 mendukung tindakan untuk memastikan perdagangan bebas, penghapusan restriksi ekspor, dan transparansi stok pangan melalui AMIS.
- Mendorong negara-negara berkembang dan petani kecil merupakan kelompok rentan terdampak kondisi geopolitik.

- Menyambut baik pembentukan FIH (USD 10 *Billion* per tahun). Negara yang mempertimbangkan kontribusi keuangan (Singapura, UEA, Inggris, Australia, UE, Indonesia, AS, Gates Foundation dan Wellcome Trust).
- Dukungan kuat untuk WHO di pusat tata kelola FIH, untuk tata kelola inklusif, dan untuk didorong oleh G20.
- Perlu memastikan produksi berkelanjutan terhubung dengan *global procurement* di Afrika Selatan.
- Mempersiapkan *replenishment Global Funds to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)* dan tantangan kesehatan lain pada kontribusi FIF.
- Perlu mengatasi fokus FIF untuk mengatasi kesenjangan, pendanaan saat ini hanya 1 miliar per tahun dan diperlukan 10 miliar.
- Terkait pariwisata, mendorong *seamless travel and vaccine recognition (Blueprint for Safe Travel)*.

Sesi 2. Digitalization

- Mendorong *wording* G20 untuk lebih konsisten terkait “*human-centered*” lebih konsisten.
- China, India, Jepang, Singapura mendukung untuk meningkatkan interoperabilitas secara luas.
- Rusia mengutuk G7 akibat penyampaian informasi *mislead* yang mengakibatkan tensi geopolitik meningkat. AUS menggarisbawahi prioritas *online safety principles* tidak dapat dilanjutkan jika agresi terus terjadi.
- Mendorong *consensus* terhadap skill, literasi, dan infrastruktur serta kaitannya terhadap SDGs
- Terkait TIIWG, G20 mendorong fokus pada kebijakan *trade related industry*.
- Mendorong G20 mengatasi restriksi ekspor pangan terutama dalam konteks meningkatnya kerawanan pangan global.
- Menyambut hasil baik WTO TRIPS, MEX, Afrika Selatan, India mendorong upaya dalam exempting diagnostics and therapeutics.
- Mendukung integrasi UMKM ke dalam GVC, khususnya bagi perempuan (India, Argentina), dan dalam rangka memperkuat ketahanan rantai pasokan.

- Kanada, Mexico, US, UK, Spain and Italia mendorong Presidensi untuk memperkuat narasi kesetaraan gender.
- Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Meksiko mendorong komitmen komitmen *gender based violence* yang lebih kuat, khususnya di zona konflik.

Sesi 3. Energy Transition

- Brasil, Argentina, Cina dan Afrika Selatan menggarisbawahi perlu mempertahankan momentum pada pendanaan iklim dan CBDR, Jerman (ketua G7) menyoroti target US\$ 100 Billion akan terpenuhi pada tahun 2023.
- Mendukung usulan Presidensi terhadap *global deal* dan Bali COMPACT, serta pengembangan JETP, termasuk urgensi investasi dan pemberdayaan masyarakat.
- ACWG perlu memperbarui fokus dalam menjalankan komitmen yang ada, termasuk *foreign bribery* dan *beneficial ownership*.
- Terkait isu development, G20 harus fokus pada pencapaian SDGs secara berimbang dan tidak hanya fokus pada vaksin dan arsitektur Kesehatan.
- Mendorong *implementasi blended and innovative finance* pada negara berkembang. Afrika Selatan menggarisbawahi pentingnya mobilisasi sumber daya *domestic* dan nasional.
- Pembahasan debt sustainability tidak menjadi koridor dari DWG.

Sesi 4. Concrete Deliverable

- Secara umum, anggota G20 mendukung upaya Presidensi untuk menghasilkan *concrete deliverables*.
- Mendorong Presidensi untuk memperjelas proses kurasi dan mekanisme, termasuk pembagian kerja antara bahasan di *Working Group* dan tingkat Sherpa.

Sesi Sherpa Sofa Talk

- Memahami situasi geopolitik saat ini tidak dapat dihindari. G20 diharapkan dapat memberikan dorongan politis bagi tidak hanya negara-negara G20 namun secara global.

- G20 agar dapat membahas isu dampak dari krisis Ukraina-Rusia termasuk dampak pada pangan, energi, dan keuangan di lihat sisi pembangunan ekonomi dan keuangan. Tidak dari sisi yang dibahas dalam konteks UN dan perjanjian Internasional.
- Sepakat untuk mencari solusi dari dari krisis geopolitik saat ini. Sherpa dapat mendorong mencari *common working language*.
- Terdapat opsi untuk membahas isu U-R dalam (i) tingkat *working group*, dibahas sesuai dampak dibahas sesuai topik; atau (ii) tingkat Sherpa, Sherpas' *statement* dikeluarkan dan *working group* tidak akan membahas isu tersebut
- Sherpa perlu memberikan mandat kepada OI, termasuk WTO, WB, FAO, untuk mencari solusi dari isu tersebut.
- Selain isu U-R turut dibahas agar Sherpa tetap harus fokus pada bahasan utama termasuk capaian SDGs, *climate change*, *food security* serta menghasilkan *Leaders' Declaration* yang singkat.

Selain keberhasilan pada pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Indonesia juga terlaksana kegiatan yang menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan pertemuan, diantaranya:

- **Host Country Reception:** *Host Country Reception* merupakan agenda pertama yang dilakukan pada rangkaian Pertemuan Sherpa G20 Presidensi Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh negara anggota G20, *invitees*, dan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri yang sudah hadir pada saat kegiatan berlangsung. *Host Country Reception* dilakukan di Kisik Restaurant Ayana Komodo Resort pada pukul 19:00 waktu setempat. Secara keseluruhan, acara berlangsung dengan cuaca dan nuansa yang sangat mendukung suasana hati para delegasi. Delegasi juga menunjukkan *gesture* yang baik dan menunjukkan antusiasme terhadap jamuan hangat dan berkesan oleh Presidensi G20 Indonesia.
- **Gala Dinner and Cultural Performances:** Kegiatan *Gala Dinner* bertempat di Xanadu Beach, Plataran Komodo. Gala Dinner tersebut mengambil latar suasana pantai. Kegiatan ini dihadiri oleh negara anggota G20, *invitees*,

spouse, sponsorship, dan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri. *Seating arrangement* yang disediakan panitia, makanan yang disuguhkan hingga musik yang diputar pada makan malam dapat diterima dengan baik oleh para tamu undangan.

- **Site Visit/Excursion:** Pada 12 Juli 2022, Presidensi G20 Indonesia beserta delegasi G20 melakukan kegiatan *site visit* ke beberapa pulau di Labuan Bajo. Tujuan pertama adalah melakukan kegiatan *Coral Reef Nursery* di Ayana Pier. Sebagai bentuk bukti konkrit dukungan Presidensi G20 Indonesia terhadap transisi energi, kunjungan berikutnya membawa para delegasi mengunjungi Pulau Messah guna melakukan *showcasing* Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau Messah yang sejalan dengan isu prioritas Presidensi G20 Indonesia pada kelompok tenaga kerja transisi energi. Tidak berhenti sampai disitu, kegiatan ini dilanjutkan dengan berlabuhnya delegasi di dermaga untuk bertemu masyarakat untuk proyek CSR. Melalui kegiatan ini, Indonesia telah menunjukkan kepada delegasi G20 bagaimana upaya Indonesia dalam mempercepat transisi energi, termasuk di daerah terpencil. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan berkunjung ke Pulau Komodo, yang merupakan pulau tempat hewan eksotis Indonesia berada. Tidak lupa mengajak delegasi menginjak pasir pink asli yang merupakan keindahan alam Nusa Tenggara Barat ini, para delegasi diajak mengunjungi dan *snorkeling* di Pink Beach. Rangkaian *site visit/excursion* ini ditutup dengan mengajak delegasi tracking Pulau Padar dan memanjakan para delegasi dengan menikmati matahari terbenam di Pulau indah tersebut.
- **Side Event: Blue and Green Circular Economy:** Konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular bukanlah konsep baru. Tetapi, dunia baru tersadar akhir-akhir ini akan pentingnya melakukan transformasi dalam pendekatan ekonomi global sehingga menjadi berkelanjutan. *Blue, Green, and Circular Economy* memiliki potensi dan keuntungan besar untuk pembangunan ekonomi global berkelanjutan. Implementasinya dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru, mengurangi sampah dari berbagai sektor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Isu-isu lingkungan seperti polusi karbon, degradasi laut dan tanah, hingga sampah plastik mendorong urgensi penerapan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan. Dimoderatori oleh Track Chair Sustainable and Livable Planet Y20 Indonesia, Hanny Chrysolite, seminar

berjudul “*Blue, Green, and Circular Economy: The Future Platform for Post-Pandemic Development*” memulai pembahasan dari penjelasan konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular. Seminar ini juga turut melakukan pembahasan mengenai kontribusi Indonesia dalam implementasi ketiga konsep ekonomi ini, program dan aksi nyata di forum G20, serta tantangan yang harus diselesaikan untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ekonomi ini secara matang.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum pertemuan telah menggunakan sumber daya non anggaran secara efisien termasuk aspek logistik, *delegation handling*, *hospitality*, keamanan dan penerapan protokol kesehatan. Hal yang menjadi perhatian penting pada saat pelaksanaan kegiatan yaitu terdapat dukungan flight dari kementerian/lembaga terkait bagi para delegasi dan dukungan dari pemerintah daerah antisipasi kegiatan atas cuaca yang tidak mendukung.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Presidensi Sherpa G20 Indonesia Tahun 2022, Sekretariat Sherpa G20 Kemenko Perekonomian berkolaborasi dengan dunia usaha baik dengan Badan Usaha Milik Negara maupun dengan sektor privat. Kolaborasi antara Kemenko Perekonomian tersebut dalam bentuk penyelenggaraan *side events* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan (*hospitality*) kepada delegasi G20 dan untuk memperkenalkan kebudayaan tradisional Indonesia melalui kuliner nusantara, musik dan tari tradisional serta produk kerajinan asli Indonesia. Persembahan ini diharapkan dapat mengharumkan nama dan reputasi Indonesia sebagai tuan rumah yang baik di mata internasional.

Badan usaha dapat memanfaatkan side event G20 sebagai sarana untuk mempromosikan profil dan capaian perusahaan di forum internasional. Beberapa Badan Usaha yang mendukung penyelenggaraan pertemuan Sherpa G20 antara lain:

- Lembaga Penjamin Simpanan
- PT Perusahaan Listrik Negara

- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
- PT Bank Rakyat Indonesia
- Kapal Api Global
- PT Yili Indonesia
- PT Hyundai Motor Indonesia
- PT Grab Indonesia

Dukungan dari dunia usaha tersebut digunakan untuk penyelenggaraan beberapa kegiatan dalam pelaksanaan Presidensi Sherpa G20 Indonesia 2022, antara lain:

- Gala *dinner*
- *Site visit*
- *Side event*
- Seminar
- Transportasi ramah lingkungan

22. Kesepakatan pada *Strategic Planning Meeting* Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (SPM IMT-GT)

Gambar 3.56 Forum SPM, 31 Maret 2022, Virtual



Pada 4 Maret 2022, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan SPM di mana salah satu agendanya adalah pembahasan persiapan masing-masing Working Group (WG) serta pembahasan isu-isu yang menjadi *highlight* posisi Indonesia dengan mempertimbangkan arahan *leaders* pada *Summit* tahun 2021. Pembicaraan lebih lanjut mengenai rencana kerja IMT-GT ini disampaikan oleh *National Secretariat* masing-masing negara pada sesi *Strategic Planning Meeting Opening Session* yang berlangsung secara virtual pada 31 Maret 2022. Ini merupakan sesi pembuka dari rangkaian *Breakout Session* yang akan dijalankan masing-masing WG pada periode April hingga Mei 2022.

Seluruh WG pada IMT-GT telah melaksanakan SPM *breakout session* pada periode April-Mei 2022. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut disusun rencana kerja IMT-GT untuk tahun 2022-2023.

Gambar 3.57 15th IMT-GT SPM Opening Session

Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Keberlangsungan proyek konektivitas antara Dumai-Malaka pada *WG Transport and Connectivity*
- WGAA setuju untuk lebih jauh menjajaki kerja sama terkait palm oil
- Penentuan beberapa indikator dalam Implementation Blueprint 2022-2026 pada *WG Trade and Investment*
- Kelanjutan proyek IMT-GT *mall* yang mengalami kendala kurangnya komunikasi antara pihak Malaysia sebagai *lead*-nya pada *WG Digital Transformation*
- Adanya inisiatif CIMT mengenai Visit IMT-GT Year 2023 dan visa bersama untuk negara IMT pada *WG Tourism*. Selain itu, akan ada *Tourism Post Recovery Program* dengan ADB di mana Thailand menjadi *lead*-nya.
- Adanya potensi kolaborasi UNINET dengan IsDB dalam kerangka Reverse Linkage program.
- Dokumen *MoU on Rubber Cities and Rubber Industries* dalam tahap penentuan pejabat penandatanganan oleh pihak Indonesia. Dokumen tersebut rencananya ditandatangani pada PTM IMT-GT di Phuket, Thailand, September 2022.

Masing-masing *Working Group* pada kerja sama IMT-GT telah melaksanakan *WG meeting* pada periode Juli-Agustus 2022 dengan beberapa isu sebagai berikut:

- WGAA melaporkan 7 *ongoing projects* dan 3 *new projects*; setuju untuk membentuk *Palm Oil Project Implementation Team*; melanjutkan *Regional Training for Agriculture Young Farmers in the Framework of IMT-GT* yang tertunda karena COVID; menyarankan perlunya sistem monitoring dan evaluasi untuk menghitung data kinerja dan indikator WGAA pada IB 2022-2026
- WGT melaporkan 4 *completed projects*, 3 *new projects*, dan 10 *ongoing projects*; WGT bersama ADB sedang menyusun *IMT-GT Tourism Recovery Communication Plan and Toolkits* serta akan melakukan *Training of Trainers on Elevating Tourism Community to Digital Economy*
- WGHAPAS melaporkan 13 *ongoing programs*; berfokus pada program-program penguatan kompetensi halal melalui *Halal Auditors and Supervisors Training, Halal Sourcing Partnership Programme, and Halal Medical-related Training Programme*
- WGTC melaporkan 25 *ongoing projects*, termasuk *Physical Connectivity Project* dan proses WGTC dalam mendukung *Sustainable Urban Development Framework (SUDF)* terkait jumlah kendaraan elektrik; WGTC juga melaporkan bahwa Indonesia dan Malaysia setuju mengadakan kunjungan lapangan untuk mempercepat Melaka-Dumai RoRo *project*
- WGDT melaporkan 7 *ongoing projects* dan 1 *new project*; merekomendasikan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan literasi dan daya saing digital serta percepatan perluasan bisnis online UMKM
- WGTI melaporkan 13 *ongoing programs* dan 1 *postponed projects*; merekomendasikan kolaborasi dengan Working Group lainnya untuk menjadikan IMT-GT sebagai wilayah investasi yang menarik serta meningkatkan kolaborasi dengan JBC
- WGHRD melaporkan 8 *ongoing projects* dan 4 *new projects*, antara lain: *Training of Trainers (ToT) on Tour Guide* dan *TVET Annual Forum: Transportation Training for Sustainable Development*
- WGE menyampaikan 3 *new projects* and 3 *ongoing projects*; merekomendasikan kerja sama dengan mitra potensial lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan

- UNINET menyampaikan bahwa UNINET Council Meeting telah dilakukan pada 29-30 Agustus 2022 di mana pada kesempatan tersebut dilakukan Handover dari Universitas Syiah Kuala ke Universiti Teknologi Mara.

JBC menyampaikan bahwa akan dikembangkan *Framework of Cooperation (FoC)* untuk efisiensi kolaborasi antar JBC untuk penguatan peran dan tanggung jawab dalam mendukung IB 2022-2026. JBC akan mengembangkan beberapa proyek antara lain:

- 1) *Tourism Portal for Single Destination* untuk mendukung IMT-GT Visit Year 2023-2025;
- 2) *IMT-GT Connect* untuk memberdayakan masyarakat dan sektor swasta;
- 3) *Healthy Ocean* untuk mengembangkan lingkungan dan pariwisata yang berkelanjutan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pertemuan dilaksanakan secara virtual, sehingga ketiga negara serta pihak-pihak terkait memiliki fleksibilitas terkait waktu.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pertemuan 15th IMT-GT SPM dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19 di mana perjalanan antar negara masih belum memungkinkan, sehingga kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan virtual lewat aplikasi Zoom yang difasilitasi oleh CIMT.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Mengingat pertemuan dilaksanakan secara virtual, tidak dikeluarkan anggaran terkait perjalanan dinas luar negeri.

23. Kesepakatan pada BIMP-EAGA *Strategic Planning Meeting* (SPM)

Penyusunan Rencana Kerja BIMP-EAGA dimulai dengan pertemuan *briefing on 2022 SPM* yang diikuti oleh NS dan CWGs yang dilaksanakan pada 8 Februari 2022. Pertemuan membahas mengenai persiapan SPM CWG. Dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Persiapan SPM pada 4 Maret 2022 yang membahas persiapan CWGs dan membahas isu-isu yang menjadi *highlight* posisi Indonesia.

Gambar 3.58 dokumentasi dari beberapa dokumen kesepakatan di tingkat working group yang dipaparkan dalam pertemuan BIMP-EAGA SPM



Setelah itu, penyusunan Rencana Kerja secara riil dilaksanakan Rangkaian Pertemuan Mini SPM/CWGs yang berlangsung mulai periode 07 Maret 2022 dan direncanakan berakhir pada pertengahan April (sekitar tanggal 18 April). Masing-masing CWG menyampaikan paparan mengenai *ongoing projects*, *finished projects*, *dropped projects*, dan *new projects* untuk periode 2022-2023.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja BIMP-EAGA tahun 2022-2023, telah dilaksanakan Strategic Planning Meeting pada tingkat SOM pada tanggal 28 April 2022. Agenda pembahasan antara lain: Laporan *Cluster/Working Groups* dalam *Mini Strategic Planning Meeting*; Perkembangan kerjasama BIMP-EAGA dengan beberapa development partner; Diskusi *Mid Term Review BIMP-EAGA Vision*

2025; Persiapan 2023 Strategic Planning Meeting dan Persiapan PTM BIMP-EAGA ke-25 tahun 2022 di Pontianak.

Gambar 3.59 Strategic Planning Meeting/Senior Officials Meeting BIMP-EAGA secara virtual tanggal 28 April 2022



Masing-masing CWGs memberikan laporan perkembangan proyek dan rencana kerja. Terdapat 88 proyek infrastruktur prioritas (PIPs) dengan 27 proyek dengan status *completed*, 8 proyek dalam status *completed in phase*, 10 proyek dengan status *nearing completion* dan 43 proyek *on-going*. Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Proyek/Program Kerja hasil dari Pertemuan SPM dan Monitoring pelaksanaan pertemuan tingkat CWGs. Seluruh CWGs dalam kerjasama subregional BIMP-EAGA telah melaksanakan CWGs Mini SPM dari bulan Maret – April 2022 dan SPM Plenary Session/SOM telah berlangsung pada 28 Oktober 2022.

Beberapa fokus program kerja CWGs antara lain:

1. Proyek power interconnection di Kalimantan.
2. Pengembangan digitalisasi UMKM dengan BIMP-EAGA SME's *Business Centre Virtual*.
3. Finalisasi Letter of Intent One Borneo Quarantine Initiative;
4. Perkembangan transformasi digital di wilayah BIMP-EAGA;

5. Pengembangan potensi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan BIMP-EAGA.
6. Proyek pemulihan pariwisata pasca pandemic.
7. Pengembangan energi terbarukan dan usaha penanganan perubahan iklim.
8. Pemanfaatan kerjasama dengan development partner (Korea, Jepang, NT-Australia, China, ADB).
9. Pengembangan SDM khususnya pendidikan vokasi dan dukungan peningkatan kapasitas SDM dalam program kerja CWGs BIMP-EAGA

Pada tanggal 1 September hingga 13 Oktober 2022 telah diadakan pertemuan Transport Cluster, ICT Cluster, Agribusiness Cluster, Trade and Investment Facilitation Cluster, CIQS WG, dan Statistics & Database WG. Kemenko melakukan monitoring pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut. Beberapa hal yang menjadi pembahasan adalah diskusi hasil *Mid Term Review* BEV 2025, deliverables, dan usulan proyek di tahun 2023-mendatang, serta penyusunan report untuk SO dan MM.

Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut antara lain:

- Capaian pertumbuhan output pertanian dan perikanan di BIMP-EAGA yang dibawah target yang ditetapkan dalam BEV 2025 yakni 10%. Rata-rata pertumbuhan output mencapai 2%.
- Revitalisasi konektivitas laut dan udara pasca pandemic
- Pengembangan transformasi ekonomi digital
- Rencana penandatanganan LOI One Borneo Quarantine Initiative
- Upgrade CIQS WG menjadi *Cluster Trade Facilitation*
- Komparabilitas data dan definisi dari indikator Investasi dan Perdagangan
- Re-formulasi TIFC menjadi *Cluster Trade, Investment, and Enterprise Development*
- Pembentukan WG baru yakni WG Economic Zone

Hingga 13 Oktober 2022 terdapat beberapa CWGs yang belum melakukan pertemuan, yakni *Power and Energy Infrastructure Cluster* dan *Socio-Cultural and Education Cluster*. Sehingga rencananya FGD membahas capaian dan

implementasi proyek yang disepakati akan diadakan setelah seluruh CWGs melakukan pertemuan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pertemuan Strategic Planning Meeting/Senior Officials Meeting dihadiri oleh Senior Officials negara anggota BIMP-EAGA dan dipimpin oleh Filipina berjalan baik dan lancar secara virtual. Cluster/working groups melaporkan rencana program kerja selama setahun kedepan dan membahas arahan Menteri pada PTM BIMP-EAGA tahun 2021.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Pertemuan BIMP-EAGA SPM dilaksanakan secara virtual dikarenakan dalam masa pandemi COVID-19 di mana perjalanan antar negara masih belum memungkinkan. Pertemuan ini dihadiri juga secara virtual oleh delegasi negara anggota BIMP-EAGA sekitar 200 orang dan delegasi Indonesia terdiri dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pihak swasta (BEBC).
- Sebelum pelaksanaan SPM/SOM BIMP-EAGA telah dilakukan breakout session CWGs dalam persiapan laporan CWGs kepada SO.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pertemuan SPM/SOM dilaksanakan secara virtual sehingga tidak perlu menggunakan perjalanan dinas sehingga dapat mengefisienkan penggunaan anggaran untuk biaya perjalanan dinas luar negeri. Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pertemuan ini adalah biaya konsumsi rapat dalam kantor.

24. Kesepakatan pada Pertemuan ke-3 Sherpa G20 Presidensi Indonesia

Seluruh Sherpa Negara G20, Negara Undangan, dan Organisasi Internasional hadir secara fisik, hanya Sherpa dari Singapura yang hadir secara virtual. Pertemuan ini mendorong komitmen Sherpa untuk menghasilkan Pernyataan Bersama Tingkat Kepala Negara/Pemerintah (*Leaders' Declaration*) yang menjadi tradisi Presidensi G20 selama ini.

Gambar 3.60 Pertemuan ke-3 Sherpa G20 Presidensi Indonesia di Yogyakarta, 27 - 30 September 2022



Berikut catatan dari intervensi setiap negara:

I. Reviu terhadap hasil Pertemuan Tingkat Menteri

Mengetahui bahwa situasi geopolitik saat ini membuat Pertemuan Tingkat Menteri hanya hasilkan *Chair's Summary*, namun Sherpa sepakat untuk tetap mengupayakan *Leaders' Declaration* di KTT.

II. Sikap terhadap kondisi Geopolitik

- Negara G7 Plus (+ Australia, Spanyol, Belanda) menghendaki pernyataan *condemnation* dan pelanggaran hukum internasional oleh Rusia di Ukraina.
- Rusia menolak dengan pandangan tidak semua negara G20 terlibat konflik yang sedang terjadi, sehingga perlu pendekatan yang seimbang.

III. Pandangan terhadap *Leaders' Declaration* (LD)

- Mendukung struktur LD yang ringkas, leaders-like, akomodatif pada fakta krisis saat ini, dan menonjolkan respons krisis yang *forward-looking*.
- Negara berkembang menganggap perlu konsensus G20 dengan menghasilkan LD agar G20 tetap menjadi forum penting. Setelah Indonesia, Presidensi akan dipegang negara-negara berkembang (India, Brazil, Afrika Selatan)
- Italia, Jerman, Prancis, Inggris, EU, Kanada usulkan Presidensi menyampaikan dengan bahasa yang lebih kuat dan ambisius, tidak *backtrack* dari komitmen global yang ada, khususnya isu Iklim, Energi, Pangan, dan Digital.
- Australia mendorong endorsement Bali COMPACT (*Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions* - 9 prinsip Transisi Energi) di dalam LD.
- Turkiye meminta paragraf khusus yang terkait dengan Migration dan Forced Displacement karena mereka ingin membentuk Working Group Migration and Forced Displacement (yang ditolak hampir semua anggota). Sebagai kompromi, Turkiye meminta diskusi Migration dan Forced Displacement dilanjutkan pada Presidensi berikutnya.
- Jepang mendorong prinsip *adherence to International principles*.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis Penyebab Keberhasilan pada Pertemuan Sherpa ke-3 G20 Presidensi Indonesia diantaranya:

1. Seluruh Sherpa hadir secara fisik.
2. Pertemuan berhasil mendorong **komitmen para Sherpa** untuk menghasilkan **Pernyataan Bersama** Tingkat Kepala Negara/Pemerintah (**Leaders' Declaration**) yang menjadi tradisi Presidensi G20 selama ini.
3. Terkait aspek substantif, terjadi kemajuan signifikan dari sisi interaksi dan suasana pembahasan. Sebagian besar Sherpa G20 berupaya menghasilkan Pernyataan Bersama (Leaders' Declaration) – tidak ada insiden walkout.
 - a) Para Sherpa G20 setuju untuk hasilkan Deklarasi yang ringkas, mudah dipahami, mengakomodasi fakta kondisi krisis dunia saat ini (termasuk geopolitik), dan pernyataan aksi-aksi yang ambisius para Leaders sebagai respons.
 - b) Sherpa G20 telah membahas 18 dari 34 paragraf yang diusulkan. Dilanjutkan beberapa pertemuan virtual (intersesi) agar Leaders' Declaration dapat diselesaikan sebelum KTT.
 - c) Untuk memperlancar negosiasi, telah dilakukan pertemuan-pertemuan bilateral, baik dengan negara G7 maupun kelompok negara berkembang.
4. Adapun catatan dari **Intervensi setiap negara**:
 - a) Perlu untuk melakukan reviu terhadap **hasil Pertemuan Tingkat Menteri**
 - b) Mengetahui bahwa situasi geopolitik saat ini membuat **Pertemuan Tingkat Menteri** hanya hasilkan **Chairs' Summary**, namun **Sherpa sepakat** untuk tetap mengupayakan **Leaders' Declaration** di KTT.
 - c) **Sikap terhadap kondisi Geopolitik**
 - Negara **G7 Plus** (+ Australia, Spanyol, Belanda) menghendaki **pernyataan condemnation** dan pelanggaran hukum internasional oleh Rusia di Ukraina.

- Rusia **menolak** dengan pandangan tidak semua negara G20 terlibat konflik yang sedang terjadi, sehingga perlu pendekatan yang seimbang.
 - Pandangan **terhadap *Leaders' Declaration (LD)***
 - Mendukung **struktur LD** yang **ringkas, akomodatif** pada fakta krisis saat ini dan menonjolkan **respons krisis** yang *forward-looking*.
 - Negara berkembang menganggap perlu **konsensus G20** dengan **menghasilkan LD** agar G20 tetap menjadi forum penting. Setelah Indonesia, Presidensi akan dipegang negara-negara berkembang (India, Brazil, Afrika Selatan).
 - Italia, Jerman, Prancis, Inggris, EU, Kanada usulkan Presidensi menyampaikan dengan **bahasa yang lebih kuat dan ambisius**, tidak *backtrack* dari komitmen global yang ada, khususnya isu Iklim, Energi, Pangan, dan Digital.
 - **Australia** mendorong endorsement **Bali COMPACT** (*Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions* - 9 prinsip Transisi Energi) di dalam LD.
 - **Turkiye** meminta paragraf khusus yang terkait dengan Migration dan Forced Displacement karena mereka ingin membentuk Working Group Migration and Forced Displacement (yang ditolak hampir semua anggota). Sebagai jalan tengah, Turkiye meminta diskusi Migration dan Forced Displacement dilanjutkan pada Presidensi berikutnya.
 - **Jepang** mendorong menyeimbangkan diskusi dan perlunya prinsip *adherence to international principles*.
 - Sesuai arahan Bapak Presiden, di sela-sela pertemuan dilakukan kunjungan ke objek-objek wisata, melibatkan UMKM, agar dapat memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat.
5. Pertemuan Sherpa G20 Indonesia ke-3 juga kembali melangsungkan kegiatan non-substansi untuk mendukung kegiatan Pertemuan Sherpa G20. Adapun pertemuan dimaksud merupakan bentuk dukungan pemerintah

kepada UMKM di Yogyakarta. Adapun kegiatan non-substansi tersebut diantaranya:

- **Welcoming Reception:** Melalui berbagai rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia 2022, Indonesia ingin lebih mendorong dan mengenalkan berbagai warisan budaya lokal ke kancah global. Kedatangan dari para Delegasi Pertemuan ke-3 Sherpa G20, yang berlangsung tanggal 26 – 30 September 2022 di Yogyakarta, dijamu dalam sebuah acara *Welcoming Reception* oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Yogyakarta. Gelaran acara budaya di Keraton ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi adat budaya Keraton Yogyakarta, di mana seluruh Delegasi juga memakai pakaian baju batik, yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia. Sembari menikmati hidangan nusantara, para Sherpa G20 juga dihibur oleh persembahan tarian Beksan Punggawa. Pada akhir acara, setiap Delegasi diberikan kesempatan untuk berfoto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selesai acara, semua delegasi kembali ke hotel untuk mempersiapkan dua hari pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi tujuan dan menyepakati substansi *draft* Leaders' Declaration yang akan dibawa ke KTT G20 pada November 2022 di Bali.
- **Gala Dinner:** Seusai melangsungkan pertemuan plenary pada hari pertama, Selasa (27/09), para Sherpa G20, Delegasi dan para tamu Undangan diajak menuju Pelataran Wisnu di Candi Prambanan untuk menghadiri Gala Dinner. Para Sherpa G20 dan Delegasi berkumpul untuk makan malam dengan menyaksikan penampakan 3 candi utama di halaman utama Candi Prambanan, yaitu Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa, yang dilakukan *Mapping Projection*, yaitu dilakukan penyinaran dengan proyektor yang diisi dengan tampilan konten video digital yang berisikan tema G20 dan keindahan alam nusantara. Para tamu kemudian dijamu dengan beragam hidangan tradisional khas Indonesia dan diiringi alunan musik gamelan jawa, serta penampilan tarian ronggeng. Selanjutnya juga disuguhkan hiburan pertunjukan wayang dan tarian kontemporer tentang kisah Rama dan Shinta. Suguhan hiburan diteruskan dengan pertunjukan gamelan dan dalang yang bertemakan "*Land of Diversity*" serta penampilan penyanyi Lyodra yang membawakan beberapa lagu, dan

semuanya mampu memberikan kesan mendalam bagi para Sherpa dan undangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memberikan sambutan secara virtual menyampaikan bahwa tema dari Gala Dinner tersebut yakni “Overflowing with The Spiritual Meaning”, yang direpresentasikan dengan tiga candi terbesar yang berdampingan dan menyimbolkan Trimurti yang menjaga keseimbangan.

- **Site Visit:** Pada hari terakhir pertemuan Sherpa ketiga akan dilakukan kegiatan *site visit* yang bertujuan memperkenalkan warisan budaya di Indonesia sekaligus menunjukkan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan termasuk UMKM melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes). Peninjauan dilakukan di wilayah Magelang meliputi Candi Borobudur, Balkondes Ngadiharjo yang didukung oleh PT Perusahaan Listrik Negara dan Balkondes Karangrejo yang didukung PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Para peserta juga diajak mencoba berbagai aktivitas seperti membuat gerabah, membatik, dan bahkan bermain gamelan. Pertunjukan Reog Ponorogo juga dihadirkan untuk menyambut kedatangan delegasi di lokasi Balkondes, di mana para Delegasi juga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi wijono Moegiarso yang juga Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track dan Finance Track serta Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas selaku Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani. Sebelum mengakhiri kunjungan, seluruh anggota rombongan kemudian diajak untuk menikmati cagar budaya peninggalan sejarah yakni Candi Mendut. Candi tersebut merupakan candi agama Buddha yang diduga dibangun pada abad ke-9 serta merupakan salah satu candi dari tiga serangkai candi di Magelang yaitu Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya non anggaran telah dilaksanakan secara efisien, rapat koordinasi persiapan dan pertemuan Sherpa ke-3 G20 Presidensi Indonesia dilakukan secara hybrid dengan menggunakan teknologi zoom meeting maka pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien, serta frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Dari aspek logistik, seperti penyediaan hotel bagi para

delegasi dan tamu undangan, serta antisipasi kegiatan apabila cuaca tidak mendukung.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Presidensi Sherpa G20 Indonesia Tahun 2022, Sekretariat Sherpa G20 Kemenko Perekonomian berkolaborasi dengan dunia usaha baik dengan Badan Usaha Milik Negara maupun dengan sektor privat. Kolaborasi antara Kemenko Perekonomian tersebut dalam bentuk penyelenggaraan side event yang bertujuan untuk memberikan pelayanan (*hospitality*) kepada delegasi G20 dan untuk memperkenalkan kebudayaan tradisional Indonesia melalui kuliner nusantara, musik dan tari tradisional serta produk kerajinan asli Indonesia. Persembahan ini diharapkan dapat mengharumkan nama dan reputasi Indonesia sebagai tuan rumah yang baik di mata internasional.

Badan usaha dapat memanfaatkan side event G20 sebagai sarana untuk mempromosikan profil dan capaian perusahaan di forum internasional. Beberapa Badan Usaha yang mendukung penyelenggaraan pertemuan Sherpa G20 antara lain:

- Lembaga Penjamin Simpanan
- PT Perusahaan Listrik Negara
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
- PT Bank Rakyat Indonesia
- Kapal Api Global
- PT Yili Indonesia
- PT Hyundai Motor Indonesia
- PT Grab Indonesia

Dukungan dari dunia usaha tersebut digunakan untuk penyelenggaraan beberapa kegiatan dalam pelaksanaan Presidensi Sherpa G20 Indonesia 2022, antara lain; Gala *dinner*, *Site visit*, *Side event*, Seminar, dan Transportasi ramah lingkungan.

25. Kesepakatan pada Pertemuan ke-3 Sherpa G20 Presidensi Indonesia

Pertemuan Ke-4 Sherpa G20 Presidensi Indonesia berlangsung pada tanggal 11-14 November 2022. Pertemuan ini diikuti oleh 167 delegasi yang berasal dari 20 negara anggota G20, 8 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Dari jumlah tersebut 165 delegasi hadir secara fisik dan 2 delegasi dari WTO hadir secara virtual.

Gambar 3.61 Pertemuan ke-4 Sherpa G20 Presidensi Indonesia di Bali, 11 - 16 November 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Keberhasilan pada Pertemuan Sherpa ke-4 G20 Presidensi Indonesia dikarenakan pelaksanaan setiap sesi yang berjalan dengan baik dan efisien.

Sesi 1 : Kondisi Ekonomi Global, Ketahanan Pangan dan Energi

- Seruan untuk mengakhiri perang – perang memperparah krisis pangan, energi, dan keuangan. Kelangkaan pupuk menjadi masalah serius dimana terdapat 48 negara berkembang menjadi korban.
- Forum G20 harus berhasil dan bertanggung jawab atas krisis global, dengan cara: (i) Mematuhi Piagam PBB secara konsisten; (ii) Menciptakan *win-win solution*

- *Concrete deliverables* yang dihasilkan (i) *Pandemic Fund*; (ii) Resilience and Sustainability Trust – ruang fiskal berpendapatan rendah; (iii) Bali COMPACT – prinsip akselerasi transisi energi
- Selain itu Indonesia juga turut aktif dalam Global Crisis Response Group (GCRG).

Sesi 2 : Kesehatan

- Mendorong WHO agar lebih kuat – terutama dalam realisasi hubs and spokes solusi kesehatan.
- Komitmen USD 50 juta dari Indonesia untuk Pandemic Fund.
- TRIPS Waiver harus diperluas pada semua solusi kesehatan termasuk diagnostik dan terapeutik.
- Tindak lanjut bahasan yang diharapkan oleh Indonesia mencakup: (i) Kerja sama penguatan arsitektur kesehatan global (ii) Perbaikan rantai pasok kesehatan dengan melibatkan negara berkembang.

Sesi 3 : Transformasi Digital

- Ekonomi digital sumbang 15,5% PDB global. Untuk itu, Presidensi G20 Indonesia dorong transformasi digital untuk percepat pemulihan global.
- Pentingnya kesetaraan akses digital, literasi digital, penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang; dan lingkungan digital yang aman.

Selain itu, kelancaran berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian pertemuan Sherpa Ke-4 juga turut berkontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan pertemuan Sherpa ke-4. Kegiatan tersebut diantaranya:

- 1) **Sunset Welcoming Reception:** Pertemuan keempat Sherpa G20 yang sekaligus menjadi pertemuan Sherpa terakhir dalam menuju KTT G20 yang merupakan puncak Presidensi G20 Indonesia akan segera diselenggarakan di Bali. Untuk menyambut para Delegasi Sherpa dan tamu undangan, Indonesia menyajikan agenda *Sunset Welcome Reception* Delegasi Pertemuan Sherpa G20 keempat di Sunset Bar Lawn, InterContinental Bali Resort, Bali, Kamis (10/11). Acara ini dipandu oleh

MC Sophie Navita serta menghadirkan Angel Pieters, Eki Cahyadi, dan Naluri Manca untuk menghibur para Delegasi dan tamu undangan. Dalam acara tersebut, Indonesia menghadirkan Nusantara *Culinary Journey* untuk mengajak para Delegasi berkeliling Indonesia melalui beragam hidangan yang disajikan. Hidangan *Culinary Journey* Nusantara sudah disajikan sejak Pertemuan Sherpa Pertama di Jakarta pada Bulan Desember 2021 lalu dilanjutkan Pertemuan Sherpa G20 kedua di Labuan Bajo, Pertemuan Sherpa G20 ketiga di Yogyakarta dan Pertemuan Sherpa G20 keempat di Bali. Pada akhir pertemuan, Delegasi Sherpa G20 mendapatkan “*passport*” sebagai bukti telah menjelajahi kuliner nusantara selama mengikuti pertemuan sherpa G20 di Indonesia.

- 2) Fun Activities:** Kegiatan *side event* dari rangkaian Pertemuan Sherpa Indonesia selama satu tahun diakhiri dengan acara *Fun Activity* pada tanggal 14 November 2022, dengan menghadirkan Denada sebagai instruktur zumba yang dilanjutkan dengan berbagai permainan tradisional Indonesia seperti lomba makan kerupuk, balap bakiak, dan berbagai permainan tradisional lainnya. Rangkaian acara ini didukung oleh PT Kapal Api Global, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya non anggaran telah dilaksanakan secara efisien, rapat koordinasi persiapan dan pertemuan Sherpa ke-4 G20 Presidensi Indonesia dilakukan secara hybrid dengan menggunakan teknologi zoom meeting maka pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien, serta frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Dari aspek logistik, seperti penyediaan hotel bagi para delegasi dan tamu undangan, serta antisipasi kegiatan apabila cuaca tidak mendukung.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Presidensi Sherpa G20 Indonesia Tahun 2022, Sekretariat Sherpa G20 Kemenko Perekonomian berkolaborasi

dengan dunia usaha baik dengan Badan Usaha Milik Negara maupun dengan sektor privat. Kolaborasi antara Kemenko Perekonomian tersebut dalam bentuk penyelenggaraan side event yang bertujuan untuk memberikan pelayanan (*hospitality*) kepada delegasi G20 dan untuk memperkenalkan kebudayaan tradisional Indonesia melalui kuliner nusantara, musik dan tari tradisional serta produk kerajinan asli Indonesia. Persembahan ini diharapkan dapat mengharumkan nama dan reputasi Indonesia sebagai tuan rumah yang baik di mata internasional.

Badan usaha dapat memanfaatkan side event G20 sebagai sarana untuk mempromosikan profil dan capaian perusahaan di forum internasional. Beberapa Badan Usaha yang mendukung penyelenggaraan pertemuan Sherpa G20 antara lain:

- Lembaga Penjamin Simpanan
- PT Perusahaan Listrik Negara
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
- PT Bank Rakyat Indonesia
- Kapal Api Global
- PT Yili Indonesia
- PT Hyundai Motor Indonesia
- PT Grab Indonesia

Dukungan dari dunia usaha tersebut digunakan untuk penyelenggaraan beberapa kegiatan dalam pelaksanaan Presidensi Sherpa G20 Indonesia 2022, antara lain:

- Gala *dinner*
- *Site visit*
- *Side event*
- Seminar
- Transportasi ramah lingkungan

26. Kesepakatan pada *Senior Official Meeting* Trilateral RI – Timor Leste – Australia

Khusus pada forum *Senior Official Meeting* Trilateral RI - Timor Leste - Australia pada tahun 2022 masih belum dapat terlaksana. Sehingga kesepakatan dalam rangka kerja sama ekonomi trilateral antara Pemerintah Indonesia, Timor Leste dan Australia belum dapat dihasilkan.

Analisis Penyebab Kegagalan

SOM Trilateral RI - Timor Leste - Australia tidak dapat terlaksana karena kondisi politik dalam negeri di Timor Leste yang sedang tidak stabil akibat adanya pemilihan Presiden sehingga Pemerintah Timor Leste melakukan pending dalam menyusun kerja sama trilateral untuk sementara waktu.

Dengan demikian, seluruh target kinerja pada IKU 1.2 Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketuai dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian pada tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 25 (dua puluh lima) atau mencapai Capaian Kinerja 96% dari target kinerja 2022

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun anggaran 2022 yang melebihi 90 persen, maka Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sangat optimis dapat meraih capaian kinerja lebih baik lagi pada periode kinerja tahun berikutnya.

CAPAIAN IKU 1.3.**Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian**

Kesepakatan tingkat Kepala Negara/Menteri di forum ekonomi Internasional adalah perjanjian/persetujuan yang disepakati oleh Kepala Negara/Menteri pada forum ekonomi Internasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada pertemuan tingkat Kepala Negara/Menteri tersebut menghasilkan kesepakatan yang dimuat dalam *Joint Leaders' Statement*. Kesepakatan tingkat Kepala Negara/Menteri tersebut mendorong peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam forum ekonomi internasional untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti pada tingkat nasional. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara/Menteri pada forum ekonomi internasional yang berhasil dikoordinasikan.

Pada tahun 2022, telah ditetapkan 2 (dua) forum ekonomi internasional yang menghasilkan kesepakatan di tingkat Kepala Negara/ Menteri. Forum Tingkat Kepala Negara ini penting karena melibatkan kepentingan banyak Negara, dimana kesepakatan yang terbentuk dalam forum tersebut menjadi kesepakatan bersama yang nantinya dapat ditindaklanjuti di masing-masing Negara. Adapun 2 (dua) forum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. *Joint Statement KTT IMT-GT;***
- 2. *G20 Leaders' Declaration.***

Hingga akhir 2022, Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian telah terealisasi 2 (dua) dari 2 (dua) target atau 100% pada Tahun 2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

Gambar 3.12 Tabel Capaian IKU 1.3. T.A. 2021 dan 2022

No	Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2021	2022
1	<i>Joint Statement KTT IMT-GT</i>	1	1
2	<i>G20 Leaders' Declaration</i>	1	1
Realisasi		2	2
Target Capaian		2	2
CAPAIAN IKU: Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian		100%	100%

Jika dibandingkan dengan target 2021 yang sama terdiri dari 2 (dua) kesepakatan, pada tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tidak menaikkan atau menurunkan targetnya yaitu tetap 2 (dua) jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Menteri di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasi Kemenko Perekonomian serta tetap dapat memenuhi seluruh target 2022 dengan baik.

Sehingga dengan demikian, Capaian Kinerja Tahun 2022 pada IKU 1.3: Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian memenuhi Capaian 100% baik pada tahun 2021 maupun pada tahun 2022 dari target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan lebih lanjut terhadap laporan realisasi dari 2 (dua) target tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. *Joint Statement* KTT IMT-GT

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pertemuan KTT IMT-GT ke-14 dimana KTT merupakan agenda Tahunan. Pada KTT ke-14 nanti *Signing Minister* Thailand akan mewakili Menteri IMT-GT lainnya untuk menyampaikan laporan perkembangan kerja sama IMT-GT kepada Kepala Negara. Adapun Presiden RI akan menjadi Ketua Delegasi Indonesia didampingi oleh Menko Perekonomian selaku *Signing Minister*.

Identifikasi potensi dan *possible deliverable* yang akan diangkat Indonesia dalam KTT IMT-GT diantaranya sebagai berikut:

- Pengesahan dokumen strategis Cetak Biru Implementasi (IB) 2022-2026;
- Penandatanganan *MoU on Rubber Cities and Rubber Industries*;
- *IMT-GT Tourism Recovery Projects 2022*;
- Pengesahan UNINET sebagai *standalone entity* yang menjadi lembaga *think tank* di IMT-GT.
- Pembentukan *working group Digital Transformation*
- Penguatan *Chief Ministers Governor Forum*
- Penandatanganan *Framework of Cooperation (FoC) of the Cross-Border Movement of Goods and People*

Gambar 3.62 *The 14th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Summit diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 10 November 2022*



Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam KTT IMT-GT

Pada KTT IMT-GT ke-14, Kepala Negara IMT-GT menyepakati 6 hal dalam upaya revitalisasi aktivitas ekonomi di sub-kawasan, yaitu: (i) Peningkatan konektivitas melalui penyelesaian proyek-proyek infrastruktur prioritas dalam PCPs; (ii) peningkatan rantai pasok produk pertanian, melalui implementasi MoU IMT-GT *Rubber Cities and Rubber Industry* dan peningkatan produktivitas kelapa sawit; (iii) pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan dan dukungan terhadap keberlanjutan Inisiatif Kota Hijau dan Kerangka Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (SUDF); (iv) Penguatan peran IMT-GT *Joint Business Council* sebagai motor penggerak kerjasama sub-kawasan; (v) meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan skema sub-regional lainnya, termasuk GMS, BIMP-EAGA, dan BIMSTEC; dan (vi) mempercepat proyek-proyek pariwisata untuk percepatan aktivitas ekonomi di sub kawasan.

Terkait monitor dan evaluasi atas arahan kepala negara pada KTT IMT-GT, Kemenko Perekonomian selaku Sekretariat Nasional, perlu melakukan koordinasi dengan K/L maupun instansi terkait lainnya khususnya terkait:

- Update kompilasi terkait perkembangan terkini proyek infrastruktur di Sumatera

- Persiapan dan penyusunan rencana implementasi *MoU on IMT-GT Rubber Cities and Rubber Industries*
- Penyusunan rencana aksi sektor pertanian (khususnya karet dan kelapa sawit), pemulihan pariwisata dan pelaksanaan program-program kota hijau serta pemanfaatan energi bersih.
- Koordinasi dengan CIMT dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan *plan of activities* perayaan 30th IMT-GT dan peluncuran IMT-GT Visit Year 2023-2025 saat Ketuanrumahan Indonesia di kerjasama ASEAN dan IMT-GT tahun 2023.
- Percepatan implementasi IB 2022-2026 melalui pelaksanaan proyek-proyek yang mendukung pemulihan ekonomi dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Rapat Koordinasi Pembahasan Pending Matters dalam Tindak Lanjut Arahan Presiden

Salah satu kesepakatan para kepala negara pada KTT IMT-GT ke-14 yaitu terkait pelaksanaan program-program kota hijau serta pemanfaatan energi bersih. Pada 13 Desember 2022, Kemenko Perekonomian mengadakan Rapat Sosialisasi untuk Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan pendanaan dari *Institute for Global Environmental Strategies* (IGES) Jepang melalui program *Climate and Clean Air Coalition (CCAC) To Reduce Short-Lived Climate Pollutants* (SLCPS). Program ini bertujuan mengurangi polutan iklim berumur pendek (*short-lived climate pollutants/ SLCPS*) untuk mendorong upaya penurunan suhu melawan resiko perubahan iklim.

Selaras dengan upaya Nasional untuk menanggulangi dampak perubahan iklim, Kemenko Perekonomian selaku Sekretariat Nasional IMT-GT mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan peluang pendanaan dimaksud. Program CCAC menawarkan pendanaan bagi kota/ provinsi anggota IMT-GT melalui dukungan, antara lain:

- a) Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif;
- b) Fasilitasi kebutuhan/permintaan mitigasi khusus;
- c) Dukungan ahli yang ditargetkan dalam jangka pendek.

Gambar 3.63 Joint Statement 14th IMT-GT Summit, 10 November 2022

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Sebelum pelaksanaan 14th IMT-GT Summit, Kemenko Perekonomian selaku National Secretariat melaksanakan rapat koordinasi penyiapan bahan serta logistik pertemuan.
- Kemenko Perekonomian berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya terkait pelaksanaan di lapangan. Mengingat KTT IMT-GT dilaksanakan dalam margin KTT ASEAN.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Delegasi yang dikirimkan menjalankan *role* masing-masing dengan baik serta turut memberi dukungan bagi para delegasi Kemenko Perekonomian lainnya yang ditugaskan untuk KTT ASEAN. Pada beberapa kesempatan, Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional turut mendampingi Presiden dalam beberapa pertemuan menggantikan Menteri Luar Negeri.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kemenko Perekonomian hanya mengirimkan tiga delegasi terkait IMT-GT Summit ini, mengingat pada waktu yang bersamaan diselenggarakan persiapan pertemuan G20 summit di Bali.

2. *G20 Leaders' Declaration* Presidensi Indonesia

Gambar 3.64 Pelaksanaan KTT G20 di Bali, 15-16 November 2022



Dalam rangka mencapai target rekomendasi penyusunan *G20 Leaders' Declaration* telah dilakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dengan keterangan sebagai berikut:

1. KTT G20 di bawah Presidensi G20 Indonesia telah diselenggarakan pada tanggal 15-16 November 2022 yang lalu di Bali. Delegasi RI (Delri) dipimpin oleh Presiden RI dan didampingi oleh sejumlah anggota Kabinet serta Co-Sherpa G20 Indonesia. Sebanyak 17 Kepala Negara/Pemerintahan menghadiri secara fisik pertemuan dimaksud, sementara Meksiko, Brazil, dan Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing.
2. KTT G20 Bali telah berhasil mengadopsi G20 Bali Leaders' Declaration yang terdiri dari 52 paragraf. Selain itu, KTT G20 di Bali juga telah menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang berhasil mempertahankan keutuhan forum G20 di tengah tantangan global.

3. Isu *condemnation* terkait invasi Rusia ke Ukraina pada akhirnya dapat diterima seluruh pihak karena Presidensi Indonesia mengambil posisi yang imparial dan menghormati seluruh pihak yang berkepentingan, dengan merujuk pada Resolusi PBB untuk menegaskan pernyataan sikap anggota G20 dan negara undangan, sebagaimana paragraf 3 Deklarasi KTT G20 Bali.
4. Secara ringkas, Deklarasi KTT G20 Bali menegaskan beberapa komitmen strategis, khususnya terkait dengan ketiga prioritas Presidensi Indonesia, antara lain:
 - a) *Pandemic Fund* untuk mengatasi pandemi di masa depan sebesar USD 1,5 miliar, dimana Indonesia berkontribusi sebesar USD 50 juta.
 - b) Komitmen untuk dukungan pemulihan bagi negara rentan melalui alokasi Special Drawing Right (SDR) oleh IMF dalam bentuk Resilience and Sustainability Trust (RST) sebesar USD 81,6 miliar.
 - c) Mendorong komitmen pendanaan perubahan iklim pada Glasgow Pact dari negara maju sebesar USD 100 miliar per tahun dari 2020 sampai 2025.
 - d) Kelanjutan komitmen untuk memastikan setidaknya 30% dari daratan di dunia dan 30% dari laut dunia dikonservasi atau dilindungi pada tahun 2030.
 - e) Kelanjutan komitmen untuk mengurangi degradasi tanah sampai 50% di tahun 2040 secara sukarela.

Gambar 3.65 Penyerahan Palu G20 dari Presiden RI, Joko Widodo kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi (Bali, 15-16 November 2022)



5. Sesuai arahan Bapak Presiden, KTT G20 juga telah mengesahkan Annex G20 Action for Strong and Inclusive Recovery, yang berisi concrete deliverables berupa kumpulan proyek, program, atau inisiatif. Terdapat 226 proyek/program/inisiatif bersifat multilateral dan 140 proyek matang bersifat bilateral dengan nilai total USD 71.5 miliar.
6. Selain hasil dari Deklarasi, KTT G20 juga mencatat beberapa komitmen investasi dari sejumlah negara maupun lembaga pembiayaan internasional, diantaranya:
 - a) Proyek transisi energi → pendanaan dari G7 untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan pensiun dini pembangkit listrik berbasis fosil di Indonesia sebesar USD 20 miliar (sekitar Rp.314 triliun);
 - b) Mobilisasi pendanaan hingga USD 600 miliar dari AS selama lima tahun kedepan untuk pembangunan infrastruktur melalui skema PGII (Partnership for Global Infrastructure and Investment);
 - c) Kerja sama proyek penyediaan hidrogen dan amonia antara Pertamina dan Saudi Aramco;
 - d) Komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk pengembangan MRT di Jakarta;

- e) Kerja sama dengan Turkiye untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera;
 - f) Kerja sama dengan ADB untuk membantu percepatan penghentian PLTU di Cirebon-1 berkapasitas 660 MW; dan
 - g) Pengembangan pembangkit listrik berkapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air berkapasitas 12.000 ton per jam antara Pertamina New and Renewable Energy (NRE) dan ACWA Power dari Arab Saudi di proyek Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P) Tuban, Jawa Timur
7. Adapun pokok dari intervensi Presiden dalam setiap sesi, antara lain:

Sesi 1: Kondisi Ekonomi Global, Ketahanan Pangan dan Energi

- Seruan untuk mengakhiri perang – perang memperparah krisis pangan, energi, dan keuangan. Kelangkaan pupuk menjadi masalah serius dimana terdapat 48 negara berkembang menjadi korban.
- Forum G20 harus berhasil dan bertanggung jawab atas krisis global, dengan cara: (i) Mematuhi Piagam PBB secara konsisten; (ii) Menciptakan win-win solution
- Concrete deliverables yang dihasilkan (i) Pandemic Fund; (ii) Resilience and Sustainability Trust – ruang fiskal berpendapatan rendah; (iii) Bali COMPACT – prinsip akselerasi transisi energi
- Selain itu Indonesia juga turut aktif dalam Global Crisis Response Group (GCRG).

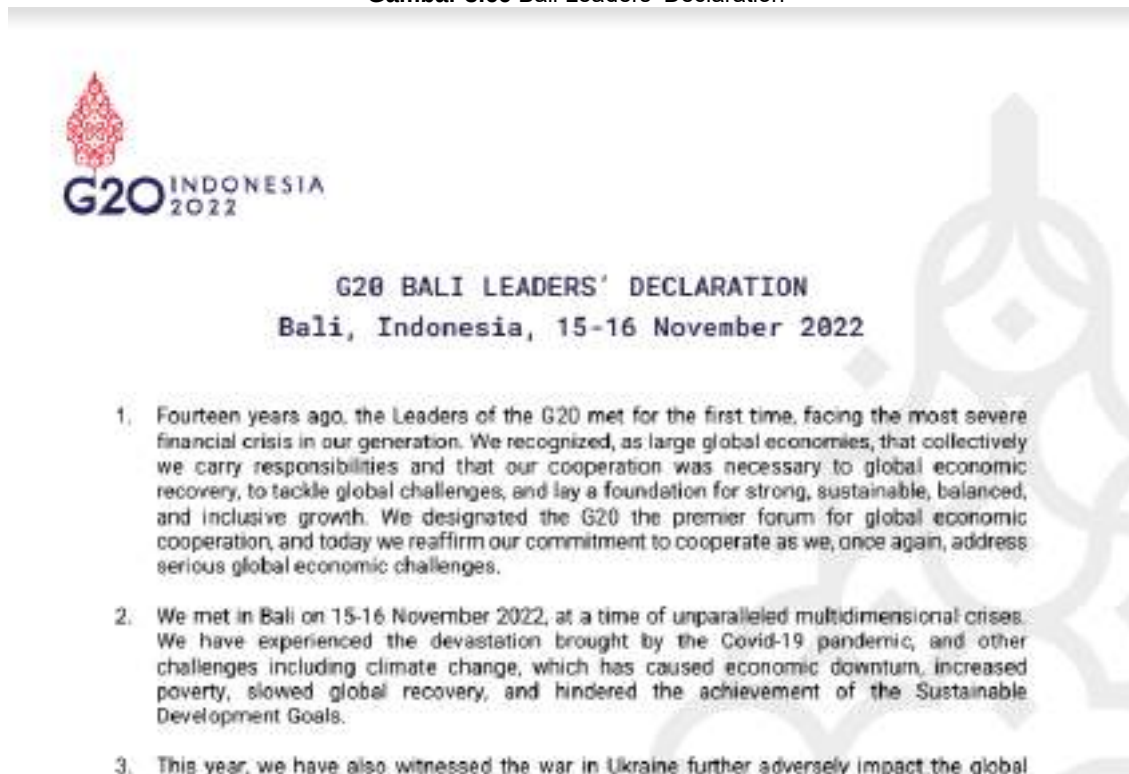
Sesi 2: Kesehatan

- Mendorong WHO agar lebih kuat – terutama dalam realisasi hubs and spokes solusi kesehatan.
- Komitmen USD 50 juta dari Indonesia untuk Pandemic Fund.
- TRIPS Waiver harus diperluas pada semua solusi kesehatan termasuk diagnostik dan terapeutik.
- Tindak lanjut bahasan yang diharapkan oleh Indonesia mencakup: (i) Kerja sama penguatan arsitektur kesehatan global (ii) Perbaikan rantai pasok kesehatan dengan melibatkan negara berkembang.

Sesi 3: Transformasi Digital

- Ekonomi digital sumbang 15,5% PDB global. Untuk itu, Presidensi G20 Indonesia dorong transformasi digital untuk percepat pemulihan global.
- Pentingnya kesetaraan akses digital, literasi digital, penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang; dan lingkungan digital yang aman.

Gambar 3.66 Bali Leaders' Declaration



Posisi Capaian Kinerja pada Tingkat Internasional

- Perbandingan capaian antar negara presidensi G20 umumnya ditampilkan 2 tahun setelah masa presidensi.
- Saat ini, capaian Presiden G20 yang sudah tersedia data risetnya hanya dari negara Arab Saudi (2020).
- Data Presidensi Italia (2021) dan Presidensi Indonesia (2022) masih dalam proses riset di Universitas Toronto, Kanada.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- KTT G20 Bali telah berhasil mengadopsi G20 Bali Leaders' Declaration yang terdiri dari 52 paragraf. Selain itu, KTT G20 di Bali juga telah

menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang berhasil mempertahankan keutuhan forum G20 di tengah tantangan global.

- Isu *condemnation* terkait invasi Rusia ke Ukraina pada akhirnya dapat diterima seluruh pihak karena Presidensi Indonesia mengambil posisi yang imparial dan menghormati seluruh pihak yang berkepentingan, dengan merujuk pada Resolusi PBB untuk menegaskan pernyataan sikap anggota G20 dan negara undangan, sebagaimana paragraf 3 Deklarasi KTT G20 Bali.
- Secara ringkas, Deklarasi KTT G20 Bali menegaskan beberapa komitmen strategis, khususnya terkait dengan ketiga prioritas Presidensi Indonesia, antara lain:
 1. Pandemic Fund untuk mengatasi pandemi di masa depan sebesar USD1,5 miliar, dimana Indonesia berkontribusi sebesar USD50 juta.
 2. Komitmen untuk dukungan pemulihan bagi negara rentan melalui alokasi Special Drawing Right (SDR) oleh IMF dalam bentuk *Resilience and Sustainability Trust* (RST) sebesar USD 81,6 miliar.
 3. Mendorong komitmen pendanaan perubahan iklim pada Glasgow Pact dari negara maju sebesar USD100 miliar per tahun dari 2020 sampai 2025.
 4. Kelanjutan komitmen untuk memastikan setidaknya 30% dari daratan di dunia dan 30% dari laut dunia dikonservasi atau dilindungi pada tahun 2030.
 5. Kelanjutan komitmen untuk mengurangi degradasi tanah sampai 50% di tahun 2040 secara sukarela.
- Sesuai arahan Bapak Presiden, KTT G20 juga telah mengesahkan Annex G20 Action for Strong and Inclusive Recovery, yang berisi *concrete deliverables* berupa kumpulan proyek, program, atau inisiatif. Terdapat 226 proyek/program/inisiatif bersifat multilateral dan 140 proyek matang bersifat bilateral dengan nilai total USD 71.5 miliar.
- Selain hasil dari Deklarasi, KTT G20 juga mencatat beberapa komitmen investasi dari sejumlah negara maupun lembaga pembiayaan internasional, diantaranya:

- a) Proyek transisi energi à pendanaan dari G7 untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan pensiun dini pembangkit listrik berbasis fosil di Indonesia sebesar USD 20 miliar (sekitar Rp.314 triliun);
- b) Mobilisasi pendanaan hingga USD 600 miliar dari AS selama lima tahun kedepan untuk pembangunan infrastruktur melalui skema PGII (Partnership for Global Infrastructure and Investment);
- c) Kerja sama proyek penyediaan hidrogen dan amonia antara Pertamina dan Saudi Aramco;
- d) Komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk pengembangan MRT di Jakarta;
- e) Kerja sama dengan Turkiye untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera;
- f) Kerja sama dengan ADB untuk membantu percepatan penghentian PLTU di Cirebon-1 berkapasitas 660 MW; dan
- g) Pengembangan pembangkit listrik berkapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air berkapasitas 12.000 ton per jam antara Pertamina New and Renewable Energy (NRE) dan ACWA Power dari Arab Saudi di proyek Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P) Tuban, Jawa Timur.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya non anggaran telah dilaksanakan secara efisien, rapat koordinasi persiapan dan pertemuan KTT G20 Presidensi Indonesia dilakukan secara hybrid dengan menggunakan teknologi zoom meeting dan youtube maka pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien, serta frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Dari aspek logistik, seperti penyediaan hotel bagi para delegasi dan tamu undangan, serta antisipasi kegiatan apabila cuaca tidak mendukung.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Karena rapat koordinasi persiapan dan pertemuan KTT G20 Presidensi Indonesia dilakukan secara hybrid maka efisiensi penggunaan anggaran dapat ditekan. Dalam kegiatan pertemuan KTT G20 Presidensi Indonesia pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan, namun tidak melupakan perhitungan ekonomi sehingga Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Multilateral mencapai efektivitas dan efisiensi kualitas pelaksanaan anggaran yang baik.

Dengan demikian, seluruh target kinerja pada **IKU 1.3 Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian** pada tahun 2022 telah terealisasi sebanyak **2 (dua) kesepakatan** atau mencapai Capaian Kinerja 100% dari target kinerja 2022.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun anggaran 2022 yang telah mencapai 100 persen, maka Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sangat optimis dapat meraih capaian kinerja lebih baik lagi pada periode kinerja tahun berikutnya.

CAPAIAN IKU 1.4.**Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian**

Kerja sama ekonomi internasional adalah persetujuan/perjanjian yang disepakati antara Indonesia dengan negara mitra baik dalam forum kerja sama ekonomi bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral dalam bentuk PTA/FTA/CEPA. Jumlah kerja sama ekonomi internasional yang disepakati dapat mencerminkan hasil kinerja dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam bernegosiasi dan mengkoordinasikan kebijakan dalam negeri dengan negara mitra.

Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah dari kesepakatan yang tercapai. Adapun target yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi Preferensial Perdagangan Barang antara RI – Pakistan (IP-TIGA) dan RI – Bangladesh (IB-PTA);
2. Kesepakatan Kerja Sama *Committee on Economic Cooperation* Indonesia-Korea CEPA;
3. Kesepakatan *Joint Committee Meeting* ke-17 GR IJEPA;
4. Kesepakatan Kerja Sama RI-Khazakstan;
5. Perundingan Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement in Services* (IC-CEPA);
6. Perundingan Indonesia-Kanada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA);
7. *Senior Official Meeting in Trade and Investment* RI-New Zealand (SOMTIF RI-NZ);
8. Perundingan Indonesia-Mercosur *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IM-CEPA);
9. Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA);
10. Indonesia- Eurasian Economic Union Free Trade Agreement
11. Indonesia-Mauritius *Preferential Trade Agreement*;

12. Indonesia- United Arab Emirates *Comprehensive Economic Partnership Agreement*;
13. ASEAN-India *Free Trade Area* (AIFTA);
14. ASEAN Australia New Zealand *Free Trade Area* (ANZFTA);
15. Upgrading ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA);
16. Keputusan Komite Bersama terhadap siklus proyek JCM;
17. Keputusan Komite Bersama terhadap proses validasi dan verifikasi proyek JCM.

Hingga akhir tahun 2022, jumlah kerja sama ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang disepakati oleh K/L di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian terealisasi sebanyak 16 (enam belas) dari 17 (tujuh belas) kesepakatan atau mencapai 94% dari target tahun 2022 sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13. Capaian IKU 1.4 T.A. 2021-2022

No	Jumlah Kerja Sama Ekonomi Internasional (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional Dan Sub Regional, Serta Multilateral) Yang Disepakati	2021	2022
1	<i>General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i> (GR-IJEPA)	1	
	Kesepakatan <i>Joint Committee Meeting</i> ke-17 GR IJEPA		1
2	<i>Feasibility Study of Pre-Negotiation Indonesia-Canada CEPA</i>	1	
	Perundingan Indonesia-Kanada <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (ICA-CEPA)		1
3	Perundingan Pertama Indonesia-Chile CEPA <i>Trade in Services</i>	1	
	Perundingan Indonesia-Chile <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement in Services</i> (IC-CEPA)		1
4	<i>Review ASEAN-India Trade in Goods Agreement</i> (AIFTA)	1	
	ASEAN-India <i>Trade in Goods Agreement</i> (AIFTA)		1
5	Perundingan <i>Upgrading ASEAN-Australia-New Zealand FTA</i> (AANZFTA)	1	
	AANZFTA		1
6	Kesepakatan Sherpa G20	1	
	Keputusan Komite Bersama terhadap siklus proyek JCM Diganti: Pembentukan Komite Bersama JCM Indonesia		1
7	Kesepakatan perpanjangan Kerja Sama Bilateral <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) untuk Kemitraan Pembangunan Rendah Karbon RI-Jepang	1	

No	Jumlah Kerja Sama Ekonomi Internasional (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional Dan Sub Regional, Serta Multilateral) Yang Disepakati	2021	2022
	Keputusan Komite Bersama terhadap proses validasi dan verifikasi proyek JCM Diganti: Kesepakatan Usulan Proyek Baru JCM		1
8	Indonesia - Pakistran Trade in Goods Agreement (IP-TIGA)	1	
	Negosiasi Preferensial Perdagangan Barang antara RI – Pakistan (IP-TIGA) dan RI – Bangladesh (IB-PTA)		-
9	Kesepakatan Kerja Sama RI-Khazakstan		1
10	Senior Official Meeting in Trade and Investment RI-New Zealand (SOMTIF RI-NZ) Diganti: Perundingan Putaran Pertama Indo Pasific <i>Economic Framework</i> (IPEF) Prosperity		1
11	Perundingan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement		1
12	Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement		1
13	Indonesia- Eurasian Economic Union Free Trade Agreement		1
14	Indonesia-Mauritius Preferential Trade Agreement		1
15	Indonesia- United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement		1
16	Upgrading ATIGA		1
17	Kesepakatan Kerja Sama Committee on Economic Cooperation IK-CEPA		1
Realisasi		8	16
Target Capaian		8	17
CAPAIAN IKU: Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian		100%	94%

Sesuai Kegiatan Prioritas: **Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, target capaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14. Target PTA/FTA/CEPA yang disepakati pada RPJMN 2020-2024

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
PTA/FTA/CEPA yang Disepakati	20*	25*	30*	35*	40*

**Kumulatif*

Berdasarkan table diatas, maka diketahui bahwa target capaian PTA/FTA/CEPA yang disepakati secara kumulatif adalah 30 target. Dari 30 target PTA/FTA/CEPA yang disepakati pada RPJMN 2024, Deputi VII telah berkontribusi dalam mewujudkan target PTA/FTA/CEPA yang disepakati sebanyak 16 capaian.

Tabel 3.15. Kontribusi Deputi VII dalam Pencapaian Target PTA/FTA/CEPA yang Disepakati pada RPJMN 2020 – 2024 Selama Tahun 2021 dan 2022

Indikator	Kontribusi Deputi VII terhadap Target RPJMN 2020-2024	
	2021	2022
PTA/FTA/CEPA yang Disepakati	14 Capaian	16 Capaian

Jika dibandingkan dengan target 2021 yang sama terdiri dari 8 (delapan) kesepakatan, maka pada tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menaikkan targetnya menjadi 17 (tujuh belas) Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian. Meskipun begitu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tetap dapat melakukan pemenuhan target 2022 hingga 94% dengan baik, yaitu tercapai 16 dari 17 target kinerja T.A. 2022. Penjelasan lebih lanjut terhadap laporan realisasi kinerja dari 17 (tujuh belas) target tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Kesepakatan *Joint Committee Meeting* ke-17 GR IJEPA

Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan *general review* IJEPA pada 2019. Saat ini salah satu isu yang sedang berlangsung adalah penyelesaian negosiasi Protokol Amandemen IJEPA. IJEPA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara serta pasar regional melalui 3 pilar utama yaitu liberalisasi, fasilitasi, dan pembangunan kapasitas. Indonesia juga mendorong perluasan akses pasar buah tropis Indonesia ke Jepang. Salah satu komoditas yang diperjuangkan Indonesia adalah ekspor mangga. Dalam rangka mempercepat penyelesaian perundingan Protokol Perubahan IJEPA, Indonesia dan Jepang sepakat untuk melaksanakan intersesi Sub Committee Trade in Goods pada 29 Desember 2022.

Gambar 3.67 The 17th Joint Committee Meeting of Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (Jepang, 9-10 November 2022)



Hasil dari Intersesi Sub Committee Trade in Goods Perundingan Protokol Perubahan IJEPA diantaranya:

1. Indonesia kembali menegaskan pentingnya Jepang memberikan eliminasi tarif 4 pos tarif tuna kaleng.
2. Offer Indonesia saat ini sudah sangat baik, mengingat Jepang hanya memberikan kerja sama New MIDECA, dan bukan akses pasar produk industri.

3. Kedua pihak saling terbuka terhadap sensitivitas dan kepentingan utama masing-masing.

Belum terdapat mandat baru kepada delegasi Jepang untuk memberikan *offer* atas 4 pos tarif tuna kaleng Indonesia sehingga perlu pendekatan di setiap lini agar Jepang semakin memahami pentingnya isu dimaksud bagi Indonesia

Gambar 3.68 Laporan Pembahasan Rapat GR IJEPA yang telah dilaksanakan pada 26 Juli 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Faktor kedekatan, kepercayaan dan kemitraan yang sangat erat antara kedua Negara menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan Joint Committee Meeting IJEPA.

Program-program kerja sama yang menguntungkan kedua Negara menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kerja sama bilateral RI-Jepang.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rapat koordinasi persiapan pertemuan maupun intersesi yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dipimpin oleh kementerian Perdagangan dan didukung dengan penggunaan teknologi zoom meeting maupun ms. teams maka kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rapat koordinasi persiapan pertemuan dipimpin oleh kementerian Perdagangan dan didukung dengan penggunaan teknologi zoom meeting maupun microsoft teams sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih ditekan.

2. Perundingan *Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement in Services (ICA-CEPA)*

Rapat Koordinasi Delri dan Pelaksanaan Perundingan Pertama Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA)

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Delri pada Persiapan Perundingan Putaran Pertama ICA-CEPA pada tanggal 8 Maret 2022 dan pada tanggal 14 s.d. 19 Maret 2022 telah dilaksanakan perundingan pertama Indonesia-Canada CEPA secara virtual dimana Indonesia menjadi tuan rumah pada perundingan pertama tersebut.

Gambar 3.69 Perundingan Pertama Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) - 14 Maret 2022



Pelaksanaan perundingan dilakukan melalui pembahasan isu pada 17 Working Group (WG) dan 3 Expert Discussion (ED). Keasdepan KSE Amerika dan Pasifik ikut serta dalam WG on National Treatment and Market Access for Goods (NTMA) dan WG on Economic and Technical Cooperation (Ecotech).

Pasca pelaksanaan perundingan pertama tersebut, Delri akan melakukan koordinasi internal dan mempelajari kembali draft text NTMA usulan Kanada dan akan mengusulkan *counter draft text* kepada Kanada. Untuk chapter Ecotech, secara umum Kanada terbuka terhadap usulan *non-paper* Ecotech Pemri, namun Kanada perlu mempelajarinya lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia dan Kanada telah menyepakati *work plan* perundingan ICA-CEPA yang ditargetkan dapat selesai selama kurun waktu 2 tahun (2022-2023) dengan mempertimbangkan dinamika perundingan.

Perundingan Putaran Kedua Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA)

Perundingan kedua ICA-CEPA telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 15 Agustus – 2 September 2022. Perundingan kedua melanjutkan pembahasan draft text untuk 17 *working groups* dan 3 *expert-level discussion* yang sebelumnya telah dilangsungkan beberapa pertemuan intersesi melalui pertukaran informasi data tarif, informasi regulasi dan praktik perdagangan secara virtual.

Pada perundingan kedua ICA-CEPA, Indonesia dan Kanada telah memetakan tingkat ambisi melalui pembahasan eksploratif di tiap *working group* dan telah mencapai kemajuan substantif dalam pembahasan draft text yang meliputi Ketentuan Asal Barang; Prosedur Pabean dan Fasilitas Perdagangan; Perdagangan Jasa; Hak Kekayaan Intelektual; Perdagangan Digital; Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan Persaingan Usaha.

Gambar 3.70 Perundingan Kedua Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) - 15 Agustus 2022



Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik mengikuti pembahasan *WG on National Treatment and Market Access for Goods (NTMA)* dan *WG Economic and Technical Cooperation (Ecotech)*.

Hal – hal yang mengemuka pada 2 *Working Group* tersebut antara lain sebagai berikut:

a. WG NTMA

- Kanada mengusulkan adanya persyaratan kinerja (performance requirement) atas perdagangan barang ekspor dan impor. Ini merupakan hal baru bagi Pemri sehingga ketentuan dan kesesuaiannya akan dipelajari sesuai dengan ketentuan domestik Indonesia
- Pada diskusi *National Treatment*, Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki otonomi daerah namun Peraturan Daerah sejalan dengan peraturan di Pusat khususnya peraturan terkait pemasukan barang yang sejalan dengan WTO. Pemri berharap 3 pemerintah regional Kanada yaitu the Northwest Territories, Nunavut and Yukon mengikuti aturan internasional
- Dalam hal penghapusan pajak atas barang impor (custom duties), Indonesia mengusulkan agar sebelum penghapusan tersebut, suatu pihak harus memberitahu pihak lainnya sebelum daftar baru komitmen tarif mulai berlaku sedini mungkin. Kanada menanggapi perlu implementasi yang praktis tidak rumit termasuk dalam penerapan komitmen tarif
- Indonesia mengusulkan untuk menghapus pasal *remanufactured goods* karena kebijakan nasional Indonesia tidak dapat mengakomodir barang yang diproduksi ulang. Kanada terbuka jika Indonesia menganggap ini tidak penting.
- Indonesia mengusulkan untuk menghapus usulan Kanada untuk pertukaran prosedur perizinan ekspor dan impor secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah berlakunya ICA-CEPA karena dapat dilakukan selama negosiasi dan mengusulkan para pihak dapat mempublikasi setiap prosedur perizinan ekspor dan impor yang diadopsi segera mungkin tidak lebih dari 60 hari setelah aturan berlaku. Kanada dapat mempertimbangkan usulan tersebut.
- Pemri mempertanyakan urgensi section Pertanian dibentuk section tersendiri, khususnya terkait bioteknologi dan Low Level Presence (LLP) Occurrence. Kanada menjelaskan Dengan diaturnya Pertanian di section

khusus maka diharapkan akan tercipta transparansi, prediktabilitas dan penguatan kerja sama

- Indonesia keberatan terhadap usulan Kanada mengenai penerapan larangan atau pembatasan ekspor, selain bea, pajak, atau pungutan lain atas bahan makanan. Indonesia menyarankan agar pengaturan terkait pembatasan ekspor dapat diterapkan secara general, tidak khusus hanya pada produk pertanian.

b. WG Ecotech

- Pemri menjelaskan bahwa *draft-zero WG Ecotech* hingga saat ini masih dalam perumusan tim legal Kementerian Perdagangan, sehingga untuk diskusi saat ini bisa fokus pada pertukaran pengalaman akan *chapter Ecotech* kedua negara selama ini dengan negara mitra masing-masing.
- Selama ini Indonesia memiliki pengalaman akan *chapter Economic Cooperation* (kerjasama pembangunan ekonomi) dengan beberapa negara antara lain dengan Jepang (IJEPA) dan Chile (IC-CEPA). Fokus utama pada dari *chapter Economic Cooperation* adalah untuk mendukung implementasi FTA maupun CEPA dengan negara mitra melalui kerjasama teknis, melakukan *feasibility studies*, ataupun *capacity building*.
- Kanada mengutarakan bahwa antara Indonesia dan Kanada saat ini sudah ada *Expert Deployment Mechanism for Trade and Development* (EDM-TD), dimana Kanada telah menyalurkan \$93 juta dalam bentuk *capacity building* di area pembangun ekonomi, khususnya pada pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Kanada melanjutkan bahwa Indonesia dapat memasukkan EDM-TD dalam *draft text Ecotech* sebagai bentuk kerjasama pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Kanada berharap WG Ecotech dapat sesegera mungkin membahas *chapter Ecotech* secara lebih detail.
- Indonesia menginginkan bentuk *Economic Cooperation* yang baru selain EDM-TD pada *draft text Ecotech ICA-CEPA*, seperti *Economic Cooperation* dengan negara mitra lainnya
- Indonesia berharap Kanada dapat memberikan *offering* terbarunya sebelum perundingan ke-3, sehingga pada perundingan ke-3 kedua

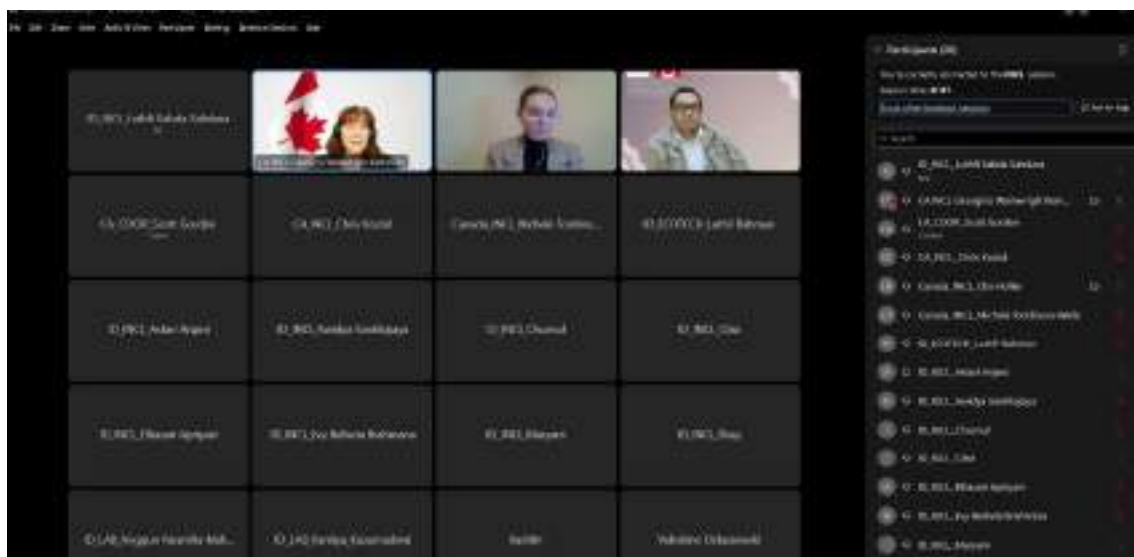
negara dapat mulai mendiskusikan draft-zero Ecotech. Begitu pula Indonesia juga akan menyampaikan outline dari draft-zero dalam waktu dekat ke pihak Kanada.

- Kedua pihak sepakat akan melakukan pertemuan intersesi secara virtual dan saling bertukar informasi dan klarifikasi beberapa isu yang belum selesai dibahas antara lain pada: Ketentuan dan Asal Barang; Standar Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian; Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Sanitari dan Pito Sanitarian; dan Hak Kekayaan Intelektual. Perundingan Putaran ketiga disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 4 November 2022 secara virtual dengan Kanada sebagai host.

Pelaksanaan Perundingan Ketiga Indonesia-Kanada CEPA

Pasca diselenggarakannya perundingan kedua ICA-CEPA pada 15 Agustus – 2 September 2022, kedua negara kembali menyelenggarakan perundingan lanjutan secara virtual pada tanggal 31 Oktober – 4 November 2022. Dalam perundingan tersebut, Kemenko Perekonomian menghadiri *pembahasan Working Group (WG) on National Treatment and Market Access for Goods (NTMA), WG Inclusive Trade dan WG Economic and Technical Cooperation (Ecotech)*.

Gambar 3.71 Perundingan Ketiga Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) - 2 November 2022



Pertemuan tersebut melanjutkan pembahasan terkait *drat text* yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Section A: Definition and Scope

Article X.1: Definition

- Indonesia mengusulkan agar tidak perlu ada definisi “consumed”. Indonesia mengusulkan agar definisi “consumed” menggunakan catatan kaki. Kanada mempertimbangkan usulan Indonesia, namun ingin menggunakan catatan kaki sesedikit mungkin.
- Indonesia kembali mengkonfirmasi perbedaan penggunaan kata “goods” dan “goods of a Party”, seperti yang telah disampaikan pada perundingan ke-2. Kanada menjawab bahwa “goods of a Party” merupakan produk dari pihak yang melakukan perjanjian, yaitu RI dan Kanada. Sebagai catatan, penggunaan kata Goods of Party ini tidak untuk membuat komitmen baru dan memperjelas definisi tersebut sesuai yang diatur dalam GATT 1994.
- Indonesia menganggap bahwa pengecualian *custom duty* pada huruf (d), mengenai premi yang ditawarkan atau dikumpulkan terkait dengan barang impor yang timbul dari sistem tender, tidak perlu diatur dalam *Chapter* NTMA. Kanada menjelaskan bahwa negaranya menerapkan sistem tender pada barang-barang impor tertentu yang dikenakan pembatasan impor secara kuantitatif, dan pengenaan premi terhadap barang-barang tersebut telah diatur UU domestik Kanada melalui pengesahan legislatif mereka. Lebih lanjut, Indonesia perlu melakukan diskusi internal dengan Pemri.
- Indonesia menyampaikan bahwa paragraf terkait *performance requirement* merupakan hal baru bagi Pemri dalam bernegosiasi pada FTA/CEPA. Indonesia mengusulkan agar “performance requirement” tidak dimasukkan dalam *Chapter* NTMA, melainkan di *chapter* terkait *customs* atau kebijakan investasi. Kanada mencatat masukan tersebut dan akan menyelaraskan dengan aturan WTO.
- o Indonesia kembali menekankan sensitivitas pada kata “remanufactured good”. Dalam regulasi Indonesia tidak dikenal istilah tersebut, meskipun terdapat pengaturan impor mengenai barang modal dalam keadaan tidak baru (Permendag 118/2018 jo. Permendag 44/2021). Kanada dapat

memahami bahwa *remanufactured* merupakan isu sensitif bagi Indonesia, namun isu ini diperlukan untuk mengantisipasi *concern* terkait kendala sumberdaya (*resource constraints*) dan penting untuk *circular economy*.

Article X.2: Scope

- Indonesia mengusulkan “*Except as otherwise provided in this Agreement, this Chapter shall apply to trade in goods between the Parties*” dari kalimat awal “...of a Party”. Kanada dapat menerima usulan dari Pemri tersebut.

Article X.3: National Treatment

- Kanada mengusulkan penggunaan kalimat (dicetak tebal) “*Each Party shall accord national treatment to the goods of the other Party in accordance with Article III of GATT 1994, including its interpretative notes, and to this end, Article III of GATT 1994 and its interpretative notes are incorporated into and made part of this Agreement as amended*” pada Paragraf 1. Usulan kalimat tersebut untuk mengakomodir kalimat *mutatis mutandis* dan menjaga fleksibilitas. Terkait usulan ini Indonesia akan mengkonsultasikan dengan Tim Legal.

Article X.4: Elimination of Custom Duties

- Indonesia mengusulkan perubahan judul article X4 menjadi: *elimination or reduction of customs duties on import*. Selain itu menambahkan kalimat “*shall eliminate or reduce its customs duties*” pada poin 2 article X4. Hal ini mempertimbangkan tidak semua tarif dieliminasi melainkan terdapat penurunan tarif dengan pertimbangan sensitivitas tiap-tiap barang impor di dalam negeri. Kanada menyetujui usulan kalimat dari Indonesia tersebut.
- Indonesia berpendapat Poin 6 huruf (c) yang berbunyi “*maintain or increase a customs duty as authorized by this Agreement, the Dispute Settlement Body of the WTO, or an agreement under the WTO Agreement*” berpotensi menimbulkan multitafsir, yaitu “perjanjian apapun di bawah WTO”. Kanada mempertimbangkan pendapat tersebut.

Article X.5: Waiver of Customs Duties

Pada article X5 masih menyebutkan kalimat *performance requirement*. Dalam hal ini Pemri kembali menyampaikan perlunya konsultasi di internal Pemri terkait terminologi dari *performance requirement* itu sendiri.

Article X.6: Import and Export Restrictions

Indonesia kembali meminta klarifikasi arti poin 3 dan 4 mengenai pembatasan atau pelarangan ekspor maupun impor dari negara yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian ICA-CEPA, baik secara langsung maupun *re-export/re-import*. Kanada menjelaskan bahwa hal tersebut untuk memberikan transparansi terhadap asal usul barang sebagai contoh barang dari Kanada tidak diperbolehkan untuk diekspor ke Rusia yang dikenakan sanksi dari Kanada, begitu juga barang hasil ekspor dan impor dari Rusia tidak boleh diekspor ke Kanada. Indonesia meminta waktu untuk berdiskusi dengan K/L dan Tim Legal.

Article X.7: Remanufactured Goods

Indonesia kembali menjelaskan bahwa *remanufactured goods* tidak dimungkinkan dalam peraturan domestik, meski diperbolehkan impor hanya bagi barang modal dengan keadaan tidak baru. Indonesia mengusulkan klausa ini dimasukkan dalam pengaturan terkait perpajakan dan/atau investasi bukan *chapter* NTMA, perlu adanya pemahaman bersama arti dari *remanufactured goods* itu sendiri dan perlu tidaknya HS Code khusus untuk jenis *remanufactured goods*. Kanada memahami sensitivitas Indonesia pada klausa *remanufactured goods*, dan menunggu masukan/*drafting* dari Indonesia sebagai catatan *remanufactured goods* diimplementasikan sesuai dengan HS Code barang (tidak ada HS Code khusus).

Article X.9: Transparency in Export Licensing Procedures

- Indonesia mengusulkan pemberian waktu 60 hari bagi para pihak untuk mempublikasi setiap prosedur perizinan ekspor dan impor setelah aturan berlaku, alih-alih 30 hari usulan Kanada. Kanada menerima usulan tersebut.
- Terkait Paragraf 3, Indonesia meminta penambahan kalimat “sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kanada mempertimbangkan usulan tersebut.

Article X.12: Committee on Trade in Goods

- Indonesia keberatan akan salah satu fungsi Komite pada Paragraf 4 huruf (f), yaitu “membahas dan berusaha untuk menyelesaikan setiap perbedaan yang mungkin timbul antara para Pihak mengenai hal-hal yang terkait dengan Sistem Harmonisasi, termasuk memastikan bahwa kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak diubah oleh penerapan amandemen Sistem Harmonisasi di masa mendatang ke dalam nomenklatur nasionalnya”. Kanada mempertimbangkan pendapat Indonesia.

Section C: Agriculture

- Indonesia kembali mempertanyakan urgensi Pertanian untuk membentuk *section* tersendiri, khususnya terkait bioteknologi dan *Low Level Presence (LLP) Occurrence*.
- Kanada menjelaskan bahwa Pertanian perlu diatur dalam *section* khusus karena sifatnya yang unik, dan di WTO pun diatur secara khusus. Namun, Kanada mencoba mengakomodir masukan Indonesia dengan:
 - a) Menghilangkan judul *Section C: Agriculture*;
 - b) Memindahkan *Article X.13: Definitions* ke *Article X.1*, yang memuat definisi secara umum;
 - c) Menghilangkan *Article X.14: Scope*;
 - d) Memindahkan *Article X.15* sampai dengan *Article X.21* ke *Section B*;
 - e) Menggabungkan *Article X.16: Export Restrictions – Food Security* ke dalam *Article X.6: Import and Export Restrictions*; serta;
 - f) Menggabungkan *Article X.17: Subcommittee on Agriculture* ke *Article X.12: Committee on Trade in Goods*;
 - g) Revisi *draft text* akan disampaikan Kanada kepada Indonesia pada kesempatan pertama

ANNEX X-A: EXCEPTIONS TO ARTICLES X.3 AND X.6

- Indonesia kembali meminta klarifikasi Kanada terkait urgensi lampiran tersebut, khususnya pengaturan terkait pengecualian *National Treatment* dan *Import and Export Restrictions* pada ekspor kayu batangan dan ikan mentah, impor “barang-barang terlarang” seperti senjata, propaganda terorisme, alkohol absolut, dan sebagainya.

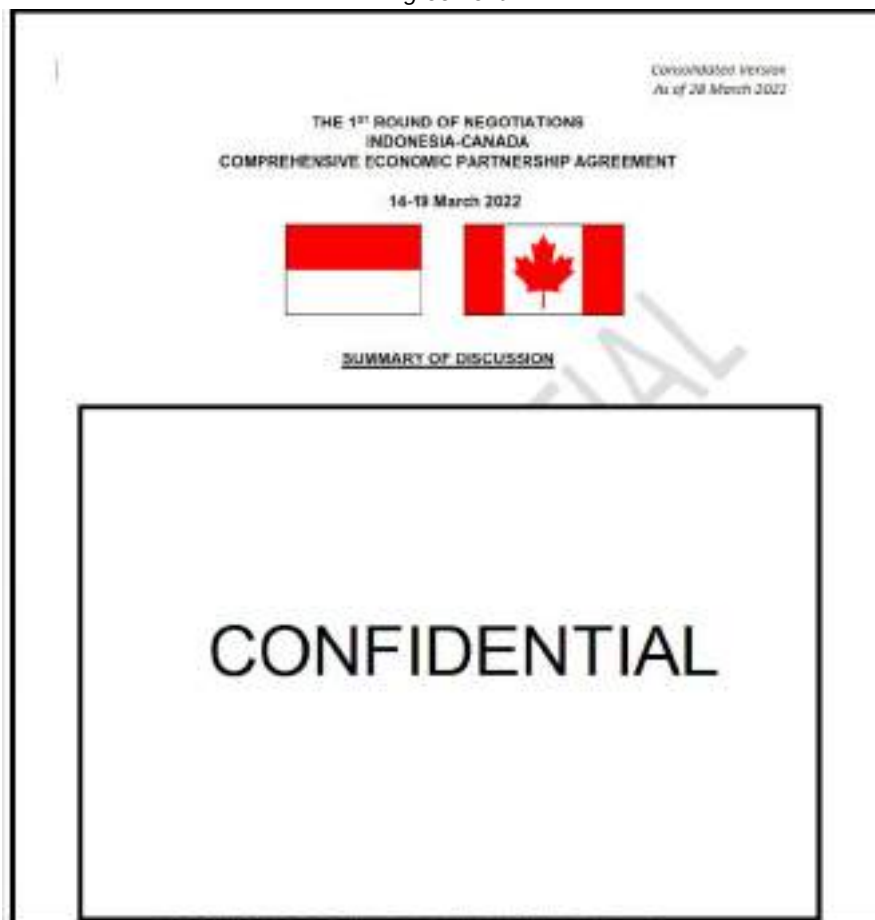
- Kanada menjelaskan bahwa pengaturan tersebut untuk tujuan transparansi dan memberikan kepastian hukum.
- Indonesia akan mendiskusikan Lampiran terkait pengecualian ini dengan K/L terkait.

Pada pelaksanaan diskusi WG *Inclusive Trade*, beberapa hal yang menjadi *concern* kedua negara antara lain sebagai berikut:

- Indonesia menekankan gender dalam WG *Inclusive Trade* adalah laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan pemberdayaan perempuan. Sementara LGBT adalah isu sensitif dimana Indonesia akan menolak jika ada isu tersebut dalam dalam perjanjian ICA-CEPA.
- Indonesia mengenal konsep masyarakat hukum adat namun bukan *indigenous peoples* yang dimaksud oleh Kanada, sehingga menolak penggunaan istilah tersebut dalam perjanjian ICA-CEPA. Menanggapi hal tersebut, penekanan Kanada dalam *indigenous peoples* adalah pembangunan ekonomi bagi kelompok yang belum merupakan keuntungan dari sebuah FTA. Kanada menyepakati bahwa konsep *indigenous peoples* mirip dengan konsep masyarakat hukum adat Indonesia.
- Indonesia memaparkan perundang-undangan terkait UMKM sebagaimana dalam UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 mengenai perlindungan, pemberdayaan dan perlindungan MSME.
- Indonesia juga memaparkan kontribusi UMKM terhadap lapangan pekerjaan dan PDB, serta tantangannya antara lain: Database UMKM yang belum terintegrasi, rendahnya penggunaan teknologi, literasi finansial dan partisipasi dalam Global Value Chain.
- Kanada telah menyampaikan *model text* terkait chapter UMKM yang terdiri dari Article X.1 General Provisions, Article X.2 Information Sharing, Article X.3 Cooperation Activities, Article X.4 Committee on MSMEs.
- Dalam paparannya, Pemerintah Kanada selama ini menerapkan pendekatan dua arah untuk perdagangan dan UMKM dalam FTA mereka. Kanada selama ini memasukkan *chapter* tersendiri tentang perdagangan dan UMKM dan menekankan ketentuan terkait UMKM di seluruh FTA.

- Pendekatan tersebut sejalan dengan tren global yang berkembang untuk memajukan perdagangan inklusif, termasuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM serta kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam perdagangan dua arah dan rantai nilai global.
- Kanada menginginkan struktur komite yang dapat merefleksikan keterwakilan perempuan kedua negara.
- Kanada juga menyampaikan bahwa terdapat *gender-based analysis* yang merupakan instrumen wajib dalam setiap kebijakan pemerintah Kanada termasuk dalam penyusunan FTA dan pembiayaan terkait kerjasama pembangunan internasional.
- Indonesia kembali menolak isu gender dan *indigenous people* pada WG *inclusive trade* dan akan mendiskusikan *model text* MSME dengan K/L terkait.

Gambar 3.72 The 1st Round of Negotiations Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement



Pada pelaksanaan diskusi WG Ecotech, beberapa hal yang menjadi *concern* kedua negara antara lain sebagai berikut:

- Indonesia menekankan pentingnya chapter Ecotech untuk membantu manfaat dari perjanjian serta dapat memfasilitasi pihak swasta dari kedua negara untuk mendapatkan manfaat dari implementasi ICA-CEPA.
- Indonesia telah mengirimkan *model text* kepada Kanada serta meminta menanyakan proses implementasi chapter terkait Ecotech yang telah dimiliki Kanada dan mitranya dalam sebuah FTA.
- Kanada menjelaskan secara singkat tiga chapter terkait Ecotech pada 4 FTA Kanada yaitu Kanada-Peru FTA, Kanada-Kolombia FTA, Kanada-Ukraina-FTA dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
- Selama ini pihak Kanada bersama mitra FTA tidak banyak melakukan kegiatan dibawah Chapter Cooperation. Dalam chapter Cooperation CPTPP, Kanada memiliki rencana kerja dengan tiga negara anggota CPTPP namun belum terwujud suatu kegiatan pun.
- Kanada menjelaskan bahwa dalam konteks *Development Assistance Program*, Kanada memiliki Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM-TD). Kanada selama 20 tahun terakhir juga telah memberikan bantuan pembangunan senilai \$1 milyar kepada Indonesia melalui berbagai program.
- Indonesia kembali menekankan pentingnya Chapter Ecotech dalam memfasilitasi atau mewujudkan kerjasama pembangunan baru selain yang telah terwujud di EDM-TD. Hal ini mengingat cakupan pada dari chapter *Ecotech* antara lain adalah untuk mendukung implementasi FTA maupun CEPA dengan negara mitra melalui *joint study*, kerjasama teknis, *feasibility studies*, maupun *capacity building*.
- Terkait frase “*inclusive and sustainable economic growth*” dalam *model text*, Indonesia menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan, UMKM dalam pertumbuhan ekonomi dan transfer teknologi ramah lingkungan menjadi salah satu prioritas Indonesia. Kanada juga menyepakati pentingnya isu tersebut dalam kerjasama kedua negara, dan berharap Indonesia dapat

menyampaikan *work plan* secara mendetail atas keterlibatan pihak-pihak yang menjadi prioritas Indonesia tersebut kedepannya.

- Kedua negara berharap pada perundingan selanjutnya kedua negara dapat mulai mendiskusikan *draft-zero* Ecotech.
- Indonesia dan Kanada juga berharap komite dalam chapter ICA-CEPA dapat mulai terbentuk pada perundingan selanjutnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Selama tahun 2022, pelaksanaan putaran perundingan negosiasi Indonesia-Canada CEPA telah terealisasi dengan baik hingga putaran ke-3. Kelancaran proses negosiasi ini terjalin mengingat proses koordinasi yang berjalan baik antar K/L dalam menyusun posisi Pemri dan juga dengan pihak Pemerintah Kanada. Kedua negara berharap pada perundingan selanjutnya kedua negara dapat mempertajam proses diskusi pada 17 *working grup* dan 3 *expert-level discussion*. Indonesia dan Kanada juga berharap komite dalam chapter ICA-CEPA dapat mulai terbentuk pada perundingan selanjutnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Perundingan Indonesia–Canada CEPA dilaksanakan secara virtual sepanjang tahun 2022, sehingga dilakukan Pemanfaatan Aplikasi Zoom maupun Aplikasi Meeting Online lainnya untuk melakukan pertemuan secara virtual dengan pihak Kanada.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Karena pelaksanaan perundingan Indonesia - Canada CEPA dilaksanakan secara virtual sepanjang tahun 2022, efisiensi penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran kepada kegiatan lainnya yang lebih prioritas ataupun kegiatan lainnya yang muncul di pertengahan tahun, namun tetap memastikan efektivitas ketercapaian target kegiatan.

3. Pelaksanaan Perundingan Kedua Indonesia-Chile CEPA Trade in Services (IC CEPA TIS)

Perundingan Kedua Indonesia-Chile CEPA Trade in Services (IC CEPA TIS)

Pasca diselenggarakannya perundingan pertama IC-CEPA TIS pada tanggal 15-16 November 2021, kedua negara kembali menyelenggarakan perundingan kedua IC CEPA TIS secara virtual pada tanggal 4-6 April 2022. Pada perundingan kedua ini, kedua pihak memfokuskan pada kelanjutan pembahasan draft text Chapter Trade in Services, penyampaian konsep Annex on Movement of Natural Persons dan Annex on Professional Services dari Indonesia, penjelasan singkat initial offer masing-masing pihak, serta logistik pelaksanaan pertemuan selanjutnya.

Pembahasan terkait draft text Trade in Services, difokuskan pada 11 *chapters* yaitu:

1. *Additional Air Services*. Kedua negara sepakat untuk menghapus *additional air services* dari definisi dan cakupan perjanjian karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Chile akan memberikan komitmen apabila Indonesia juga memberikan komitmen atas sektor tersebut. Dilain sisi Indonesia berpandangan terdapat sensitivitas untuk sektor tersebut sehingga tidak dapat memberikan komitmen.
2. *Financial Services*. Indonesia mengusulkan rumusan tambahan dalam pasal *Scope and Coverage* guna menjamin terbukanya kemungkinan pembahasan *Financial Services* di masa mendatang. Chile terbuka untuk merefleksikan hal-hal yang telah disepakati dalam *Scooping Paper* perundingan jasa IC-CEPA menjadi pasal tersendiri yang menjelaskan status jasa keuangan dalam perjanjian IC-CEPA. Chile akan menyampaikan usulan rumusan pasal tersebut untuk dipertimbangkan Indonesia.
3. *Cabotage Chile* menyatakan sensitivitas sektor ini untuk kedua negara. Sehingga hal ini tidak perlu diatur dalam pengecualian pasal *Scope and Coverage*. Namun Indonesia menyampaikan pengecualian *cabotage* akan memberikan dampak lebih besar apabila diatur dalam *Scope and Coverage* dibandingkan dengan *Schedule of Commitment*. Kedua negara akan melanjutkan konsultasi domestik.

4. *Domestic Regulation*. Indonesia mengusulkan untuk memasukkan subpara baru terkait *tribunals* atau *procedures* sebagaimana yang ada pada GATS namun Chile menganggap bahwa subpara tersebut tidak diperlukan apabila kedua negara telah memiliki *judicial, arbitral*, ataupun *administrative tribunals* yang berjalan di negaranya. *Chapters* ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
5. *Payment and Transfer*. Chile menyampaikan bahwa pasal ini dicakup dalam *annex* tersendiri yang akan diusulkan oleh Chile di tahap berikutnya. Untuk saat ini, Chile belum dapat menyampaikan judul dari *annex* tersebut mengingat masih berlangsungnya proses konsultasi domestik dengan otoritas keuangan dan bank sentral Chile. Diharapkan *annex* dapat disampaikan sebelum pertemuan berikutnya.
6. *Taxation Measures*. Chile menyampaikan bahwa pasal ini diusulkan oleh otoritas keuangan Chile. Indonesia berpandangan bahwa rumusan yang diajukan Chile berbeda dengan yang terdapat di dalam *main agreement*. Chile mengusulkan *chapter* ini dapat dicantumkan dalam *Chapter Trade in Services*. Indonesia akan mempelajari pengaturan *taxation* pada *Chapter Exceptions* lebih lanjut.
7. *Security Exception*. Indonesia mengusulkan untuk memasukkan rumusan Pasal *Security Exception* yang ada di GATS, namun dengan ketentuan tambahan terkait pengecualian perlindungan *critical public infrastructures*, seperti komunikasi, energi dan air, sebagaimana dicakup dalam perjanjian perdagangan jasa Indonesia sebelumnya. Rumusan ini merupakan *common practice* yang dilakukan Indonesia, termasuk dalam RCEP.
8. *Denial of Benefits*. Indonesia berpandangan bahwa frase “*subject to prior notification*” pada awal pasal berpotensi menghambat praktik penyangkalan keuntungan perjanjian ini di lapangan. Sehingga mengusulkan tambahan paragraf dalam pasal ini yang mengatur mengenai *denial of benefits* dalam *maritime transport service*, merujuk perjanjian bilateral Indonesia – Korea CEPA.
9. *Transparency* Chile menyampaikan bahwa ini akan berlaku terhadap *Chapter Trade in Services* setelah *entry into force*. Kedua negara sepakat untuk menghapus usulan pasal dimaksud pada *chapter* ini.

10. *Monopolies and Exclusive Services Suppliers*. Chile menyampaikan kedua negara tetap terikat pada ketentuan Pasal VIII *Monopolies and Exclusive Services Suppliers* di GATS, karena pasal ini dapat tetap berlaku meskipun tidak ada komitmen sektoral.

11. *Cooperation*. Chile mengusulkan rumusan baru yang bersifat lebih umum dari rumusan yang disampaikan oleh Indonesia sebelumnya. Namun Indonesia mengusulkan agar bisa dibuat lebih spesifik untuk memperkuat kerja sama atas sektor jasa yang dikomitmenkan. Sementara Chile menginginkan kerjasama secara umum untuk meningkatkan manfaat dari Chapter TIS IC CEPA.

Pada akhir pertemuan, kedua negara mendiskusikan kemungkinan pelaksanaan putaran ketiga perundingan IC-CEPA TIS pada bulan Agustus 2022. Perundingan akan dilaksanakan secara fisik dengan Indonesia sebagai tuan rumah/host.

Perundingan Ketiga Indonesia-Chile CEPA Trade in Services

Pasca diselenggarakannya perundingan kedua IC-CEPA TIS pada tanggal 4-6 April 2022, kedua negara kembali menyelenggarakan perundingan ketiga IC CEPA TIS secara *hybrid* (tatap muka dan virtual) pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Pertemuan melanjutkan pembahasan terkait *draft text Chapter Trade in Services* dengan 8 pasal telah disepakati dan 10 pasal masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Pembahasan terkait *draft text Trade in Services*, difokuskan pada beberapa pasal yaitu:

- ***Financial Services***. Chile menyampaikan Kembali keinginannya untuk melakukan pembahasan jasa keuangan di masa mendatang dan mengecualikan dari pembahasan chapter *Trade in Services* (TIS). Secara prinsip Indonesia dapat menerima usulan Chile, namun kedua pihak masih perlu menyepakati bagaimana hal tersebut direfleksikan dalam teks perjanjian, khususnya dalam pasal *Scope and Coverage*.
- ***Payments and Transfers***. Chile menyampaikan proposal Annex *Payments and Transfers* yang berfungsi mendukung provisi pasal terkait, yang merupakan reservasi atas otoritas Bank Sentral Chile dalam

menerapkan kebijakan *payments and transfers*. Indonesia menyampaikan bahwa annex ini merupakan hal yang baru bagi Indonesia, dan meminta klarifikasi urgensi pencantumannya sebagai annex mengingat akan lebih tepat jika dicantumkan dalam penjadwalan akses pasar sebagai reservasi.

- Disampaikan bahwa usulan Chile terkait langsung dengan keberadaan pasal *Payments and Transfers*, dan jika tidak terdapat pasal dimaksud maka usulan annex tersebut tidak diperlukan. Menanggapi hal tersebut, disampaikan bahwa Indonesia akan mempelajari usulan annex dimaksud untuk kemudian menetapkan posisi.
- Indonesia juga telah menyampaikan ***Modification of Schedules, Domestic Regulation, Monopolies and Exclusive Services Suppliers, dan Security Exceptions***. Chile masih memerlukan konsultasi domestik lebih lanjut dan akan menyampaikan posisi pada kesempatan pertama.
- ***Taxation Measures***. Kedua pihak bersepakat untuk membahas pasal ini lebih lanjut dengan legal expert, terutama terkait keterkaitan antara Chapter TIS dengan ICCEPA *main agreement* mengingat *taxation measures* sudah diatur dalam *main agreement* sebagai chapter tersendiri. Adapun Indonesia mengusulkan untuk melihat perkembangan pembahasan pasal *Taxation Measures* sebelum menentukan posisi pasal ***General Exceptions*** mengingat usulan Chile untuk kedua pasal ini saling terkait.
- ***Denial of Benefits***. Indonesia memerlukan konsultasi lebih lanjut terkait frase “*subject to prior notification*”. Chile menyampaikan bahwa *prior notification* penting untuk memberikan kepastian hukum. Chile juga mengusulkan untuk menentukan *timeframe* dalam memberikan notifikasi terkait *denial of benefit*.

Pada pembahasan *Annex on Movement of Natural Persons dan Annex on Professional Service*, secara umum Chile dapat menerima usulan rumusan Indonesia untuk *annex on Professional Services*, dan menyampaikan beberapa usulan tambahan. Disampaikan bahwa secara umum Indonesia dapat menerima usulan Chile, namun memerlukan sedikit waktu untuk melakukan konfirmasi secara internal. Adapun pembahasan konsep Annex on MNP tidak dapat

dilakukan mengingat ketidakhadiran MNP *expert* dari Chile. Chile akan menyampaikan pandangan umum secara intersesi.

Perundingan ke-3 IC-CEPA TIS juga membahas terkait akses Pasar, Chile meminta klarifikasi untuk request Indonesia pada sektor *Other Services* yang tidak tercantum dalam *W/120 documents*, karena Chile belum pernah memberikan komitmen untuk sektor ini sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, disampaikan bahwa salah satu dari sektor tersebut adalah *Services Related to Gaming & e-Sports* yang merupakan sektor yang sedang berkembang cukup pesat di Indonesia, dan diharapkan perjanjian ICCEPA dapat memperluas peluang sektor dimaksud.

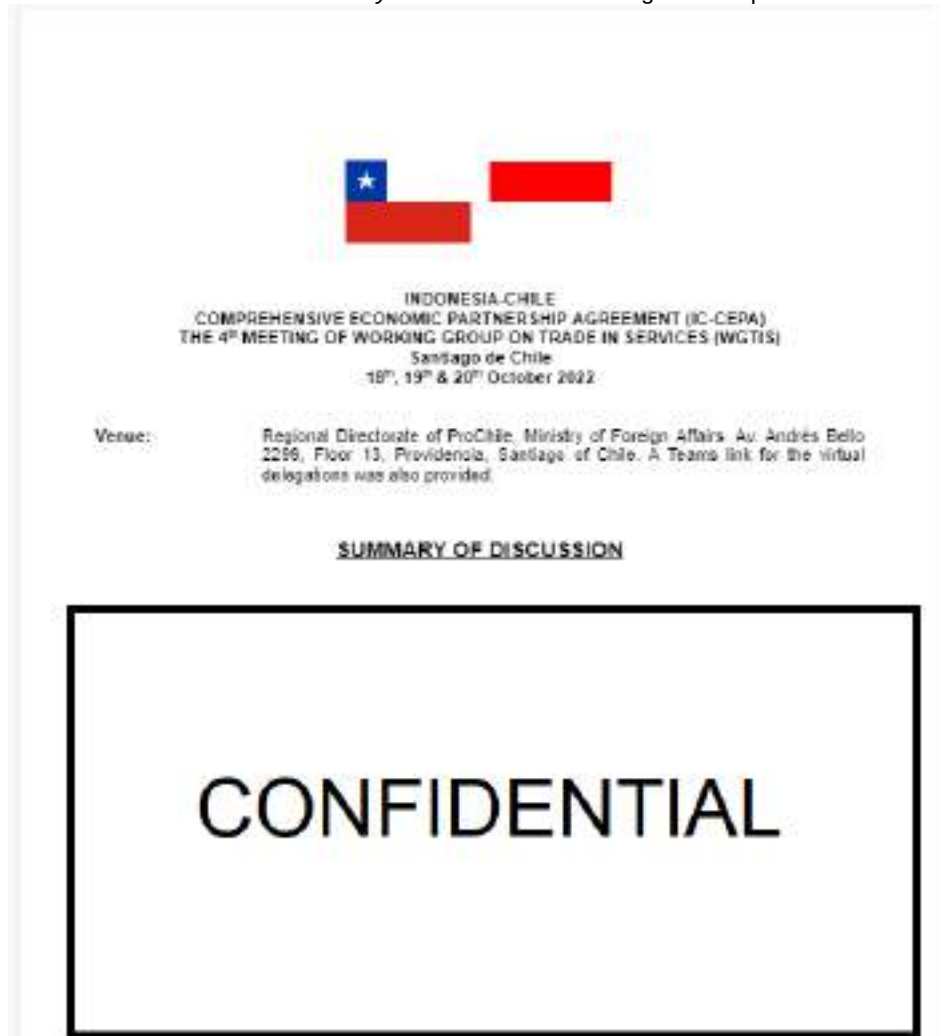
Terkait permintaan sektor jasa lainnya, Indonesia merujuk dari apa yang telah Chile berikan dalam perjanjian bilateral yang ada. Pihak Chile juga menyampaikan pandangannya agar Indonesia dapat memberikan tingkat *offer* yang lebih dalam untuk sektor-sektor yang diantaranya sebagai berikut: *Architectural Services, Integrated Engineering Services, Project Management Services, Tour Operator, dan Vessel Salvage and Refloating Services*. Terkait komitmen sektor konstruksi dalam initial offer Indonesia, disampaikan bahwa initial offer Indonesia merujuk pada tingkat komitmen kedua negara di WTO GATS. Dengan mempertimbangkan *initial offer* Chile, Indonesia dapat memiliki ruang untuk meningkatkan *offer* pada sektor *Architectural Services, Engineering Services, Integrated Engineering Services, Urban Planning and Landscape Architectural Services*, dengan basis resiprokal.

Pada akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk menyelenggarakan dua pertemuan intersesi secara virtual sebelum pelaksanaan pertemuan putaran ke-4, yang mana terdiri dari pertemuan intersesi pembahasan *legal scrubbing*; dan pertemuan pembahasan jasa keuangan. Terkait penyelenggaraan perundingan ke-4, kedua pihak menyepakati pelaksanaan perundingan pada tanggal 18-20 Oktober 2022.

Pelaksanaan Perundingan Keempat Indonesia – Chile CEPA Trade in Services dan Penandatanganan Protokol Perdagangan Jasa IC-CEPA

Pelaksanaan perundingan keempat perdagangan jasa dalam kerangka Indonesia-Chile CEPA (IC-CEPA) telah dilaksanakan pada 18-20 Oktober 2022 secara *hybrid* di Santiago, Chile. Delegasi Kemenko Perekonomian hadir secara virtual.

Gambar 3.73 Dokumen *Summary of Discussion* Perundingan Keempat IC-CEPA in Services



Berdasarkan hasil perundingan keempat bahwa kedua negara telah menyepakati seluruh teks perjanjian yang terdiri dari *Chapter Trade in Services*, *Annex on Movement of Natural Persons*, dan *Annex on Professional Services*. Pertemuan juga melanjutkan pembahasan isu akses pasar, serta pembahasan mengenai pelaksanaan *legal scrubbing* dan proses penandatanganan protokol perjanjian.

Pada pembahasan *Draft Text Chapter Trade in Services*, Indonesia dan Chile telah menyepakati seluruh pasal dalam teks *Trade in Services (TIS) Chapter* yang terdiri atas 17 pasal, yaitu *Objectives, Definitions, Scope and Coverage, Market Access, National Treatment, Additional Commitments, Schedule of Specific Commitment, Modification of Schedules, Domestic Regulation, Recognition, Taxation Measures, General Exceptions, Security Exceptions, Denial of Benefits, Committee on Trade in Services, Monopolies and Exclusive Services Suppliers*, dan *Cooperation*.

Pada pembahasan *Draft Annex on Payments and Transfers* usulan Chile, kedua negara sepakat untuk tidak menggunakan rujukan pengaturan provisi *payments and transfers* dalam perjanjian perdagangan jasa antar Indonesia dan Chile. Posisi ini disepakati mengingat Indonesia tidak dapat menerima adanya reservasi yang secara khusus menganulir kewajiban Chile dari provisi dimaksud. Sementara jika Indonesia juga mengusulkan reservasi serupa, maka provisi *payments and transfer* menjadi tidak berarti. Dengan demikian, pengaturan *payments and transfers* akan dikembalikan pada pengaturan peraturan domestik masing-masing.

Pertemuan juga menyepakati untuk membahas *pending issues* pada perundingan isu akses pasar yang akan difinalisasi secara intersesi melalui komunikasi elektronik.

Gambar 3.74 Penandatanganan Protokol Perdagangan Jasa atau Trade in Service Agreement (TIS) dalam Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) - 21 November 2022



Lebih lanjut pada tanggal 21 November 2022, Kedua negara telah melakukan penandatanganan protokol perdagangan jasa, dimana hal ini menandai tercapainya kesepakatan kerjasama perdagangan dalam kerangka kerja sama Indonesia – Chile CEPA. Persetujuan ini diharapkan dapat mendorong sinergi dalam perluasan akses pasar serta memperkuat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 bagi Indonesia dan Chile.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pelaksanaan Perundingan Perdagangan Jasa dalam kerangka Indonesia-Chile CEPA (IC-CEPA in Services) telah terealisasi dengan baik mengingat terjalinnya koordinasi yang baik antar K/L dalam menyusun posisi Pemri dan juga dengan pihak Pemerintah Chile. Hal ini tercermin dari proses perundingan perdagangan jasa melalui empat putaran perundingan dan dalam kurun waktu satu tahun, sesuai dengan target penyelesaiannya.

Kedua negara telah melakukan penandatanganan protokol perdagangan jasa pada tanggal 21 November 2022, dimana hal ini menandai tercapainya kesepakatan kerjasama perdagangan jasa dalam kerangka kerja sama Indonesia – Chile CEPA.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Perundingan Indonesia–Chile CEPA in Services dilaksanakan secara virtual maupun hybrid sepanjang tahun 2022, sehingga telah memanfaatkan Aplikasi Zoom maupun Aplikasi Meeting Online lainnya dalam melakukan perundingan dengan pihak Chile.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka menghadiri rapat tingkat teknis ataupun agenda perundingan, Keasdepan KSE Amerika dan Pasifik telah efisien dalam menggunakan anggaran yang ada dengan mengikuti beberapa kegiatan secara virtual namun masukan tetap tersampaikan dengan baik, sehingga tetap memastikan ketercapaian target kegiatan.

4. ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA)

Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) pada pertemuan AEM Retreat ke-28 pada 16 Maret 2022 mencatat dan menyepakati draft scoping paper dalam rangka upgrading ASEAN-India Trade in Goods Agreement yang sudah mulai dibahas sejak tahun 2021. ASEAN dan India telah menyepakati dan menerima masukan dari masing-masing terhadap draft yang dibahas.

Gambar 3.75 *The 19th ASEAN-India Summit to Commemorate the 30th Anniversary of ASEAN-India Dialogue Relations* yang diadakan dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan 41 di Phnom Penh, Kamboja pada 12 November 2022



AEM menugaskan kepada Pejabat Senior (SEOM) untuk melaksanakan persiapan pertemuan Special AEM-India Consultation dengan salah satu agenda pentingnya adalah endorsement terhadap scoping paper dan mengaktifkan ASEAN-India Joint Committee untuk mulai perundingan.

Gambar 3.76 *the Scope of the Review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement*

FINAL as of 14 March 2022

**The Scope of the Review of the
ASEAN-India Trade in Goods Agreement**

1. The ASEAN India Trade in Goods Agreement (AITIGA) was signed on 13 August 2009 and entered into force on 1st January 2010. The implementation of the FTA has contributed to the expansion of two-way trade between ASEAN and India. Despite that, ASEAN-India trade and investment relations are still considered modest and have not been expanding at the rate expected with the implementation of the AIFTA.
2. At the 17th AEM-India Consultations on 29 August 2020, the Ministers agreed to take steps towards the commencement of the review by starting discussions on a scoping exercise to determine the elements or areas to be covered by the AITIGA review, and tasked the officials to discuss the scope and coverage of the review at the next SEOM-India Consultations.
3. This scoping paper aims to set out the possible elements that could be negotiated during the Review of the AITIGA. However, this scoping paper is not meant to prescribe, pre-negotiate nor prejudice the outcome of the AITIGA review; including with regard to the architecture of the agreement, but its intent is to provide a common understanding on the possible scope and coverage of the review in the event a decision is made to activate the AIFTA Joint Committee to undertake the actual review to make the AITIGA more user-friendly, simple and trade facilitative for businesses. This scoping paper does not preclude the possibility of discussing and incorporating additional issues not captured or addressed below, depending upon the mutual agreement between the Parties during the review process.

A. Objectives

4. ASEAN and India will work towards a review which aims to:
 - (a) Enhance provisions that progressively eliminate tariffs and non-tariff barriers on substantially all trade in goods, in order to establish free flow of goods in trade among the Parties;
 - (b) Incorporate provisions that facilitate the efficient cross-border movement of goods between ASEAN and India, including addressing barrier effects of non-tariff measures; and further ensuring a resilient, open and connected supply chains of goods; and supporting a sustained economic recovery in facing contemporary challenges (e.g. COVID-19 pandemic);
 - (c) Establish a framework to resolve the AITIGA implementation issues and to make AITIGA more effective, user-friendly, simple, trade facilitative for businesses, and relevant to the current global trading practices.
 - (d) Promote mutually beneficial arrangements.
 - (e) Implement and strengthen economic cooperation between ASEAN and India under the FTA, particularly in the areas covered in the Agreement.

B. Guiding Principles

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Penyelesaian perundingan dan persetujuan para Pemimpin ASEAN serta India terhadap *the scope of the review ASEAN-India Trade in Goods Agreement* didukung oleh momentum peringatan 30 tahun hubungan ASEAN dan India. Dengan adanya target ini, para perunding mendapat dukungan politis yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen dengan tepat waktu. Selain itu, level ambisi antara ASEAN dan India relatif sama sehingga pembahasan *scoping paper* tersebut dapat mencapai kesepakatan tanpa isu yang berarti.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Proses penyusunan dokumen *scoping paper* telah dilakukan oleh konsultan sejak tahun 2020 dan selanjutnya dirundingkan oleh negara-negara peserta AITIGA. Masukan terhadap dokumen dan pembahasan mengoptimalkan penggunaan teknologi melalui korespondensi email dan pertemuan virtual, mengingat pada saat perundingan kondisi pandemi belum memungkinkan untuk dilakukan pertemuan fisik.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penyelesaian pembahasan *scoping paper* dan persetujuan di level *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM) dilakukan dengan korespondensi email secara intersesi serta pertemuan secara virtual sehingga menghemat penggunaan anggaran dari sisi perjalanan dinas. Selanjutnya mengingat pertemuan para *Leaders* juga dilangsungkan sebagai rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan 41, maka pembiayaan juga telah diefisienkan dengan sekaligus dilakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

5. Upgrading ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)

Capaian TW I

Perundingan pembahasan Upgrading AANZFTA mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Pertemuan ASEAN Caucus for the 17th AANZFTA *Committee on Trade in Goods* (17th ANNZFTA CTG Meeting) telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 secara virtual. Beberapa hal penting yang menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut antara lain:

- AANZFTA *Upgrade* dibahas peningkatan komitmen NTMs dan komitmen lainnya yang berada di bawah bab *Trade in Goods* (TIG). *Timeframe* untuk konsultasi teknis isu NTM dapat disetujui namun ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait dengan *list of essential goods* dan *possible element* dalam proses *upgrading trade in goods*.
- Pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan agar dalam menyusun *upgrading* pada *area trade in good*, AMS harus mempertimbangkan : (i) batas waktu *upgrading* yang sangat singkat, dan (ii) memilih elemen yang dirasa dapat mudah untuk dicapai.

Capaian TW II

- a. Pertemuan ASEAN Caucus for the 18th AANZFTA *Committee on Trade in Goods* (18th ANNZFTA CTG Meeting) telah dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juni 2022 secara virtual. Beberapa hal penting yang menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut antara lain membahas elemen-elemen *upgrading* dibawah cakupan *Committee Trade in Goods* (CTG) sebanyak total 13 pasal. Beberapa hal yang membutuhkan perhatian khusus antara lain perbedaan para 2 dan 5 pasal tentang *Fees and Formalities Connected with Importation and Exportation, Publication and Administration of Trade Regulations, General Elimination of Quantitative Restrictions, Import Licensing Procedures, and Technical Consultation on Non Tarrif Measures*. Selain itu AU dan NZ akan menyusun revisi teks Pasal *Functions of The Committee, Sectoral Initiatives, Elements on Good Regulatory Practices* dan *Engagement with Business and Other Stakeholders* dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

- b. Perundingan *upgrading* terus berlangsung di berbagai sektor. Pada pertemuan SEOM 2/53 tanggal 6 s.d. 8 Juni 2022, Pertemuan mencatat perkembangan yang belum signifikan untuk proses *upgrading*. Hingga bulan Juni 2022 tercatat 45% penyelesaian negosiasi dan mendorong Australia dan New Zealand untuk menunjukkan fleksibilitas maksimal dengan mempertimbangkan *level of ambition* dan fokus pada penyelesaian negosiasi.

Capaian TW III

- a. Pertemuan the 18th AANZFTA-FJC telah diselenggarakan pada tanggal 31 Juli s.d. 7 Agustus 2022 di Siem Reap, Kamboja. Adapun beberapa hasil pertemuan antara lain:
- Pertemuan mencatat kemajuan perundingan *Upgrading AANZFTA* sebesar 67% per tanggal 3 Agustus 2022 yang telah menyepakati 149 dari total 224 pasal.
 - Terdapat 4 SBs yang telah menyelesaikan pembahasannya yaitu Bab Kompetisi; Prosedur Kepabeanan dan Fasilitas Perdagangan; Standard, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian; dan Pengadaan Pemerintah.
 - Pertemuan membahas definisi *Substantial Conclusion* dengan indikasi terselesaikannya pembahasan draft text dan tercapainya kesepakatan akses pasar sebesar 95%-100%.
 - Pertemuan mencatat seluruh Sectoral Bodies (SBs) untuk melakukan pertemuan secara intensif untuk menyusun *shortlist pending issues* serta opsi-opsi dalam menyelesaikan pending *issues* untuk mendapat arahan FJC atau Menteri.
 - FJC juga membahas konsep laporan pada pertemuan 27th AEM-CER yang mencakup *upgrading, assessment* negosiasi akses pasar, beberapa isu yang membutuhkan arahan Menteri dan elemen nilai tambah dari *upgrading*
 - Indonesia menegaskan bahwa seluruh pihak perlu memperhatikan bahwa perundingan fokus pada pemberian nilai tambah dari persetujuan AANZFTA dan bukan merupakan sarana untuk peningkatan nilai tambah FTA lainnya.

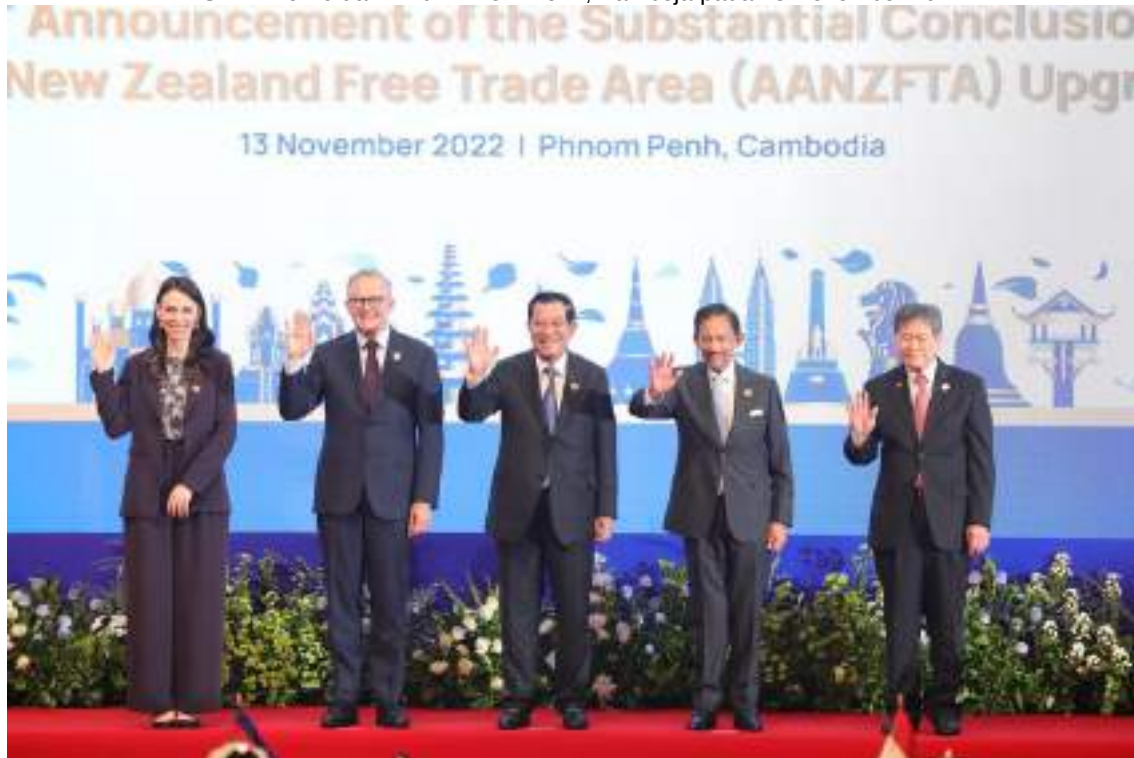
b. Pertemuan ASEAN *Economic Ministers Special Meeting* telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2022 secara virtual dan dipimpin oleh Pan Sorasak, Menteri Perdagangan Kamboja. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh *alternate AEM* yakni Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. Pertemuan bertujuan untuk membahas perkembangan perundingan *upgrading AANZFTA*. Adapun hasil pertemuan Spesial Menteri ini antara lain:

- Mencatat penyelesaian *substantial conclusion* dari *Upgrading* ini mencakup akses pasar secara bilateral dan negosiasi *text-based*. Selain itu juga menegaskan kembali bahwa *substantial conclusion* dari perundingan merupakan salah satu PED di bawah Keketuaan Kamboja.
- Pertemuan mencatat kemajuan perundingan *Upgrading AANZFTA* sebesar 72% dengan 4 (empat) *chapters* telah selesai yakni Bab *Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)*, *Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF)*, *Competition and Government Procurement*.
- Mencatat beberapa hal penting lainnya terkait perundingan *upgrading AANZFTA* seperti Bab terkait *Services, Trade and Sustainable Development (TSD)*, *E-Commerce*, dan beberapa hal terkait ketentuan dalam melakukan negosiasi perjanjian.
- Persetujuan terhadap rekomendasi pendekatan untuk mendorong penyelesaian negosiasi.

Capaian TW IV

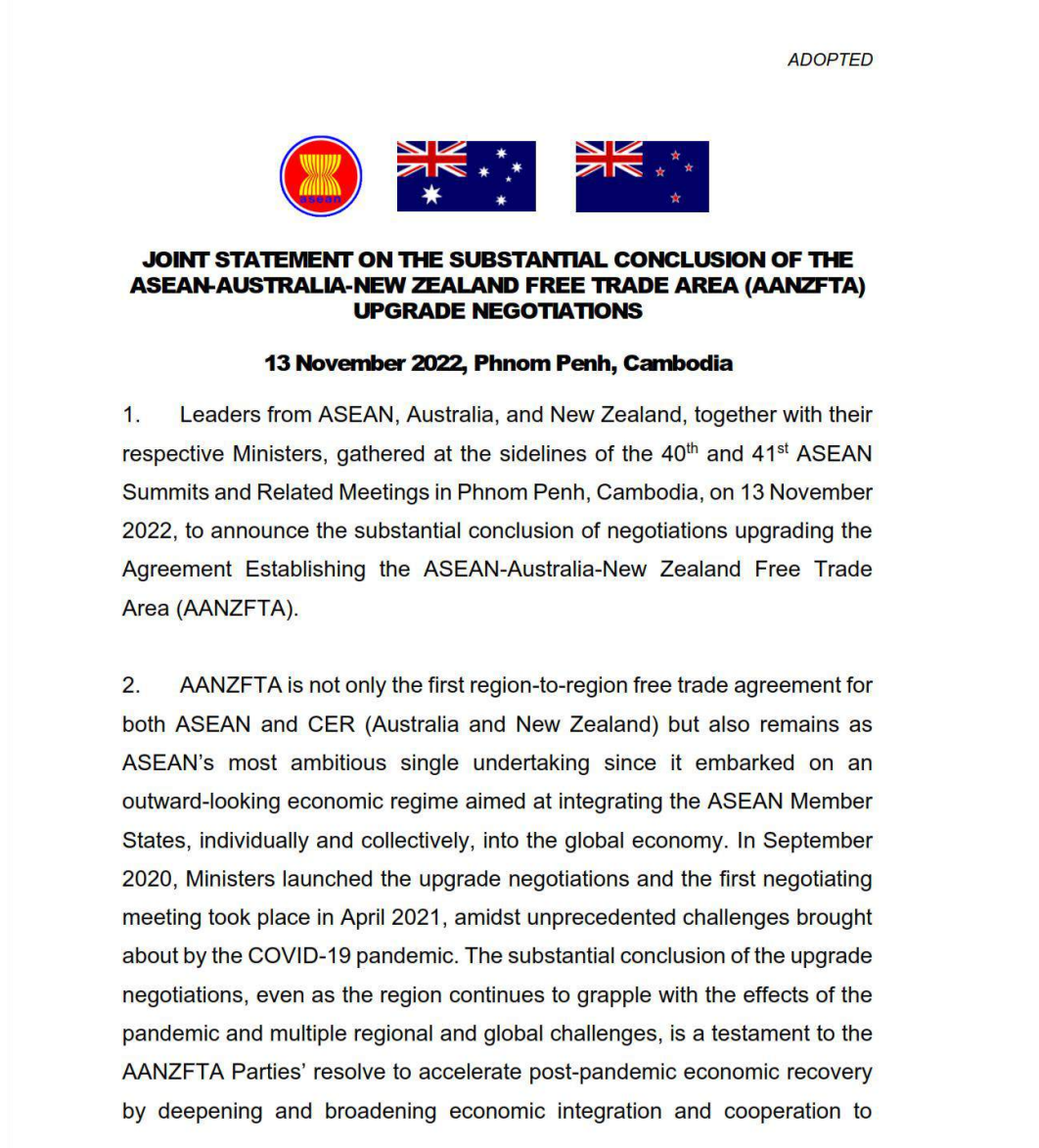
Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke 40 dan 41 dan KTT ASEAN lainnya telah dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 10 s.d. 13 November 2022. Adapun salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah “*Joint Statement on the Substantial Conclusion of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Upgrade Negotiations*”.

Gambar 3.77 *Announcement of the Substantial Conclusion of AANZFTA Upgrade* pada Rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan 41 di Phnom Penh, Kamboja pada 13 November 2022



Joint Statement ini merupakan pernyataan para kepala negara ASEAN dan Australia New Zealand yang menyatakan *Upgrading AANZFTA* akan membuka peluang baru karena mempercepat integrasi rantai pasok dan ketahanan, memastikan kelancaran arus barang selama periode krisis, peningkatan jasa layanan dan liberalisasi investasi dan mendukung perdagangan elektronik dan transformasi digital. Pada pertemuan ini para pemimpin negara juga telah menyepakati penyelesaian secara substansi *upgrading AANZFTA* dan penandatanganan perjanjian serta implementasinya akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Gambar 3.78 Joint Statement on the substantial conclusion of the AANZFTA upgrade negotiations



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

- Hingga akhir tahun 2022 tercatat proses perundingan bilateral dan akses pasar mencapai 93%. Atas dasar tersebut, KTT ASEAN ke-40 dan 41 di Kamboja para Pemimpin ASEAN, Australia, dan Selandia Baru mengumumkan *substantial conclusion of AANZFTA Upgrading* yang juga menjadi salah satu *priority economic deliverables* (PED) Keketuaan Kamboja di ASEAN tahun 2022.
- Proses perundingan berjalan cukup lambat di sebagian besar *chapter* karena perbedaan level ambisi negara-negara peserta serta banyaknya isu-isu baru yang dimasukkan ke dalam *upgrading*. Di satu sisi, pihak Australia dan Selandia Baru secara proaktif meminta komitmen yang lebih tinggi, melebihi

komitmen yang ada dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang dijadikan negara-negara anggota ASEAN sebagai *benchmark*. Di sisi yang lain, beberapa negara ASEAN mempertahankan posisi sehingga sulit untuk mencapai kompromi. Adapun *Chapter* yang masih belum selesai hingga tahun 2022 adalah Perdagangan Jasa, Investasi, dan *Movement of Natural Persons*.

- Selain itu, terdapat penolakan Australia dan Selandia Baru perihal status Myanmar dalam penandatanganan jika dokumen *upgrading* telah selesai. Sebagai catatan di tahun 2022, kebijakan ASEAN adalah tidak mengundang pejabat politik Myanmar (kepala pemerintahan, menteri) untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ASEAN, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi proses penandatanganan dan selanjutnya status ratifikasi Myanmar terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Pertemuan mengoptimalkan penggunaan teknologi melalui pertemuan virtual serta korespondensi intersesi mengingat kondisi pandemi yang belum memungkinkan serta intensnya pertemuan di tiap-tiap komite.
- Pengoptimalan SDM untuk menjalankan perundingan dilakukan dengan pembagian *chapter* perundingan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang menangani dengan Kementerian Perdagangan sebagai *national focal point* untuk level *Joint Committee*.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran telah dilakukan mengingat sebagian besar pertemuan di tahun 2022 dilakukan dalam format virtual. Pertemuan fisik untuk pembahasan *upgrading* AANZFTA dilangsungkan dalam rangkaian SEOM 3/53 di Siem Reap, Kamboja pada bulan Agustus 2022 sehingga pembiayaannya telah diefisienkan sekaligus dengan pembiayaan pertemuan lain yang dihadiri.

6. Pembentukan Komite Bersama JCM Indonesia

Pada Triwulan II Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang menyepakati untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama Bilateral tentang *Joint Crediting Mechanism* (JCM) atau Mekanisme Kredit Bersama untuk Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon hingga tanggal 31 Desember 2030 seiring dengan selesainya proses pertukaran nota verbal antara kedua negara.

Gambar 3.79 Pertemuan dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia: *Update* terkini implementasi JCM dan perpanjangan bilateral kerjasama JCM antara Indonesia dan Jepang Jakarta, 8 Februari 2022



Disepakatinya perpanjangan kerja sama tersebut telah ditindaklanjuti dengan penetapan Komite Bersama Indonesia yang diketuai oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kemenko Perekonomian dan beranggotakan 7 (tujuh) eselon II dari 7 (tujuh) K/L. Adapun Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berperan sebagai pengarah. Dengan telah ditetapkannya Komite Bersama yang mewakili Pemerintah Indonesia tersebut dalam kerja sama JCM dengan Pemerintah Jepang, maka seluruh kebijakan yang menyangkut siklus proyek JCM serta proses validasi dan verifikasi proyek akan diputuskan dalam di dalam Forum Komite Bersama.

Gambar 3.80 Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Komite Bersama Mekanisme Kredit Bersama Indonesia dengan Jepang



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Dalam memenuhi target kinerja di atas, terdapat kendala eksternal yaitu pihak komite bersama Jepang belum siap melakukan pertemuan Komite Bersama dengan Indonesia.
- Selain itu terbitnya Kebijakan Nasional Indonesia pada bulan Oktober 2022 terkait nilai ekonomi karbon juga berdampak terhadap implementasi JCM karena pihak komite bersama Jepang menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.
- Sehingga pertemuan Komite Bersama Indonesia-Jepang yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 menjadi mundur di tahun 2023. Pertemuan ini sejatinya akan membahas berbagai keputusan penting terhadap siklus proyek JCM termasuk penerbitan kredit karbon.
- Meski demikian, pihak pemerintah Indonesia tetap melakukan pertemuan internal Indonesia, yakni melakukan pembentukan Komite Bersama Indonesia.

Gambar 3.81 Rapat Internal Tim JCM Persiapan JC Meeting 2022 di Jakarta, 20 Oktober 2022



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Pemanfaatan Aplikasi Zoom untuk melakukan pertemuan teknis secara virtual dengan pihak terkait.
- Pemanfaatan Aplikasi *Whatsapp* untuk melakukan komunikasi secara intens dengan pihak terkait.
- Pemanfaatan teknologi *cloud* untuk menyusun bahan dan materi keperluan secara digital dan online.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

- Pemanfaatan dukungan kendaraan operasional dari sponsor G20 saat melaksanakan kegiatan rapat dan *site visit*
- Pemanfaatan jasa konsultan yang langsung dicover oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES) dan Mitsubishi UFJ Research and Consulting (MURC)

7. Kesepakatan Usulan Proyek Baru JCM

Gambar 3.82 Pertemuan dengan Takuya Nomoto (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia) di Jakarta, 1 Juli 2022



Terkait rencana penyelenggaraan *Joint Committee Meeting* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, maka pada triwulan IV ini telah diputuskan bahwa pertemuan tersebut ditunda untuk dilaksanakan pada tahun depan. Hal ini dikarenakan pada fokus dan perhatian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sangat tersita pada penyelenggaraan Pertemuan Sherpa G20 Ke-4 dan KTT G20 yang juga berlangsung pada triwulan IV. Di sisi lain anggota KLHK c.q. Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim c.q. Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektor dan Regional yang merupakan salah satu anggota Komite Bersama dan sekaligus *focal point* dari isu perubahan iklim di Indonesia harus mengikuti *Conference of the Parties 27 of the UNFCCC (COP 27 UNFCCC)* di triwulan IV.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

1. Dalam memenuhi target kinerja di atas, terdapat kendala eksternal yaitu pihak komite bersama Jepang belum siap melakukan pertemuan Komite Bersama dengan Indonesia.
2. Selain itu terbitnya Kebijakan Nasional Indonesia pada bulan Oktober 2022 terkait nilai ekonomi karbon juga berdampak terhadap implementasi JCM karena pihak komite bersama Jepang menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.
3. Sehingga pertemuan Komite Bersama Indonesia-Jepang yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 menjadi mundur di

tahun 2023. Pertemuan ini sejatinya akan membahas berbagai keputusan penting terhadap siklus proyek JCM termasuk penerbitan kredit karbon.

4. Meski demikian, pihak pemerintah Indonesia tetap bekerja sama dengan pemerintah Jepang dalam menerbitkan Project Identification Number (PIN).

Gambar 3.83 *Project Idea Note for the JCM Model Project*

インドネシア/日系工場 2 社への太陽光発電システムの導入
Project Idea Note for the JCM Model Project

Document release date	5/6/2022
Title of the proposed project (should be self-explanatory and clearly indicate the activity leading to emissions reduction)	Indonesia/Introduction of Solar Power System to 2 Japanese Factories
Host country	Indonesia
The main contact for the project (for identification of the person in charge for the project in terms of communication)	Name of the contact entity (company, etc.): Tokyo Century Corporation Address of the contact entity: 3 Neribel-cho, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 101-0022 Website of the contact entity: https://www.tokyocentury.co.jp Name and position of the main contact person in the entity: Htet Aung, Shine (Global Business Division) E-mail of the main contact person: HTETAUNG.S@tokyocentury.co.jp Phone number of the main contact person: +81-(0)80-1367-3714
Japanese participant[s] for the project and their roles in the	Name of the entity (company, etc.): Tokyo Century Corporation

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Pemanfaatan Aplikasi Zoom untuk melakukan pertemuan teknis secara virtual dengan pihak terkait.
2. Pemanfaatan Aplikasi *Whatsapp* untuk melakukan komunikasi secara intens dengan pihak terkait.
3. Pemanfaatan teknologi *cloud* untuk menyusun bahan dan materi keperluan secara digital dan online.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

1. Pemanfaatan dukungan kendaraan operasional dari sponsor G20 saat melaksanakan kegiatan rapat dan *site visit*
2. Pemanfaatan jasa konsultan yang langsung dicover oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES) dan Mitsubishi UFJ Research and Consulting (MURC)

8. Kesepakatan Kerja Sama RI-Kazakhstan

Pembentukan kerja sama dengan Kazakhstan saat ini merupakan waktu yang kondusif mengingat saat ini pemerintah Kazakhstan banyak melakukan reformasi di bidang pemerintahan dan bisnis untuk meningkatkan perekonomian mereka. Isu penting di bidang perdagangan yang perlu diangkat ialah isu logistik sebagai tantangan utama perdagangan Indonesia dan Kazakhstan. Karena biaya logistik masih merupakan porsi terbesar pengiriman barang ke Kazakhstan.

Gambar 3.84 Rapat Koordinasi Pembahasan Kerja Sama RI-Kazakhstan (Virtual, Jakarta-21 Juni 2022)



Pada pertemuan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Duta Besar Kazakhstan, pihak Kazakhstan mengusulkan untuk dilaksanakannya Sidang Komite Bersama Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Kazakhstan pada level teknis. Untuk merespon usulan pihak Kazakhstan, pada tanggal 6 Oktober 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional telah mengirim surat kepada Kedubes Kazakhstan perihal kesiapan untuk memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan JCEC RI- Kazakhstan.

Gambar 3.85 Surat kepada Kedubes Kazakhstan perihal kesiapan untuk memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan JCEC RI- Kazakhstan (kiri) dan daftar proyek potensi kerja sama bilateral



Daftar Potensi Kerja Sama Bilateral yang dapat diangkat pada pertemuan JCEC RI-Kazakhstan yaitu diantaranya:

- *Strengthening cooperation in the tourism field to promote bilateral tourist journeys*
- *Launching of direct (charter) flight between Turkestan/Almaty and Jakarta/Denpasar for tourist trips, as well as air cargo for transportation of perishable products*
- *Promotion of ecotourism*
- *Consolidation of Kazakh and Indonesia exports and entrepreneurs on one platform*
- *The visit of the KADIN delegation to Kazakhstan*
- *Purchase of wheat, grain products, and animal feed*
- *Construction of the Indonesian trade and logistics terminal in one of the southern regions of Kazakhstan*
- *Cooperation in Oil and Gas field*
- *Joint production of lithium, nickel, and cobalt in Kazakhstan*
- *Smelting and processing aluminum and bauxite mining in Kazakhstan*
- *Import ferrochrome directly from the manufacturer in Kazakhstan*
- *Collaboration on the platform of the “Astana” International Finance Center*
- *Interaction in the healthcare*
- *Cooperation in fin-tech*

- *Bilateral legal framework*
- *Cooperation between the peacekeeping training centers of Kazakhstan and Indonesia*
- *Facilitation of the visa regime*

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Koordinasi yang intensif antar K/L menjadi salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan kerja sama RI-Kazakhstan sehingga telah tersusun matriks potensi kerja sama yang dapat diusulkan kepada pihak Kazakhstan serta pengiriman surat kepada Kedubes Kazakhstan terkait kesiapan Deputi VII untuk memimpin pelaksanaan JCEC RI-Kazakhstan.

Program-program kerja sama yang menguntungkan kedua Negara menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kerja sama bilateral RI-Kazakhstan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rapat koordinasi pembahasan kerja sama RI-Kazakhstan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait dilakukan dengan menggunakan teknologi zoom meeting maka penyusunan matriks potensi kerja sama dapat berjalan dengan lancar dan frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rapat koordinasi pembahasan potensi kerja sama RI-Kazakhstan dilakukan secara virtual sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih ditekan.

9. Perundingan Pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)

Perundingan putaran pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) telah dilaksanakan pada 10 – 15 Desember 2022 di Brisbane, Australia secara *hybrid* (daring dan luring). Perundingan dilaksanakan secara paralel yang dipimpin oleh Delegasi Amerika Serikat dan dihadiri oleh 13 negara peserta IPEF lainnya (Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam).

Gambar 3.86 Usulan Konsep Daftar Struktur IPEF



Delegasi RI pada perundingan pertama IPEF terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Bank Indonesia. Delegasi RI menghadiri secara langsung pembahasan substansi semua isu Pilar dalam perundingan IPEF.

Beberapa catatan penting dalam pembahasan mengenai Pilar I (Perdagangan):

- Terdapat pembahasan draft teks khusus terkait Domestic Service Regulation (DSR) yang merupakan bagian dari Klaster Transparency and Good Regulatory Practices (GRPT). AS menyusun draf teks DSR yang

merujuk pada United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) dan Joint Initiative on Services Domestic Regulation (JSI-DSR).

- AS belum menyusun draf teks untuk Klaster Competition, sehingga pada perundingan pertama pihak Australia menyampaikan *Possible IPEF Competition Chapter Structure serta Coverage of Competition-Related Disciplines in IPEF Member FTAs/RTAs*. Negara peserta IPEF, termasuk Indonesia, umumnya telah memiliki komitmen serupa atas seluruh *possible chapter* yang disusun Australia. Perlu dicermati komitmen yang lebih progresif dalam pembahasan Klaster *Competition* IPEF kedepannya.
- Dalam pilar Trade Facilitation terdapat 5 artikel yang mendapatkan sorotan yakni *digital session for the procedures, Infrastructure and logistic mechanism, e payment, sustainability, dan supply chain and inclusivity in supply chain*. Dalam pembahasan pada klaster ini, terdapat indikasi bahwa sekiranya terdapat pasal yang tidak berlaku dalam hukum domestik, negara-negara dapat dikecualikan untuk menerapkannya. AS menyampaikan permintaan masukan tertulis untuk *concept note on Trade Facilitation*.
- Ruang lingkup Klaster Environment dibagi menjadi 4 bagian yaitu, *newer issues/current thinking/state of play, core/administrative, provisions that are not natural resource focused environment, dan provisions that are natural resource focused*. AS menyampaikan bahwa draf teks klaster Environment akan disampaikan pada rangkaian pertemuan IPEF yang selanjutnya yakni di New Delhi pada bulan Februari 2023.
- Pihak Australia dan Selandia Baru sebagai pengusung klaster Inclusivity memaparkan *Draft Chapter Outlines Inclusivity* yang terdiri dari 8 pasal. Indonesia menyampaikan perlunya ada definisi yang jelas untuk beberapa frase dalam teks serta penekanan bahwa Indonesia tidak mengenal konsep *indigenous people*. Pada kesempatan tersebut Indonesia juga menyampaikan terdapat Rencana Aksi Indonesia dalam mengatasi kesenjangan *gender digital* melalui Pedoman Transformasi Digital Perempuan.
- Klaster Digital Economy membahas 32 elemen yang diusulkan USTR mengacu dari perjanjian FTA *eksisting* seperti United States – Japan

Digital Trade Agreement (USJDTA), USMCA, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Lebih lanjut, Australia, Singapura dan New Zealand, mengusulkan acuan penambahan teks yang dirujuk dari perjanjian Singapore – Australia Digital Economy Agreement (SADEA) dan Digital Economy Partnership Agreement (DEPA). Indonesia mendorong kerja sama konkret yang mengedepankan elemen berbasis pengembangan kompetensi dan literasi digital, serta pembangunan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

- Pada klaster Labor, pembahasan difokuskan pada penyusunan *framework* pada sektor ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk pekerja migran dari praktek – praktek kekerasan, *forced labor* dan pelanggaran hak – hak dasar pekerja di tempat kerja. Dasar framework dari klaster Labor secara prinsip akan mengacu pada standar International Labour Organization (ILO) serta mengacu pada peraturan – peraturan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di masing-masing wilayah negara.

Gambar 3.87 Perundingan Pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)



Beberapa catatan penting dalam pembahasan Pilar II (Rantai Pasok) antara lain sebagai berikut:

- Pertemuan membahas *zero draft Agreement Relating To Supply Chain Resilience: Pillar II of the Indo-Pacific Economic Framework*, yang terdiri dari 14 *articles*. Beberapa isu yang menjadi perhatian bagi masing anggota termasuk Indonesia yaitu:
 - Pillar II terbagi menjadi dua bagian utama: (1) upaya mengamankan rantai pasok untuk *critical sectors* dan *key products*; (2) aspek *labor* dalam rantai pasok.
 - Kelembagaan, usul pembentukan 6 *committees: Supply Chain Logistics, Workforce, Tripartite Labor Rights, Supply Chain Resilience, Disruption preparedness and Action Plan Team*. Terkait hal tersebut, AS akan melakukan *streamlining* atas semua komite/tim ini agar lebih efisien dan efektif.
 - Setiap negara akan mengidentifikasi 200 *key products* (HS 6). Korea memaparkan pengalaman mengenai *Early Warning System* untuk *critical products*.

Gambar 3.88 Perundingan Pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)



Pokok-pokok bahasan dalam Pilar III (Ekonomi Bersih), disampaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Negara peserta IPEF memiliki perbedaan pandangan satu sama lain, sehingga dalam implementasi Pillar III dibutuhkan sebuah *roadmap*. Roadmap selanjutnya diturunkan dalam level proyek untuk memanfaatkan sumber daya yang di masing-masing negara, salah satunya dalam mewujudkan *Net Zero World*.
- b. *Concern* Indonesia saat ini adalah bagaimana mengimplementasikan rencana transisi energi dengan proyek-proyek konkret, sebagaimana yang dibahas pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, dan juga pada komitmen Just Energy Transition Partnership for Indonesia (JETP).
- c. Pemri perlu merujuk kembali pada IPEF *Ministerial Statement* yang mempertimbangkan keamanan energi masing-masing negara yang memiliki titik tolak yang berbeda – beda.
- d. Terdapat diskusi mendalam mengenai teknologi baru dan kerja sama transisi energi.

Gambar 3.90 Laporan Hasil Kunjungan Kerja dalam Rangka Perundingan Pertama dan SOM Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL	
NOTA DINAS NOMOR KSI.03.01/575/D.VII.M.EKON/12/2022	
Yth.	: Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Dari	: Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Hal	: Laporan Hasil Kunjungan Kerja dalam Rangka Perundingan Pertama dan SOM Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity, 10-15 Desember di Brisbane, Australia.
Tanggal	: 20 Desember 2022
Merujuk perihal tersebut pada pokok Nota, dan atas perkenan Bapak Menko, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:	
1. Perundingan putaran pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) telah dilaksanakan pada 10-15 Desember 2022 di Brisbane, Australia secara	

Pokok-pokok bahasan dalam Pilar IV (Ekonomi Adil) disampaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pertemuan difokuskan kepada *general comment* dari *draft text* yang sudah disampaikan oleh AS. Pada prinsipnya diskusi di Pillar IV masih dalam tahap penjelasan dari AS terkait *draft text* meliputi definisi istilah – istilah yang digunakan, *scope and general provision*, dan rujukan dan hubungan dengan perjanjian lain. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah disepakati sebagian besar negara di dunia menjadi rujukan utama, meskipun terdapat beberapa *article* atau paragraf yang mengambil *wording* dari perjanjian lain seperti USMCA dan CPTPP.
- b. Indonesia berpandangan bahwa perlu menekankan bagaimana agar IPEF dapat memperkuat kerja sama internasional dalam melaksanakan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) yang ada dan mendorong penguatan pelaksanaan rekomendasi FATF.
- c. Indonesia mencatat bahwa terdapat beberapa negara menyampaikan *concern* terkait dengan duplikasi isu – isu perpajakan di IPEF dengan pembahasan yang dilakukan di OECD dan forum lainnya, diantaranya Indonesia, Thailand, India, dan Jepang.
- d. Perlu kajian mendalam dalam menyikap *draft text* tersebut, terutama terkait OECD Anti-Bribery Convention di mana Indonesia tidak menjadi partisipan dalam konvensi tersebut.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Perundingan putaran pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) telah dilaksanakan pada tanggal 10-15 Desember 2022 di Brisbane, Australia secara hybrid. Perundingan pertama IPEF dihadiri oleh para Chief Negotiator dan delegasi dari 14 negara partisipan IPEF. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bertindak sebagai *Chief Negotiator* Pemri untuk IPEF dan *Lead Negotiator* dalam Pilar I Perdagangan. Adapun Delri terdiri dari beberapa KL antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi, Informasi, dan

Teknologi, serta beberapa instansi lainnya seperti Bank Indonesia, PT Pertamina, dan PLN.

Dengan adanya koordinasi yang baik antar K/L yang menjadi pengampu dalam Pilar II-IV maupun dengan pihak AS selaku penginisiasi IPEF, Perundingan Pertama dapat terlaksana dengan baik walaupun dilaksanakan di akhir tahun. Adapun beberapa K/L lainnya yang tidak dapat hadir dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran di akhir tahun sehingga K/L terkait lainnya hadir secara virtual.

Adapun target ini merupakan perubahan dari target awalnya yaitu penyelenggaraan SOMET RI-NZ dan menggantinya dengan Kesepakatan dalam Perundingan Pertama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity. Penggantian target kami lakukan dengan mempertimbangkan dua hal, yakni Pertama, hampir seluruh Kementerian Lembaga dan Stakeholder terkait, termasuk Kemenko Perekonomian, memusatkan kegiatannya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia. Kedua, pada 5 September 2022 Kemenko Perekonomian diberikan mandate berupa tugas oleh Presiden untuk mengkoordinir proses negosiasi IPEF. Oleh sebab kedua hal tersebut, target kesepakatan SOMET RI-NZ kami ganti menjadi Kesepakatan pada Perundingan Pertama IPEF.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Perundingan putaran pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada melalui:

- Pemanfaatan Aplikasi Zoom untuk melakukan pertemuan teknis dengan KL terkait maupun pertemuan perundingan yang dilakukan secara hybrid dengan 14 negara partisipan.
- Pemanfaatan teknologi *onedrive* maupun *gdrive* untuk menyusun bahan dan posisi Pemri dalam Perundingan putaran pertama IPEF secara digital dan online. Adapun pihak AS juga menggunakan aplikasi *sharepoint* dalam mensirkulasikan bahan atau *draft text* yang bersifat *confidential* kepada 14 negara partisipan IPEF.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan Perundingan putaran pertama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dimana Kemenko Perekonomian memimpin Delri serta bertindak sebagai Chief Negotiator Pemri untuk IPEF, namun tidak melupakan perhitungan ekonomi sehingga Keasdepan telah mencapai efisiensi kualitas pelaksanaan anggaran yang baik.

10. *Preliminary Meeting* Indonesia MERCOSUR CEPA

Gambar 3.91 Infografis Kinerja Perdagangan Indonesia - MERCOSUR



Mercosur merupakan salah satu blok dagang di Amerika Selatan, yang beranggotakan Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Brasil dan Argentina merupakan mitra dagang terbesar. Oleh karena itu, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan negara blok dagang Mercosur melalui rencana penyusunan FTA dalam bentuk CEPA.

Pasca diluncurkannya Indonesia – Mercosur CEPA (IM-CEPA) pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Mendag RI dan para Menteri Luar Negeri anggota Mercosur, Indonesia dan Mercosur telah menyelenggarakan *Preliminary Meeting* tanggal 7 Juni 2022. Pada intinya *Preliminary Meeting* membahas antara lain (i) Usulan ToR perundingan IM-CEPA; (ii) Work Plan perundingan IM-CEPA; dan (iii) keperluan dokumen dan logistik untuk perundingan pertama IM-CEPA.

Gambar 3.92 Dokumen Laporan Analisa Potensi dan Manfaat Pembentukan Indonesia – MERCOSUR (IM-CEPA) pada Perdagangan Barang untuk Indonesia



Hal-hal yang mengemuka dalam dalam pertemuan, antara lain:

- *Draft Term of Reference (TOR)*
 - Indonesia menegaskan kepada Mercosur bahwa dokumen TOR bersifat tidak mengikat (*non-binding*).
 - Bidang-bidang yang dicakup dalam TOR sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya dalam *Scoping Paper*.
 - TOR akan menjadi rujukan kedua pihak selama perundingan berlangsung.
- *Pembentukan Working Group*
 - Tanggapan Mercosur bahwa Trade Remedies, STRACAP dan Sanitary and Phytosanitary Measures tetap menjadi Working Group sendiri, tidak menjadi Sub Working Group di bawah Working Group Trade in Goods.
 - *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)* dan *Trade and Sustainable Development (TSD)* merupakan Chapter dan Working Group tersendiri di luar *Working Group Cooperation*

- Penunjukkan *Contact Point*
MERCOSUR menyampaikan akan menunjuk Koordinator tetap yang akan menjadi *Contact Point* ketika sudah memasuki periode perundingan.

Gambar 3.93 *Preliminary Meeting* Indonesia-Mercosur CEPA secara virtual (7 Juni 2022)



- Perundingan Putaran Pertama, akan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2022 dengan mempertimbangkan bahwa MERCOSUR saat ini sedang dalam tahap penyelesaian perundingan dengan negara mitra lain dan pertimbangan politik lainnya.
 - MERCOSUR akan menyampaikan masukan secara tertulis atas draft TOR usulan Indonesia dalam jangka waktu 2-3 minggu setelah *preliminary meeting*. Sebelum perundingan Putaran Pertama, kedua pihak sepakat untuk saling mempertukarkan data statistik perdagangan dan zero draft text.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pada tahun 2022, Indonesia dan negara-negara Mercosur telah melaksanakan Preliminary Perundingan Indonesia-Mercosur CEPA walaupun ditengah berbagai kepadatan agenda perundingan dengan negara mitra lainnya. Pelaksanaan Perundingan lanjutan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mempertimbangkan bahwa MERCOSUR saat ini sedang dalam tahap penyelesaian perundingan dengan negara mitra lain dan pertimbangan politik lainnya. Sebelum perundingan selanjutnya, kedua pihak sepakat untuk saling mempertukarkan data statistik perdagangan dan zero draft text.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Preliminary Perundingan Indonesia-Mercosur CEPA dihadiri oleh perwakilan dari 5 negara dan dilaksanakan secara virtual pada tanggal 7 Juni 2022, sehingga pelaksanaan pertemuan tersebut telah memanfaatkan Aplikasi Zoom dalam melakukan pertemuan dengan negara-negara Mercosur.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Karena pelaksanaan Preliminary Perundingan Indonesia - Mercosur CEPA dilaksanakan secara virtual, efisiensi penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran kepada kegiatan lainnya yang lebih prioritas ataupun kegiatan lainnya yang muncul di pertengahan tahun, namun tetap dengan memastikan efektivitas ketercapaian target kegiatan.

11. Perundingan Indonesia – EU CEPA Putaran ke-12

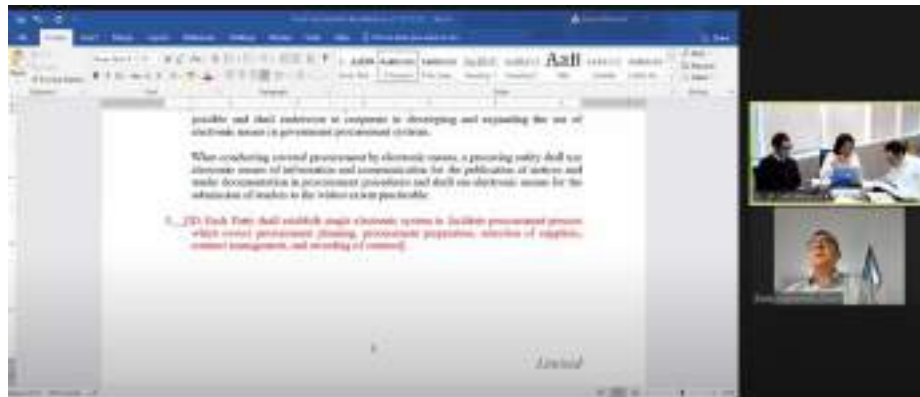
Gambar 3.94 Opening Plenary IEU - CEPA Putaran Ke-12, Virtual 16 Desember 2022



Perundingan IEU-CEPA Putaran ke-12 diselenggarakan secara virtual pada 12 - 16 Desember 2022. Pelaksanaan perundingan putaran ke-12 pada triwulan ke-IV dilaksanakan berdasarkan keputusan dari kedua pihak. Delri dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan selaku Chief Negotiator Indonesia. Sedangkan pihak Uni Eropa dipimpin oleh Deputy Head of Unit, DG Trade Komisi Eropa, Mr. Filip Deraedt selaku EU Chief Negotiator.

Gambar 3.95 Perundingan Putaran Ke-12 IEU - CEPA Working Group ECCB



Gambar 3.94 Perundingan Putaran Ke-12 IEU - CEPA Working Group Government Procurement

Perundingan Putaran ke-12 ini membahas berbagai elemen pokok yang mencakup 15 chapters, yaitu Trade in Goods; Rules of Origin (ROO); Customs and Trade Facilitation; Trade Remedies; Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS); Technical Barriers to Trade (TBT); Trade in Services; Investment; Investment Court System (ICS); State-Owned Enterprises (SOE); Trade and Sustainable Development (TSD); Government Procurement; Competition; Final and Institutional Provisions; dan Dispute Settlement.

Gambar 3.95 Summary of Discussions Chapter Economic Cooperation and Capacity Building Perundingan IEU

Sedangkan beberapa *Working Group* (WG)/*Chapter* lainnya seperti *Intellectual Property Rights* (IPR) dan *Small and Medium Enterprises* (SMEs) dikarenakan jadwal yang tidak memungkinkan dan adanya pergantian pada susunan

kelompok perunding, disepakati untuk tidak dirundingkan di putaran ke-12 dan dijadwalkan kembali pada putaran ke-13.

Secara umum, perundingan IEU CEPA Putaran ke-12 berjalan lancar dengan semangat yang konstruktif dari kedua pihak untuk dapat segera menyelesaikan berbagai isu dalam perundingan. Masih terdapat sejumlah *policy issues* (e.g GP SOEs, Bea Keluar, TKDN, TSD) dimana kedua pihak masih belum mendapatkan titik temu. Sebagai tindak lanjut arahan kedua kepala negara untuk percepatan penyelesaian perundingan, baik Indonesia maupun UE sepakat untuk melakukan empat (4) putaran perundingan secara fisik di tahun 2023 secara bergantian (di Indonesia dan di Brussels, Belgia). Putaran ke-13 direncanakan minggu pertama/kedua Februari 2023 dengan Indonesia sebagai host.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Perundingan IEU-CEPA Putaran ke – 12 diselenggarakan secara virtual pada 12 – 16 Desember 2022. Perundingan sebelumnya telah dilaksanakan pada 8 - 12 November 2021 secara virtual dilanjutkan dengan sejumlah pertemuan intersesi selanjutnya.

Delri dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan Johni Martha selaku *Chief Negotiator* Indonesia. Sedangkan pihak Uni Eropa dipimpin oleh *Deputy Head of Unit, DG Trade* Komisi Eropa, Mr. Filip Deraedt selaku *EU Chief Negotiator*. Sebagaimana pada perundingan sebelumnya, perundingan putaran ke-12 IEU-CEPA ini diikuti oleh kelompok perunding dari seluruh K/L terkait Pemri dan negosiator *DG Trade* Komisi Eropa.

Perundingan Putaran ke - 12 ini membahas berbagai elemen pokok yang mencakup 15 *chapters*, yaitu *Trade in Goods; Rules of Origin (ROO); Customs and Trade Facilitation; Trade Remedies; Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS); Technical Barriers to Trade (TBT); Trade in Services; Investment; Investment Court System (ICS); State-Owned Enterprises (SOE); Trade and Sustainable Development (TSD); Government Procurement; Competition; Final and Institutional Provisions*; dan *Dispute Settlement*.

Sedangkan beberapa *Working Groups (WG)/Chapter* lainnya seperti *Intellectual Property Rights (IPR)* dan *Small and Medium Enterprises (SMEs)* dikarenakan jadwal yang tidak memungkinkan dan adanya pergantian pada susunan kelompok perunding, disepakati untuk tidak dirundingkan di putaran ke-12 dan dijadwalkan kembali pada putaran ke-13.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah bergabung dalam tim perunding sebagai *Lead Negotiator Chapter SMEs*. Pada putaran ke-12, chapter SMEs belum dapat melaksanakan perundingan karena di waktu yang sama harus mendampingi menko perekonomian kunjungan kerja ke Brussels, Belgia untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan Hubungan Bilateral ASEAN - UE ke-45 Tahun.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dikarenakan kondisi pandemi dan kesepakatan kedua belah pihak, perundingan putaran ke-12 diselenggarakan secara virtual diawali dengan agenda Opening Plenary IEU - CEPA pada tanggal 12 Desember 2022 dan diikuti dengan perundingan masing-masing working group IEU CEPA.

Serangkaian agenda rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah sebagai persiapan dan penentuan posisi Indonesia dalam perundingan dilakukan secara hybrid sebagai implementasi pemanfaatan teknologi.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah terkait dengan Perundingan Putaran Ke-12 telah dilaksanakan secara hybrid dan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya.

Pelaksanaan Perundingan Putaran Ke-12 IEU CEPA dilaksanakan secara virtual dan tidak menimbulkan biaya apapun. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran sehingga anggaran dapat dialokasikan ke agenda lainnya.

12. Penyelesaian JFSG FTA RI – EAEU

Peluncuran bersama (*joint launching*) dimulainya perundingan perdagangan Indonesia – EAEU FTA secara virtual pada 5 Desember 2022 oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Eurasian Economic Cooperation (EEC). Perjanjian Indonesia – EAEU FTA mencakup beberapa bab, yaitu Trade in Goods (TIG); Rules of Origin (ROO); Trade Remedies; Customs Procedures and Trade Facilitation; Technical Barriers to Trade (TBT); Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS); Intellectual Property Rights; Competition; Cooperation; dan E-Commerce. Peluncuran dikukuhkan dengan penandatanganan Joint Ministerial Statement secara sirkuler.

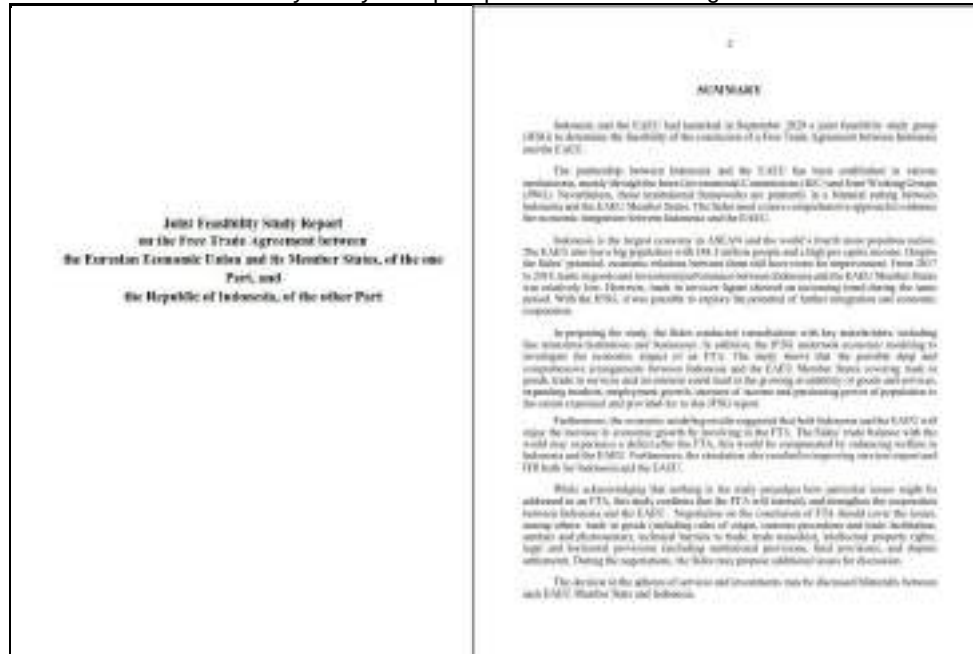
Gambar 3.95 Summary of Discussions Chapter Economic Cooperation and Capacity Building Perundingan IEU



Menteri Perdagangan RI menyampaikan bahwa FTA dapat menjadi mesin pertumbuhan, produktivitas, inovasi, dan pembangunan. Sementara itu, Menteri Perdagangan EEC menyampaikan FTA dapat menciptakan lapangan kerja, serta

menjamin food and energy security. Target perundingan FTA tersebut diharapkan selesai dalam 2 (dua) tahun.

Gambar 3.96 Joint Feasibility Study Group Report on Free Trade Agreement Indonesia - EAEU



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Indonesia dan negara Persatuan Ekonomi Eurasia (EAEU) telah berhasil sepakat meluncurkan perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) secara virtual. Peluncuran sempat tertunda dari perencanaan awal dikarenakan masih adanya beberapa hal yang belum disepakati.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

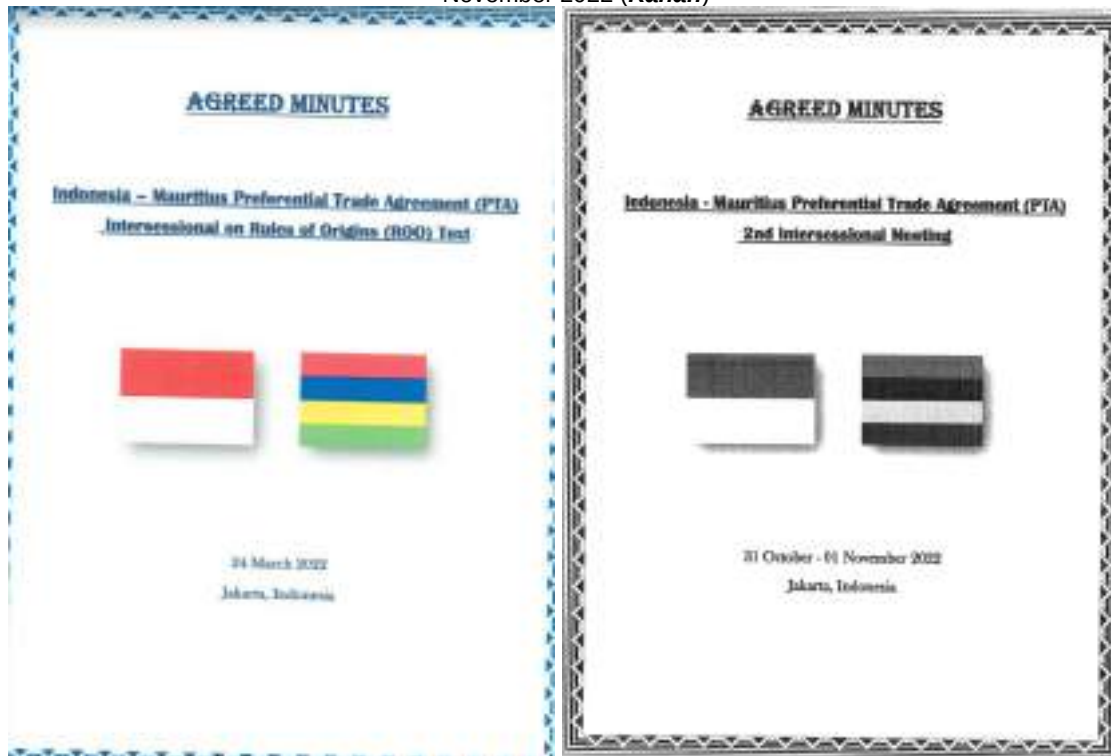
Penyelenggaraan rapat koordinasi antar Kementerian dan peluncuran bersama perundingan Indonesia-EAEU FTA dilaksanakan secara virtual selama tahun 2022 sehingga dapat memaksimalkan penggunaan teknologi.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penyelenggaraan rapat koordinasi antar Kementerian dan peluncuran bersama perundingan Indonesia-EAEU FTA dilaksanakan secara virtual selama tahun 2022 sehingga dapat mengefisienkan penggunaan anggaran untuk dapat digunakan pada kegiatan lain/tugas tambahan.

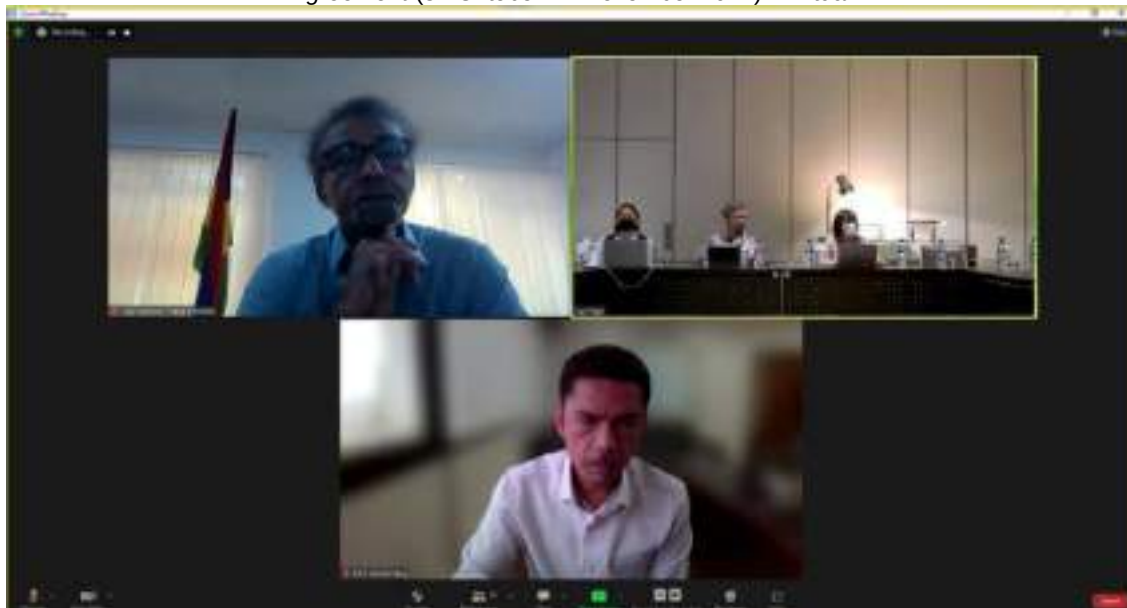
13. Perundingan Indonesia-Mauritius Putaran ke-3

Gambar 3.97 *Agreed Minutes* Indonesia - Mauritius PTA 1st *Intersessional Meeting* pada 24 Maret 2022 (*kiri*) dan *Agreed Minutes* Indonesia – Mauritius PTA 2nd *Intersessional Meeting* pada 31 Oktober – 01 November 2022 (*Kanan*)



Perundingan Indonesia – Mauritius PTA Putaran Ke-3 yang sebelumnya direncanakan pada Triwulan I, telah diselenggarakan secara *hybrid* di Port Louis, Mauritius pada 21 – 22 Desember 2022. Sebelum perundingan putaran ke-3 telah dilaksanakan Perundingan Intersesi Putaran Ke-1 terkait Chapter ROO Level Teknis pada tanggal 24 Maret 2022 dan Perundingan Intersesi Putaran Ke-2 terkait Chapter Main Text dan ROO text pada 1 – 2 November 2022. Perundingan putaran ke-3 dibagi menjadi 2 (dua) hari di mana pada hari pertama dibahas mengenai *pending issue* pada *draft main text* dan *rules of origin text*. Sedangkan di hari kedua, dibahas isu modalitas dan *market access*.

Gambar 3.98 Perundingan Intersesi Putaran Kedua Indonesia - Mauritius *Preferential Trade Agreement* (31 Oktober - 1 November 2022) - Virtual



Sebagai tindak lanjut atas usulan Mauritius untuk menambahkan 2 kategori modalitas, Pemri akan melakukan analisis dan diskusi secara internal terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Hal ini mengingat bahwa Pemri sebelumnya telah membuat *Initial Request List* untuk 4 kategori modalitas awal. Kedua belah pihak juga setuju untuk menyelesaikan *pending issue* selambat-lambatnya bulan Januari 2023 dan perundingan putaran ke-4 IM PTA direncanakan diselenggarakan pada akhir Maret 2023 secara tentative.

Gambar 3.99 Perundingan Putaran Ketiga Indonesia - Mauritius PTA (21 - 22 Desember 2022) - Hybrid



Berikut adalah beberapa hal yang dibahas pada perundingan putaran ke-3 Indonesia - Mauritius PTA:

Hasil pokok pembahasan main text:

- Pada *Article 7: Reduction or Elimination of Tariff*, Mauritius menyetujui usulan Indonesia untuk menggunakan ‘for the year 2022’ pada paragraf 1.
- Pada *Article 8: Non-Tariff Measures*, kedua belah pihak menyetujui untuk menunda usulan Mauritius terkait *Import Licensing* sampai dilakukannya pembahasan untuk *market access*.
- Terkait usulan Indonesia untuk memasukkan *Article XX: Classification of Goods and Transposition of Schedules of Tariff Commitments*, Mauritius dapat menyetujui paragraf 1, namun untuk paragraf 2 – 5, masih memerlukan tambahan penjelasan dari pihak Indonesia. Mauritius mengusulkan untuk melakukan diskusi terlebih dahulu, terutama mengenai metodologi, termasuk di dalamnya pembahasan terkait kurun waktu dan sensitivitas produk. Pihak Mauritius juga mengusulkan pembentukan sub komite untuk membahas mengenai isu *market access*.
- Masih berhubungan dengan usulan *Article XX*, secara prinsip, Mauritius dapat menyetujui usulan Indonesia untuk menambahkan paragraf tambahan pada *Article 25: Amendment*, yaitu “*Notwithstanding paragraph 2, amendments relating only to [Attachment A, X, X] may be diplomatic notes exchanged between the Governments of the Parties*”.
- Mauritius mengusulkan untuk menspesifikasi struktur bahasa pada paragraf 6 *Article 20: Joint Committee* dan mengusulkan tambahan poin pada paragraf 2, yaitu “*e. discuss issues on enhancing trade and investment between two countries*”. Mauritius memutuskan untuk menunda pembahasan terkait hal ini.

Gambar 3.100 *Agreed Minutes Indonesia - Mauritius PTA 3rd Round of Negotiations (21 - 22 Desember 2022)*



Hasil pokok pembahasan ROO text:

- Kedua belah pihak menyetujui penggunaan “*all other applicable requirements*” pada *Rule 2: Origin Criteria*.
- Pada *Rule 4: Not Wholly Obtained or Produced Goods*, kedua belah pihak menyetujui untuk menghapus paragraf 2 (d). Sedangkan untuk paragraf 5 (a), kedua belah pihak juga menyetujui untuk mengubah “XXX” menjadi “*originating material cost*”.
- Mauritius mengusulkan alternatif yang dapat digunakan pada *Rule 5: Accumulation*. Oleh karena itu, pembahasannya akan ditunda sampai perundingan berikutnya.
- Secara prinsip, Indonesia dapat menyetujui usulan Mauritius untuk menambahkan *Rule X: Sets*, namun masih diperlukan konsultasi internal untuk membahas ambang batas maksimum 15% untuk komponen *non originating* dari nilai FOB atas set.
- Menunda pembahasan usulan Indonesia pada *Rule 14: Claim for Preferential Tariff Treatment* sampai Attachment A disetujui.

- Secara prinsip, Indonesia menyetujui usulan Mauritius untuk menambahkan “*Proof of Origin*” pada *Attachment A: Article 1* paragraf 1 yang juga mengakomodasi proposal Mauritius terkait *Certificate of Origin* dan *Declaration of Origin*.
- Menunda pembahasan usulan Indonesia pada *Attachment A: Article 2, 4, 9, dan 17*, serta usulan Mauritius terkait *Article XX* sampai pembahasan untuk *Declaration of Origin* disetujui.
- Mauritius dapat menyetujui usulan Indonesia pada *Attachment A: Article 20*, kecuali untuk usulan batas maksimum FOB yang diusulkan oleh Indonesia sebesar US\$200.00 (Mauritius mengusulkan nilai US\$500.00).
- Dilakukan pengenalan *electronic data exchange system* yang digunakan oleh masing-masing negara sebagai tindak lanjut dari isu *Certificate of Origin*. Indonesia melalui Lembaga Negara *Single Window* memperkenalkan *Indonesia National Single Window (INSW)* termasuk juga prosedur penggunaannya dalam pertukaran data elektronik Indonesia. Meskipun begitu, pembahasan terkait *verification of origin* pada *Attachment A: Article 24* diputuskan untuk ditunda terlebih dahulu untuk dibahas pada perundingan selanjutnya.
- Adapun terkait *Third Party Invoicing* pada *Attachment A: Article 27*, kedua pihak juga sepakat untuk menunda pembahasan *Certificate of Origin Template Box 13*.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Perundingan putaran ke-3 Indonesia - Mauritius dapat diselenggarakan dengan baik karena pihak Indonesia telah melakukan beberapa rapat interkem agar menyatukan posisi Indonesia. Selain itu, Indonesia dan Mauritius telah melaksanakan perundingan intersesi ke-1 dan ke-2 sebelum dilaksanakannya perundingan putaran ke-3 Indonesia - Mauritius PTA sehingga dapat berjalan dengan baik.

Namun, pada perundingan putaran ke-3 Indonesia - Mauritius PTA, pihak Mauritius mengajukan penambahan 2 kategori pada modalitas. Sehingga pihak Indonesia memerlukan analisis lebih lanjut dan diskusi secara internal sebelum

memutuskan untuk menyetujuinya. Mengingat Indonesia telah membuat *Initial Request List* berdasarkan 4 kategori pada modalitas sebelumnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perundingan intersesi ke-1, ke-2, dan perundingan putaran ke-3 Indonesia - Mauritius PTA dilaksanakan secara virtual sehingga penggunaan teknologi semakin maksimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Perundingan intersesi ke-1, ke-2, dan perundingan putaran ke-3 Indonesia - Mauritius PTA dilaksanakan secara virtual sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran untuk digunakan pada kegiatan lain yang belum ada pada perencanaan kegiatan sebelumnya.

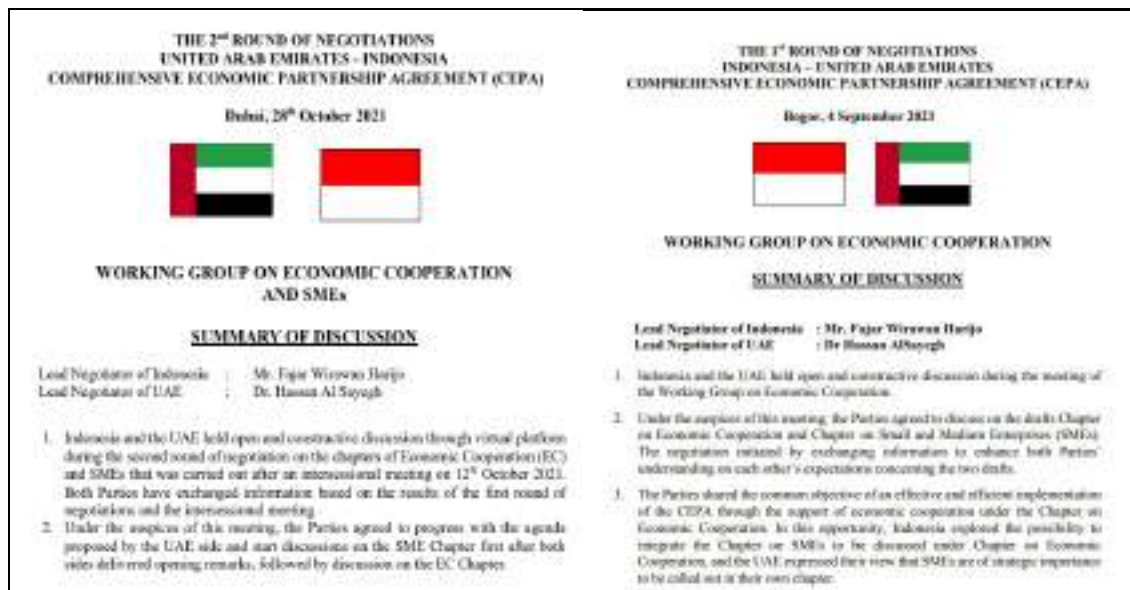
14. Indonesia-United Arab Emirates *Comprehensive Economic Partnership Agreement*

Gambar 3.101 Penandatanganan Indonesia-UAE CEPA pada 1 Juli 2022 di Abu Dhabi, PEA



Pada tanggal 1-4 Februari 2022 telah diselenggarakan perundingan IUAE-CEPA putaran ke-3 secara hybrid. Pada Working Group Economic Cooperation and SMEs, kedua pihak melanjutkan perundingan terhadap 2 Chapters, yaitu Chapter Economic Cooperation dan Chapter on Small Medium Enterprises. Selanjutnya pihak UAE akan segera menyampaikan tanggapan terhadap draf dokumen Implementing Arrangement yang diusulkan pihak Indonesia pada saat pelaksanaan intersesi berikutnya. Sementara pihak Indonesia akan segera menyempurnakan dan melengkapi draf teks dimaksud.

Gambar 3.102 Summary of Discussion (SOD) Perundingan Putaran Pertama dan Kedua IUAE - CEPA:
WG on Economic Cooperation



Penandatanganan IUAE-CEPA dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Ekonomi United Arab Emirates (UAE) Abdulla bin Touq Al Marri pada 1 Juli 2022 di Abu Dhabi dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al Shatie. Dalam perkembangannya, UAE sudah menyelesaikan ratifikasi pada 12 September 2022, sedangkan Indonesia masih melakukan proses ratifikasi yang ditargetkan selesai pada awal 2023.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Penyebab keberhasilan perundingan Indonesia-UAE CEPA adalah dilakukannya Pre-Negotiation Consultation secara virtual pada bulan Mei 2021. Peluncuran awal sekaligus perundingan Putaran Pertama telah dilaksanakan pada tanggal 2- 4 September 2021 di Bogor dengan dihadiri langsung oleh perwakilan delegasi kedua pihak. Perundingan Putaran Kedua telah dilaksanakan pada tanggal 28- 30 Oktober 2021 secara hybrid dengan dihadiri oleh kedua Chief Negotiator di Dubai, UAE. Perundingan Putaran Ketiga dan Keempat, masing-masing telah dilaksanakan pada tanggal 1-4 Februari 2022 dan tanggal 24-26 Februari 2022 secara hybrid.

Perundingan Indonesia-UAE CEPA telah selesai dan ditandatangani pada 1 Juli 2022 oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Ekonomi United Arab Emirates (UAE) Abdulla bin Touq Al Marri pada 1 Juli 2022 di Abu Dhabi. Perundingan

IUAE - CEPA dapat berhasil diselesaikan karena adanya dukungan dari seluruh K/L. Langkah selanjutnya setelah diselesaikannya IUAE - CEPA adalah proses ratifikasi.

Notifikasi resmi telah selesainya ratifikasi/berlakunya perjanjian IUAE - CEPA di pihak UAE dilakukan melalui Keputusan Pemerintah Federal PEA tertanggal 5 Desember 2022. Proses ratifikasi perjanjian IUAE - CEPA saat ini telah bergulir/masih berjalan bersama DPR RI (c.q. Komisi VI DPR RI) dan menurut catatan sudah masuk tahapan akhir. Namun demikian dari catatan pada jadwal rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan yang semula direncanakan pada 2 November 2022 lalu, tidak dapat dilaksanakan dan oleh DPR RI ditunda karena tidak kuorum/banyak jadwal anggota yang sudah teragendakan dengan acara yang lain (ref. informasi Web Page Komisi VI DPR RI). Sehingga ratifikasi IUAE - CEPA masih tertunda di Pihak Pemri.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rapat antar Kementerian terkait IUAE - CEPA beberapa kali dilaksanakan secara hybrid dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah menghadiri rapat tersebut secara virtual.

Perundingan Putaran Ketiga dan Keempat IUAE - CEPA, masing-masing telah dilaksanakan pada tanggal 1-4 Februari 2022 dan tanggal 24-26 Februari 2022 secara hybrid. Pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut menggunakan teknologi sehingga penggunaan teknologi semakin maksimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rapat antar Kementerian terkait IUAE - CEPA beberapa kali dilaksanakan secara hybrid dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah menghadiri rapat tersebut secara virtual.

Perundingan Putaran Ketiga dan Keempat IUAE - CEPA, masing-masing telah dilaksanakan pada tanggal 1-4 Februari 2022 dan tanggal 24-26 Februari 2022 secara hybrid. Pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut menggunakan teknologi sehingga penggunaan anggaran dapat diefisiensikan untuk digunakan pada kegiatan lain/tugas tambahan.

15. Upgrading ATIGA

Adopsi Guiding Principle for Negotiation Upgrade of the ATIGA dan Adopsi TOR Trade Negotiating Group (TNG) Negosiasi Upgrade ATIGA

Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) secara prinsip telah mengesahkan Guiding Principle ATIGA Upgrade dan Term of Reference of the Trade Negotiating Committee (TNC) dalam pertemuan AEM Retreat ke-28 pada 16 Maret 2022. Negosiasi ATIGA Upgrade adalah sebagai langkah awal pengembangan kerja sama perdagangan barang di ASEAN yang semakin modern, terintegrasi, solutif terhadap berbagai isu non-tradisional dan siap untuk menjawab berbagai tantangan regional dan global.

Gambar 3.103 Pertemuan 28th ASEAN Economic Minister Retreat, 16 Maret 2022, Video Conference



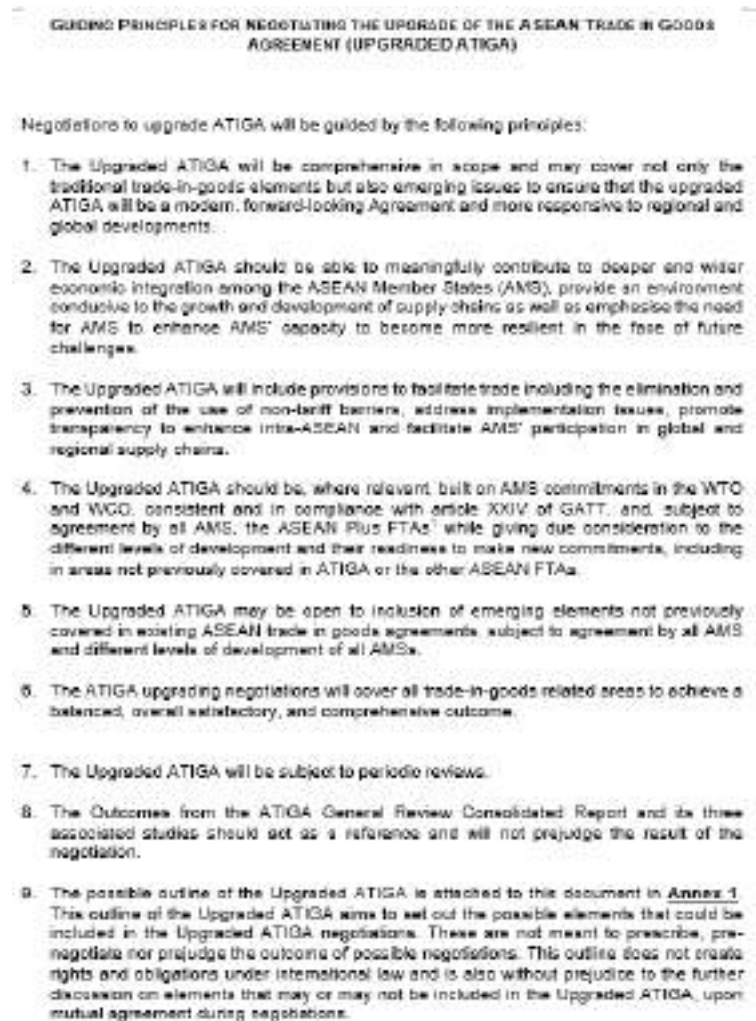
Pembentukan TNG dan Subsidiary negotiating groups

Selain mengesahkan 2 (dua) dokumen penting sebagaimana di atas, pada pertemuan AEM Retreat para menteri menugaskan TNC agar dapat memulai perundingan dan memfinalisasi *guiding principle*. TNC akan membawahi 6 (*enam*) *working groups* dan Indonesia diminta kesediaannya untuk menjadi chair pada salah satu *working group* yaitu *working group on trade remedies (WG-TR)*.

Pembahasan awal Draft Text

Draft awal text akan dibahas pada pertemuan TNC pertama yang diagendakan untuk dilaksanakan pada TW ke-II.

Gambar 3.104 Dokumen *Guiding Principles for Negotiating the Upgrade of the ASEAN trade in goods agreement (upgraded ATIGA)*



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Pertemuan 28th ASEAN Economic Minister Retreat, secara prinsip telah mengesahkan *Guiding Principle ATIGA Upgrade* dan *Term of Reference of the Trade Negotiating Committee* (TNC). Hal ini sekaligus menandai dimulainya negosiasi *ATIGA Upgrade* sebagai langkah awal pengembangan kerja sama perdagangan barang di ASEAN yang semakin modern, terintegrasi, solutif terhadap berbagai isu non-tradisional dan siap untuk menjawab berbagai tantangan regional dan global.

- Pada pertemuan 28th AEM Retreat, para menteri menugaskan TNC agar dapat memulai perundingan. TNC akan membawahi 6 (enam) *working groups* dan Indonesia diminta kesediaannya untuk menjadi *chair* pada salah satu *working group* yaitu *working group on trade remedies* (WG-TR).
- Pelaksanaan kegiatan dalam dilaksanakan secara virtual, maka kendala yang dihadapi adalah kesulitan komunikasi dalam proses perundingan apalagi dilakukan secara virtual. Terkait beberapa *pending matters* penyelesaian diperlukan fleksibilitas negara mitra untuk negosiasi *upgrading* perjanjian.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Pertemuan dilakukan dengan cara optimalisasi penggunaan teknologi video conference sehingga memungkinkan para menteri serta delegasi perwakilan dari setiap Kementerian/Lembaga hadir mengikuti seluruh agenda pertemuan.
- Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan selaku *AEM Lead* Indonesia menjadi *focal point* Indonesia dalam membahas upgrade ATIGA. Pembagian kerja yang jelas dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dilakukan untuk mendukung upgrading ATIGA.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

- Delegasi Kemenko Perekonomian mengikuti kegiatan secara virtual sehingga tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk mengikuti pembahasan upgrade ATIGA.

16. Kesepakatan Kerja Sama *Committee on Economic Cooperation* Indonesia – Korea CEPA

Gambar 3.105 Rapat Pembahasan Proposal Kerja Sama IKCEPA (Jakarta, 5 Desember 2022)



IKCEPA akan mulai diimplementasikan pada Januari 2023. Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan segala peraturan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan dokumen IA IKCEPA yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian dan MOTIE pada Desember 2020, Indonesia dan Korea harus mengadakan pertemuan pertama paling lambat 60 hari setelah pelaksanaan IKCEPA. Oleh karena itu Asdep KSE Asia mengusulkan pertemuan pada Februari 2023.

Pada pertemuan pertama terdapat dua tujuan utama yaitu membahas proposal proyek potensial untuk kerja sama dan menetapkan program kerja sektoral sebagaimana dipersyaratkan oleh IA berdasarkan hasil pembahasan proposal proyek. Pada tanggal 30 Desember 2022, Asdep KSE Asia telah mengirimkan surat kepada Kedubes Korea perihal Penyampaian 16 proposal kerja sama IKCEPA.

Gambar 3.106 surat kepada Kedubes Korea perihal Penyampaian 16 proposal kerja sama IKCEPA

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Koordinasi yang intens antar K/L menjadi salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan kerja sama economic cooperation IKCEPA sehingga Indonesia dapat mengirimkan 16 proposal kerja sama kepada pihak Korea.

Program-program kerja sama yang menguntungkan kedua Negara menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kerja sama bilateral RI-Korea.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rapat koordinasi pembahasan proposal proyek kerja sama IKCEPA serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait dilakukan dengan menggunakan teknologi zoom meeting maka penyusunan proposal proyek kerja sama dapat berjalan dengan lancar dan frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rapat koordinasi pembahasan proposal proyek kerja sama IKCEPA dilakukan secara virtual sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih ditekan.

17. Negosiasi Preferensial Perdagangan Barang antara RI – Pakistan (IP-Tiga) dan RI-Bangladesh (IB-PTA)

Khusus pada kerja sama dalam kerangka Negosiasi Preferensial Perdagangan Barang antara RI – Pakistan (IP-TIGA) dan RI – Bangladesh (IB-PTA) pada tahun 2022 masih belum dapat terlaksana. Sehingga kesepakatan dalam rangka kerja sama ekonomi antara RI – Pakistan (IP-TIGA) dan RI – Bangladesh (IB-PTA) belum dapat dihasilkan.

Analisis Penyebab Kegagalan

1. Pada kerja sama IP-TIGA dan IB-PTA, Indonesia telah menyampaikan *draft text* dan menunggu tanggapan resmi dari pemerintah Pakistan.
2. Hingga saat ini, Pakistan belum memberikan *counter draft* disebabkan oleh kondisi dalam negeri yang menghadapi krisis ekonomi dan politik.
3. Sedangkan kerja sama IB-PTA, hingga saat ini Indonesia belum dapat memberikan tambahan *request* pos tarif yang diminta oleh Bangladesh terkait dengan industri TPT. Kementerian teknis terkait, masih terus melakukan pengkajian terhadap permintaan dari pihak Bangladesh.
4. Tindak lanjut yang diambil terkait tidak tercapainya target tersebut adalah dengan menjalin komunikasi dengan Kementerian Perdagangan agar dapat mendorong Pakistan memberikan *counter draft* dan agar kementerian teknis terkait menyelesaikan kajian atas daftar permintaan Bangladesh.

Dengan demikian, Capaian Kinerja Tahun 2022 pada IKU 1.4. Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian terealisasi 16 (enam belas) dari 17 (tujuh belas) target atau sebesar 94%.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun anggaran 2022 yang telah mencapai 94 persen, maka Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sangat optimis dapat meraih capaian kinerja lebih baik lagi pada periode kinerja tahun berikutnya.

CAPAIAN IKU 1.5.**Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian**

Ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional adalah salah satu bentuk pengesahan pada suatu perjanjian internasional atau proses adopsi perjanjian internasional ke dalam konstitusi hukum nasional sehingga negara terkait dapat memanfaatkan perjanjian internasional tersebut pada negaranya masing-masing. Ratifikasi tersebut dapat mencerminkan bahwa kesepakatan kerja sama yang telah berhasil dilakukan diharapkan dapat sah secara hukum dan dapat dimanfaatkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah proses dan ratifikasi yang tercapai.

Adapun target 2022 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Proses Ratifikasi Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA);
- 2) Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan RI-Angola;
- 3) Penyelesaian Proses Ratifikasi *ASEAN Protocol to Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM);
- 4) Penyelesaian Proses Ratifikasi *ASEAN Trade in Services Agreement* (ATISA);
- 5) Penyelesaian Proses Ratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP);
- 6) Penyelesaian Proses Ratifikasi *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) Paket-10;

Hingga Triwulan IV Tahun 2022, proses ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang telah terselesaikan adalah 5 (lima) dari 6 (enam) ratifikasi atau 83% yang dihitung berdasarkan formula berikut ini:

$$\text{Persentase Ratifikasi} = \frac{\text{Jumlah ratifikasi yang telah selesai disupervisi}}{\text{Jumlah target ratifikasi yang disupervisi}}$$

Dimana target pada IKU Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian adalah *range* antara 80-90%. Sehingga dengan demikian, capaian dari IKU ini, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mencapai Capaian Kinerja 100% dari target Tahun 2022. Lebih lanjut, ringkasan capaian kinerja pada IKU ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU 1.5. T.A. 2021 dan 2022

No.	Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional Yang Disupervisi Kemenko Perekonomian	2021	
	Persentase Ratifikasi Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian		2022
1	Persetujuan Indonesia-Korea <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (I-K CEPA) melalui Undang-Undang	1	
	Penyelesaian Proses Ratifikasi Indonesia-Korea CEPA		1
2	Penyelesaian Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Mozambik <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA)	1	
	Penyelesaian Proses Ratifikasi ASEAN <i>Protocol to Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i> (EDSM)		1
3	Penyelesaian Ratifikasi Perjanjian Indonesia-European <i>Free Trade Association</i> (EFTA) <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>	1	
	Penyelesaian Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan Indonesia-Angola		1
4	Penyelesaian <i>the 1st Protocol to Amend</i> ASEAN-Japan <i>Comprehensive Economic Partnership</i> (AJ-CEP)	1	
	Penyelesaian Proses Ratifikasi Protokol ASEAN <i>Framework Agreement on Services</i> (AFAS) Paket ke-10		1
5	Penyelesaian Ratifikasi Perjanjian ASEAN <i>Agreement on E-Commerce</i>	1	
	Penyelesaian Proses Ratifikasi ASEAN <i>Trade in Services Agreement</i> (ATISA)		-
6	Penyelesaian Ratifikasi Perjanjian Regional <i>Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)	1	
	Diganti: Penambahan Target Penyelesaian Pengesahan Perubahan Protokol ke-4 Perjanjian ACIA		
	Penyelesaian Proses Ratifikasi Perjanjian Regional <i>Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)		1
Realisasi		6	5 (83%)
Target Capaian		6	80-90%
CAPAIAN IKU: Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian		100%	100%

Sesuai Kegiatan Prioritas: **Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, rencana target RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17 Target RPJMN 2021 untuk Indikator Capaian Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional (Ratifikasi)

Indikator	Target RPJMN 2020 – 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional (Ratifikasi)	4	4	4	4	4

Berdasarkan table target RPJMN diatas, maka dapat diketahui bahwa target RPJMN tahun 2022 ialah 4 Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional (Ratifikasi). Sementara, kontribusi capaian Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional pada tahun 2021 dan 2022 adalah:

Tabel 3.18. Kontribusi Deputy VII dalam Pencapaian Target Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional (Ratifikasi) yang Disepakati pada RPJMN 2020 – 2024 Selama Tahun 2021

Indikator	Perbandingan Capaian 2021 - 2022	
	2021	2022
Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional (Ratifikasi)	6	5

Dari 4 target Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional (Ratifikasi) yang disepakati pada RPJMN 2024, Deputy VII telah berkontribusi dalam mewujudkan target target Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional (Ratifikasi) yang disepakati sebanyak Ratifikasi.

Jika dibandingkan dengan target 2021 yang terdiri dari 6 (enam), pada tahun 2022 Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mengubah satuan perhitungan capaian kinerja pada IKU ini menjadi Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian dengan target *range* realisasi

80-90% dari 6 (enam) jumlah Ratifikasi. Meski demikian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berhasil memenuhi target 2022 dengan baik.

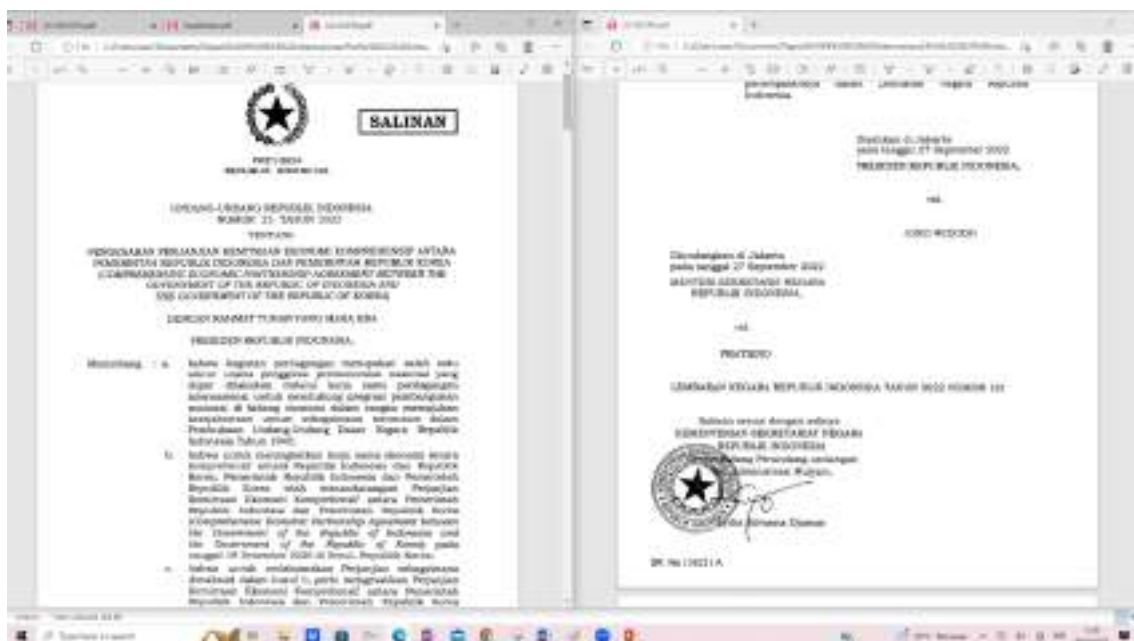
Sehingga dengan demikian, Capaian Kinerja Tahun 2022 pada IKU 1.5. Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian memenuhi Capaian 100% baik pada tahun 2021 maupun pada tahun 2022 dari target yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan lebih lanjut terhadap laporan realisasi 5 dari 6 (enam) ratifikasi tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Penyelesaian Proses Ratifikasi Indonesia-Korea CEPA

Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) ditandatangani oleh Menteri Perdagangan, Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Korea Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Hasil penandatanganan IKCEPA mencakup perdagangan barang yang meliputi elemen penurunan/penghapusan tarif, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan, dan *trade remedies*, perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi, serta pengaturan kelembagaan. Melalui perjanjian ini, Korea Selatan akan mengeliminasi hingga 95,54 persen pos tarifnya, sementara Indonesia mengeliminasi 92,06 persen pos tarifnya.

Gambar 3.107 Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.



Parlemen Korea telah menyetujui dan meratifikasi perjanjian IKCEPA pada 29 Juni 2021. Sedangkan Indonesia telah meratifikasi perjanjian IKCEPA pada tanggal 27 September 2022 setelah dilaksanakannya Rapat Paripurna Pembahasan dan Pengesahan RUU di DPR RI yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*

Program-program kerja sama yang menguntungkan kedua Negara menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kerja sama bilateral RI-Korea.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rapat kerja komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan didukung dengan menggunakan teknologi zoom meeting sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan frekuensi rapat dapat dilakukan lebih banyak dan intens. Hal ini juga melibatkan penggunaan SDM yang lebih efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rapat kerja komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan dilakukan secara virtual sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih ditekan.

2. Penyelesaian Proses Ratifikasi ASEAN *Protocol to Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM)

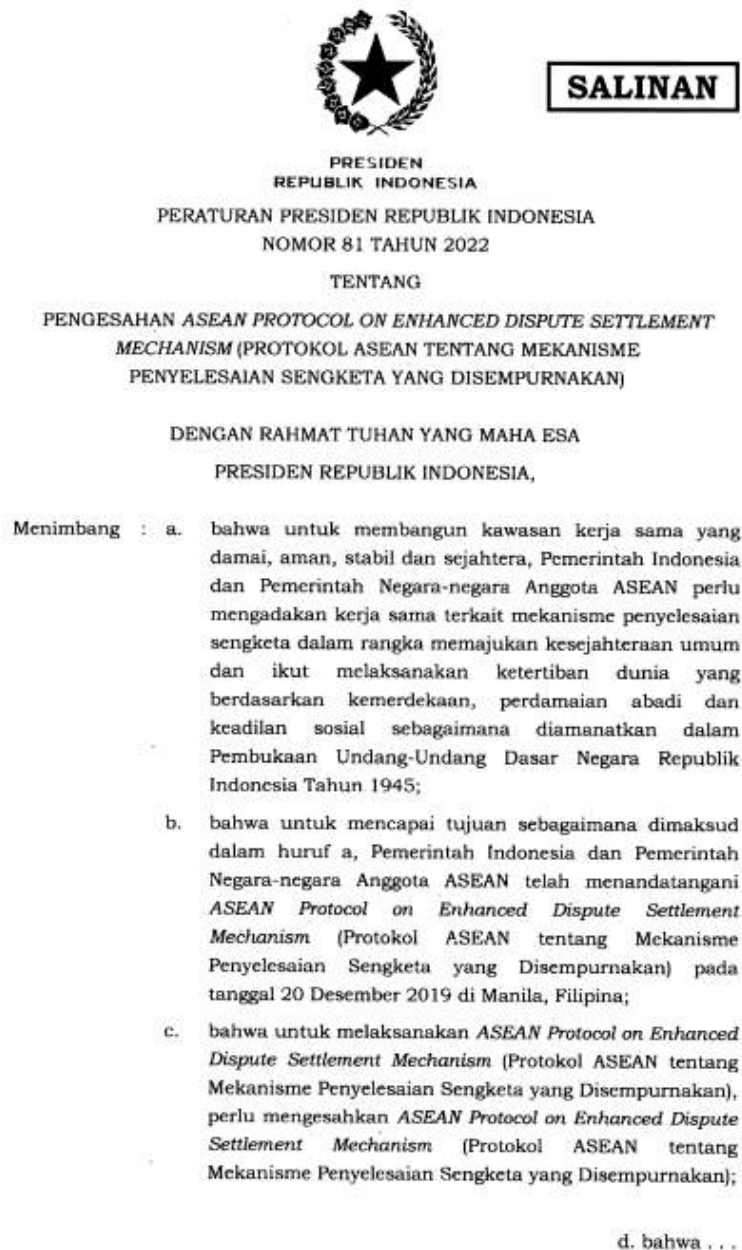
Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan ASEAN *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM)

ASEAN *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM) merupakan perjanjian tentang mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi di ASEAN. Rapat Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan ASEAN EDSM telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 20 Januari 2022 diikuti oleh seluruh anggota PAK dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Rapat melakukan penyelarasan konsep naskah atas Rancangan Peraturan Presiden dan dokumen kelengkapan lainnya.

Setelah rapat harmonisasi, permohonan paraf kepada menteri terkait dilakukan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sedang dalam tahapan pemberian paraf pada akhir Triwulan I. Penetapan Peraturan Presiden ditetapkan akan dilakukan pada Triwulan berikutnya setelah seluruh menteri memberikan persetujuannya.

Sebagaimana telah dilaporkan pada triwulan sebelumnya, proses pengesahan ASEAN *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurkan ditargetkan untuk selesai pada Triwulan III. Bapak Menko Perekonomian telah memberikan paraf persetujuan pada Rancangan Peraturan Presiden Protokol dimaksud pada tanggal 19 April 2022 melalui surat nomor PH.2-101/M.EKON/04/2022. Selanjutnya Rancangan tersebut ditandatangani oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2022 yang telah ditetapkan tanggal 20 Mei 2022.

Gambar 3.109 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pengesahan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism



SK No 137766 A

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- ASEAN Protocol on EDSM ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) merupakan perjanjian tentang mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi di ASEAN. Kesepakatan ini perlu diratifikasi sehingga para pelaku ekonomi dapat memiliki jaminan terhadap pelanggaran perjanjian kerja sama yang telah disepakati di ASEAN.

- Proses ratifikasi diawali dengan koordinasi Panitia Antar Kementerian, dilanjutkan pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan ASEAN EDSM oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian paraf oleh para Menteri terkait.
- Bapak Menko Perekonomian telah memberikan paraf persetujuan pada Rancangan Peraturan Presiden Protokol dimaksud pada tanggal 19 April 2022 melalui surat nomor PH.2-101/M.EKON/04/2022. Selanjutnya Rancangan tersebut ditandatangani oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2022 yang telah ditetapkan tanggal 20 Mei 2022.
- Tantangan terbesar muncul saat Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian dilakukan secara virtual yang menyebabkan paraf oleh anggota PAK sedikit terhambat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya, efisiensi Sumber Daya Manusia dilakukan dengan menugaskan staf dalam rapat harmonisasi dan kemudian melaporkannya kepada pimpinan untuk memperoleh arahan.
- Koordinasi internal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dari level staff hingga pejabat tinggi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Koordinasi terbukti efisien dalam mempercepat proses paraf draft Perpres oleh Bapak Menko Perekonomian, sehingga proses ratifikasi dapat dilaksanakan tepat waktu.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Hingga proses ratifikasi selesai, rapat harmonisasi dan koordinasi internal yang dilakukan secara virtual tidak mengalami kendala sehingga tidak ada penggunaan anggaran secara khusus yang dikeluarkan.

3. Penyelesaian Capaian Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan Indonesia - Angola

Persetujuan Umum Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan RI-Angola telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada 11 April 2017. Persetujuan ini merupakan refleksi kesungguhan Indonesia untuk menjadi mitra yang dapat dipercaya bagi negara-negara di Afrika sesuai dengan Pernyataan Presiden RI pada Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019. Sehubungan dengan penandatanganan persetujuan tersebut, perlu dilakukan pengesahan untuk memenuhi ketentuan pemberlakuan, hal ini tertuang dalam kesepakatan pada pasal 17 tentang “Durasi dan Masa Berlaku”.

Gambar 3.110 Perpres Nomor 57 Tahun 2022



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Umum Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republic Angola Tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan (*General Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*) telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2022 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2022.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan RI-Angola berhasil tercapai di tahun 2022 dikarenakan proses ratifikasi, pembentukan Panitia antar Kementerian, dan *drafting* awal naskah penjelasan telah dibuat pada tahun 2021. Sehingga pada tahun 2022 proses ratifikasi adalah finalisasi naskah penjelasan, proses paraf Menteri, dan monitoring penyelesaian Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan RI-Angola.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rapat antar Kementerian beberapa kali dilaksanakan secara hybrid dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah menghadiri rapat tersebut secara virtual sehingga penggunaan teknologi semakin maksimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rapat antar Kementerian beberapa kali dilaksanakan secara hybrid dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah menghadiri rapat tersebut secara virtual sehingga terdapat efisiensi anggaran.

4. Penyelesaian Proses Ratifikasi Protokol ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) Paket ke-10

Rapat Koordinasi Proses Penetapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Protokol ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) Paket ke-10

Kemenko Perekonomian telah mengadakan Rapat Koordinasi pada tanggal 4 Januari 2022 dengan tujuan utama menggali informasi secara substansi sebelum memberikan rekomendasi pemberian paraf dimaksud. Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat tersebut antara lain:

- Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian untuk mempersiapkan proses permintaan paraf Menko Perekonomian terhadap draft RPerpres AFAS Paket 10
- Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan dapat mempelajari dan menentukan panduan pencatatan perdagangan jasa secara nasional
- Kemenko Perekonomian akan melakukan koordinasi internal untuk mendukung koordinasi penetapan panduan pencatatan perdagangan jasa dengan *stakeholders* terkait (Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik).

Paraf Menko Perekonomian

Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2022 tersebut, Bapak Menko Perekonomian telah memberikan persetujuannya pada naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* dengan tanggal dokumen 31 Desember 2021.

Pengesahan Perpres AFAS Paket-10

Peraturan Presiden tentang *Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022.

Gambar 3.111 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi pada tanggal 4 Januari 2022 dengan tujuan utama menggali informasi secara substansi sebelum memberikan rekomendasi pemberian paraf dimaksud. Rapat tersebut menyepakati 2 (dua) hal penting bahwa:
 - i. AFAS 10 merupakan kesepakatan penting sektor jasa untuk memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa Indonesia dalam mendapatkan preferensial melalui penghapusan hambatan secara substansial perdagangan jasa diantara negara anggota ASEAN.
 - ii. Kemenko Perekonomian mendukung proses ratifikasi AFAS 10 dan sebagai tindak lanjut Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian

akan mempersiapkan proses permintaan paraf Menko Perekonomian terhadap draft RPerpres AFAS Paket 10.

2. Ratifikasi AFAS 10 sempat terhambat dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Kemenko Pengampu kementerian pemrakarsa belum terinformasi mengenai proses ratifikasi, sehingga rapat khusus perlu dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia di Kemenko Perekonomian terlibat secara aktif dan efisien dalam mengumpulkan informasi dan mempersiapkan rapat khusus koordinasi dukungan ratifikasi kesepakatan AFAS 10. Pembagian kerja dan koordinasi pimpinan unit baik secara langsung maupun virtual sangat membantu dan memudahkan kerja seluruh anggota unit.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kemenko Perekonomian mengedepankan prinsip efisiensi anggaran termasuk untuk pelaksanaan rapat khusus ratifikasi AFAS 10. Adapun anggaran dikeluarkan untuk menyediakan konsumsi berupa snack dan makan siang.

5. Penyelesaian Proses Ratifikasi Perjanjian Regional *Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

Pembahasan draft RUU Pengesahan oleh Tim PAK

Proses ratifikasi perjanjian RCEP pada triwulan I yang dilakukan adalah beberapa kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Rapat Finalisasi Dokumen Kelengkapan Ratifikasi RCEP pada tanggal 14 Januari 2022
- b. Rapat Lanjutan Finalisasi Dokumen Kelengkapan Ratifikasi RCEP tanggal 20 Januari 2022
- c. Penyampaian Nota Dinas Laporan Perkembangan Proses Ratifikasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) kepada Menko Perekonomian tanggal 26 Januari 2022
- d. Rapat Lanjutan Pembahasan Terjemahan Annex 1 TRS sebagai Kelengkapan Ratifikasi RCEP pada tanggal 2 Februari 2022.

Secara keseluruhan rapat telah menyelesaikan pembahasan seluruh dokumen ratifikasi seperti Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RCEP, Naskah Akademik, Surat Keputusan Tim Panitia Antar-Kementerian, Terjemahan lengkap Persetujuan RCEP, dan Inventarisasi Masalah. Adapun dokumen keseluruhan ratifikasi dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/ratifikasircep>

Laporan perkembangan proses ratifikasi RCEP juga dilaporkan secara berkala kepada Bapak Menko Perekonomian melalui Nota Dinas nomor: KSI.04.04/14/D.VII.M.EKON.4/02/2022 tanggal 26 Januari 2022 dan KSI.04.04/68/D.VII.M.EKON.4/02/2022 tanggal 10 Februari 2022.

Pembahasan Harmonisasi RUU tentang Pengesahan RCEP

Proses pembahasan harmonisasi merupakan salah satu rangkaian dalam ratifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan melihat seksama aspek legalitas dari persetujuan dan rancangan instrumen hukum yang digunakan. Dalam hal proses pengesahan RCEP terdapat beberapa kali rapat yang dilakukan antara lain:

- a. Rapat Penyelarasan dengan stakeholder mengenai Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RCEP
- b. Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) tanggal 9 Maret 2022
- c. Sebelum pengesahan RCEP, dilakukan proses internal pemerintah setelah harmonisasi yakni paraf persetujuan atas dokumen RUU RCEP oleh para Menteri terkait. Bapak Menko Perekonomian telah memberikan parafnya pada tanggal 24 Maret 2022 melalui surat nomor PH.2.1-80/M.EKON.03/2022

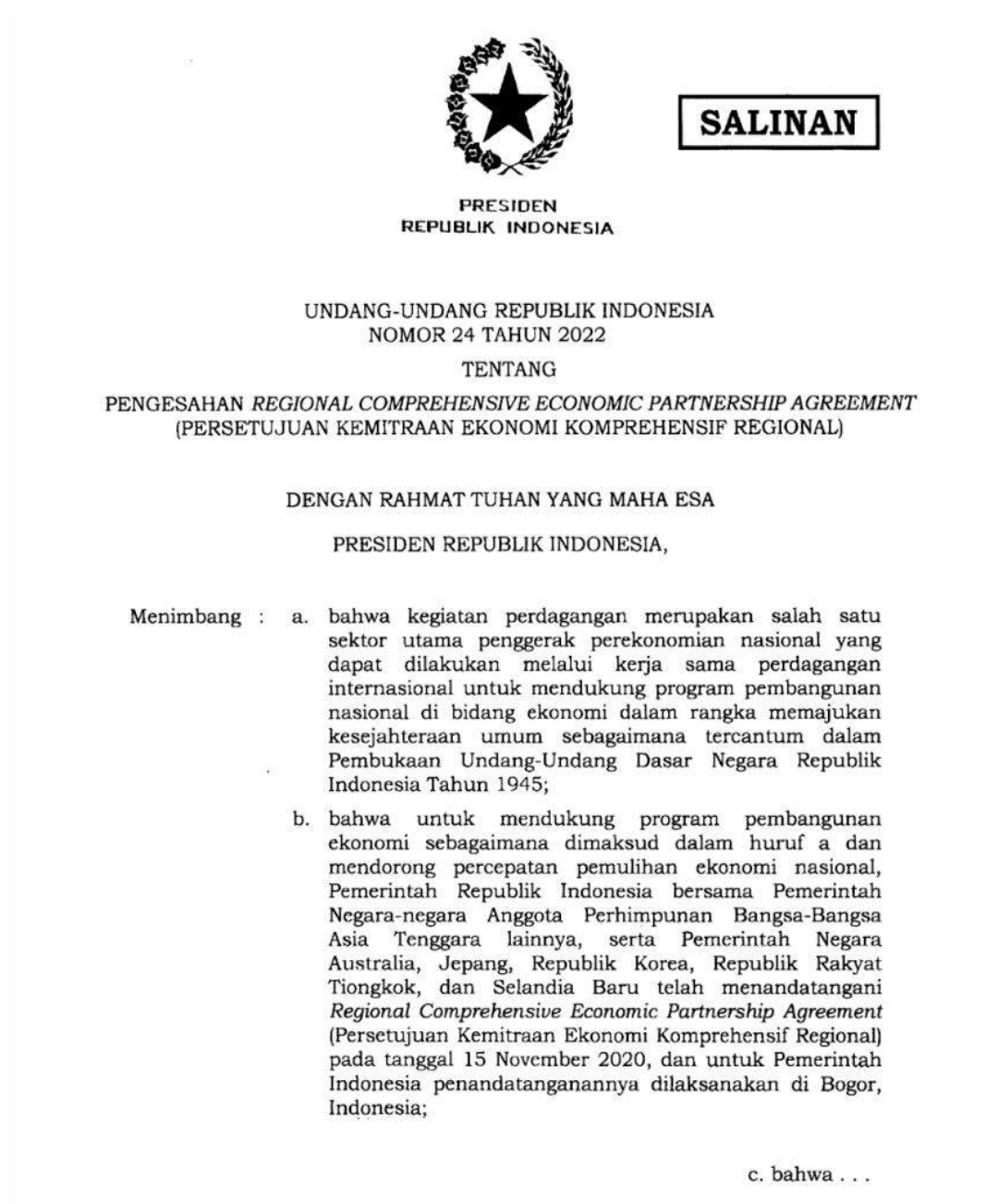
Pengesahan Persetujuan RCEP yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Triwulan I Tahun 2022, menjadi mundur dikarenakan terdapat beberapa proses internal yang perlu dilakukan. Hingga 30 Juni 2022 telah dilaksanakan beberapa kali rapat. Salah satunya adalah FGD Kementerian Perdagangan dengan Komisi VI DPR-RI mengenai Pengesahan RCEP. Adapun dalam FGD tersebut, DPR menyampaikan dukungan terhadap ratifikasi RCEP, namun *concern* yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Manfaat tambahan yang didapatkan dari ASEAN dibandingkan dengan ASEAN + 1.
- b. Kekhawatiran manfaat RCEP hanya dapat dirasakan oleh investor asing di Indonesia.
- c. Strategi pemerintah agar UMKM dapat bertahan di pasar di tengah ancaman naiknya impor dan negara-negara anggota RCEP.
- d. Jadwal Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Perdagangan untuk pembahasan RUU Pengesahan Persetujuan RCEP diagendakan untuk dilaksanakan pada 5 Juli 2022. Sehingga, proses pengundangan RUU mengalami kemunduran hingga triwulan selanjutnya.

Pembahasan pengesahan Persetujuan RCEP telah disahkan pada Rapat Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 30 Agustus 2022. Rapat telah menyetujui RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic

Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan atas RUU ini juga telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Surat Ketua DPR RI nomor B/15348/LG.01.03/8/2022 tanggal 30 Agustus 2022.

Gambar 3.113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan konferensi pers secara virtual dari Singapura terkait persetujuan DPR atas Perjanjian RCEP. Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menjelaskan bahwa persetujuan RCEP membuka akses pasar baru terutama di sektor pertanian dan

perkebunan, perikanan, otomotif dan elektronik, makanan dan minuman, hingga sektor bahan kimia dan mesin di pasar RRT, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Persetujuan RCEP diperkirakan dapat meningkatkan PDB Nasional sebesar 0.07% di tahun 2040 dengan kenaikan ekspor mencapai USD 5,01 Miliar dan Surplus perdagangan juga bisa diperkirakan naik 2,5 kali lipat.

RUU RCEP telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) tanggal 27 September 2022 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Proses ratifikasi Persetujuan RCEP melewati tahapan pembahasan di DPR sebanyak 2 tahap. Pada Pembicaraan Tingkat I yang meliputi pandangan umum fraksi terhadap RUU yang berasal dari pemerintah, jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi, serta pembahasan RUU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pada pertemuan yang diadakan pada 5 Juli 2023 ini para fraksi secara umum menyampaikan dukungannya terhadap ratifikasi Persetujuan RCEP dan meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi defensif maupun ofensif untuk implementasinya, terutama dalam rangka melindungi UMKM, meningkatkan ekspor, dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kementerian Perdagangan menyampaikan arah kebijakan pemerintah untuk membuat rencana aksi implementasi, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian.
- Pada Pembicaraan Tingkat II yang meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dan penyampaian sambutan pemerintah telah disepakati. Pada pertemuan yang diadakan pada 30 Agustus 2022 ini DPR secara resmi menyetujui RUU Ratifikasi Persetujuan RCEP menjadi UU. Dalam pernyataannya, Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan dukungan terhadap ratifikasi dalam rangka mendukung program pembangunan ekonomi dan

percepatan pemulihan nasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dan DPR RI menjadi faktor pendukung diselesaikannya ratifikasi Persetujuan RCEP di tahun 2022.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Proses ratifikasi Persetujuan RCEP telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Dalam hal rapat penyiapan bahan pemerintah dan koordinasi lainnya, telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan rapat virtual. Adapun pertemuan fisik dilakukan saat pemerintah melakukan rapat dengan DPR, mulai dari tahap FGD, Pembicaraan Tingkat I, dan Pembicaraan Tingkat II.
- Efisiensi penggunaan SDM telah dilakukan pemerintah dengan mengoptimalkan fungsi dari unit pada K/L terkait. Kementerian Perdagangan selaku Ketua Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Perpres No. 82 Tahun 2017) mengkoordinasikan penyusunan bahan dan jawaban pemerintah untuk rapat kerja dengan DPR dengan K/L terkait, termasuk Kemenko Perekonomian selaku koordinator penyusunan rencana aksi implementasi. Dengan melakukan kolaborasi dalam pembagian beban kerja, tugas dapat diselesaikan dengan memanfaatkan SDM yang tersedia.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

- Proses ratifikasi Persetujuan RCEP telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan pertemuan virtual di level pembahasan dan koordinasi teknis serta internal pemerintah. Pertemuan dengan DPR RI juga dilakukan secara terbatas sehingga dapat mengefisienkan komponen pembiayaan perjalanan dinas dan/atau pembiayaan lainnya yang relevan.

6. Penyelesaian Proses Ratifikasi ASEAN *Trade in Services Agreement* (ATISA)

Khusus pada proses penyelesaian ratifikasi ASEAN *Trade in Services Agreement* (ATISA) pada tahun 2022 masih belum dapat terselesaikan dalam bentuk pengesahan Peraturan Presiden. Meski demikian, Menko Perekonomian telah menerima Surat Nomor B-1099/M/D-1/HK.03.04/11/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Permohonan Paraf atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan ASEAN *Trade in Services Agreement* (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) dari Menteri Sekretaris Negara.

Sebagai bentuk persetujuan tersebut, Bapak Menko Perekonomian telah menyampaikan paraf persetujuan pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden dimaksud melalui Surat Nomor PH.2.1-311/M.EKON/12/2022 tanggal 10 Desember 2022. Setelah proses paraf Menteri selanjutnya adalah menunggu pengesahan oleh Presiden Republik Indonesia yang ternyata mundur dari target awal yaitu terselesaikan di akhir tahun 2022 menjadi di tahun 2023 mendatang.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Rapat Koordinasi Anggota PAK telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2022. Agenda pembahasan yang dilakukan adalah membahas draft Rancangan Peraturan Presiden ATISA dan Naskah Penjelasan sebagai kelengkapan dokumen ratifikasi. Rapat menyepakati secara substansial atas draft Rancangan Peraturan Presiden dan melakukan penyesuaian pada naskah penjelasan.
- Proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara virtual dan dihadiri oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Para peserta rapat menyetujui agar proses ratifikasi dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu paraf oleh Menteri terkait sebelum ditandatangani oleh Presiden.
- Bapak Menko Perekonomian telah memberikan paraf terhadap draft Perpres ratifikasi ATISA pada bulan Desember 2022 dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh Presiden melalui Perpres no.3 tahun 2023.

- Dalam proses ratifikasi, kendala yang dihadapi adalah paraf oleh anggota PAK memerlukan waktu sedikit panjang karena ditandatangani secara elektronik.

Gambar 3.114 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023



SK No 163297 A

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Seluruh SDM di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional terlibat aktif dan efektif baik dalam berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun dengan internal Kemenko Perekonomian sehingga ratifikasi ATISA dapat berjalan dengan lancar.

- Proses ratifikasi diselenggarakan melalui rapat untuk membahas substansi draft Peraturan Presiden dan dilanjutkan dengan rapat harmonisasi. Pelaksanaan rapat-rapat tersebut memanfaatkan teknologi yang ada sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan baik.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Prinsip efisiensi anggaran telah diterapkan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional. Tidak ada anggaran yang digunakan secara khusus pada Rapat koordinasi dan harmonisasi yang diikuti.

Meskipun realisasi ratifikasi yang terselesaikan adalah 5 ratifikasi dari 6 ratifikasi di tahun 2022 atau 83% dari target berupa range persentase capaian 80-90%, maka Capaian Kinerja Tahun 2022 pada IKU 1.5. Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian adalah sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun anggaran 2022 yang telah mencapai 100%, maka Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sangat optimis dapat meraih capaian kinerja lebih baik lagi pada periode kinerja tahun berikutnya.

2. Sasaran Strategis Kedua

Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif

Pencapaian kinerja pada sasaran program strategis “Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif” ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) IKU, yaitu:

1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Ditindaklanjuti

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas. Nilai dari indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional diperoleh melalui penilaian dari 2 (dua) sub indikator, yaitu:

Sub indikator pertama, merupakan Persentase Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang ditindaklanjuti. Adapun Instrumen kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kantor Kemenko Perekonomian (PP, Perpres, Permenko, dll)
2. Regulasi yang dihasilkan oleh Presiden dan K/L lain sebagai dampak/tindak lanjut dari hasil proses dan koordinasi yang dikeluarkan kantor Kemenko Ekon
3. Surat dari K/L terkait
4. Kesepakatan kerjasama ekonomi internasional
5. Notula Rapat yang diselenggarakan oleh Presiden melalui Ratas atau K/L terkait sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian

Dan instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh Kemenko Perekonomian antara lain:

1. Rumusan kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas, Surat Keluar);
2. Siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor Kemenko Perekonomian; dan/atau
3. Draft Kesepakatan kerja sama ekonomi hasil pertemuan internasional yang dipimpin/inisiasi oleh Kemenko Perekonomian
4. Risalah/notulensi/Berita Acara Kegiatan rapat koordinasi level Menteri/Deputi/Asisten Deputi

Sub indikator kedua, merupakan indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas. Untuk sub indikator ini, indeks kepuasan layanan koordinasi dapat dibuktikan dengan penghargaan atau apresiasi dari pihak luar yang kredibel.

2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian penyusunan kajian dan analisa kebijakan dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Kebijakan yang berkualitas yang dimaksud adalah hasil dari proses analisis yang dalam dan komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional diperlukan analisa kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) dan karya tulis ilmiah (*policy brief*, *policy paper*, artikel kebijakan dan makalah).

Lebih lanjut, IKU ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian atas dokumen analisis kebijakan yang ditargetkan. Dokumen Analisis Kebijakan yang dihasilkan nantinya harus mendapat persetujuan dari Menko Perekonomian. Pada tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menargetkan menyusun 42 dokumen

analisis kebijakan. Dengan terpenuhinya Indikator kinerja ini, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional namun juga diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan Kompetensi ASN yang merupakan “*ultimate indicator*” pada sasaran strategis di level Kementerian

CAPAIAN IKU 2.1.**Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Ditindaklanjuti**

Sampai pada akhir tahun 2022, capaian kinerja pada IKU Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Ditindaklanjuti yang telah terealisasi adalah 4 dari 4 (sangat baik). Hal ini telah melebihi target kinerja pada target ini yang semua hanya 3 dari 3 (baik).

Adapun hasil dari koordinasi dan sinkronisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tersebut antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Hasil Kerja Sama dalam Forum/Kesepakatan Indonesia dengan Negara di Kawasan Eropa Barat

Sehubungan dengan upaya peninjauan pembentukan *German Industrial Quarter* di Indonesia, telah dilaksanakan kunjungan *site visit* ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik pada tanggal 10 Februari 2022. Kunjungan ini melibatkan *stakeholders* Jerman yang diwakili oleh *First Secretary* Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta, perwakilan Kamar Dagang dan Industri Jerman (EKONID), serta beberapa perusahaan Jerman dibawah naungan EKONID. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memfasilitasi pembahasan antara *Java Integrated Industrial and Port Estate* dan perwakilan Jerman untuk menindaklanjuti kerja sama.

2. Rapat Koordinasi Posisi Pemri atas Kasus Sengketa DS477/478 untuk Pertemuan Reguler Dispute Settlement Body (DSB) dan Pertemuan Bilateral AS dan SB

Triwulan I

Indonesia selalu berpartisipasi dalam sidang reguler DSB WTO, dimana terakhir dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022. Rapat penyusunan posisi Status Report Pemri dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022. Dalam Status Report tersebut, Pemri menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Aturan impor nasional yang menjadi objek sengketa, yang diatur oleh Undang-Undang, telah dicabut seiring dengan pengesahan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK)
- Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian, seperti pembatasan pada masa panen, persyaratan realisasi impor, persyaratan panen enam bulan, dan harga referensi, juga telah disesuaikan

Pada setiap persiapan sidang reguler DSB WTO, perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terlibat dalam penyusunan posisi Pemri melalui status report dan memonitor proses penerbitan perizinan impor hortikultura dan hewan dari AS dan SB. Telah dilaksanakan rakor tim kecil review Perpres Neraca Komoditas dengan beberapa tindak lanjut, antara lain:

- Menerjemahkan buku saku yang berisikan pertanyaan dan jawaban seputar implementasi NK ke dalam Bahasa Inggris untuk memberikan pemahaman pada stakeholders terkait
- Menyusun narasi bersama dalam menjawab berbagai concern negara mitra berdasarkan matriks terkait pasal-pasal Perpres NK
- Pusat akan melakukan konsultasi lebih lanjut dengan PTRI Jenewa terkait penyelesaian sengketa DS 477/478 dan rencana notifikasi Perpres No.32 Tahun 2022 terkait NK ke WTO

Triwulan II

a. Rakor Penyusunan Posisi Indonesia pada Pertemuan Reguler DSB WTO atas Kasus Sengketa DS477/478

Selama Triwulan II Tahun 2022, Indonesia aktif menghadiri sidang reguler DSB WTO tiap bulannya, Pertemuan terakhir di semester I 2022 telah diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2022, dimana Pemri menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Aturan impor nasional yang menjadi objek sengketa, yang diatur oleh Undang-Undang, telah dicabut seiring dengan pengesahan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).
- Meskipun terdapat putusan Mahkamah konstitusi pada tanggal 25 November 2021 yang memutuskan bahwa UUCK bersifat inkonstitusional bersyarat, namun UUCK masih tetap berlaku dalam kurun waktu yang diberikan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian, yakni 2 (dua) tahun.
- Aturan impor yang diatur pada tingkat Peraturan Menteri juga telah disesuaikan.
- Terkait dengan pertanyaan AS dan SB mengenai Neraca Komoditas (NK), penerapan mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan kemudahan dan kepastian berusaha serta ketersediaan pasokan produk.

Pada setiap persiapan sidang reguler DSB WTO, KSEAP selalu terlibat aktif dalam penyusunan posisi Pemri melalui status report dan memonitor proses penerbitan perizinan impor hortikultura dan hewan dari AS dan SB.

b. Rakor Penyusunan Buku Saku Neraca Komoditas

Asisten Deputi Bidang Fasilitasi Perdagangan, Kemenko Perekonomian telah menyusun draft Buku Saku Neraca Komoditas yang akan digunakan oleh Pemerintah dan/atau *stakeholder* dalam menjawab pertanyaan dari pihak pelaku usaha dan/atau pemerintah asing maupun dalam negeri.

Pada 25 April 2022 telah dilaksanakan Rakor Penyusunan Buku Saku NK pada tanggal yang dihadiri oleh perwakilan dari Asdep Fasilitasi

Perdagangan Kemenko Perekonomian, Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian, DPM Kementerian Perdagangan, serta Rovodag Kementerian Perdagangan. Pada rakor tersebut, K/L menyepakati beberapa hal antara lain:

- Draft buku saku NK masih memerlukan beberapa penyesuaian substansi tambahan dari Perpres no.32/2022 dan perlu dimasukkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Permenko terkait pedoman NK untuk menjawab berbagai concern negara mitra.
- Pemri perlu memisahkan keterkaitan substansi dalam NK dengan measure-measure dalam DS 477/478.
- Strategi Pemri dalam DS 477/478 selanjutnya adalah mengajukan kepatuhan Permendag dan Permentan atas measure 1-17 kepada DSB WTO tahap Compliance Panel untuk selanjutnya dilakukan pembuktian terbalik oleh *Complainant* (SB).

Pada 8 Juni 2022 telah dilaksanakan Rakor Tindak Lanjut Pembahasan Buku Saku NK. Menindaklanjuti permintaan masukan atas Buku Saku NK, Biro Advokasi Perdagangan telah menyelenggarakan rapat tindak lanjut pembahasan Buku Saku NK. Adapun hasil rapat tersebut telah disampaikan oleh Biro Advokasi Perdagangan kepada Asdep KSE Amerika dan Pasifik melalui Surat No: 1061/SJ-DAG.7/D/06/2022 perihal Penyampaian Masukan konsep Buku Saku NK tanggal 10 Juni 2022.

c. Pertemuan Bilateral dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru

Pada Triwulan II Tahun 2022, telah dilakukan dua kali pertemuan yaitu dengan perwakilan Kedubes AS tanggal 11 April 2022 dan dengan perwakilan U.S. Department of Commerce (US.DoC) tanggal 23 Mei 2022. Pada pertemuan bilateral tersebut, Kemenko Perekonomian juga menyampaikan *concern* terkait sengketa DS478 RI-AS di WTO. Kemenko Perekonomian kembali menegaskan bahwa Indonesia telah mematuhi 18 *measures* putusan panel dan memahami *concern* AS terkait NK, namun NK bukan merupakan persyaratan tambahan dalam ekspor-impor dan bukan merupakan salah satu rekomendasi Panel WTO. Kemenko menyampaikan bahwa Pemri mengharapkan agar Pemerintah AS dapat segera menutup kasus WTO DS478. Menanggapi

concern tersebut, pihak AS akan menyampaikan kepada USTR untuk ditindaklanjuti.

Triwulan III

a. Rakor penyusunan posisi Indonesia pada pertemuan reguler DSB WTO atas kasus sengketa DS477/478

Selama Triwulan III Tahun 2022, Indonesia aktif menghadiri sidang reguler DSB WTO tiap bulannya, Pertemuan terakhir di Triwulan III 2022 telah diselenggarakan pada tanggal 23 September 2022, dimana Pemri menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Indonesia menekankan kembali bahwa telah dihapus seluruh Pasal terkait kebijakan *self-sufficiency* (*Measure 18*) dalam Undang-Undang (UU) terkait melalui UU Cipta Kerja
- Indonesia telah melakukan penyesuaian atas ketentuan lainnya dalam sengketa, sebagaimana tercakup dalam measures 1-17, antara lain, melalui penghapusan pembatasan masa panen, persyaratan realisasi impor, persyaratan setelah masa panen 6 bulan, harga referensi, dan persyaratan penyerapan produk dalam negeri.
- Indonesia juga memberikan konfirmasi kepada Amerika Serikat (AS) bahwa Neraca Komoditas akan berdampak positif dalam mempermudah dan memberikan kepastian dalam melakukan usaha dalam penerapannya. Disampaikan pula bahwa Neraca Komoditas akan didukung oleh sistem nasional basis data terintegrasi dan proses yang transparan dan lebih ringkas.
- Pada sidang DSB WTO bulan September 2022, AS kembali menyampaikan tanggapan antara lain sebagai berikut:
 - ➔ AS berharap Indonesia dapat menyediakan informasi tambahan mengenai peraturan terkait rezim perizinan impor dan peraturan lain yang terkait
 - ➔ AS juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dampak positif penerapan mekanisme Neraca Komoditas terhadap kemudahan dan kepastian berusaha.
- Untuk SB menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempelajari informasi dari status report Indonesia dan akan menyampaikan

tanggapannya pada kesempatan berikutnya. Pada setiap persiapan sidang reguler DSB WTO, KSEAP selalu terlibat aktif dalam penyusunan posisi Pemri melalui status report dan memonitor proses penerbitan perizinan impor hortikultura dan hewan dari AS dan SB.

b. Pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru

Pada Triwulan III Tahun 2022, terdapat 2 pertemuan antara Menko Perekonomian RI dengan Ambassador USTR Katherine Thai yaitu pada tanggal 8 September di Los Angeles dan tanggal 22 September di Bali yang menghasilkan perkembangan penyelesaian beberapa isu sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat di WTO (DS 478) dimana Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia telah memenuhi seluruh rekomendasi dan putusan DSB WTO dan berharap Pemerintah AS dapat mendukung Indonesia untuk menyelesaikan hambatan perdagangan bilateral melalui penutupan sengketa dagang WTO DS 478 terkait importasi produk hortikultura, hewan, dan produk hewan.

Triwulan IV

a. Rapat Penyusunan Posisi Indonesia pada Pertemuan Reguler DSB WTO atas Kasus Sengketa DS477/478

Selama Triwulan IV Tahun 2022, Indonesia aktif menghadiri sidang reguler DSB WTO tiap bulannya, Pertemuan terakhir di Triwulan IV 2022 telah diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2022, dimana Pemri menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Indonesia menekankan kembali bahwa Pemri telah mengamandemen seluruh Pasal terkait kebijakan *self-sufficiency* (*Measure* 18) dalam Undang-Undang (UU) terkait melalui UU Cipta Kerja.
- Indonesia telah melakukan penyesuaian atas ketentuan lainnya dalam sengketa, sebagaimana tercakup dalam *measures* 1-17, antara lain melalui penghapusan pembatasan masa panen, persyaratan realisasi impor, persyaratan setelah masa panen 6 bulan, harga referensi, dan persyaratan penyerapan produk dalam negeri.
- Indonesia juga memberikan konfirmasi bahwa Neraca Komoditas akan berdampak positif dalam mempermudah dan memberikan

kepastian dalam melakukan usaha dalam penerapannya. Pemri juga menyampaikan bahwa Neraca Komoditas akan didukung oleh sistem nasional berbasis data terintegrasi dan proses yang transparan dan lebih ringkas. Kebijakan dimaksud juga akan membantu K/L terkait untuk memperoleh data yang akurat.

Pada sidang DSB WTO bulan Desember 2022, AS kembali menyampaikan tanggapan antara lain sebagai berikut:

- AS berharap Indonesia dapat menyediakan informasi tambahan mengenai peraturan terkait rezim perizinan impor dan peraturan lain yang terkait.
- AS juga meminta klarifikasi Indonesia bahwa mekanisme Neraca Komoditas hanyalah sebatas kebijakan prosedural dan bukan bermaksud membatasi kegiatan ekspor – impor.

Untuk SB menyampaikan *concern*-nya kepada Indonesia setelah pertemuan berakhir secara informal. *Concern* SB tersebut mencakup kaitan antara isu neraca komoditas dengan perkembangan implementasi keputusan DSB pada sengketa ini. SB menyampaikan bahwa adanya kekhawatiran dengan mekanisme Neraca Komoditas ini akan menggantikan *measures* yang telah dihapus maupun disesuaikan.

Pada setiap persiapan sidang reguler DSB WTO, KSEAP selalu terlibat aktif dalam penyusunan posisi Pemri melalui status report dan memonitor proses penerbitan perizinan impor hortikultura dan hewan dari AS dan SB.

b. Pertemuan Bilateral dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru

Pada Triwulan IV Tahun 2022, terdapat pertemuan antara Menko Perekonomian RI dengan Ambassador USTR Katherine Thai pada tanggal 26 Oktober 2022 di Washington DC. Pertemuan tersebut membahas usulan penutupan sengketa WTO DS478. AS mengapresiasi upaya Indonesia namun membutuhkan lebih banyak waktu untuk memutuskan rencana penutupan kasus DS478.

Selain itu usulan penutupan sengketa WTO DS477/478 juga telah ditindaklanjuti dengan pengiriman surat Deputi KSE Internasional sebagai ketua Tim Clearing House Pemri kepada PTRI Jenewa pada tanggal 19 Oktober 2022. Surat tersebut menyampaikan narasi *full compliance* Pemri dan pengajuan penutupan sengketa DS477/478, sebagai panduan bagi PTRI Jenewa dalam melakukan pendekatan bilateral kepada Perutap Amerika Serikat dan Selandia Baru di Jenewa.

3. Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi Pemri dalam Memitigasi Rencana Retalisasi Brasil terkait Sengketa Dagang DS484

Merujuk pada Brafaks PTRI Jenewa tertanggal tanggal 2 Februari 2022 dan Brafax KBRI Brasilia tanggal 17 Februari 2022, diinformasikan bahwa Pemerintah Brasil telah mengesahkan peraturan nasional sebagai landasan kebijakan untuk mengenakan retaliasi dagang secara unilateral terhadap anggota WTO yang digugat oleh Brasil dan proses penyelesaian sengketa tertunda di Appellate Body WTO yang saat ini tidak berfungsi.

Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional selalu Ketua Tim Clearing House Penyelesaian Sengketa DS484 telah menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan strategi Pemri dalam memitigasi rencana retaliasi unilateral Brasil pada tanggal 1 Maret 2022. Strategi diplomasi yang dihasilkan, sebagai berikut:

- Melakukan pendekatan bilateral dengan Kedubes Brasil di Jakarta, maupun pendekatan oleh KBRI Brasilia, untuk mengetahui arah dan tujuan Pemerintah Brazil dalam implementasi kebijakan MP No. 1908/2022. Diplomasi bertujuan agar Brasil tetap menghormati dan mengimplementasikan aturan WTO yang berlaku serta menghindari tindakan unilateral, serta mencegah pengesahan MP menjadi Undang-Undang (UU)
- Sejalan dengan upaya diplomasi bilateral, PTRI Jenewa akan melakukan pendekatan kepada Perutap Brasil di Jenewa dan mencari

informasi terkait isu retaliasi unilateral Brasil kepada *The Committee on Market Access* WTO

- Pemri dapat membangun narasi positif kepada Brasil terkait peluang peningkatan perdagangan di antara kedua belah pihak. Beberapa potensi yang dapat ditawarkan kepada Brasil sebagai *agreed solution* antara lain adalah pemasukan daging sapi beku, kedelai, bahan pakan asal hewan dan produk perunggasan (*poultry products*)
- Masing-masing K/L perlu melakukan skenario potensi produk yang akan terkena dampak dari rencana retaliasi tersebut. Skenario tersebut perlu dieskalasi berdasarkan seberapa berat implikasi retaliasi unilateral Brasil

Dalam hal Brasil mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan retaliasi unilateral kepada Indonesia, Pemri dapat mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyusun Perpres Retaliasi Dagang sebagai dasar hukum dalam melakukan balasan retaliasi unilateral terhadap mitra dagang Indonesia
- Melakukan *silent retaliation*, dengan memberikan perlakuan yang sama kepada komoditas Brasil yang masuk ke Indonesia, namun dilakukan secara informal. *Silent retaliation* dapat berupa peningkatan tarif bea masuk, penerapan kuota, pencabutan kuota, maupun kebijakan teknis lainnya
- Mengajukan gugatan atas tindakan retaliasi Brasil kepada DSB WTO, mengingat Brasil berpotensi melanggar ketentuan *sequencing agreement* dan *Article 22 DSU* WTO
- Keputusan litigasi merupakan pilihan terakhir

4. Persiapan *Trade and Investment Framework Agreement Ministerial Meeting* (TIFA MM) RI-Amerika Serikat Tahun 2022

Dalam rangka persiapan *Trade and Investment Framework Agreement Ministerial Meeting* (TIFA MM) RI-AS ke-18 yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022, Kemenko Perekonomian dan KL terkait telah melakukan beberapa upaya persiapan, antara lain:

- Rapat Koordinasi Persiapan TIFA-MM RI-AS

Dalam rangka mempersiapkan posisi Indonesia pada pelaksanaan TIFA MM RI-AS ke-18, Kemenko Perekonomian telah menghadiri rapat interkem yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan pada tanggal 20 Januari 2022. Beberapa *possible issues* substansi yang akan dibahas pada agenda *Tete-a-tete* antara lain sebagai berikut:

- Reaktivasi 4 (empat) Working Group yang dibentuk dalam TIFA RI-AS tahun 2007, yaitu *WG on Services*, *WG on Intellectual Property Rights* (IPR), *WG on Investment*, *WG on Agricultural and Industrial Goods*.
 - Dikeluarkannya Indonesia dari Status Priority Watch List (PWL) untuk Isu Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - Pembentukan *Limited Trade Deal* (LTD) dan *Joint Task Force* (JTF) *on Global Supply Chain* (GVC)
 - Penutupan Sengketa Dagang DS 478
- Pertemuan dengan Delegasi USTR

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan didampingi Pejabat Eselon II Kementerian Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan telah menerima dan melakukan pertemuan dengan Assistant U.S. Trade Representative for Agricultural Affairs and Commodity Policy pada tanggal 28 Januari 2022 dan 8 Februari 2022. Dua agenda pertemuan tersebut membahas perkembangan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, kebijakan Neraca Komoditas, perizinan impor atas produk hortikultura dan produk hewan, serta fasilitas pendaftaran untuk susu, daging dan produk olahan. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang positif sebelum pelaksanaan TIFA Ministerial Meeting yang direncanakan akan dilaksanakan pada Semester I Tahun 2022. Selain membahas beberapa *concern* USTR, Pemri juga menyampaikan beberapa kepentingan Indonesia.

5. Rakortas terkait dengan Potensi Ekspor Pupuk Urea ke Australia

Duta Besar Australia di Jakarta menyampaikan permintaan ekspor urea Indonesia sekitar 5000 ton per bulan untuk memenuhi kebutuhan sektor otomotif di Australia. Untuk membahas permintaan Australia tersebut, Asdep KSEAP telah mengadakan Rapat Pembahasan Permintaan Ekspor Urea Indonesia ke Australia dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022. Rapat menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain:

- Realisasi ekspor dari Desember 2021 s.d. Februari 2022 mencapai 7.500 ton, namun belum ada long term contract (LTC). PT Pupuk Indonesia tidak dapat menjamin untuk mengekspor urea setiap bulan dengan jumlah 5.000 ton.
- PT Pupuk Indonesia (Persero) akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan urea domestik, dimana apabila ada sisa stok yang tersedia dapat digunakan untuk melakukan supply ke Australia.
- Apabila *supply* berjalan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan hubungan dagang antara Indonesia dengan Australia.

6. Koordinasi, Sinkronisasi Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023

Triwulan I

- Rapat koordinasi dengan *sectoral bodies* di bawah pilar ekonomi telah dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan persiapan yakni rakor Sekretariat Nasional ASEAN dan rapat pleno Sekretariat Nasional ASEAN. Sebagai tindak lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional melakukan rakor persiapan ASEAN Chairmanship 2023 pada pilar ekonomi dengan hasil pertemuan, sebagai berikut:
 - Momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam kerja sama ekonomi kawasan dengan mendorong isu-isu prioritas yang sejalan dengan kepentingan nasional
 - Kesuksesan *Chairmanship* Indonesia didukung oleh

penyelenggaraan/logistik, substansi, dan diseminasi

- Mendukung agar penyusunan *Priority Economic Deliverables* dapat bersifat strategis, berdampak luas, impactful, berkualitas, konkret *achievable, doable*, dan bermanfaat besar sebagaimana arahan yang disampaikan Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan pada rapat sebelumnya.
- Penyusunan Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN
Rapat penyusunan *Priority Economic Deliverables* (PED) telah dilakukan beberapa kali dengan K/L di bawah pilar ekonomi dan menghasilkan 3 usulan tema besar dalam keketuaan Indonesia, antara lain:
 - *Strategic Thrust I: Recovery/Rebuilding: Rebuilding Regional Growth, Connectivity and New Competitiveness*
 - *Strategic Thrust II: Digital Economy: Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation*
 - *Strategic Thrust III: Sustainability: Advancing Multidimensional Sustainability Agenda for the AEC*
- Telah dilakukan permintaan ke K/L untuk dapat melakukan pengisian dan identifikasi awal notional calendar

Triwulan II

- Rapat Koordinasi dengan Sectoral Bodies di bawah pilar ekonomi
Pada Triwulan II, telah dilakukan beberapa kali rapat PED antara lain:
 - Rapat Tindak Lanjut Finalisasi *Priority Economic Deliverables* pada *Chairmanship* Indonesia di ASEAN 2023 pada tanggal 21 April 2022. Rapat membahas usulan inisiatif PED sektor selain sektor di bawah ASEAN *Economic Minister* (AEM) dan ASEAN *Finance Minister Meeting* (AFMM)
 - Rapat Koordinasi Penyusunan Kalender Kegiatan (*Notional Calendar*) Pertemuan pada Pilar Ekonomi ASEAN 2023 tanggal 13 Mei 2022
 - Pembahasan rencana pertemuan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 di bawah pilar ekonomi dan mengidentifikasi pertemuan yang akan dilangsungkan di kantor ASEAN Sekretariat Jakarta.

- Rapat Trilateral Pembahasan PED ASEAN Chairmanship 2023 tanggal 28 Juni 2022
- Finalisasi dan pembahasan usulan PED secara keseluruhan terutama untuk *pending* PED di sektor energi, pangan, dan ekonomi digital.
- Sinkronisasi PED dan Pendanaan di masing-masing K/L (*Outreach Programs*)
 - Pertemuan Multipihak Pembahasan Koordinasi dan Sinergi Dukungan pada Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 diinisiasi oleh Bappenas. Selain itu pada internal Kemenko Perekonomian telah dilakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Bappenas sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 29 Juni 2022. Hingga saat ini, usulan anggaran tambahan untuk ASEAN Chairmanship 2023 masih dalam proses penelaahan oleh Kementerian Keuangan.
 - Rapat Koordinasi Penetapan Usulan *Priority Economic Deliverables (PED)* pada ASEAN Chairmanship 2023 tanggal 30 Juni 2022
 - a. Rapat membahas pengesahan PED usulan K/L terkait dan opsi perubahan narasi beberapa PED agar menggambarkan nilai strategis dan capaiannya, serta substansi tujuan dari masing-masing usulan PED.
 - b. Berdasarkan pembahasan, terdapat 8 (delapan) usulan PED yang dapat ditetapkan (*endorsed*) sebagai PED usulan Indonesia. Sementara itu, 7 (tujuh) usulan PED lainnya masih perlu pembahasan lebih lanjut, khususnya pada sektor pangan dan energi.
 - c. Usulan PED yang ditetapkan akan dikoordinasikan dengan Sekretariat Nasional ASEAN.
 - Konsultasi PED dengan ASEAN Secretariat
Konsultasi PED dengan ASEAN Secretariat dijadwalkan untuk diagendakan pada bulan Juli 2022.
 - Penetapan Tema Keketuaan ASEAN 2023

Penetapan Tema dan hal teknis lainnya terkait persiapan ASEAN *Chairmanship* 2023 dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Hingga Triwulan II, belum terdapat koordinasi lebih lanjut dengan koordinator pilar

Triwulan III

- Pada 24 Agustus 2022, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan *Chairmanship* Indonesia di ASEAN tahun 2023. Rakortas dipimpin oleh Menko Perekonomian dan dihadiri oleh Menlu, Mentan, Menperin, Menteri KKP, Kepala BRIN, Kepala Bapanas, serta pejabat lainnya yang mewakili. Rakortas tersebut membahas identifikasi pertemuan Pilar Ekonomi ASEAN di tahun 2023, perkembangan *Priority Economic Deliverables*, dan *Flagship Events*.
- Pada 13 September 2022, telah dilaksanakan Rapat Internal Presiden mengenai Persiapan *Chairmanship* Indonesia pada ASEAN 2023. Menko Perekonomian menyampaikan usulan *strategic thrust* berikut *Priority Economic Deliverables* pada Pilar Ekonomi, perkembangan kerja sama ASEAN+1 FTAs, perkembangan, ratifikasi RCEP oleh Indonesia dan rencana pendirian Sekretariat RCEP di Jakarta, serta partisipasi Indonesia dalam *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF).
- Pada 16 September 2022, telah diselenggarakan Rapat Pemutakhiran *Notional Calendar* ASEAN di tahun 2023 pada Pilar Ekonomi. Rapat tersebut melakukan *update* agenda pertemuan ASEAN di bawah Pilar Ekonomi sepanjang tahun 2023, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun yang bertempat di negara anggota ASEAN lainnya.
- Dalam Rapat Pimpinan Presiden pada 30 September 2022, Presiden menyepakati “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*” sebagai tema ASEAN *Chairmanship* Indonesia di tahun 2023.

Triwulan IV

- Penetapan *Concept Note* PED

Hingga Triwulan IV, Kemenko Perekonomian selaku Koordinator Pilar Ekonomi di ASEAN secara nasional, telah menetapkan 16 PED yang

akan diangkat menjadi prioritas Indonesia pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Telah dikirimkan *Indicated Priority Economic Deliverables (PED) under Indonesia's Chairmanship of ASEAN in 2023* melalui nomor KSI.04.03/96.S/D.VII.M.EKON.4/11/2022 yang ditujukan kepada *Director of ASEAN Integration Monitoring ASEAN Economic Community Department, ASEAN Secretariat*.

- **Handover Chairmanship ASEAN 2023**

Presiden Joko Widodo telah menerima mandat ketua ASEAN pada upacara penutupan Rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan 41 tanggal 13 November 2022 di Phnom Penh, Kamboja. Indonesia mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Tema ini menunjukkan harapan bahwa ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, serta menjadi jangkar stabilitas dunia. Lebih lanjut, ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun.

- **Pelaksanaan *Ekon Goes to Campus***

Sebagai upaya diseminasi dalam mengenalkan peran Indonesia di ASEAN Tahun 2023, salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Seminar "*Road to Indonesia's Chairmanship in 2023: Economic Pillar*". Tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman terkait Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 kepada masyarakat khususnya mahasiswa sebagai generasi muda. Seminar dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022 dengan kolaborasi bersama Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan.

7. Rencana Aksi Implementasi Perjanjian RCEP

Triwulan I

- **Penyelesaian Rencana Aksi Implementasi Perjanjian RCEP**

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Aksi Implementasi Perjanjian RCEP dalam rangka Peningkatan Daya Saing Nasional dengan hasil:

- Rencana aksi disusun dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana aksi jangka pendek mencakup analisa daya saing produk Indonesia dalam RCEP, identifikasi regulasi existing untuk mendukung implementasi RCEP, dan rencana aksi pada sektor prioritas
- Perlu adanya sektor prioritas yang akan didorong dalam rencana aksi sehingga akan mendorong investasi dan memberikan manfaat yang lebih besar
- Pemetaan sektor prioritas dapat dilakukan dengan menetapkan indikator antara lain nilai jumlah ekspor, keterkaitan hulu hilir, dan partisipasi dalam GVC
- Perlunya membentuk tim inti penyusunan rencana aksi yang diawali dengan menyusun panduan/*guideline*
- Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi

Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Panduan Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Perjanjian RCEP. Salah satu pembahasan terkait implementasi dan monitoring rencana aksi, diperlukan rumusan mekanisme monitoring yang kuat, sebagai berikut:

- Diperlukan pendekatan intensif dengan K/L terkait sebagai pembina sektor dalam perjanjian RCEP. K/L juga harus melakukan monitoring masing-masing
- Monitoring dapat diselenggarakan dalam 2 pendekatan yaitu monitoring proses dan monitoring dampak
- Diperlukan integrasi ke dalam RPJMN dan RKP sehingga akan menjadi prioritas bersama dan mendapat dukungan penganggaran yang lebih jelas

Triwulan II

- Indonesia perlu menyusun Rencana Aksi Implementasi RCEP dengan target penyelesaian Oktober 2022
- Upaya penyusunan Renaksi Implementasi RCEP akan menjadi upaya harmonisasi dan sinergi berbagai kebijakan yang ada di masing-masing K/L.

- Kemenko Perekonomian melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Propsera untuk menyusun *review* atau kajian mengenai identifikasi sektor prioritas sebagai tahap penyusunan renaksi RCEP.
- Prospera melakukan tender untuk memilih konsultan dalam menyusun renaksi RCEP. Rapat tanggal 28 Juni 2022 telah mendapatkan pemenang tender dan perlu penyiapan keperluan administrasi tender.
- Terkait dengan SK Deputy untuk tim teknis saat ini dalam proses review oleh Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian.

Triwulan III

- Surat Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tentang Tim Penyiapan Rencana Aksi Implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) telah disahkan melalui SK Nomor 11 Tahun 2022 pada tanggal 18 Juli 2022;
- SK dibentuk sebagai dasar tim kecil untuk melakukan tugas seperti melakukan persiapan penyusunan dan perumusan Rencana Aksi, mengoordinasikan penyusunan rancangan instrumen hukum, dan melaksanakan tugas terkait lainnya.
- Anggota dari SK yang dibentuk adalah terdiri dari beberapa K/L seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.
- Dalam hal proses penyusunan Rencana Aksi Implementasi RCEP, Pemerintah Indonesia c.q. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional memperoleh dukungan dari Prospera untuk pelaksanaan *project* menyusun rencana aksi.
- Pada Bulan September telah dilakukan finalisasi dan penandatanganan kontrak dengan konsultan pemenang, dan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Selanjutnya CIPS menyusun rencana kerja dengan periode enam bulan.
- Kemenko Perekonomian dan Prospera menyepakati penyesuaian target penyelesaian penyusunan Rencana Aksi yang semula pada bulan

Oktober 2022 menjadi Januari 2023 untuk memberikan waktu yang mencukupi guna penyusunan hasil laporan yang lebih komprehensif

8. Pengusulan Proyek yang Memanfaatkan BKCF dalam Kerangka Kerja Sama BIMP-EAGA

Triwulan I

Sehubungan dengan pengusulan proyek yang memanfaatkan dana BKCF (BIMP-EAGA – Korea Cooperation Fund), telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- Pertemuan tingkat NS dan CWGs dalam rangka briefing on BIMP-EAGA ROK Cooperation Fund
- Konsultasi nasional identifikasi proyek yang akan diusulkan dalam pemanfaatan BKCF
- Rapat pembahasan identifikasi proyek sektor energy
- Penyusunan project proposal
- Pertemuan BIMP-EAGA Project Appraisal Committee

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerima dan mengirimkan 23 proyek untuk disampaikan kepada GGGI. Selain itu, telah memberikan asistensi dalam pengajuan proposal kepada masing-masing K/L. Proposal yang sudah sesuai yakni *Environment, Tourism, dan Connectivity*.

Triwulan II

- Korea merupakan negara mitra dalam BIMP-EAGA yang memberikan pendanaan hibah sebesar 1 Juta USD untuk BKCF tahap 1 tahun 2021 untuk pelaksanaan proyek di BIMP-EAGA. *Call for proposals* dilaksanakan pada tahun 2021 dan mekanisme penilaian proyek selesai pada Mei 2022.
- Usulan yang masuk kemudian dilakukan penilaian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Korea yakni *Global Green Growth Institute (GGGI)*.
- Pada 17 Juni 2022 telah dilaksanakan *BIMP-EAGA and Republic of Korea (ROK) Senior Official Meeting (SOM)* yang memutuskan dua

proyek yang akan didanai dengan BKCF tahun 2021 tersebut. Proyek pertama merupakan usulan dari Filipina yakni *Developing Land Management Options for Diverse Cacao-based system in Mindanao* dan proyek kedua merupakan usulan dari Indonesia yakni *Renewable Energy Certificate Potential in the Area of BIMP*.

Pada SOM tersebut ROK menyebutkan akan memberikan pendanaan BKCF tahap 2 pada tahun 2022 sebesar 3 Juta USD. Proses *call for proposal* direncanakan pada bulan Agustus. Kemudian, pada bulan November 2022 akan diadakan BIMP-EAGA ROK SOM pada rangkaian PTM BIMP-EAGA di Pontianak untuk memutuskan proyek yang akan dipilih pada BKCF termin 2 tahun 2022.

Triwulan III

- Monitoring pelaksanaan proyek yang didanai BKCF

Pada BKCF termin 1 tahun 2022 terdapat satu proyek yang usulan Indonesia yakni *Renewable Energy Certificate Potential in the Area of BIMP*, proyek tersebut saat ini akan mulai tahap implementasi awal dengan koordinasi antara pengusul dengan instansi terkait di negara BIMP pada pertemuan BIMP-EAGA PEIC ke-9. Setelah pertemuan tersebut masing-masing negara akan berkoordinasi untuk pelaksanaan proyek.

Pada tanggal 3 Agustus hingga 2 September 2022 telah dilaksanakan *call for proposals* BKCF Termin ke-2 dengan pendanaan sebesar 3 Juta USD. Fokus area dari pendanaan BKCF Termin ke-2 masih sama dengan sebelumnya yakni *environment, tourism, and connectivity*. Terdapat 14 proposal proyek yang masuk dari Seknas. Rencananya proyek yang terpilih akan diumumkan pada BIMP-EAGA – ROK SOM dalam rangkaian PTM BIMP-EAGA di Pontianak tanggal 23-26 November 2022.

Triwulan IV

- Penyusunan laporan/pertanggungjawaban proyek yang didanai BKCF
Program BKCF batch pertama alokasi tahun 2021 saat ini masih pada

tahap penandatanganan kontrak, sehingga belum ada pelaksanaan proyek. Sementara untuk program BKCF alokasi tahun 2022 masih sampai pada tahap penetapan proyek terpilih yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak, sehingga belum ada proyek yang didanai program BKCF yang telah selesai.

9. Pelaksanaan IMT-GT *Flagship Projects* dalam IB 2022-2026

Triwulan I

- Mengenai flagship projects ini, telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 7 Februari 2022, dilanjutkan dengan komunikasi lewat surat ke K/L lain. Setelah mendapat masukan, diputuskan bahwa Flagship Projects dari Indonesia berjumlah 6, dengan mengeluarkan Dumai-Melaka dari daftar. Dumai-Melaka akan dimasukkan ke dalam Physical Connectivity Project (PCP)
- Penyusunan rencana aksi pelaksanaan IMT-GT Flagship Project sementara belum terlaksana karena menunggu hasil pembahasan dan famialiarisasi IB yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan *Strategic Planning Meeting* (SPM)

Triwulan II

- Usulan proyek yang masuk berasal dari WG dan Pemerintah Daerah di IMT-GT. Dalam perencanaan *Flagship Projects* kriteria yang dipilih untuk masuk di IB 2022-2026 adalah proyek-proyek *tangible*, konkrit, dan *low hanging fruit*
- Terdapat enam Flagship Project yang tercantum dalam draf IB 2022-2026, yakni *Sei Mangkei Rubber City, North Sumatera; Bintan Halal Industrial Hub, Riau Island; IMT-GT Tourism Village Forum, South Sumatera; IMT-GT Business Centre Implementation, Riau; Integrated Waste Management Facility, North Sumatera; Mutual Recognition of Skill Process Alignment to ASEAN Guiding Principles*
- Terdapat enam Flagship Project yang tercantum dalam draf IB 2022-

2026, yakni *Sei Mangkei Rubber City, North Sumatera; Bintan Halal Industrial Hub, Riau Island; IMT-GT Tourism Village Forum, South Sumatera; IMT-GT Business Centre Implementation, Riau; Integrated Waste Management Facility, North Sumatera; Mutual Recognition of Skill Process Alignment to ASEAN Guiding Principles*

- Masing-masing WG juga telah memasukkan *flagship projects* pada rencana kerja ke depan dalam rangkaian pertemuan *working group SPM IMT-GT* di bulan April hingga Mei 2022
- Implementasi *Flagship Projects* akan dilaksanakan pada tahun 2023 setelah IB 2022-2026 yang akan disahkan pada MM di Phuket, September 2022

Triwulan III

- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Pelaksanaan IMT-GT Flagship Project

Dari 6 *flagship project* dalam *Implementation Blueprint 2022-2026*, salah satu proyek yang sudah dimulai dalam tahap perencanaan yaitu proyek *Integrated Waste Management Facility* di Sumatera Utara. Proyek ini adalah proyek pengelolaan limbah khususnya penanganan limbah berbahaya. Pihak swasta (PT SDLi) telah melakukan beberapa kali koordinasi dan pertemuan baik secara virtual maupun fisik dengan Kementerian KLHK selaku *focal point Working Group on Environment*. Dalam kaitan ini, Kemenko telah mengadakan rapat koordinasi awal pada 21 Juli 2022 untuk mempertemukan PT SDLi dan Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3, Kementerian KLHK. Dalam rapat ini dibahas arahan *Leaders* pada KTT 2021 salah satunya terkait pengembangan kota hijau. Proyek ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada pertengahan 2024.

10. APEC Project di Indonesia

Triwulan I

- APEC Friend of the Chair (FotC) Corporate Law Governance (CLG)
 - Indonesia telah melaporkan Program Kerja APEC FotC CLG dengan judul Enhancing Good Corporate Governance (GCG) assessment criteria for more sustainable practice dan mendapat dukungan dari Ekonomi APEC
 - Indonesia akan menyiapkan kuesioner yang akan disirkulasi ke seluruh Ekonomi APEC sebagai langkah dalam memetakan kondisi GCG assessment yang berlaku di Ekonomi APEC
 - Program Asistensi GRP oleh Amerika Serikat kepada Indonesia dalam kerangka kerja sama APEC
 - Indonesia dan AS telah sepakat akan berfokus pada review penerapan GRP pada 7 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, termasuk diantaranya adalah PP 5/2021

Triwulan II

- FGD Potensi dan Komitmen Indonesia pada Implementasi APEC ODR *Framework* di Indonesia
Project Proposal Capacity Building on the APEC Collaborative Framework on ODR to Improve Cross Border Trade in Indonesia telah disetujui *Program Director & Economic Committee* serta telah diserahkan ke *Project Management Unit* (PMU) untuk direviu.
- FGD Implementasi APEC Project on MSMEs
Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut terkait Proyek dengan Pendanaan APEC pada 23 Mei 2022 bersama konsultan. Hasil rapat antara lain, Progress Report 1 yang dibuat konsultan telah sesuai dengan persyaratan APEC, kuesioner yang disusun telah disirkulasikan kepada Ekonomi APEC, dan konsultan akan melanjutkan penyusunan Progress Report 2.

Triwulan III

- Rapat koordinasi pembahasan implementasi APEC ODR Framework di Indonesia (terkait payung hukum dan provider)

Telah dilakukan *assesment* oleh *APEC Budget and Management Committee (BMC)* dan *Project Overseer* telah menandatangani *Approval of Project Proposal Letter* sehingga *Project* dikonfirmasi mendapat fasilitas pendanaan APEC. *Project* berupa studi *Online Dispute Resolution* di Indonesia dan Penyelenggaraan *Workshop* pada bulan Mei 2023.

Telah dilaksanakan Kickoff Meeting Proyek ODR dengan Pendanaan APEC pada 26 September 2022 bersama calon konsultan. Hasil rapat antara lain membahas pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab antara Kemenko dan calon konsultan. Tindak lanjut atas rapat adalah penyusunan *timeline* dan ToR proyek ODR serta penyelesaian persyaratan administratif pengajuan calon kontraktor.

- Rapat Asistensi GRP oleh Amerika Serikat kepada Indonesia dalam kerangka kerja sama APEC
 - Kemenko Perekonomian melalui Deputi VII telah mengirimkan surat permohonan nomor KSI.04.01/277/D.VII.M.EKON/06/2022 tanggal 29 Juli 2022 kepada Kementerian/Lembaga terkait perihal Rencana Kunjungan Tim Ahli Program Asistensi Teknis *Good Regulatory Practices*
 - Kementerian/Lembaga terkait menanggapi surat tersebut dengan menyampaikan tanggal untuk menerima kunjungan Tim Ahli GRP
 - Tim Ahli GRP telah melakukan kunjungan kepada Kementerian/Lembaga terkait pada 25 Juli s.d. 8 Agustus 2022 dalam rangka memetakan area yang berpotensi mendapat bantuan teknis untuk peningkatan kualitas regulasi di Indonesia
 - Sebagai hasil kunjungan tersebut, pada 30 September 2022 Tim Ahli GRP menyampaikan opsi tindak lanjut untuk program GRP di Indonesia

11. Laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM) pada Proyek “6MW Mini Hydro Power Plant Project in West Pasaman, West Sumatera”

Terlaksana pada tanggal 14 Januari 2022 di PT Optima Tirta Energy, Pasaman, Sumatera Barat. PT Optima Tirta menyampaikan perkembangan pembangunan proyek yang akan berdampak positif mendukung efisiensi energi sehingga mampu mengurangi emisi GRK.

12. Dukungan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional telah membubuhkan paraf koordinasi pada dukungan atas RPerpres tentang Persetujuan Umum antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang KSEITK.

13. Dukungan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional telah membubuhkan paraf koordinasi pada dukungan atas RUU RCEP.

14. Tindak lanjut dari K/L dalam menyampaikan usulan daftar kerja sama potensial

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan rapat koordinasi perihal potensi proyek kerja sama pada tahun 2022 dalam rangka Presidensi G20 Indonesia. Adapun dari rapat tersebut diminta usulan potensi kerja sama yang terdapat pada K/L yang dapat didorong untuk dapat diimplementasikan dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Tujuan dari pengembangan kerja sama yang dapat diimplementasikan adalah mendorong terwujudnya *concrete deliverable* Presidensi G20.

15. Tindak lanjut dari K/L dalam menyampaikan agenda prioritas *Working Group* dan *Engagement Group* serta *pending matters* Presidensi G20 Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada 11 Februari 2022 guna mendapatkan update agenda prioritas dan *pending matters* masing-masing WG dan EG. K/L telah menyampaikan masukan sebagaimana mestinya.

16. Tindak lanjut dari K/L untuk mengusulkan kegiatan *side event*, kegiatan *road to G20 summit*

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada 14 Februari 2022 guna mendapatkan daftar kegiatan *side event* dan *road to G20 Summit* dari masing-masing WG dan WG.

17. Proses Penetapan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Perjanjian AFAS Paket ke-10

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memperoleh penjelasan perkembangan proses pengesahan kesepakatan AFAS 10 pada level nasional dan ASEAN serta menyusun rekomendasi kepada Menko Perekonomian terkait pengesahan AFAS ke-10

18. Laporan Hasil Pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Korea

Pertemuan tersebut membahas dan menyepakati kerja sama ekonomi dalam empat Working Group yaitu perdagangan dan investasi, industri, energi dan sumber daya mineral, dan e-commerce. Bapak Menko Perekonomian bersama dengan Menteri MOTIE menandatangani MoU on Cooperation Regarding Indonesia Special Economic Zones and Korean Free Economic Zones.

19. Endorsement of the Terms of Reference of the Committee of the Whole (CoW)

Pertemuan CoW bertujuan untuk melakukan koordinasi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu lintas sektor pada pilar ekonomi. Selain itu, membahas juga isu-isu yang bersifat cross-cutting dan cross pillar. TOR-CoW diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di bawah pilar ekonomi untuk merealisasikan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dan mendorong implementasi rekomendasi Mid-Term Review of the AEC Blueprint 2025

20. Siaran Pers

Triwulan I

- Siaran Pers perihal Inisiatif Public Private Track 1.5 Perkuat Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Jepang untuk Inovasi dan Ekonomi Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang pada 11 Januari 2022. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia, akses perdagangan kedua Negara, peningkatan kerja sama di kawasan, serta usulan kerja sama baru yaitu Public Private Track 1.5: Japan-Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society. Melalui forum tersebut kedua Negara akan meningkatkan kerja sama dalam rantai pasok regional dan global, pembangunan infrastruktur, ekonomi digital, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan industri berkelanjutan yang merupakan prioritas pembangunan Indonesia.

- Siaran Pers perihal Rangkaian Sherpa Meeting Presidensi G20 Indonesia Mengangkat Keanekaragaman Budaya dan Filosofi Bangsa Indonesia

Penyelenggaraan pertemuan Sherpa pertama dilaksanakan pada 6 - 8 Desember 2021. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 39 negara/organisasi internasional secara hybrid. Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global serta merumuskan aksi-aksi nyata bagi pemulihan ekonomi global. Pertemuan Sherpa berperan dalam mendukung pengambilan keputusan tingkat tinggi pada pertemuan KTT G20.

- Siaran Pers perihal Pemerintah Wujudkan Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sinergi Kepemimpinan Indonesia di G20 dan ASEAN

Dalam proses pencapaian realisasi kinerja indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional. Pada tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara G20 dan dilanjutkan pada kepemimpinan di Forum ASEAN pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi menjadi prioritas

utama G20 dan ASEAN di mana harus dapat merata di seluruh negara di Kawasan. Sinergi dan kolaborasi dari berbagai forum internasional seperti G20 dan ASEAN menjadi semakin penting.

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga Bahas Peningkatan Kerja Sama di Sektor Pertanian dan Apresiasi Agriculture Visa Program dari Pemerintah Australia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Wilayah Utara Australia pada 27 Januari 2022. Pertemuan tersebut membahas berbagai sektor kerja sama pertanian yang mencakup perdagangan sapi dan daging sapi beserta produk susu sapi, gandum, pupuk urea, hingga tawaran Australia terkait Program Visa Pertanian. Selain itu, dibahas juga mengenai mekanisme implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) bidang pertanian. Bapak Menko Perekonomian juga mengajak Australia untuk berpartisipasi dalam *concrete deliverables*.

- Siaran Pers perihal Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-OECD Turut Mendukung Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OECD pada 17 Februari 2022. Kerja sama antara Indonesia dan OECD perlu didorong agar menghasilkan *deliverables* yang konkret, baik dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia maupun dalam upaya pemulihan global pasca pandemi.

- Siaran Pers perihal Presidensi G20 Indonesia Dorong Tercapainya Pemulihan Ekonomi Global yang Berkelanjutan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan Presiden COP26 UK pada 16 Februari 2022. Pertemuan tersebut membahas sinergi COP26 dan G20 dalam upaya menuju net zero emission dan transisi energy serta kerja sama dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Inggris.

- Siaran Pers perihal Sepakati Berbagai Kerja Sama Strategis, Indonesia dan Korea Selatan Saling Dukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea

Selatan pada 22 Februari 2022. Pertemuan membahas dan menyepakati kerja sama dalam berbagai bidang dalam empat *Working Group* yaitu Investasi dan Perdagangan, Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta *e-commerce*.

- Siaran Pers perihal *the 41th ASEAN HLTF-EI*: Indonesia Dorong Upaya Pemulihan dan Persiapan Menuju ASEAN Pasca 2025

Pertemuan The 41th Meeting of the High-Level Task Force on Economic Integration secara luring pada 2 Maret 2022. Pertemuan membahas terkait Priority Economic Deliverables (PED, mendukung akselerasi implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) terutama mendorong operasionalisasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF), implementasi Consolidated Strategy on the Fourth Industrial Revolution for ASEAN. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dalam meningkatkan keterlibatan dan sinergi inisiatif ASEAN dan G20 dalam pemulihan ekonomi, transformasi digital, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

- Siaran Pers perihal Bahas Pengembangan KIK hingga EBT, Menteri Pembangunan Nasional Singapura Kunjungi Menko Airlangga
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan Menteri Pembangunan Nasional, Singapura. Pertemuan membahas tentang perkembangan pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK), kerja sama dalam sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pemanfaatan teknologi suplai air bersih.

Triwulan II

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga Sambut Baik Memorandum of Understanding Kerja Sama Ekonomi Digital dengan Republik Rakyat Tiongkok

Pada 12 April 2022, Menko Airlangga menerima kunjungan Duta Besar RRT. Topik utama pertemuan tersebut adalah pengembangan kerja sama antara kedua negara dan diskusi terkait penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, Bapak Menko juga menyambut

baik MoU kerja sama ekonomi digital yang juga sejalan dengan agenda utama Presidensi G20 Indonesia.

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga: Forum Public Private Dialog Track 1.5 Perluas Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Jepang

Pada 25 April 2022 telah diselenggarakan pertemuan antara Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Jepang melalui Forum Public Private Dialog Track 1.5 Indonesia-Jepang. Forum tersebut dibentuk untuk membahas berbagai proyek kerja sama konkret yang berorientasi pada kebutuhan, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan guna mewujudkan transformasi ekonomi.

- Siaran Pers perihal Pertemuan Menko Perekonomian dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia

Pada 12 Mei 2022, Menko Perekonomian bertemu dengan Dubes Jerman secara virtual. Pertemuan tersebut membahas dan mendiskusikan terkait upaya penguatan dan peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, persiapan Indonesia sebagai Partner Country Hannover Messe 2023 serta sinergi prioritas Presidensi G20 Indonesia dan Presidensi G7 Jerman.

- Siaran Pers perihal Pertemuan Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan Singapura

Pada 18 Mei 2022, Menko Perekonomian menerima kunjungan Menkeu Singapura. Pertemuan tersebut membahas terkait situasi pandemi Covid-19, upaya percepatan pembangunan dan investasi di KEK Kendal serta tantangan dari kondisi geopolitik yang terdampak perang Rusia dan Ukraina. Selain itu, membahas juga rencana kunjungan Bapak Menko untuk menghadiri Asia Tech Singapore (ATxSG).

- Siaran Pers perihal Rangkaian Pertemuan World Economic Forum

Pada tanggal 22-26 Mei 2022, Menko Perekonomian menghadiri pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Selain mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, Menko Perekonomian juga melakukan pertemuan bilateral antara lain dengan Ratu Belanda, Perdana Menteri Belanda, Menteri Ekonomi dan Perencanaan Saudi Arabia, Presiden

WEF, dan Direktur Eksekutif International Energy Agency serta pertemuan dengan beberapa pimpinan perusahaan guna pengembangan dan peningkatan kerja sama.

- Siaran Pers perihal Menghadiri Acara Opening Ceremony Pameran Hannover Messe 2022

Pada tanggal 29 Mei 2022, Menko Perekonomian melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Kanselir/Menteri Ekonomi dan Iklim Jerman. Pada pertemuan tersebut kedua Menteri sepakat untuk berkolaborasi dalam mendorong transisi energi dan langkah climate mitigation serta energy transition. Selain itu, disepakati juga untuk mendorong pengembangan infrastruktur teknologi digital.

- Siaran Pers perihal Rangkaian Pertemuan Asia Tech x Singapore

Pada tanggal 31 Mei-1 Juni, Menko Perekonomian menghadiri pertemuan Asia Tech X Summit di Singapura. Pertemuan tersebut. Selain mengikuti rangkaian pertemuan tersebut, Bapak Menko juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, serta Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Menteri Transportasi.

- Siaran Pers perihal Ukraina Apresiasi Tinggi Upaya Pemerintah Indonesia Turut Mendorong Penyelesaian Konflik dan Membantu Penanganan Dampak Konflik

Pada 7 Juni 2022, Menko Perekonomian menerima kunjungan Duta Besar Ukraina. Pertemuan tersebut membahas antara lain terkait konflik dan dampaknya.

- Siaran Pers perihal Indonesia dan Bosnia Eratkan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

Pada 13 Juni 2022, Menko Perekonomian bertemu dengan Duta Besar Bosnia dan Herzegovina. Pertemuan tersebut membahas terkait kerja sama ekonomi kedua negara. Bapak Menko mendukung untuk meningkatkan kerja sama di sektor industri pertahanan, business-to-business, hingga kerja sama hospitality. Selain itu dibahas juga terkait dengan kondisi terkini dan dampak konflik di Ukraina.

- **Siaran Pers perihal Indonesia Menjadi Mitra Strategis Jerman dalam Penyelesaian Berbagai Isu dan Tantangan Global**
Pada 16 Juni 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan Delegasi Bisnis Jerman yang dipimpin oleh State Secretary Kementerian Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan Roundtable Business Meeting Indonesia-Jerman di Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0. Pertemuan tersebut mendiskusikan potensi kerja sama yang mengerucut pada tiga isu yakni bidang digitalisasi, infrastruktur, dan keberlanjutan.
- **Siaran Pers perihal Akselerasi Pemulihan dan Pembangunan Ekonomi Kawasan, BIMP-EAGA Lakukan Kerja Sama dengan Republik Korea**
Pada 17 Juni 2022 telah diselenggarakan BIMP-EAGA dengan Republic of Korea Senior Officials Meeting (SOM). Pertemuan tersebut membahas mengenai komitmen Pemerintah Korea untuk mendukung pembangunan kawasan dalam bentuk hibah pendanaan.
- **Siaran Pers perihal Tidak Hanya Terkesan dengan Presidensi G20 Indonesia, Direktur Eksekutif Global Fund Juga Jajagi Peluang Kerja Sama saat Bertemu Menko Airlangga**
Pada 23 Juni 2022, Menko Perekonomian menerima kunjungan Direktur Eksekutif The Global Fund. Bapak Menko menyampaikan apresiasi karena dukungan dan bantuan The Global Fund. Selain itu disampaikan juga beberapa peluang kolaborasi yakni studi proyek transformasi digital kesehatan, mekanisme pendanaan kesehatan, dan transformasi pada unit pelayanan kesehatan, serta research and development pada sistem kesehatan di Indonesia.
- **Siaran Pers perihal Beragam Isu Dibahas dalam Pertemuan Menko Airlangga dengan Sekretaris Eksekutif UNESCAP, termasuk Penanganan Krisis Global**
Pada 22 Juni 2022, Menko Perekonomian bertemu dengan Sekretaris Eksekutif UNESCAP. Pertemuan membahas peran Indonesia pada GCRG, potensi ekonomi digital, Presidensi G20 Indonesia, dan program Karta Prakerja.

Triwulan III

- Siaran Pers perihal Pertemuan Ketiga Sherpa G20 Selesai, Pembahasan Leaders' Declaration Berjalan Lancar, Semua Saling Mendukung untuk Solusi Permasalahan Dunia

Pertemuan Sherpa G20 ke-3 untuk membahas rancangan G20 Leaders' Declaration telah selesai diselenggarakan pada 27-29 September 2022 di Yogyakarta. Leaders' Declaration merupakan komitmen dari para Pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19. Rancangan tersebut berisikan substansi pembahasan prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital, dan Transisi Energi serta isu ketahanan pangan yang menjadi isu global saat ini. Pertemuan juga mengendorse concrete deliverables, yaitu proyek, program, atau inisiatif sebagai manfaat nyata dalam bentuk konkret.

- Siaran Pers perihal Pertemuan Ketiga Sherpa G20 Berhasil Membahas Substansi Leaders' Declaration, Dilanjutkan dengan Pertemuan Intersesi Pada pertemuan Sherpa G20 ke-3, semua delegasi Sherpa berkontribusi untuk mencapai konsensus bersama dalam Leaders' Declaration. Sebagian besar substansi yang sudah dipahami oleh Sherpa G20 akan dilanjutkan pembahasan yang lebih teknis secara virtual untuk menyepakati concrete deliverables.
- Siaran Pers perihal Pertemuan Sherpa G20 di Yogyakarta, Menyiapkan Leaders' Declaration untuk Menjadi Rekomendasi dan Solusi Berbagai Permasalahan Dunia

Pertemuan Sherpa G20 ke-3 berfokus pada untuk penyiapan konsep Leaders' Declaration yang akan dibawa dan ditetapkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan dalam KTT G20. Sherpa Track membahas tantangan global dan berbagai isu ekonomi (non-finansial) untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi atas agenda dan isu prioritas G20. Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memimpin negara maju dan berkembang dalam dalam pembahasan berbagai isu dan proses pemulihan ekonomi global. Presidensi G20 Indonesia juga menunjukkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di forum global, memperkuat citra positif, dan

membangun kepercayaan internasional terhadap perekonomian nasional, menjadi sarana *showcasing* atas kemajuan pembangunan Indonesia serta pelaksanaan reformasi struktural, dan meningkatkan daya tarik investasi.

- Sherpa G20 Menerima Dukungan Penuh dari UI, Mulai dari Penyerahan *Policy Brief* dan Penggunaan Bus Listrik Merah Putih

Universitas Indonesia merupakan salah satu mitra utama Kemenko Perekonomian pada Presidensi G20 Indonesia telah melaksanakan sejumlah kegiatan bersama, mulai dari program magang (*internship*), pendirian Pusat Kerja Sama Ekonomi Multilateral, G20 Study Center, pengerahan para Pakar untuk Working Groups dan Engagement Groups, pembuatan rekomendasi kebijakan, sampai dengan penyelenggaraan Konferensi Nasional dan Internasional. *Policy brief* ini adalah bagian pemikiran dari para ilmuwan dan akademisi, supaya dapat dimanfaatkan untuk memperkaya hasil konkret Presidensi G20. Adapun total naskah yang dikompilasi sebanyak 40 *policy brief* mencakup ketiga pilar tema utama Presidensi G20, yang terdiri dari 11 *policy brief* dengan topik Arsitektur Kesehatan Global, 15 *policy brief* untuk topik Transformasi Digital, 12 *policy brief* untuk topik Transisi Energi, dan 2 *policy brief* untuk *cross-cutting issues*.

- Siaran Pers perihal Tingkatkan Kerja Sama Konkrit Industri yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan dengan Indonesia, Afrika Selatan Dorong Manfaat Besar bagi Kedua Negara

Menko Perekonomian bertemu dengan Minister of Trade, Industry, and Competition Afrika Selatan pada 22 September 2022 di sela-sela pertemuan G20 Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting. Pertemuan tersebut menjajaki peluang yang dapat dikerjasamakan. Selain membahas kerja sama energi dan pertambangan, disinggung juga tentang potensi kerja sama halal dan industri otomotif berserta komponennya. Kedua pihak sepakat untuk berbagai pengalaman dan menciptakan peluang kerja sama serta melanjutkan komunikasi secara reguler. Dilakukan juga *work with local industry* agar tercipta nilai investasi yang seimbang.

- Siaran Pers perihal Dorong Percepatan Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA, untuk Meningkatkan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Uni Eropa
Menko Perekonomian bertemu dengan Executive Vice-President Commissioner for Trade, Valdis Dombrovskis pada 22 September 2022 di sela-sela pertemuan G20 Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting. Kedua pihak sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pertemuan tersebut juga membahas mengenai proposal kebijakan Uni Eropa yang diterapkan melalui Green Deal Strategy, khususnya menyangkut Deforestation Free Supply Chain (DFSC), proses sengketa dagang di WTO dan Uni Eropa, Neraca Komoditas, dan Halal Certification.
- Siaran Pers perihal Menko Airlangga Bertemu UNIDO, Mendorong Peningkatan Kinerja Sektor Industri untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Dunia
Menko Perekonomian bertemu dengan Direktur Jenderal UNIDO (United Nations on Industrial Development Organization) Mr. Gerd Muller di sela-sela pertemuan G20 Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting. kerja sama Indonesia – UNIDO Country Programme (IUCP) fokus pada empat area utama yakni penguatan akses pasar dan industrial competitiveness, energi bersih dan berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan penguatan kerja sama dengan fokus kepada inovasi, digitalisasi dan industry 4.0.
- Siaran Pers perihal Peran Strategis Indonesia, Menjadi Kunci untuk Menyelesaikan Permasalahan Global dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Menko Perekonomian bertemu dengan U.S Trade Representative, Ambassador Katherine Tai pada 22 September 2022 di sela-sela pertemuan G20 Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk terus mendorong upaya peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia - Amerika Serikat, serta komitmen untuk terus mendorong peningkatan kerjasama pada tataran Indo-Pacific melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Kerangka kerja sama IPEF dinilai dapat

menjadi respon yang tepat dalam meng-address kondisi dan dinamika global saat ini, dimana semua negara harus mengedepankan kerja sama yang lebih erat di dalam menciptakan keseimbangan, kemakmuran, dan pembangunan yang berkeadilan, terutama di kawasan Indo-Pacific. Dalam kesempatan ini juga dibahas mengenai peluang kerja sama Indonesia-Amerika Serikat di sektor industri, khususnya yang terkait dengan industri Semikonduktor, dan juga perkembangan penyelesaian beberapa isu sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat di WTO (DS 478), serta perlunya tetap mendorong skema kerjasama bilateral Indonesia – AS dan juga kesepakatan agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas GSP dari Amerika Serikat.

- Siaran Pers perihal Revitalisasi Industri Pariwisata dan Pembangunan Kota Berkelanjutan Menjadi Topik Ministerial Retreat IMT-GT 2022
Pertemuan Ministerial Retreat dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-28 berlangsung pada 15 September 2022 di Phuket, Thailand. Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan beberapa prioritas pemulihan sektor pariwisata di antaranya mengembalikan kepercayaan turis, pengurangan ketidakpastian serta meningkatkan informasi dan komunikasi, restorasi konektivitas, infrastruktur dan kapasitas jasa pariwisata. Kemudian, memberi dukungan kepada dunia usaha pariwisata, terutama UMKM dan masyarakat pelaku pariwisata agar dapat beradaptasi dan *survive*, terutama melalui adaptasi teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata yang lebih *resilient* dan *sustainable*.
- Siaran Pers perihal Lewat Kerja Sama IMT-GT, Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Terus Ditingkatkan
Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IMT-GT telah dilaksanakan pada 16 September 2022. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri berdiskusi secara mendalam tentang kemajuan implementasi program Kerja Sama Sub-Kawasan IMT-GT serta arah kerja sama ke depan untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Program IMT-GT antara lain berhubungan dengan perkembangan pariwisata dan perdagangan, meningkatkan investasi, serta mengatasi pengangguran

setelah masa pandemi Covid-19. Termasuk juga Proyek Konektivitas Prioritas (PCPs) yang merupakan proyek-proyek prioritas untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek ini meliputi jalan, pelabuhan, bandara maupun *Information and Communication Technology* (ICT). Para Menteri sepakat untuk mengesahkan beberapa kesepakatan, yaitu Dokumen Cetak Biru IMT-GT 2022-2026, Pelaksanaan peringatan 30 tahun Kerja Sama IMT-GT di 2023, dan IMT-GT Visit Year 2023-2025.

- Siaran Pers perihal Siaran Pers perihal Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan India, Sepakat Mendorong Partisipasi di IPEF

Menko Perekonomian bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Republik India Piyush Goyal di Los Angeles setelah penutupan IPEF MM. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Piyush mengharapkan dukungan Indonesia dalam berbagai kerjasama ekonomi, misalnya kelapa sawit, perpajakan, daging, beras, industri otomotif, impor ban dan juga batu bara. Pemerintah Indonesia tengah menggenjot sejumlah kerjasama bilateral untuk meningkatkan volume perdagangan dan juga mempercepat Pemulihan ekonomi. Selain itu, juga dibahas mengenai pengembangan kerjasama di bidang farmasi dengan kemungkinan India membangun manufaktur di Indonesia.

- Siaran Pers perihal IPEF sebagai Jalan Baru dalam Peningkatan Kerja Sama Ekonomi untuk Mencapai Kemakmuran dan Keseimbangan di Kawasan Indo-Pasifik

Menko Perekonomian memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat menteri di forum IPEF (*Indo-Pacific Economic Framework*) di Los Angeles, Amerika Serikat yang diselenggarakan 2 hari mulai tanggal 8 hingga 9 September 2022. Partisipasi Indonesia dalam forum ini sangat penting karena Indonesia menginginkan dukungan negara mitra dalam Presidensi G20 dan keketuaan ASEAN 2023. Negosiasi dalam forum internasional seperti ini sangatlah penting terutama ketika dunia saat ini dihadapkan pada krisis yang sangat kompleks. Kolaborasi seluruh negara dibutuhkan agar tercipta kerja sama simbiosis mutualisme yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga keberlanjutan ekonomi yang lebih bersih (*sustainable development*).

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga Bertemu Secretary Raimondo, Perkuat Kerja Sama IPEF dan Mendorong Perdagangan, Investasi, dan Industri, Khususnya Industri Semi Konduktor

Menko Perekonomian bertemu dengan Gina Raimondo, *U.S. Secretary of Commerce* pada 8 September 2022 di sela-sela PTM IPEF. Pertemuan tersebut membahas berbagai perkembangan penting dalam perundingan IPEF dan upaya untuk meningkatkan kerja sama dan investasi AS ke Indonesia.

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga Bertemu Menteri Jepang: Tahun 2023 Momentum Terbaik Saling Mendukung, dalam Forum G20 maupun IPEF

Menko Perekonomian bertemu dengan Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Nishimura Yasutoshi di sela-sela agenda PTM IPEF. Kedua Menteri membahas berbagai isu, termasuk didalamnya keikutsertaan dalam pilar-pilar yang menjadi fokus pembahasan di pertemuan menteri IPEF. Secara terpisah, Menko Perekonomian juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Ogushi Masaki. Pertemuan keduanya berlanjut dengan diskusi terkait kebutuhan investasi di sejumlah sector.

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga Jelaskan Perkembangan Penanganan PMK dan Upaya Kerja Sama dalam Pertemuan dengan Menteri Selandia Baru

Menko Perekonomian bertemu dengan Damien O'Connor, *Minister of Agriculture, Trade & Export Growth, Land Information, Biosecurity and Rural Communities* pada 8 September 2022. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal antara lain harapan Pemerintah Indonesia agar Selandia Baru dapat mendukung kesuksesan Presidensi G20 Indonesia dan juga keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan, perkembangan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia, mendorong kerjasama dengan pemerintah Selandia Baru untuk pendidikan *breeding* sapi dan domba di Indonesia, pengembangan energi bersih atau *clean energy*, dan perkembangan atau update perjanjian ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga Bertemu USTR untuk Penguatan Kerja Sama Ekonomi RI-Amerika Serikat dan Mengawali IPEF Ministerial Meeting

Menko Perekonomian bertemu dengan USTR pada 7 September 2022 di sela-sela PTM IPEF. Pertemuan bilateral antara lain membahas partisipasi Indonesia dalam *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF), juga membahas penutupan kasus sengketa dagang (*Dispute Settlement*) WTO DS 478, dukungan AS untuk Deklarasi pada KTT G20, peran Indonesia sebagai Presidensi G20, dan perkembangan pengesahan perpanjangan GSP di Kongres AS.

- Siaran Pers perihal Jawab Tantangan Dinamika Global Pasca 2025, ASEAN Susun Core Element Pilar Ekonomi dalam Pertemuan HLTF-EI ke-42

Pada tanggal 18-19 Agustus 2022 telah diselenggarakan pertemuan *the 42nd High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration* (HLTF-EI) di Kamboja. Forum tersebut menyepakati prinsip dari *core element* pilar ekonomi dalam agenda Visi Pasca 2025 harus komprehensif namun ringkas, strategis, bermakna, menawarkan nilai tambah dan peningkatan nyata dengan tetap mempertimbangkan megatren dan tantangan baru. *ASEAN Comprehensive Recovery Framework* (ACRF) sebagai salah satu exit strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19 hingga akhir Juli 2022 telah terimplementasi sebanyak 92 inisiatif, 91 berstatus on going dan hanya 4 inisiatif yang belum berjalan.

- Siaran Pers perihal Gelar Konferensi Pers dari Singapura, Menko Airlangga Sampaikan Persetujuan RCEP dan Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Dalam Konferensi Pers yang digelar secara virtual di Singapura pada 30 Agustus 2022, Bapak Menko menyampaikan bahwa inisiatif yang disampaikan Indonesia dalam keketuaan ASEAN tahun 2011 yakni persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah disetujui oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 30 Agustus 2022. Skema RCEP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas, yang mencakup 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan

Selandia Baru. Persetujuan RCEP diperkirakan dapat meningkatkan PDB Nasional sebesar 0,07% di tahun 2040 dengan kenaikan ekspor mencapai USD5,01 miliar dan surplus perdagangan juga bisa diperkirakan naik 2,5 kali lipat. Selain itu, persetujuan RCEP membuka akses pasar baru terutama di sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, otomotif dan elektronik, makanan dan minuman, hingga sektor bahan kimia dan mesin di pasar RRT, Jepang, dan Korea Selatan.

- Siaran Pers perihal Upaya Indonesia dalam Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi dan Menghadapi Krisis Global Dapatkan Dukungan dari Pelaku Usaha Internasional

Pada 25 Agustus 2022 telah diselenggarakan pertemuan antara Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan United States ASEAN Business Council (US-ABC). Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yakni Presidensi G20 tahun 2022, ASEAN Chairmanship 2023, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, rantai pasok global, SDM untuk mendukung TIK, dan keuangan inklusif.

- Siaran Pers perihal G20 Skills Strategy, Digital Economy, hingga Pemberdayaan Perempuan Tak Luput dari Pembahasan dalam Sesi Kedua 2nd Sherpa Meeting

Digital Economy menjadi salah satu poin pembahasan dalam Pertemuan Sherpa ke-2 Presidensi G20 Indonesia pada hari kedua bertempat di Hotel Meruorah, Labuan Bajo pada 11 Juli 2022. Selain itu, para Sherpa G20 mendapatkan *update* perkembangan pembahasan di tingkat *Working Group* yang meliputi *Education, Employment, Trade, Investment and Industry*, dan *Empower*.

- Siaran Pers perihal *Arsitektur Kesehatan Global Menjadi Bahasan Pembuka dalam Pertemuan Sherpa ke-2 Presidensi G20 Indonesia*
Arsitektur kesehatan global menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam Sesi Pertama Pertemuan Sherpa ke-2 Presidensi G20 Indonesia di Labuan Bajo pada 11 Juli 2022. Selain itu, dibahas juga sektor pertanian, pariwisata.

- **Siaran Pers perihal Pemerintah Dorong Transisi Energi yang Transparan dan Kedepankan Masyarakat Rentan**
Pembahasan perkembangan hasil musyawarah *Working Group* dari para Sherpa G20 diteruskan pada sesi ketiga yang bertemakan Transisi Energi pada 11 Juli 2022. Para Sherpa G20 dalam Energy Transitions WG turut mempertegas komitmen mereka untuk menyiapkan dan mengimplementasikan transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mereka juga sedang merancang aksi nyata yang antara lain adalah Aksesibilitas energi yang universal, terutama untuk negara-negara kepulauan; Memaksimalkan teknologi yang *smart and clean* serta pembentukan ekosistem inovasi; dan Memfasilitasi investasi di bidang energi, terutama yang akan membantu memitigasi dampak perubahan iklim.
- **Siaran Pers perihal Gunakan Concrete Deliverables, Presidensi G20 Indonesia Dorong Solusi Berupa Aksi Nyata Bagi Harapan Hidup yang Lebih Baik**
Concrete deliverables menjadi pembahasan keempat dari Pertemuan Sherpa ke-2, yang diadakan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 11 Juli 2022. Poin pembahasan berkisar kepada masing-masing kelompok kerja dan inisiatif pada Sherpa Track, serta mengenai langkah selanjutnya untuk memastikan pencapaian objektif. *Concrete deliverables* berupa proyek-proyek yang telah dijalankan negara-negara anggota G20 baik secara nasional, bilateral atau multilateral, yang sekiranya dapat diimplementasikan negara lainnya sebagai solusi untuk suatu permasalahan yang serupa. Presidensi G20 Indonesia bertindak sebagai kurator dari proposal yang diberikan masing-masing negara dan membaginya dalam kategori yang dikerjasamakan melalui forum G20 atau multilateral, maupun kategori yang akan dilakukan melalui kerja sama bilateral.
- **Siaran Pers perihal Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Industri Indonesia Mendapat Apresiasi Positif dalam Pertemuan antara Menko Perekonomian dengan AmCham dan Pelaku Usaha AS**
Menko Perekonomian melakukan pertemuan virtual dengan American Chambers of Commerce in Indonesia (AmCham) pada 20 Juli 2022.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas isu-isu yang cukup luas antara lain mencakup perluasan iklim investasi dan dukungan partisipasi pelaku usaha termasuk pihak swasta AS dalam membantu pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing industri, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja, kebijakan Pemerintah terkait Energi Baru dan Terbarukan (EBT), potensi ekonomi digital Indonesia, Rencana Kerja Pemerintah untuk 2 tahun ke depan, dan Presidensi G20 Indonesia yang dikaitkan dengan peran Indonesia pada *Global Crisis Response Group* (GCRG).

- Siaran Pers perihal Dikunjungi Petinggi Perusahaan Dana Investasi Infrastruktur JOIN dari Jepang, Menko Airlangga Ajak Kembangkan Sistem Smart City di Ibu Kota Nusantara

Menko Perekonomian menerima kunjungan *Member of Board of Directors Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development* (JOIN) Mr. Takuma Hatano pada 21 Juli 2022. Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga mengajak JOIN untuk terlibat aktif dalam mendukung pengembangan *smart city*, sektor energi terbarukan, dan ekonomi digital di Indonesia.

- Siaran Pers perihal Pertemuan dengan METI Jepang, Menko Airlangga Dorong Kepentingan Indonesia dalam Penyelesaian IJEPA dan Kerangka Kerja Sama IPEF dan RCEP

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memulai rangkaian kunjungan kerja di Tokyo, dengan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda. Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas terkait perkembangan kerja sama dalam Forum *Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative*. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (*capacity building*), teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau. Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST.

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga: JBIC Menjadikan Indonesia sebagai Prioritas Utama dan Tertarik untuk Masuk ke Sektor Kesehatan dan Pangan

Menko Perekonomian bertemu dengan Gubernur Japan International Cooperation (JBIC) pada 25 Juli 2022. Pertemuan tersebut berfokus pada berbagai proyek JBIC yang ada di Indonesia. Menko Perekonomian berharap agar JBIC juga mendorong investasi di sector lain yang sangat potensial, yaitu sector kesehatan dan pangan.

- Siaran Pers perihal Bertemu Pimpinan LDP, Menko Airlangga Bahas Banyak Hal, Mulai dari Pentingnya Dukungan Partai, Reviu IJEPA, sampai Akses Pasar Produk Perikanan dan Pertanian Indonesia ke Jepang

Menko Perekonomian bertemu secara terbatas dengan Chairman Partai Liberal Demokrat Jepang pada 26 Juli 2022. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting, antara lain dari segi politik terkait kebijakan yang akan berpihak pada investasi dan perdagangan antara Jepang dan Indonesia, berbagai skema kerja sama bilateral dan multilateral, baik mengenai IJEPA, RCEP, maupun IPEF, serta Keketuaan Indonesia bersamaan dengan 50 tahun persahabatan ASEAN-Jepang pada tahun 2023.

- Siaran Pers perihal Bertemu Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF) Jepang, Menko Airlangga Meminta Akses Pasar dan Menyelesaikan Kendala Ekspor Produk Perikanan dan Pertanian Indonesia ke Jepang.

Menko Perekonomian bertemu dengan Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Jepang. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu terutama terkait dengan masih adanya kendala dalam ekspor produk perikanan dan pertanian Indonesia ke Jepang, serta penyelesaian isu terkait ekspor produk Jepang ke Indonesia.

- Siaran Pers perihal Paparkan Prospek Ekonomi Indonesia dalam US-Indonesia Investment Summit 2022, Menko Airlangga Tekankan Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha

Menko Perekonomian mewakili Presiden Joko Widodo dalam memberikan keynote speech pada acara *US-Indonesia Investment*

Summit 2022, Selasa (6/12). Salah satu poin yang disampaikan bahwa pada tahun 2023, Indonesia juga akan menindaklanjuti berbagai komitmen pendanaan bagi transisi energi dan proyek infrastruktur yang merupakan hasil dari KTT G20 Indonesia. Komitmen pendanaan tersebut yakni *Just Energy Transition Partnership (JETP)*, *Asia Zero Emission Community (AZEC)*, dan *Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII)*.

- Siaran Pers perihal Menerima Kunjungan Kerja Presiden JAPINDA Yasuo Fukuda, Menko Airlangga Bahas Mitigasi Perubahan Iklim hingga Pengembangan Smart City

Menko Perekonomian menerima kunjungan kerja Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA) Yasuo Fukuda yang juga Perdana Menteri Jepang tahun 2007-2008, di Kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat (2/12). Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan mengenai kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang, serta isu terkait pengurangan emisi karbon, konservasi lingkungan, kerja sama pengembangan *electric vehicle* (EV), serta kerja sama bidang infrastruktur.

- Siaran Pers perihal Para Menteri Negara Partisipan IPEF Tekankan Pentingnya *Tangible Benefit* dalam Skema *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity*

Menko Perekonomian didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menghadiri pertemuan virtual dengan para Menteri negara partisipan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity pada Selasa (20/12). Pertemuan dipimpin oleh US Secretary of Commerce Gina Raimondo. Pertemuan membahas usulan dan ekspektasi yang diharapkan oleh negara-negara partisipan IPEF guna memperoleh *tangible benefit* dalam skema IPEF.

- Siaran Pers perihal Hadapi Tantangan Perekonomian Global, Pemerintah Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Tata Kelola Ekonomi hingga 2026

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional bersama dengan *Deputy Secretary for Southeast Asia and Global Partners Group Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* Australia

menandatangani *Exchange of Letters Program* Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang akan berlaku hingga 2026 pada 9 Desember 2022. Perjanjian ini ke depannya juga akan memperluas area cakupan kerja sama di antara kedua negara.

“Selain penyediaan tenaga ahli dan konsultasi rutin, kedua negara juga dapat bertukar pengalaman mengenai reformasi kebijakan Pemerintah kedua negara melalui program Prospera.

- Siaran Pers perihal Mendampingi Presiden Joko Widodo, Menko Airlangga Hadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45 Tahun ASEAN – Uni Eropa

ASEAN – EU Commemorative Summit, KTT Peringatan 45 tahun hubungan ASEAN – Uni Eropa telah diselenggarakan di Brussels, Belgia, Rabu (14/12). Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya kemitraan ASEAN dan Uni Eropa (UE) yang didasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Dengan pembangunan yang inklusif dan bernilai tambah akan mendukung ketahanan ekonomi dunia yang berkeadilan. Kemitraan yang dijalin antar dua organisasi internasional terbesar di dunia ini juga harus membangun masa depan yang hijau dan berkelanjutan. Indonesia juga mengharapkan dukungan dari Uni Eropa untuk agenda prioritas Ketetuaan Indonesia ASEAN 2023. Indonesia juga mengharapkan dukungan dari Uni Eropa untuk agenda prioritas Ketetuaan Indonesia ASEAN 2023.

- Siaran Pers perihal Indonesia dan Uni Eropa Akan Terus Mendorong Percepatan Penyelesaian Perundingan *Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement* (IEU CEPA)

Menko Perekonomian melakukan pertemuan bilateral dengan *Executive Vice President of the European Commission* Mr. Valdis Dombrovskis pada Selasa (13/12). Pertemuan tersebut membahas upaya mendorong percepatan penyelesaian Indonesia-EU CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Selain itu, dibahas juga terkait dengan permasalahan sengketa dagang, peningkatan kerja sama di

bidang energi antara kedua pihak melalui program *Just Energy Transition Partnership* (JETP).

- Siaran Pers perihal Keketuaan Indonesia di ASEAN dan Presidensi Swedia di Uni Eropa 2023: Bersama Membangun dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Kedua Kawasan

Menko Perekonomian melakukan pertemuan dengan *State Secretary for Foreign Trade* Kementerian Luar Negeri Swedia, H.E. Mr. Håkan Jevrell di sela – sela rangkaian acara KTT Peringatan ASEAN – EU. Salah satu isu yang didiskusikan adalah terkait peningkatan kerja sama bidang ekonomi antara Indonesia dan Swedia. Lebih lanjut, Swedia mendukung percepatan penyelesaian perundingan Indonesia – EU *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) sesegera mungkin. Indonesia juga mendorong Swedia untuk bekerjasama dalam upaya pengurangan emisi melalui pemanfaatan energi terbarukan, misalnya melalui proyek pengembangan *green hydrogen* dan *green ammonia*.

- Siaran Pers perihal Tindak Lanjuti G20 Bali Leaders Declaration, Indonesia – Uni Eropa bahas Kerja Sama Infrastruktur Global Energi Terbarukan dan Berkelanjutan

Menko Perekonomian melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa Ms. Jutta Urpilainen untuk kerja sama internasional. Pemerintah Indonesia saat ini dalam tahap persiapan untuk implementasi kesepakatan JETP dengan pemangku kepentingan terkait, antara lain melalui pembentukan struktur kelembagaan internal. Sedangkan Uni Eropa akan memobilisasi dana sebesar 300 miliar Euro dalam rangka mempersempit kesenjangan investasi dalam pembangunan infrastruktur global di beberapa kawasan seperti Afrika, Amerika Latin dan Asia Tengah. Uni Eropa juga siap bekerjasama untuk sejumlah proyek dengan negara kawasan ASEAN, tidak terkecuali Indonesia terutama pada isu perubahan iklim dan transisi energi hijau (energi terbarukan). Selain itu juga disampaikan potensi untuk investasi di bidang ekonomi digital, dengan telah disiapkannya beberapa Kawasan Ekonomi Khusus untuk pengembangan ekonomi digital, khususnya di

Batam yang akan bisa didorong untuk menjadi pusat bagi kawasan regional ASEAN.

- Siaran Pers perihal CMA/CGM Group Sampaikan Rencana Investasi dalam Proyek Infrastruktur Kepelabuhanan di Indonesia

Menko Perekonomian menerima *Vice-President of Public Affairs* dari CMA/ CGM Group Mr. Patrice Bergamini sebagai bagian dari rangkaian acara KTT Peringatan ASEAN – EU. VP Bergamini ingin menjajaki kemungkinan untuk melakukan kerja sama investasi dalam rencana pembangunan Pelabuhan *New Tanjung Priok* di Jakarta. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan kami terhadap strategi Indo-Pasifik dengan berpartisipasi dalam berbagai proyek konkret khususnya infrastruktur kepelabuhanan di Indonesia.

- Siaran Pers perihal Bertemu Menko Airlangga, FESI (*Federation of European Sporting Goods*) Mengharapkan Perundingan IEU – CEPA Segera Diselesaikan

Menko Perekonomian melakukan pertemuan dengan FESI (*Federation of European Sporting Goods Industry*), Mr. Manuel Pauser, *Vice President* FESI yang juga merupakan *Vice President Government and Community Affairs* dari Adidas. FESI menyampaikan harapan dan dukungan agar perundingan *Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement* (IEU – CEPA) bisa segera selesai dan menghasilkan kesepakatan. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa IEU CEPA adalah kunci dalam mendorong kerjasama perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi lainnya antara Indonesia dengan Uni Eropa. Indonesia menyampaikan terima kasih atas dukungan FESI untuk dapat tercapainya penyelesaian perundingan. Proses perundingan memang berjalan lebih lama dibandingkan dengan rencana semula. Harapannya perundingan akan selesai dalam 4 (empat) putaran lagi, atau sebelum tahun 2024. Indonesia mengharapkan dukungan dari para pelaku usaha di Uni Eropa agar proses perundingan bisa diselesaikan dengan cepat.

- Siaran Pers perihal Pertemuan Sherpa Pertama Presidensi G20 India Telah Digelar, Presidensi India menuju *One Earth, One Family and One Future* Dimulai

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi selaku *Co-Sherpa* G20 Indonesia hadir pada pertemuan Sherpa pertama Presidensi G20 India pada 4-7 Desember 2022. Seperti pada KTT G20 di Bali, fokus India, terutama pada transformasi digital, adalah kunci masa depan ekonomi global dan percepatan pemulihan global. Mengenai isu terkini dan kepentingan nasional, Indonesia juga mendukung pembentukan *working group* baru dalam Presidensi G20 India, contohnya *Working Group* Ketahanan dan Pengurangan Risiko Bencana, *Working Group* Budaya dan Startup 20. Inisiatif Indonesia selama Presidensi G20 Indonesia juga berlanjut, seperti *Working Group* Ekonomi Digital. Merangkum hasil diskusi selama tiga hari, Sherpa G20 India menyoroti bidang-bidang fokus diskusi dan menekankan perlunya memperkuat tindakan kolektif negara-negara G20. Tema menyeluruh Presidensi G20 India adalah *Vasudhaiva Kutumbakam - One Earth. One Family. One Future* - bergema disemua kegiatan. Usai *substantive discussions and excursion* selama dua hari, pertemuan Sherpa pertama Presidensi G20 India berakhir. Para Sherpa Anggota G20, 9 negara undangan, dan 14 organisasi internasional berpartisipasi penuh dan aktif dalam semua pertemuan.

- Siaran Pers perihal Perkuat Kerja Sama Konkret Antar Pemerintah Daerah, CMGL-Forum Kembali Aktif Guna Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat di Kawasan

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendampingi dan turut hadir pada agenda Pertemuan Gubernur, Menteri Besar dan Kepala Daerah (CMGL-F) BIMP-EAGA ke-4 yang digelar di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (25/11). Para Pemimpin Daerah serta perwakilan lembaga mitra mendukung inisiatif revitalisasi CMGLF, sebagai wadah bagi para pemimpin daerah untuk saling berbagi inisiatif dan berkolaborasi merealisasikan potensi-potensi proyek pembangunan kawasan. Salah satu bentuk kerja sama konkret dalam kerangka BIMP-EAGA yang saat ini berlangsung yakni

interkoneksi listrik di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak yang mampu melayani 9 kota/kabupaten yakni Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Ke depan, di perbatasan Entikong-Tebbedu juga akan didorong kerja sama berupa *Special Border Economic Zone* maupun kerja sama di perbatasan lain seperti Nanga Badau dan Aruk.

- Siaran Pers perihal Dukung Daya Saing dan Ketahanan Iklim untuk Subkawasan, Kerja Sama BIMP-EAGA Siap Wujudkan Visi 2025
Menko Perekonomian memimpin Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 yang dilaksanakan di Kota Pontianak, Sabtu (26/11). Beberapa isu penting yang dibahas guna merespon situasi saat ini yakni mengenai tindak lanjut hasil *Mid-Term Review* BIMP-EAGA *Vision* 2025. Kemudian, tentang upaya pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi kawasan, termasuk mengenai pembukaan kembali konektivitas transportasi kawasan, pemulihan aktivitas perdagangan lintas batas, penguatan rantai pasok, dan dukungan UMKM. Terakhir, mengenai keberlanjutan kerja sama dan visi BIMP-EAGA setelah 2025.
- Siaran Pers perihal Pembangunan Kembali Sektor Pariwisata, Menjadi Poin Penting Menko Airlangga dalam *Ministerial Retreat* BIMP-EAGA
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 Tahun 2022 *Retreat* yang digelar di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (25/11). Terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam *Ministerial Retreat* yaitu percepatan kerja sama BIMP-EAGA termasuk penyusunan Visi Pasca 2025 dan penguatan Sekretariat BIMP-EAGA *Facilitation Centre* (FC). Terkait hal ini, Menko Airlangga menyampaikan tiga poin penting.
- Siaran Pers perihal BIMP-EAGA Dorong Peningkatan Daya Saing, Ketahanan Pangan dan Iklim di Subkawasan
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional memimpin *Senior Officials Meeting* (SOM) ke-30 BIMP-EAGA yang digelar di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (24/11). Pertemuan tersebut membahas beberapa isu antara lain hasil BIMP-EAGA *Vision*

2025 (BEV 2025) *Mid Term Review* (MTR) dilihat dari aspek transportasi, ICT, fasilitasi perdagangan dan investasi, energi, agribisnis, serta pariwisata. Sedangkan beberapa agenda yang menjadi highlight dalam pembahasan yakni tentang pembukaan kembali rute darat, udara, dan perairan pasca pandemi dalam rangka mendukung aktivitas perdagangan dan pariwisata; optimalisasi potensi produksi pangan di area EAGA untuk meningkatkan ketahanan pangan; serta integrasi energi listrik dan kerja sama pengembangan sumber energi terbarukan lintas batas untuk mendorong keamanan energi di subkawasan.

- Siaran Pers perihal Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang: Optimis Wujudkan Asia Sebagai Pemimpin Proses Transisi Energi Global
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan kerja Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Mr. Maeda Tadashi, Special Advisor to the Cabinet of the Government of Japan serta menjabat sebagai Chairman of the Board of Directors of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) di Jakarta, Kamis (24/11). Pertemuan ini membahas peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara, serta isu khusus terkait netralitas karbon dan realisasi konsep *Asia Zero Emission Community (AZEC)*.
- Siaran Pers perihal Pertemuan Sherpa GCRG Indonesia dengan UN RC Indonesia Bahas Atasi Dampak Krisis Pangan, Energi, dan Keuangan serta Sinergi Forum Multilateral dalam Penanganan Krisis Global
Sesmenko Perekonomian telah melaksanakan pertemuan dengan Kepala Perwakilan UN Resident Coordinator (UNRC) untuk Republik Indonesia, Valerie Julliard secara langsung di kantor PBB Indonesia pada Selasa (22/11). Terdapat isu-isu strategis yang dapat dibicarakan bersama dalam forum multilateral tersebut, seperti isu konektivitas dan transisi energi. Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional juga menyampaikan pentingnya isu keamanan dalam penyelesaian permasalahan ekonomi, maka dari itu dalam deklarasi KTT G20 juga terdapat isu terkait penanganan krisis.

- Siaran Pers perihal Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan, Presiden Joko Widodo Promosikan IKN kepada Kalangan Usaha APEC
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara *APEC Leaders' Dialogue with APEC Business Advisory Council (ABAC)* yang merupakan agenda keempat dalam rangkaian KTT APEC pada hari Jumat (18/11). Pertemuan ini membahas tiga isu utama, yaitu mengenai *sustainability, regional economic integration, dan digitalization and inclusion*.
- Siaran Pers perihal Menko Airlangga Wakil Presiden Bahas Upaya Hadapi Inflasi Tinggi dan Ancaman Resesi dalam *APEC Leaders' and Guests' Working Lunch*
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara *APEC Leaders' and Guests' Working Lunch* yang merupakan agenda ketiga dalam rangkaian APEC Economic Leaders' Meeting pada hari Jumat (18/11) di Bangkok, Thailand. Dalam kesempatan ini, para pemimpin Ekonomi APEC membahas topik "*Promoting Inclusive Growth amidst Hyper-Inflation and Looming Recession*". Para pemimpin Ekonomi APEC menyerukan perlunya penguatan kerja sama dalam APEC sebagai *incubator of ideas* untuk mengeksplorasi dan mengusahakan konsep, strategi, dan ide untuk menghadapi ancaman resesi, krisis energi dan lingkungan. Beberapa inisiatif yang dibahas antara lain adalah dukungan terhadap UMKM, transformasi digital, serta ekonomi inklusif.
- Siaran Pers perihal KTT APEC 2022: Presiden Joko Widodo Serukan Kolaborasi Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau untuk Hadapi Tantangan Ekonomi Global
Menko Perekonomian mendampingi Presiden RI menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi APEC tahun ini pada 18-19 November 2022 di Bangkok. Isu peningkatan risiko resesi menjadi latar belakang dalam berbagai pertemuan pemimpin dunia, termasuk dalam *APEC Economic Leaders' Meeting (AELM)*. AELM hari pertama dibuka dengan Retreat Session I pada Jumat (18/11), yang mengangkat topik "*Balanced, Inclusive, and Sustainable Growth*". Pertemuan tersebut turut membahas

Bangkok *Goals for the Bio-Circular-Green (BCG) Economy* sebagai upaya untuk mencapai APEC Putrajaya Vision 2040 serta transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga: Menjadi Satu-satunya Negara yang Tergabung dalam Forum G20, APEC, dan ASEAN, Indonesia Memegang Posisi Sangat Strategis

Menko Perekonomian mewakili Presiden RI dalam *APEC Leaders' Retreat Session 2* yang merupakan agenda penutup rangkaian *APEC Economic Leaders' Meeting (AELM)* pada Sabtu (19/11). Dalam acara tersebut, para pemimpin APEC membahas topik *Trade and Investment for Sustainable and Inclusive Growth*. Dalam *APEC Economic Leaders' Meeting* tersebut, para pemimpin Ekonomi APEC berhasil menyepakati *2022 APEC Leaders' Declaration* yang sampai pada hari pertama penyelenggaraan AELM masih mengalami kebuntuan mengenai isu perang Ukraina. Untuk memecah kebuntuan, para pemimpin Ekonomi APEC sepakat untuk menggunakan rumusan dalam *G20 Leaders' Declaration* mengenai isu tersebut, sehingga deklarasi dapat diterima oleh seluruh pihak.

- Siaran Pers perihal Pimpin Delegasi RI dalam APEC Ministerial Meeting, Menko Airlangga Ajak Kolaborasi para Menteri APEC Dukung Transisi Hijau dan Transfer Teknologi

Setelah mengikuti keseluruhan rangkaian acara KTT G20, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Bangkok untuk kemudian menghadiri rangkaian acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) *Economic Leaders' Weeks* di Thailand, pada tanggal 16-20 November 2022. Mengawali rangkaian kegiatan, Menko Airlangga memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam acara *APEC Ministerial Meeting (AMM)*, Kamis (17/11). Sesi pembukaan AMM mengangkat topik "*Balanced, Inclusive, and Sustainable Growth*" dan secara khusus membahas inisiatif *Bio-Circular Growth (BCG) Economy Model* dalam rangka mendukung transisi ekonomi berkelanjutan di Ekonomi APEC. Dalam sesi tersebut, Menko Airlangga menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif BCG dan mengajak Ekonomi APEC untuk berkolaborasi.

- Siaran Pers perihal Hasil Pertemuan Bilateral G20, Indonesia-RRT Sepakat Jalankan Kerja Sama di Sektor Ekonomi Digital
Pada rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, Rabu (16/11), telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerja Sama Ekonomi Digital antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Wentao. MoU tersebut mengatur adanya kerangka kerja dan forum dalam pembahasan kerja sama ekonomi digital antara Pemerintah Indonesia dengan RRT. Lingkup kerja sama dalam MoU tersebut mencakup kerja sama yang terbuka, termasuk dalam eksplorasi peluang bisnis digital antara kedua negara, percepatan transformasi digital di semua sektor, kerja sama pembangunan infrastruktur digital, kota pintar, *e-commerce*, inovasi teknologi digital, serta pengembangan format dan model bisnis baru seperti *telemedicine*, logistik pintar, dan juga ruang lingkup lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- Siaran Pers perihal PGII Menjadi Jalan Baru dalam Mengatasi Kesenjangan Infrastruktur dan Investasi bagi Negara Berkembang
Disela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia, telah diadakan pertemuan *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII), Selasa (15/11) di Bali. Pemerintah AS secara resmi mengumumkan proyek baru PGII antara lain kemitraan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang memobilisasi USD 20 miliar pembiayaan sektor publik dan swasta untuk Indonesia, Indonesia *Millenium Challenge Corporation* (MCC) Compact yang telah berhasil meluncurkan USD 698 juta, *Trilateral Support for Digital Infrastructure* melalui kemitraan Australia dan Jepang dalam mendukung proyek digital, mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brasil, pengembangan energi surya di Honduras, dan investasi dalam infrastruktur kesehatan India.
- Siaran Pers perihal World Bank Siap Mendukung Langkah Transisi Energi Indonesia Guna Mengurangi Emisi Karbon
Menteri Perekonomian bertemu dengan Managing Director of Operations World Bank Axel van Trotsenburg di sela-sela Business 20 Summit di

Nusa Dua, Bali, Senin (14/11). Dukungan World Bank terhadap reformasi ekonomi Indonesia telah terjalin sejak lama melalui berbagai program kerja sama. Sedangkan saat ini Indonesia terus mendorong pemanfaatan renewable energy dan mengembangkan energi hydro di kawasan Kalimantan Utara.

- Siaran Pers perihal Bertemu Executive Chairman WEF Klaus Schwab, Menko Airlangga Ungkap Komitmen Indonesia Bangun Perekonomian Rendah Karbon

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaksanakan pertemuan bilateral dengan Executive Chairman World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab di sela-sela penyelenggaraan B20 Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11). Indonesia berkomitmen untuk membangun perekonomian masa depan yang rendah karbon. Selanjutnya, WEF juga menekankan pentingnya menjaga lautan karena selain perannya sebagai *stabilitator* suhu permukaan bumi, kekayaan laut yang terkandung di dalamnya juga merupakan salah satu sumber pangan umat manusia. Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian WEF dengan menggandeng dan bekerjasama dengan berbagai negara, khususnya dengan negara-negara kepulauan melalui Forum Ocean 20 yang digagas bersama dengan Indonesia.

- Siaran Pers perihal Menjadi Momen Penting dalam KTT ASEAN-AS, Kemitraan Komprehensif Strategis ASEAN-AS Diluncurkan

Pada pertemuan KTT ASEAN-Amerika Serikat dilakukan peluncuran Kemitraan Komprehensif Strategis ASEAN-AS yang diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi menghadapi situasi dunia yang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Presiden RI, yang turut didampingi oleh Menko Perekonomian, mengusulkan tiga hal yang perlu dilakukan sekaligus sebagai solusi menjawab tantangan. Hal pertama terkait dengan mewujudkan kemitraan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan, dimana ASEAN menginginkan kehadiran AS di kawasan membawa energi positif bagi perdamaian, membangun kemitraan untuk ketahanan kawasan dan global, dan menciptakan kemitraan untuk masa depan berkelanjutan.

- Siaran Pers perihal Dorong Pembangunan Ekonomi Kawasan yang Lebih Resilien dan Hijau, Presiden Joko Widodo Bahas Ekosistem Kendaraan Listrik dalam KTT ASEAN-Jepang ke-25

Pada pertemuan KTT ASEAN-Jepang ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, pada Sabtu (12/11), Presiden RI membahas pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang akan mendukung ekonomi kawasan yang lebih resilien dan hijau. Upaya ini juga akan mempertebal kontribusi kawasan Indo-Pasifik sebagai *epicentrum of growth* sekaligus upaya global mengatasi perubahan iklim.

- Siaran Pers perihal Pertemuan Tingkat Sherpa Digelar Menjelang KTT G20, Optimis Upayakan Kesepakatan *Leaders' Declaration*

Pertemuan Sherpa ke-4 Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan pada 11-14 November 2022 dan dilanjutkan dengan KTT G20 pada 15-16 November 2022. *Sherpa Track* Presidensi G20 Indonesia sendiri meliputi 12 *Working Groups* (WG) dan 10 *Engagement Groups* (EG). Selain itu, peran vital Sherpa Track juga untuk mengadakan berbagai kegiatan lainnya seperti *culture and creative economy*, *Research and Innovation Ministers' Meeting*, *Side Event*, dan *Joint Ministerial Meeting* yang merupakan bentuk kerja sama antar Kementerian dan Lembaga. Selain unsur Pemerintah, Indonesia juga secara aktif melibatkan kelompok non-pemerintah yang tergabung dalam *G20 Engagement Groups*. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi bersifat inklusif dengan memperhatikan masukan dari kelompok di luar Pemerintah selaku *stakeholders* dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi. Seluruh pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan juga akan meng-*endorse concrete deliverables*. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan menjadi *legacy* Indonesia bagi G20 serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada Forum G20.

- Siaran Pers perihal Hadiri KTT ASEAN-Australia ke-2, Presiden Joko Widodo Bahas Penguatan Kerja Sama untuk Memajukan Kawasan Indo-Pasifik

Menko Perekonomian mendampingi Presiden RI dalam pertemuan KTT ASEAN-Australia pada 12 November 2022. Presiden RI menyampaikan tiga fokus kerja sama yang dapat diperkokoh antara ASEAN dan Australia antara lain ASEAN dan Australia harus terus menjalin kerja sama konkret dalam konteks Indo-Pasifik, Australia dapat menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi antara ASEAN dan Pacific Islands Forum (PIF), dan Australia untuk hadir dan berkontribusi dalam pertemuan Indonesia-Pacific Forum for Development yang utamanya akan memberikan perhatian pada kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan Pasifik.

- Siaran Pers perihal Pleno KTT ASEAN ke-40: Presiden Joko Widodo Tekankan Pentingnya Upaya Maksimal Negara ASEAN Memelihara Kesatuan dan Sentralitas

Menko Perekonomian mendampingi Presiden RI dalam pertemuan Pleno KTT ASEAN ke-40 di Kamboja pada 11 November 2022. Terdapat tiga poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sesi pleno tersebut yakni mendorong agar Piagam ASEAN dijalankan seutuhnya, mendorong penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN, dan penguatan peran ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang tangguh.

- Siaran Pers perihal Presiden Joko Widodo: Tiga Hal Fundamental sebagai Kunci Akselerasi Pemulihan di Kawasan IMT-GT

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku *Signing Minister* kerja sama subregional Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT) mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pertemuan KTT IMT-GT ke-14, di sela-sela Rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan ke-41, di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11). Presiden RI menyampaikan bahwa perlu dilakukan tiga hal dalam akselerasi pemulihan ekonomi di Kawasan, yaitu membangkitkan dan memulihkan sektor pariwisata sub-kawasan, mempercepat

pembangunan *hard* dan *soft infrastructure* dan mewujudkan ekonomi sub-kawasan yang hijau dan berkelanjutan.

- Siaran Pers perihal Ungkap Prioritas Ekonomi yang Diusung, Menko Airlangga Paparkan Kesiapan Indonesia Menjadi Ketua ASEAN 2023
Menko Perekonomian memimpin Delegasi RI dalam Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11). Menko Perekonomian menyampaikan prioritas ekonomi yang diusung Indonesia akan fokus pada 3 (tiga) hal utama antara lain membangun pertumbuhan regional, konektivitas dan keunggulan baru yang dilakukan melalui fasilitasi sektor jasa, ketahanan sektor keuangan, ketahanan pangan sebagai antisipasi krisis serta optimalisasi perdagangan dan investasi; percepatan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif untuk mengurangi kesenjangan digital melalui penguatan kerja sama kelancaran konektivitas digital, pembayaran dan keuangan digital, dan memberikan keamanan pertukaran data digital lintas batas, serta mendukung rantai pasok logistik; dan mendorong pembangunan infrastruktur hijau, mempercepat implementasi SDGs, dan meningkatkan ketahanan energi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih tangguh.
- Siaran Pers perihal Menko Airlangga: Forum Antar Menteri Sektor ASEAN Sepakati Kerjasama Netralitas Karbon dan Agenda Ekonomi Berkelanjutan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi RI dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang digelar di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu (9/11). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kesiapan ASEAN menghadapi ancaman dan membangun kapasitasnya untuk ketahanan jangka panjang. Diperlukan kerja sama lintas sektor seperti pertanian, energi dan transportasi untuk memastikan bahwa semua inisiatif yang telah ada bisa berjalan dengan efektif.

- Siaran Pers perihal Bertemu Menko Airlangga, Dubes Australia Sampaikan Dukungan pada KTT G20 dan Bahas Peningkatan Kerjasama Ekonomi Bilateral

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia H.E. Penny Williams PSM di Jakarta, Selasa (08/11). Pemerintah Australia kepada 10 pelajar Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan Master maupun Doktoral di Australia khusus untuk program studi yang sesuai dengan area prioritas G20 Indonesia yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Kemudian dalam pertemuan antara Menko Airlangga dengan Dubes Penny, keduanya juga menyinggung rencana pelaksanaan pertemuan kedua *Economic, Trade, and Investment Ministerial Meeting* (ETIMM). Selanjutnya, pada pertemuan tersebut Dubes Penny juga sempat membahas hasil konferensi *Australian-Indonesian Business Council* (AIBC) yang telah berlangsung pada tanggal 1-4 November 2022 di Darwin, Australia.

- Siaran Pers perihal Menko Airlangga Terima Audiensi Duta Besar Korea, Kerja Sama Ekonomi Digital Menjadi Salah Satu Fokus Pembahasan
Menko Perekonomian melakukan pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia YM. Park Tae-Sung di Jakarta, Senin (7/11). Kunjungan Duta Besar Park Tae-Sung ini adalah guna mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan. Kerja sama yang dimaksud diantaranya melalui pelaksanaan Indonesia-Korea *Business Roundtable* dan penandatanganan MoU kerja sama ekonomi digital antara Menko Airlangga dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan, yang direncanakan akan dilaksanakan di sela-sela KTT G20 nanti di Bali.

- Siaran Pers perihal Dukungan AS Mengalir Untuk Indonesia Dalam Berbagai Forum Perhelatan Antar Bangsa

Menko Perekonomian bertemu dengan US Trade Representative (USTR), Ambassador Katherine Tai, pada hari Selasa (25/10) di Washington D.C. Pertemuan tersebut membahas perkembangan Presidensi G20 Indonesia, kerjasama *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) dan isu-isu ekonomi bilateral lainnya. Dalam

pertemuan tersebut juga dibahas upaya penyelesaian berbagai hambatan perdagangan kedua negara, termasuk isu-isu kebijakan yang strategis dan sengketa dagang yang dinilai telah memenuhi kriteria kepatuhan sesuai rekomendasi Panel WTO.

- Siaran Pers perihal Pemerintah AS Dukung Presidensi G20 Indonesia dan Dorong Penguatan Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Menteri Perekonomian melakukan pertemuan bilateral dengan Jake Sullivan, Assistant to the President for National Security Affairs (APNSA) Amerika Serikat, dilakukan secara tatap muka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Pertemuan membahas sejumlah topik antara lain mengenai dukungan AS terhadap Presidensi G20 Indonesia, inisiasi penyelenggaraan *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) dan tindak lanjut *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF).

- Siaran Pers perihal Di Depan Menko Airlangga: Bank Dunia Menawarkan Dukungan Untuk Keketuaan Indonesia pada ASEAN Tahun 2023

Menko Perekonomian menerima Mari Elka Pangestu, *World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships*, dalam pertemuan tatap muka pada Minggu (23/10) di sela-sela acara kunjungan kerja Menko Airlangga di Washington D.C. Pertemuan membahas sejumlah topik antara lain peran Indonesia dalam *ASEAN Energy Connectivity*, Transformasi Digital, *Food Security* dan juga membahas *Partnership on Global Infrastructure and Investment* (PGII).

- Siaran Pers perihal Pemerintah RI dan AS Akan Mendorong Peningkatan Investasi dan Penguatan Kerja Sama Ekonomi Strategis

Menko Perekonomian melakukan pertemuan bilateral dengan Gina Raimondo, US Secretary of Commerce pada Selasa (25/10) di Washington D.C. Pertemuan membahas perihal perkembangan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) dan usulan proyek-proyek infrastruktur potensial Indonesia yang dapat masuk dalam kerangka *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII).

21. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indonesia-Jepang pada CEVEST BBPLK Bekasi

Telah dilaksanakan pada 1 April 2022. Tujuan kegiatan ini untuk melihat secara langsung perkembangan kerja sama Indonesia-Jepang di sektor pengembangan SDM, menampung masukan potensi kerja sama baru yang bisa diusulkan ke pihak Jepang dalam pertemuan pertama PPDT 1.5, serta mengevaluasi jalannya kerja sama pengembangan SDM di CEVEST Bekasi terkait tantangan dan hambatan yang dialami untuk perbaikan ke depannya.

Hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- Dalam pertemuan Menko Perekonomian dengan METI Jepang dibahas usulan kerja sama *Public Private Dialogue Track 1.5* (PPDT 1.5) antara Indonesia dan Jepang.
- Salah satu skema kerja sama yang potensial untuk dilaksanakan adalah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- Rencananya pada 25 April 2022 akan dilaksanakan pertemuan pertama PPDT 1.5 di Jakarta.
- BBPLK CEVEST didirikan pada tahun 1985 dengan bantuan dari Pemerintah Jepang sebagai bentuk kerja sama dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan ASEAN.
- CEVEST diresmikan oleh Perdana Menteri Jepang, Zenko Suzuki dan Sudomo selaku Menteri Tenaga Kerja dan Hartanto sebagai Menteri Perindustrian.
- CEVEST mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Jepang baik sektor Pemerintah maupun swasta telah terbangun dengan baik meskipun mengalami penurunan semenjak pandemi.

22. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha Jawa Barat

Telah dilaksanakan pada 23-25 Juni 2022. Tujuan kegiatan ini untuk melihat secara langsung perkembangan kerja sama Indonesia-Jepang di sektor pembangkit listrik terbarukan dan ramah lingkungan, menampung masukan potensi kerja sama baru di bidang ini yang bisa diusulkan ke pihak Jepang dalam Pertemuan PPDT 1.5 dan showcasing transformasi energi di G20, serta mengevaluasi jalannya kerja sama pengembangan PLTP Patuha-1 terkait tantangan dan hambatan yang dialami untuk perbaikan kedepannya terutama dalam pengembangan PLTP Patuha-2.

Hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- Pemerintah perlu mendorong pemanfaatan sumber energi alami terbarukan panas bumi untuk memaksimalkan lokasi strategis Indonesia serta mencapai target *zero emission* di 2060.
- Mengingat pengembangan energi ini memiliki risiko bisnis yang tinggi terutama pada tahap eksplorasi dan eksploitasi maka dukungan fasilitas fiskal pemerintah diperlukan untuk mendorong tumbuhnya sektor ini.

Kemenko Perekonomian dapat melakukan pembahasan dengan pemerintah dan sektor swasta negara mitra untuk bekerja sama dalam peningkatan SDM dan alih teknologi pembangunan dan operasi energi panas bumi utamanya dengan negara Jepang sebagai salah satu pemimpin dalam teknologi panas bumi dunia.

23. Monitoring dan Evaluasi Hasil Kerja Sama dalam Forum/Kesepakatan Indonesia dengan Negara di Kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur

Telah dilaksanakan kunjungan ke PT Petrokimia Gresik pada 23 Juni. Tujuan kegiatan untuk mengumpulkan informasi, monitoring, dan evaluasi terkait dampak konflik di Ukraina terhadap industri pupuk nasional.

Kapasitas produksi PT Petrokimia Gresik saat ini mencapai 8,9 juta ton (5 juta ton di antaranya merupakan produk pupuk dan 90% untuk pupuk subsidi). Dari kapasitas produksi pupuk hingga 5 juta ton per tahun, PT Petrokimia Gresik memproduksi Pupuk NPK dengan kapasitas 2,7 juta ton per tahun. Bahan baku pupuk NPK terdiri dari Nitrogen, Phosphate, dan Kalium. Khusus untuk Phosphate dan Kalium (Potash) seluruhnya impor karena tidak bisa diproduksi di dalam negeri.

PT Petrokimia Gresik mengimpor bahan baku dari Rusia dan Belarus, khususnya untuk bahan baku KCl (Kalium Klorida) dan DAP (Nitrogen dan Fosfor). Secara total, Rusia dan Belarus mensuplai kebutuhan KCl dunia sekitar 47%. Setelah terjadi konflik di Ukraina, harga KCl kembali mengalami kenaikan hingga mencapai USD 1.125 per MT saat ini. Kenaikan harga bahan baku tersebut tentu saja berdampak pada harga akhir pupuk yang diproduksi.

24. Penandatanganan dan Tindak Lanjut Implementasi Plan of Action RI-Kanada 2022-2025

Naskah Plan of Action PoA RI-Kanada periode 2022-2025 telah ditandatangani Menlu RI dan Menlu Kanada pada tanggal 11 April 2022. Dalam rangka menyusun berbagai usulan program konkrit yang akan disampaikan ke Kanada, Kemlu telah menyelenggarakan rapat antar kementerian pada tanggal 18 Mei 2022. Adapun beberapa hal yang mengemuka antara lain:

- Kedua negara perlu menyepakati untuk terus melanjutkan negosiasi menuju perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif secara bilateral dalam bentuk (CEPA) agar sejalan dengan PoA.
- Dalam mendorong partisipasi UKM, Kemendag berhadapan PoA tersebut dapat menciptakan ruang untuk ekspor produk UKM Indonesia ke pasar Kanada agar UKM Indonesia dapat mengembangkan usaha.

- Untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama sektor swasta, Kemenko Perekonomian menyampaikan perlunya keberlanjutan program dialog ekonomi antara KADIN Indonesia-Kanada (KIKAN) dengan Indonesia-Canada Chambers of Commerce (ICCC). Namun demikian, kontinuitas dialog tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak KIKAN.
- Terkait dialog kebijakan sektor keuangan antar Kementerian Keuangan kedua negara, Kemenkeu menyampaikan bahwa telah terdapat dialog kolaborasi antara BKF dengan Department of Finance Canada melalui forum Financial Sector Policy Dialogue (FSPD). Forum tersebut rencananya akan dilanjutkan pada tahun 2023 untuk membahas minat bersama kedua negara di sektor keuangan.

Berbagai isu yang disampaikan K/L terkait akan menjadi masukan bagi pelaksanaan Forum Konsultatif Bilateral (FKB) RI-Kanada ke-5 pada tingkat Menlu, yang rencanakan akan diselenggarakan pada Semester II 2022.

25. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Form Surat Keterangan Asal (SKA) GSP AS, IC-CEPA, dan IA-CEPA

Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia telah memiliki 23 perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan, 13 perjanjian perdagangan dalam tahap perundingan dan 20 rencana perjanjian perdagangan. Di Kawasan Amerika dan Pasifik, Indonesia telah memiliki kerja sama perdagangan bilateral dengan Chile dalam bentuk IC-CEPA dan Australia dalam bentuk IA-CEPA. Dengan Amerika Serikat (AS), Indonesia masih mendapatkan perpanjangan fasilitas preferensi tarif melalui skema GSP.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Kerja Keasdepan KSE Amerika dan Pasifik, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tanggal 31 Mei 2022 ke Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan ke kantor Pelayanan Bea dan Cukai di Pelabuhan Makassar New Port (MNP).

Kegiatan monev dilakukan untuk melihat perkembangan pemanfaatan form SKA Preferensi melalui skema IA-CEPA, IC-CEPA dan fasilitas GSP AS oleh pelaku usaha Makassar, dimana Makassar sebagai hub perdagangan Indonesia di bagian Timur serta untuk mendapatkan informasi terkait isu-isu yang menghambat pertumbuhan ekspor di wilayah Timur Indonesia melalui Pelabuhan petikemas Makassar. Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

- Keasdepan KSE Amerika dan Pasifik bersama Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan berencana menyelenggarakan Rakor terkait hambatan ekspor di Indonesia Bagian Timur, khususnya Sulawesi Selatan.
- Keasdepan KSE Amerika dan Pasifik bersama Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel akan menyelenggarakan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan optimalisasi pemanfaatan fasilitas perdagangan melalui kerangka FTA/CEPA maupun GSP.

26. Rapat Persiapan *the 1st Technical Working Group Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement*

Pemri telah mengusulkan kepada Fiji agar agenda pelaksanaan *the 1st Technical Working Group Indonesia – Fiji Preferential Trade Agreement* dapat dilaksanakan.

Mengusung konsep “Pacific Elevation” yang dicanangkan Pemerintah RI, Indonesia-Fiji PTA (IF-PTA) merupakan bentuk nyata dari engagement Indonesia ke wilayah Pasifik Selatan. Bagi Indonesia, pembentukan IF-PTA tidak hanya dilihat secara politis, namun terdapat economic benefit yang akan dicapai.

Mengingat Fiji dapat menjadi *hub* bagi Indonesia untuk negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan lainnya, IF-PTA ini selain dapat menstimulus pengembangan kerja sama Indonesia yang lebih luas di wilayah Pasifik perlu diidentifikasi lebih lanjut agar kerja sama antara Indonesia dan Fiji dapat terlihat nyata di tingkat regional.

Proses rencana kerja sama IF-PTA berjalan sesuai *timeline* yang telah disusun sehingga Pemri perlu antara lain pembuatan kajian dari perspektif Fiji, dan penyusunan teks perjanjian kerja sama, TOR IF-PTA, dan dokumen lainnya.

Waktu pelaksanaan *the 1st Technical Working Group* pada tanggal 19 April 2022 masih bersifat tentatif dan menunggu tanggapan dari Pemerintah Fiji. Rencananya pertemuan akan dilaksanakan secara virtual dan hybrid. Sekiranya Fiji menyetujui waktu pelaksanaan tersebut, akan dilakukan pertemuan internal

Delegasi RI pada pertemuan *Technical Working Group* pada tanggal 19 April 2022 akan dipimpin oleh Dirjen Aspasaf Kemlu, dan beranggotakan para pejabat Eselon 2 dari K/L terkait.

27. Perkembangan PTA RI-Papua Nugini

a. Rapat Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini ke Indonesia

Pada 31 Maret 2022, Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG), James Marape, telah melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Kunjungan tersebut merupakan jawaban atas outstanding invitation Presiden Jokowi kepada PM Marape pada saat awal menjabat, yakni pada bulan Mei 2019. Tindak lanjut yang perlu segera dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Mekanisme pembukaan pintu perbatasan;
- Misi dagang dan investasi ke PNG;
- Joint Feasibility Study dalam pembentukan PTA RI – PNG

Standar Operasional Prosedur (SOP) pembukaan perbatasan diperlukan pada masa pandemi. Kemendagri sebagai lead dalam pembuatan SOP akan segera berkoordinasi dengan K/L terkait pembentukan SOP untuk segera dapat didiskusikan dan dipertukarkan dengan SOP PNG. Sebagai informasi, WNI yang masuk PNG tidak perlu melakukan PCR.

Namun tidak demikian sebaliknya, karena tingkat vaksinasi di PNG sangat rendah sementara vaksinasi di Indonesia sudah lebih dari 60%. Perlu pertimbangan kiranya Indonesia dapat memberikan bebas visa bagi PNG.

Peluang kerja sama infrastruktur sangat besar di PNG seperti pembangunan rumah sakit, jalan raya, perumahan, dan bendungan. Namun proyek tersebut memerlukan dana yang besar, sehingga perlu mematangkan skema pendanaan baik bisnis to bisnis, *Build Operate Transfer* (BOT), atau skema lainnya. Sebagai informasi, meskipun saat ini Kementerian BUMN tidak dapat melakukan investasi di PNG, namun masih memungkinkan untuk menjadi kontraktor.

Terkait *Joint Feasibility Study* (JFS), Kemlu akan menjadi lead dalam JFS dalam kerangka PTA RI – PNG. Untuk mempercepat terlaksananya JFS yang direncanakan selesai tahun ini, Pemri perlu segera menyusun FS dan menginformasikan kepada pihak PNG untuk mendapatkan persetujuan dari perspektif kajian pihak PNG.

Sebagai tindak lanjut, Bulan Juli 2022 merupakan masa pemilu di PNG dan susunan pejabat yang definitif terbentuk sekitar September 2022. Rencana penandatanganan kerja sama sebaiknya dilakukan setelah terbentuknya pejabat yang definitif di PNG. Terkait pembukaan pintu perbatasan, Kementerian Luar Negeri mengirimkan surat kepada Dubes PNG di Jakarta agar PNG membuka Pintu Lintas Batas dan sekaligus menanyakan requirement yang dibutuhkan bagi WNI untuk masuk ke wilayah PNG, Untuk misi dagang, akan terdapat pertemuan lanjutan dengan Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kemendag dan K/L teknis lainnya, Untuk antisipasi, Presiden Joko Widodo rencananya akan melakukan kunjungan balasan ke PNG pada tahun 2023.

b. Kajian Pembentukan PTA RI-PNG

Rencananya Pemri akan membantu penyusunan *feasibility study* dari perspektif PNG untuk disampaikan kepada pihak PNG. Menurut Kemdag, JFS tidak wajib dilakukan. Namun pembuatan kajian mengenai Indonesia oleh Pemri wajib dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pemri dalam melakukan perjanjian perdagangan internasional.

Rencananya Asdep KSEAP akan melakukan update hasil kajian Prospera tahun 2019 terkait pembentukan PTA RI-Papua Nugini, dalam bentuk *policy paper*.

28. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Membahas Pemanfaatan Form Surat Keterangan Asal (SKA) IC-CEPA dan SKA IA-CEPA

Monitoring dan Evaluasi membahas pemanfaatan form SKA IC-CEPA dan SK IA-CEPA telah dilaksanakan pada di Makassar pada tanggal 31 Juni 2022. Monev menghasilkan beberapa poin penting antara lain kegiatan monev dilakukan untuk melihat perkembangan pemanfaatan form SKA Preferensi melalui skema IA-CEPA, IC-CEPA dan fasilitas GSP AS oleh pelaku usaha di Makassar sebagai hub perdagangan Indonesia di bagian Timur serta mendapatkan informasi terkait isu-isu yang menghambat pertumbuhan ekspor di wilayah Timur Indonesia melalui pelabuhan peti kemas Makassar. Umumnya pelaku usaha wilayah Timur Indonesia lebih memilih untuk memanfaatkan skema tarif dalam kerangka ASEAN yang telah mendapatkan preferensi tarif seperti AANZ-FTA, AKFTA, dan ACFTA. Sebagai tindak lanjut, Asdep KSE Amerika dan Pasifik bersama Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel berencana menyelenggarakan Rakor terkait hambatan ekspor di Indonesia Bagian Timur dengan mengundang stakeholders terkait. Rapat koordinasi diharapkan dapat memberikan solusi dan mendorong ekspor di Indonesia Bagian Timur, khususnya Sulawesi Selatan. Selain itu, Asdep KSE Amerika dan Pasifik bersama Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel akan menyelenggarakan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan optimalisasi pemanfaatan fasilitas perdagangan melalui kerangka FTA/CEPA maupun GSP.

29. Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Kerja Sama Peternakan Indonesia-Selandia Baru

Telah dilaksanakan di Padang Panjang pada 25 Mei 2022. Hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

- Kunjungan Deputi VII dan Dubes Selandia Baru ke Padang Panjang kiranya dapat diintegrasikan dengan program lainnya seperti sosialisasi ke kampus yang berada di Sumatera Barat, serta peningkatan komoditas unggulan lainnya di Kota Padang Panjang, seperti industri pengolahan kikir yang juga berkembang pesat.
- Dairy Academy melibatkan secara aktif Fonterra Brands Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru untuk menjadi pembimbing aktif program. Sebagai catatan, Dairy Academy akan mencontoh program Fonterra yang sebelumnya telah dilaksanakan di Batu Raden dan Selandia Baru. Awardee dari Fonterra Scholarship diharapkan dapat menjadi trainer program Dairy Academy. Fonterra telah menyatakan dukungan penuh dengan implementasi melalui koperasi Mersi.
- Kemenko Perekonomian telah menyusun peta jalan serta pilar pembentukan Dairy Academy yaitu pilar inkubasi, bisnis dan edukasi. Namun demikian pihak Pemda Kota Padang Panjang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan dijadikan pusat pengembangan industri sapi perah.
- Pemda Kota Padang Panjang berharap pada saat launching program Dairy Academy, dapat pula disertai dengan penyerahan bantuan mesin UHT, bantuan sapi perah, beasiswa bagi para peternak dan bantuan lainnya.
- Dipandang perlu kiranya untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dengan K/L teknis, Kedeputian Teknis terkait di Kemenko Perekonomian dan BUMN terkait untuk tindak lanjut program Dairy Academy sekaligus usulan potensi pendanaan dan bantuan bagi peningkatan kapasitas pengolahan susu seperti pengadaan mesin Ultra High Temperature (UHT), bantuan sapi perah, dan bantuan lainnya

Sebagai tindak lanjut, terkait waktu kunjungan ke kota Padang Panjang, kami masih berkoordinasi dengan Kedubes SB di Jakarta dan pihak Fonterra. Kami telah berkoordinasi dengan Atase Pertanian Kedubes SB di Jakarta terkait kehadiran Dubes SB dimaksud.

30. Monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama ekonomi ASEAN

Triwulan II

- Monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama ekonomi ASEAN. Telah dilaksanakan beberapa diskusi dengan para expert yakni:

- Expert discussion on ASEAN Chairmanship 2023

Diskusi dilakukan pada 1 April 2022 mengundang Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi, *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, Kiki Verico, Wakil Kepala Bidang Penelitian, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Sosial (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada. Adapun hasil diskusi antara lain:

- *Chairmanship* Indonesia pada ASEAN 2023 maupun *Post-2025 Vision* perlu mempertimbangkan kondisi dinamika global terkini, terutama isu-isu strategis seperti ketahanan pangan dan bahan makanan, energi dan logistik, serta *scarring effect* di tengah pemulihan pasca-pandemi
- Mengingat keadaan pemulihan yang relatif membaik, Indonesia dan AMS akan mengalami masa peralihan (*adjustment period*), seperti perubahan struktur ekonomi tradisional ke manufaktur, atau transformasi ekonomi non-hijau ke ekonomi hijau (*green economy*). PED perlu mengutarakan dampak dari *adjustment* tersebut, beserta biaya (*cost*) dari pemberlakuan transformasi ekonomi
- Indonesia memangku beban sejarah tertentu dalam *Chairmanship* ASEAN yang mengharuskan Indonesia untuk berani mengusung PED dengan *trajectory/legacy* yang berdampak besar. Beberapa PED yang diusulkan saat ini

diharapkan dapat merujuk ke arah tersebut, terutama dalam mempromosikan *'togetherness'* di antara negara-negara ASEAN.

- *Discussion Future Collaboration Opportunities Between Indonesia and Singapore in Support of Indonesia's 2022 G20 Presidency and 2023 ASEAN Chairmanship*

- Kegiatan ini terdiri dari rangkaian diskusi bersama, Mrs Tan Ching Yee Permanent Secretary, Ministry of Finance Singapore, pertemuan bilateral dengan Prof. Danny Quah, Dean and Li Ka Shing Professor in Economics, Lee Kuan Yew School of Public Policy, dan Mr. Choi Sing Kwok, Director and Chief Executive Officer of ISEAS – Yusof Ishak Institute dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 23 Juni 2022
- Kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan untuk berkontribusi nyata terhadap situasi global. Presidensi G20 di tahun 2022 serta *Chairmanship ASEAN* pada tahun 2023 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam menavigasi situasi global yang saat ini dipengaruhi oleh ketidakpastian akibat krisis yang terjadi di Ukraina
- Diperlukan rekalisasi strategi pelaksanaan agenda Presidensi G20 serta persiapan *Chairmanship ASEAN* di tahun depan dengan memperhatikan perkembangan isu-isu kawasan dan global yang berkembang
- Perlunya pengembangan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di kawasan sebagai modalitas yang perlu dioptimalkan untuk menyukseskan agenda-agenda kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum internasional
- Adanya peluang untuk kerja sama dengan kedua lembaga think tank tersebut, yaitu *Lee Kuan Yew School of Public Policy*, dan *ISEAS – Yusof Ishak Institute* dibidang pertukaran pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia.

Triwulan III

- Rencana Workshop APEC Bali
 - Workshop akan diselenggarakan pada 19-20 Oktober 2022. *General Information Circular* telah disusun dan disirkulasikan ke Ekonomi APEC. Ekonomi APEC yang dikonfirmasi hadir fisik adalah Filipina, Viet Nam, Thailand, dan Malaysia.
 - Undangan kepada masing-masing Pembicara telah dikirimkan. Pembicara yang telah dikonfirmasi diantaranya OECD, APEC PSU, Viet Nam, Australia, Russia, Kemenkop UKM, dan Universitas Islam Indonesia.
 - Sebagai *project* kerja sama Kemenko Perekonomian dan Kementerian Koperasi dan UKM, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kemenkop UKM akan menyampaikan *keynote speech*.
 - *Workshop* akan dibuka dengan *welcoming remarks* dari Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional dan ditutup dengan *closing statements* dari Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional.
- Rencana Ekon Goes to Campus
 - Ekon Goes to Campus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai sarana sosialisasi program dan kebijakan di lingkup Kemenko Perekonomian sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan di Kemenko Perekonomian.
 - Partisipasi dan topik yang disosialisasikan akan beragam bergantung pada kebijakan dari perwakilan kedeputan yang bertanggung jawab atas isu substansi yang akan disosialisasikan.
 - Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional akan turut berpartisipasi pada program kerja Ekon Goes to Campus tersebut.

Pada 30 September 2022, diusulkan rencana tema, dan tempat kegiatan “Ekon Goes to Campus” kepada Biro KLIP yang akan membahas “Road

to Indonesia's 2023 ASEAN Chairmanship" pada minggu pertama Desember 2022 di Universitas Padjadjaran, Jawa Barat

31. Dukungan Paraf atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*

Pada April 2022, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional telah membubuhkan paraf koordinasi pada naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan)

32. Dukungan Paraf Persetujuan pada Naskah Rancangan Undang-Undang tentang *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*

Pada April 2022, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional telah membubuhkan paraf koordinasi pada naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*)

33. Bilateral *Economic Cooperation Forum* RI-Jerman

Pihak Indonesia telah menyampaikan *Counterdraft Joint Declaration of Intent on Strengthening the Economic Cooperation by Establishing a Joint Indonesia-Germany Economic and Investment Committee* (JDol on JEIC) kepada Pemerintah Jerman melalui saluran diplomatik. Secara prinsip kedua negara sudah menyetujui isi draft JDol, namun masih perlu dilakukan legal scrubbing. Sampai saat ini, sedang diujai penentuan jadwal penandatanganan JDol on JEIC dengan pihak Jerman.

34. Monitoring dan evaluasi hasil kerja sama dalam forum/kesepakatan Indonesia dengan negara di Kawasan Afrika

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan kunjungan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat pada tanggal 21 Juli 2022 dan kunjungan ke Kadin Provinsi Jawa Barat serta FTA Center Bandung pada tanggal 22 Juli 2022.

Dekranasda Jawa Barat

Dekranasda Jawa Barat sudah memiliki Kerabat Store yang setara dengan produk di *mall* dengan display estetis dan dapat dibeli secara *online* melalui e-commerce. Dekranasda meminta Kemenko Perekonomian dapat memfasilitasi pertemuan dengan organisasi dan lembaga perwakilan perdagangan asing di Jakarta seperti INA, KOTRA, KOICA, dan Kadin asing lainnya dalam rangka pertemuan *business matching* untuk peningkatan produk ekspor kerajinan Jawa Barat.

Kadin Provinsi Jawa Barat

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Monev tersebut, Kadin Provinsi Jawa Barat akan mendukung peningkatan ekspor produk Jawa Barat khususnya UMKM ke Afrika dan akan membentuk kelompok kerja (Pokja) peningkatan

perdagangan pasar ke Afrika dan akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian.

Perlu adanya sosialisasi mengenai FTA serta kajian *market intelligence* sebagai informasi pengusaha di Indonesia untuk ekspor ke Afrika dengan mengundang berbagai *stakeholder* terkait termasuk perwakilan RI, KBRI dan Konsulat Jenderal RI di negara-negara Afrika.

Kadin juga meminta kepada pemerintah untuk dapat memastikan ketersediaan produk dalam negeri terlebih dahulu sebelum peningkatan ekspor. Hal ini tercermin pada krisis bahan baku kertas di dalam negeri yang tidak diimbangi dengan program pemerintah, yaitu perubahan kurikulum merdeka dengan capaian pencetakan buku oleh 16 (enam belas) perusahaan di Indonesia selama tahun 2022-2024.

FTA Center Bandung, CEDS Universitas Padjajaran

FTA Center Bandung didirikan pada tahun 2018 untuk memberikan pelayanan publik dengan cara menyebarkan informasi tentang perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah dilakukan Indonesia dan mendorong pemanfaatannya oleh pelaku usaha di Indonesia. FTA Center Bandung juga memberikan pendampingan dan bantuan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor dan impor serta membantu proses perizinan dalam mendapatkan izin dan sertifikasi dari K/L terkait dalam hal ekspor dan impor.

Perlu adanya sinkronisasi aturan yang tidak menghambat pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Hal ini seperti sertifikasi yang rigid dan tidak diperlukan untuk negara tujuan ekspor sebab sudah terakomodasi secara *reciprocal* dalam perjanjian FTA antara Indonesia dengan negara mitranya. FTA Center juga menyampaikan permintaan kepada Kemenko Perekonomian untuk dapat memfasilitasi penghapusan syarat legalisasi dokumen dengan Kadin pusat (khususnya komite Timur Tengah) yang masih berbayar sebesar 0,25 USD per legalisasi stempel.

Masalah UMKM Jawa Barat yang berorientasi ekspor di antaranya adalah 1) Kelembagaan di mana perlu membuat *trading house* dengan aturan yang mengakomodir untuk UMKM; 2) Karakter yang terlihat dari banyaknya penjual yang tidak berorientasi pada kontinuitas; dan 3) Program di mana masih kurangnya sinergi program antar K/L terkait pemajuan UMKM.

35. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Importasi Daging Sejenis Lembu dari Zona Bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

India merupakan mitra dagang yang terbesar di kawasan Asia Selatan bagi Indonesia. Berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan daging sapi nasional serta mengurangi ketergantungan dari negara pemasok tertentu, Indonesia telah membuka keran impor dari India sejak tahun 2016 meskipun negara tersebut belum mendapat status bebas PMK ternak dari *World Organisation for Animal Health (OIE)*. Munculnya kembali PMK di bulan April 2022 telah menjadi perhatian utama dari berbagai pihak dan dalam waktu relatif cepat virus ini telah menyebar di 22 provinsi pada 265 kabupaten/kota. Merebaknya PMK di Indonesia berdampak pada industri peternakan yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Adapun hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- Importasi daging sejenis lembu asal India dilakukan berdasarkan produk kebijakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Importasi daging berdasarkan *zone based* dimana sebelumnya berdasarkan *country based*.
- Kebijakan impor daging asal India merujuk kepada ketentuan regulasi teknis berdasarkan kondisi PMK suatu negara yang diatur oleh OIE, dimana India adalah negara yang belum bebas PMK namun memiliki program pengendalian resmi yang diakui oleh OIE.
- Kebijakan impor daging dilakukan berdasarkan kebutuhan Indonesia untuk pemenuhan kuota daging dalam negeri. Sebagai sebuah kebijakan, agar terhindar dari PMK pemerintah telah melakukan pengawasan secara ketat masuknya daging asal India.
- Pemerintah telah menetapkan impor daging tahun 2022 sebesar 266.065 ton dimana kuota impor tersebut telah dihitung berdasarkan neraca perkiraan produksi dan kebutuhan saat ini. Produksi daging tahun 2022 sebanyak 436.704 ton. Angka tersebut ditambah dengan stok awal sebanyak 62.485 ton. Sementara itu, kebutuhan daging pada tahun 2022

sebesar 706.388ton ditambah target stok akhir 58.866 ton. Total kebutuhan tersebut menghitung konsumsi sebanyak 2,57 kilogram (kg) per kapita per tahun.

- Upaya penanggulangan PMK dilakukan melalui medis dan biosekuriti, termasuk pengadaan sebanyak 29 juta dosis vaksinasi melalui pendanaan yang berasal dari KPC-PEN.
- Belum diketahui secara pasti asal muasal masuknya PMK ke Indonesia. Selain upaya penanggulangan PMK, perlu dilakukan investigasi terhadap daging dan hewan ternak dengan melibatkan stakeholder terkait.
- Pemerintah Indonesia belum dapat memenuhi permintaan India untuk membuka pintu masuk impor daging selain dari Pelabuhan Tanjung Priok. Dikarenakan status India yang masih dalam program pengendalian resmi oleh OIE (belum bebas PMK) sehingga proses pemasukan hanya melalui pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki infrastruktur mitigasi risiko yang memadai dan mempermudah pengawasan.

36. Monitoring dan Evaluasi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor dan PT Yongjin Java Suka Garment Factory

Pada tanggal 22 Juli 2022 telah dilaksanakan kunjungan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor dalam rangka melakukan pendalaman wawasan terkait kegiatan trade facilitator dan industrial assistance, serta Fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Berdasarkan data dari PT Yongjin Java Suka Garment Factory, terdapat penurunan permintaan produk jadi tekstil dari AS pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh inflasi yang tinggi di AS serta kelangkaan kontainer. Kelangkaan container yang disebabkan oleh pandemi dan hambatan distribusi pada Terusan Suez

tahun 2021, telah menyebabkan permasalahan pengiriman yang cukup serius. Biaya logistik meningkat 3 kali lipat, karena pengiriman dilakukan melalui transportasi udara.

Di sisi lain, kebijakan Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) telah meningkatkan beban biaya perusahaan. Sejak diberlakukannya BMTP, perusahaan-perusahaan di Kawasan Berikat tidak dapat menyalurkan sisa bahan baku dan garmen reject ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dalam rangka diimpor untuk dipakai, sehingga menyebabkan meningkatnya deadstock di Kawasan Berikat. Hal tersebut menyebabkan tingginya biaya penimbunan serta meningkatnya risiko atau potensi pelanggaran.

Permasalahan lain pada KB dan KITE Bogor adalah tingginya UMR Kota Bogor, yang menyebabkan timbulnya risiko pindahnya perusahaan-perusahaan ke kota/wilayah dengan UMR lebih rendah, seperti di Jawa Tengah. Menyikapi hal tersebut, terdapat saran yang mengemuka agar terdapat pengaturan upah khusus bagi Kawasan Berikat, namun hal tersebut perlu didiskusikan lebih lanjut.

Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

- Terkait fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP), PT Yongjin telah memanfaatkan fasilitas GSP ke AS sejak 2008 dan terakhir menggunakan fasilitas GSP pada tahun 2012. Namun pihak PT Yongjin tidak mendapatkan informasi bahwa fasilitas GSP masih didapatkan oleh Indonesia hingga saat ini. PT Yongjin berharap Pemerintah (c.q. Kementerian Perdagangan) dapat lebih aktif melakukan sosialisasi fasilitas pembebasan tarif impor yang telah didapatkan Indonesia dari negara mitra untuk memberikan kemudahan bagi eksportir nasional dalam meningkatkan penjualannya.
- Mengingat PT Yongjin sebagai eksportir besar apparel ke AS belum memperoleh informasi bahwa fasilitas GSP masih berlaku, Kemenko Perekonomian memandang perlu untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait fasilitas perdagangan yang diterima Indonesia, termasuk persyaratan yang perlu dipenuhi eksportir untuk menggunakan fasilitas tersebut.

37. Monitoring dan Evaluasi ke Balai Inseminasi Buatan Lembang dan Koperasi Peternak Susu Bandung Utara

Pada tanggal 7 September 2022 telah dilakukan kunjungan ke Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dan Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) dalam rangka melakukan pendalaman wawasan terkait peluang dan tantangan Kerja sama dalam pengembangan Inseminasi Buatan (IB) serta tingginya kebutuhan sapi perah bakalan di tengah depopulasi sapi akibat penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Monev menghasilkan beberapa poin penting yaitu:

- Kegiatan monev dilakukan untuk melihat perkembangan pemanfaatan form SKA Preferensi melalui skema IA-CEPA, IC-CEPA dan fasilitas GSP AS oleh pelaku usaha di Makassar sebagai hub perdagangan Indonesia di bagian Timur serta mendapatkan informasi terkait isu-isu yang menghambat pertumbuhan ekspor di wilayah Timur Indonesia melalui pelabuhan peti kemas Makassar
- Enam jenis sapi perah yang umumnya dikembangkan di dunia adalah *Friesian Holstein*, *Jersey*, *Brown Swiss*, *Guernsey*, *Ayrshire*, dan *Milking Shorthorn*. Kementerian Pertanian hanya mengizinkan pengembangan secara umum untuk jenis *Friesian Holstein*
- Jumlah produksi BIB Lembang tahun 2021 terealisasi sebanyak 3.221.451 dosis dari target sebanyak 2.325.000 dosis atau mencapai 138,56%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 diperoleh sebesar Rp. 836.351.906 dan Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 20.858.845.625 atau 137,68% dari target Rp. 15.150.000.000. Jenis sumber PNBP dan BLU berasal antara lain dari penjualan semen beku, sewa rumah dinas, dan sewa tanah
- BIB Lembang berhasil mengembangkan sapi jenis *Friesian Holstein* sebanyak 14 varietas dengan Grade A (Produksi Induk > 11.000 kg/ 305 Mature Equivalent) dan 6 varietas dengan Grade B (Produksi Induk 9.000- 11.000 kg/ 305 Mature Equivalent setara 36 liter/ hari)
- Secara historis, berdirinya BIB Lembang memiliki hubungan yang erat dengan kerja sama bilateral Indonesia dan Selandia Baru. Kerja sama

penelitian dan pengembangan terkait Inseminasi Buatan dengan Selandia Baru perlu terus dilanjutkan

Sebagai tindak lanjut, Sehubungan dengan akan diimplementasikannya program Dairy Academy, dipandang perlu untuk melibatkan BIB Lembang sebagai trainer vokasi terkait dengan inseminasi sapi perah kepada peternak.

38. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Proyek JCM dan Penyelenggaraan Webinar

Pada tanggal 25 Juli telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada proyek JCM *“Introduction of Cng-Diesel Hybrid Equipment to Public Bus In Semarang”* yang telah diimplementasikan dalam Bus Trans Semarang pada tanggal 24 Juli 2022 hingga 27 Juli 2022. Secara bersamaan, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Multilateral juga telah menyelenggarakan *webinar on the Joint Crediting Mechanism (JCM) Implementation in Indonesia “Accelerating the Transition towards Decarbonization through JCM”*.

Pada tanggal 20 September juga telah dilakukan kunjungan dan observasi proyek *“12MW Biomass Power Plant Project in Aceh Province, Sumatera”*. Partisipan proyek Indonesia yaitu PT. Primanusa Energi Lestari Bersama dengan partner Jepang Aura Green Energy Co. Ltd., mendapatkan bantuan skema JCM Model Project pada tahun fiskal 2018. Proyek ini merupakan proyek pembangkit listrik biomassa pertama dan satu-satunya di JCM Indonesia. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Sekretariat JCM bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Proyek ini beberapa kali mengalami kemunduran dalam implementasinya karena efek dari pandemi Covid-19. Saat ini, proyek masih dalam tahap pembangunan konstruksi sipil sementara mesin turbin dan generator listrik telah tiba dan disimpan di Gudang Pelabuhan Belawan. Proses instalasi diharapkan dapat selesai pada bulan Maret 2023.

39. Monitoring dan Evaluasi hasil kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Asia Tenggara dan Asia Selatan

Telah dilaksanakan pada 9 Desember 2022 dengan pembahasan performa ekspor - impor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Secara umum, industri pengolahan menyumbang hampir total dari keseluruhan nilai ekspor Jawa Barat sebesar 98%, termasuk industri otomotif, industri tekstil dan garment, serta industri permesinan. Sementara untuk impor, mayoritas didominasi oleh impor mesin.

40. Monitoring dan evaluasi hasil kerja sama antara Indonesia dengan negara di Kawasan Timur Tengah

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Kerja Sama dalam Forum/Kesepakatan Indonesia dengan Negara di Kawasan Timur Tengah di Palembang pada tanggal 13 Oktober 2022. Dalam pelaksanaannya, dilakukan kunjungan ke 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui peningkatan perdagangan ekspor dan produk UMKM/kerajinan daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Timur Tengah serta terkait peningkatan kerja sama Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) pada daerah Provinsi Sumatera Selatan.

41. Pelaksanaan Site Visit ke KEK dan Industri di KPBPB Batam pada 4 November 2022

Pada pertemuan bilateral antara Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian dengan Ms. Mary Ng, Menteri Perdagangan Internasional, UKM dan Pembangunan Ekonomi Kanada, tanggal 12 Oktober 2022,

terdapat salah satu pembahasan terkait pengembangan industri semikonduktor.

Saat ini Kanada dikenal sebagai pengembang Artificial Intelligence (AI) dan pemrograman semikonduktor terbesar di dunia serta memiliki program pendidikan dan pelatihan dalam bidang tersebut.

Menko Perekonomian mengharapkan Kanada dapat bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas talent Indonesia. Menko Perekonomian menyampaikan bahwa Indonesia telah menyiapkan KEK Nongsa Digital Park (NDP) di Batam dan KEK Singhasari di Kabupaten Malang, dengan infrastruktur yang sudah memadai untuk mengembangkan digital talent.

Menindaklanjuti hal tersebut Bapak Menko mengajak Duta Besar Kanada untuk meninjau langsung kesiapan KEK di Batam sebagai showcase bahwa Indonesia siap menerima investasi untuk pengembangan industri semikonduktor, digital talent, dan sektor-sektor lainnya.

Batam merupakan kawasan khusus (KPBPB) dan lebih berpotensi menarik investor mengingat telah tersedianya studio animasi dan studio alam di Kawasan Nongsa Digital Park seperti halnya studio film di Vancouver Kanada.

Selain Duta Besar Kanada, Bapak Menko juga mengajak Duta Besar Amerika Serikat untuk meninjau langsung kesiapan KEK di Batam untuk showcase bahwa Indonesia siap menerima investasi untuk berbagai usulan proyek yang telah dibahas pada kunjungan Kerja di Washington DC dan mewujudkan komitmen Pemerintah AS terkait alokasi dana program CHIPS.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF tanggal 8-9 September 2022, Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian telah melakukan pertemuan bilateral dengan Gina Raimondo, US Secretary of Commerce yang salah satunya membahas Program CHIPS Pemerintah AS yang menyediakan dana Federal sebesar USD 50 Miliar untuk membangun industri semikonduktor.

Dalam pertemuan tersebut dibahas usulan kerjasama dalam pengembangan sumber-sumber energi terbarukan, energi bersih, berbagai usulan proyek dalam skema rantai pasok termasuk semikonduktor,

pengembangan industri kesehatan, dan pengembangan pusat data (data center).

42. Monitoring dan Evaluasi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dan CV Coconut Internasional Indonesia

Monev telah dilaksanakan pada 15 Desember 2022. Dalam pertemuan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, beberapa hal yang mengemuka antara lain disampaikan sebagai berikut:

- Pulau Sulawesi merupakan salah satu daerah penghasil briket arang batok kelapa dengan kualitas ekspor terbaik di Indonesia. Pada tahun 2021, Sulawesi memiliki area seluas 700.000 Ha pohon kelapa, dengan estimasi produksi sekitar 335 ribu ton per tahun. Pada tahun 2021, Sulsel diperkirakan menghasilkan sekitar 68 ribu kelapa per tahun. Tiga wilayah penghasil kelapa terbesar di Sulsel adalah Selayar (24 ribu), Bone (12 ribu), dan Wajo (5 ribu). Produksi melimpah tersebut berpotensi besar untuk dimanfaatkan menjadi briket arang dan produk turunan kelapa lainnya.
- Meskipun demikian, produsen briket arang batok kelapa Sulsel belum dapat mengeksport komoditas produksinya secara langsung melalui pelabuhan di Makassar, melainkan harus melalui pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Menurut data Bea dan Cukai (2022), tercatat nilai ekspor briket arang batok kelapa yang berasal dari Surabaya senilai USD 21 juta pada bulan Januari 2022. Namun, tidak terdapat ekspor briket arang batok kelapa dari Pelabuhan di Makassar.

Tantangan dalam melakukan ekspor briket secara langsung dari pelaku usaha Sulsel antara lain sebagai berikut:

- Belum terdapatnya standar regulasi pelayaran untuk “barang berbahaya” atau *dangerous goods* yang dapat menimbulkan masalah pada penggunaan kode HS;
- Tidak terdapat perusahaan *wrapping* yang beroperasi di Sulsel untuk mendukung kegiatan ekspor. Sebagai catatan, *wrapping* khusus merupakan salah satu syarat pengiriman briket mengingat komoditas ini dianggap sebagai barang berbahaya atau mudah meledak;
- Potensi turunnya kepercayaan dari pembeli akibat lamanya waktu pengiriman dan kurangnya pengawasan atas barang pada saat proses *wrapping* di luar wilayah Makassar;
- Meningkatnya biaya pengiriman karena harus melalui pelabuhan di Jawa dan terdapatnya komponen biaya sewa gudang;
- Belum berkembangnya industri hilir komoditas kelapa dari Sulawesi, sehingga banyak potensi yang terbuang.

Kendala – kendala pada sisi logistik tersebut menyebabkan belum terdapatnya pemanfaatan perjanjian dagang IC-CEPA dan IA-CEPA melalui pelabuhan di Makassar. Bea Cukai Makassar melihat potensi ekspor yang sangat besar ke negara-negara di kawasan Amerika dan Pasifik, dan mengharapkan kendala logistik dapat ditangani secara kolektif.

Selain komoditas briket arang batok kelapa, Sulsel juga menghadapi tantangan dalam mengeksport produk perikanan, seperti persyaratan sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) bagi produk UMKM. Sebagai catatan, perikanan merupakan salah satu sektor utama penghasil komoditas untuk diekspor bagi Sulsel.

Lebih lanjut, pada kunjungan lapangan ke pabrik CV Coconut Internasional Indonesia terdapat beberapa hal yang mengemuka terutama mengenai kendala ekspor utama yang dirasakan oleh CV Coconut Internasional Indonesia antara lain sebagai berikut:

- Belum terdapat *direct shipping* dari Makassar ke negara tujuan, serta belum optimalnya pemanfaatan Makassar New Port sebagai pelabuhan internasional. Selama ini CV Coconut Internasional Indonesia harus mengirimkan produk ke Surabaya sebelum diangkut dengan kargo

internasional, dengan biaya tambahan berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per kontainer;

- Belum terdapat perusahaan wrapping yang beroperasi di Sulsel untuk mendukung kegiatan ekspor;
- Terhambatnya cashflow selama 3-4 minggu akibat lamanya proses administrasi *bill of lading* yang terpusat di pulau Jawa memberatkan kinerja *working capital management* perusahaan eksportir, terlebih lagi dengan kondisi *capital structure* perusahaan yang belum stabil

43. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Pembangunan Fasilitas Iradiator Kalimantan Timur di Kawasan Industri Kariangau pada 22 Desember 2022

Sebagaimana diketahui, teknik iradiasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sinar gamma dapat digunakan dalam upaya untuk menjaga kualitas produk ekspor untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan khususnya pada komoditas pertanian dan perikanan. Teknik ini juga dapat memenuhi persyaratan Sanitary and Phytosanitary (SPS) negara mitra.

Saat ini Indonesia hanya memiliki 2 fasilitas iradiator gamma, tertinggal dari negara ASEAN lainnya yang telah memiliki jumlah fasilitas iradiator lebih banyak seperti Malaysia (6 fasilitas), Thailand (5 fasilitas), dan Vietnam (3 fasilitas).

BRIN, yang di dalamnya termasuk BATAN, tengah melakukan peninjauan dengan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) terkait rencana pembangunan fasilitas iradiator gamma yang merupakan fasilitas iradiator pertama di luar Pulau Jawa. Pemprov Kaltim melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) telah melakukan feasibility study (FS) terkait rencana pembangunan iradiator gamma di Kaltim.

Kegiatan monev dilakukan untuk meninjau secara langsung kesiapan lokasi yang menjadi rencana pembangunan fasilitas iradiator gamma di kecamatan Kariangau, Balikpapan, Kaltim, dan kesiapan pelabuhan peti

kemas Kariangau. Pemprov Kalimantan Timur rencananya akan melakukan pembangunan fasilitas iradiator gamma di Kawasan Industri Kariangau (KIK). Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga menjadi opsi lokasi, namun sarana dan prasarannya belum siap, antara lain terkait pembebasan tanah, jalur transportasi dan sumber energi. Selain itu, alternatif lokasi lain juga terdapat di KEK Maloy di Kabupaten Kutai Timur, namun hasil kajian Balitbangda menunjukkan bahwa KEK Maloy belum siap untuk dibangunnya proyek tersebut.

Rencana pengembangan fasilitas nuklir tersebut sejalan dengan potensi kerjasama yang sedang dijajaki dengan Amerika Serikat khususnya dalam pengembangan teknologi nuklir. Sebagai catatan, perusahaan AS NuScale Power memperkenalkan teknologi PLTN berupa Small Modular Reactor (SMR). Berbeda dengan PLTN konvensional, setiap modul SMR dapat menghasilkan 77 megawatt listrik bebas karbon. NuScale mengklaim pembangunan PLTN dengan sistem ini dapat dibangun dengan repurposing PLT Batu Bara yang sudah ada dan menghemat biaya.

Hal ini dipandang bahwa studi tekno ekonomi SMR Indonesia dapat menjadi peluang bagi pusat pembangunan kapasitas manusia melalui peningkatan dan pelatihan pengetahuan PLTN menggunakan teknologi SMR, tidak hanya di Indonesia namun juga di Kawasan. Melalui NuScale diharapkan dapat terbantu pendanaan untuk proyek pembangunan fasilitas dan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang. Pemprov Kaltim mengusulkan agar KEK Maloy dapat menjadi alternatif lokasi pembangunan fasilitas nuklir SMR.

Sebagai catatan, pembangunan SMR di Indonesia merupakan proposal dan kepentingan Amerika Serikat. Sekiranya disetujui, perlu dilakukan pendekatan kepada Amerika Serikat dengan alternatif lokasi di Kaltim untuk pembangunan SMR dengan dukungan kerjasama dari NuScale.

Kabalitbangda Pemprov Kaltim menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim mengharapkan kiranya dapat melakukan pertemuan dengan Bapak Menko Perekonomian untuk membahas rencana pembangunan fasilitas iradiator gamma dan PLTN di Kalimantan Timur tersebut.

44. Pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) Indonesia-Ekuador ke-2

Indonesia dan Ekuador telah menyelenggarakan pertemuan WGTI ke-2 pada tanggal 5 Oktober 2022 secara virtual. Pertemuan pada intinya membahas pertukaran informasi terkait potensi dan *concern* kedua negara pada sektor perdagangan, investasi, perikanan dan usulan pembentukan perjanjian perdagangan bebas dalam bentuk Preferential Trade Agreement RI-Ecuador.

Kedua negara memandang bahwa WGTI RI – Ekuador merupakan forum penting mengingat kedua negara memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan perdagangan, sarana fasilitas akses pasar dan promosi perdagangan, dan upaya untuk menarik FDI dari kedua negara.

Sebagai tindak lanjut, pihak Ekuador mengusulkan agar terdapat forum *join committee* yang melibatkan sektor swasta dari kedua belah pihak untuk berdiskusi teknis dan menggali potensi-potensi yang dapat dikerjasamakan yang saling melengkapi pada sektor perdagangan dan investasi. Adapun pembahasan terkait pembentukan PTA, pihak Ekuador mengusulkan pertukaran TOR dapat dilakukan tahun depan.

45. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama APEC dan Sub Regional

Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-29 rencananya akan diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau pada Bulan September 2023. Tim Kemenko Perekonomian telah melakukan kunjungan awal untuk penentuan venue potensial. Kunjungan ini diselenggarakan pada 20-22 Desember 2022. Tim Kemenko Perekonomian melakukan kunjungan ke beberapa venue potensial di Kota Batam dan Kawasan Lagoi. Beberapa venue potensial akan dilaporkan untuk mendapat arahan Menko Perekonomian lebih lanjut.

46. Kunjungan Lapangan Proyek “Introduction of High-Efficiency Thermal Oil Heater System in Chemical Factory”

Kunjungan pada tanggal 23 November 2022 ini merupakan kunjungan pertama ke lokasi proyek “*Introduction of High-Efficiency Thermal Oil Heater System in Chemical Factory*”, yang dimiliki oleh Fumakilla Ltd. sebagai partisipan swasta Jepang dan PT Fumakilla Nomos sebagai partisipan swasta Indonesia. Proyek ini merupakan salah satu kegiatan mitigasi GRK dalam lingkup energi efisiensi. Garis besar kegiatan mitigasi GRK disini adalah penggantian mesin pemanas *thermal* berbahan bakar batu bara menjadi pemanas *thermal* berbahan bakar gas yang memiliki efisiensi tinggi. Proyek ini terpilih pada tahun 2021. Dalam kurun waktu 1 tahun, proyek ini berhasil menyelesaikan proses desain, manufaktur, dan instalasi mesin sehingga proyek dapat mulai berjalan pada bulan Juni 2022.

Hal menarik dalam proyek ini adalah penggunaan limbah tepung kanji, kayu, dan batok kelapa sebagai bahan baku produksi obat nyamuk koil (*up-cycling*). Proyek ini berkontribusi pada promosi dan perluasan guna-ulang limbah dan efisiensi energi dalam dekarbonisasi pada sektor perindustrian di Indonesia. Dua instalasi *Thermal Oil Heater System* yang baru, berhasil menggantikan konsumsi pasokan batu bara sebanyak 1,2 juta ton per bulannya dengan bahan bakar gas yang disuplai oleh PT PGN melalui perpipaan sebanyak 16.000 MMBTU (*Metric Million British Thermal Unit*). Oli yang telah dipanaskan melalui *boiler* kemudian disalurkan ke dalam proses produksi untuk pemanasan obat nyamuk koil menggunakan 9 unit *oil heating*.

47. Kunjungan Lapangan Proyek “Reducing GHG emission at textile factories by upgrading to air-saving loom”

Proyek ini dimiliki oleh Toray Industries Inc. sebagai partisipan swasta Jepang dan PT Indonesia Synthetic Textile Milles (ISTEM), PT Easterntex, dan PT Century Textile Industry Tbk (CENTEX) sebagai partisipan swasta Indonesia. Kunjungan dilakukan ke PT Easterntex di Pandaan pada tanggal 15 Desember 2022. Proyek ini merupakan salah satu kegiatan mitigasi GRK dalam lingkup energi efisiensi. Proyek ini telah menjalankan proses verifikasi dan telah menerbitkan kredit karbon pada periode monitoring 6 Februari 2017 – 7 Maret 2018. Dari total seluruh mesin yang diinstalasi pada 3 lokasi proyek, terdapat 1.244 tCO₂-eq yang telah diterbitkan dan disetujui oleh Komite Bersama JCM pada 16 Januari 2020.

Garis besar kegiatan mitigasi GRK disini adalah penggantian mesin menjadi *air jet saving loom* yang memiliki efisiensi tinggi. Proyek ini terpilih pada tahun 2014, dan mulai berjalan pada tahun 2017. Dalam proyek ini, di 3 lokasi pabrik tekstil di Indonesia, proyek ini memutakhirkan alat tenun yang ada menjadi total 96 unit (ISTEM 16 unit, CENTEX 17 unit dan Easterntex 63 unit) dari alat *air jet saving loom* (Toyota JAT810) sehingga dapat mengurangi konsumsi energi kompresor udara. Dari total 712 mesin tenun yang ada di PT Easterntex, 108 di antaranya menggunakan *air jet saving loom*, dimana 63 mesin didanai oleh subsidi JCM Model Project. Mesin Toyota JAT810 yang dipasang pada proyek ini dapat mengurangi konsumsi udara lebih dari 15% dari referensi *air jet saving loom* yang umumnya digunakan. Efeknya tidak hanya mengurangi emisi CO₂ dengan menghemat konsumsi daya kompresor udara, tetapi juga mengurangi biaya operasional.

Saat ini, total konsumsi pemakaian batu bara untuk boiler mencapai 7.500 ton/bulan, dengan harga batu bara (4500) Rp1.200,00 per kg. Pada tahun 2024, PT Easterntex bermaksud mengganti penggunaan bahan bakar batu bara menjadi gas untuk *boiler*. Tahap *feasibility study* dilakukan pada tahun 2023. Jaringan perpipaan sudah disiapkan namun masih ada kendala mengenai kontinuitas pasokan gas.

48. Survei indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional telah melaksanakan 2 kali survey pada semester 1 dan 2 tahun 2022. Survei tersebut untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan dengan hasil sebagai berikut: 1) Semester 1 - jumlah responden sebanyak 33 orang dengan rata-rata hasil survei sebesar 3,43; dan 2) Semester 2 – jumlah responden sebanyak 17 orang dengan rata-rata hasil survei sebesar 3,48.

Dengan demikian realisasi nilai indeks adalah 4 dari 4 atau Sangat Baik dari target 3 dari 4 (Baik), maka Capaian Kinerja Tahun 2022 pada IKU 2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebesar 133,3%.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2022 yang telah mencapai 133,3%, maka Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sangat optimis dapat meraih capaian kinerja lebih baik lagi pada periode kinerja tahun berikutnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Dalam proses pencapaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional ditemukan beberapa kendala, yaitu:

1. Mundurnya monitoring dan evaluasi terkait dengan kerja sama peternakan Indonesia-New Zealand karena harus menyusun konsep *dairy academy* terlebih dahulu
2. Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sehingga perkembangan pembangunan sejumlah proyek tidak dapat berlangsung secara optimal
3. Belum selesainya proses negosiasi perpanjangan kerja sama JCM antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Saat ini proses negosiasi perpanjangan telah memasuki tahap akhir dimana sedang menunggu

persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Jepang.

4. Mundurnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi potensi kerja sama energi terbarukan dengan Amerika Serikat dikarenakan Monev yang tertunda di Triwulan I diundur ke Triwulan II serta banyaknya kegiatan di Triwulan II sehingga perlu digeser ke Triwulan III.
5. Terdapat perubahan rencana pelaksanaan FKB RI-Kanada yang diubah menjadi Pelaksanaan WGTI RI-Ekuador ke-2. Pergantian rencana ini dikarenakan belum adanya kejelasan terkait rencana pelaksanaan FKB RI-Kanada dari pihak Kanada.
6. Perubahan pelaksanaan Monev dikarenakan adanya perubahan isu yang sedang dibahas dengan negara mitra.

Meskipun begitu, hal-hal tersebut tidak terlalu berdampak signifikan bagi terselesainya seluruh target dari IKU ini, sehingga realisasi indeks mencapai nilai 4 dari 4 atau mencapai Capaian Kinerja 133%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Dalam proses pencapaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional ditemukan beberapa kendala, yaitu:

- a) Mundurnya monitoring dan evaluasi terkait dengan kerja sama peternakan Indonesia-New Zealand karena harus menyusun konsep *dairy academy* terlebih dahulu
- b) Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sehingga perkembangan pembangunan sejumlah proyek tidak dapat berlangsung secara optimal
- c) Belum selesainya proses negosiasi perpanjangan kerja sama JCM antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Saat ini proses negosiasi perpanjangan telah memasuki tahap akhir dimana sedang menunggu persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Jepang.
- d) Mundurnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi potensi kerja sama energi terbarukan dengan Amerika Serikat dikarenakan Monev yang

tertunda di Triwulan I diundur ke Triwulan II serta banyaknya kegiatan di Triwulan II sehingga perlu digeser ke Triwulan III.

- e) Terdapat perubahan rencana pelaksanaan FKB RI-Kanada yang diubah menjadi Pelaksanaan WGTI RI-Ekuador ke-2. Pergantian rencana ini dikarenakan belum adanya kejelasan terkait rencana pelaksanaan FKB RI-Kanada dari pihak Kanada.
- f) Perubahan pelaksanaan Monev dikarenakan adanya perubahan isu yang sedang dibahas dengan negara mitra.

Meskipun begitu, hal-hal tersebut tidak terlalu berdampak signifikan bagi terselesainya seluruh target dari IKU ini, sehingga realisasi indeks mencapai nilai 4 dari 4 atau mencapai Capaian Kinerja 133%.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Telah melaksanakan rapat koordinasi terkait isu di bidang kerja sama ekonomi internasional baik secara fisik, virtual, maupun *hybrid* dengan menyesuaikan kebutuhan
- Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional yang sesuai dengan tupoksi
- Telah melakukan penyusunan siaran pers yang dipublikasikan pada website Kemenko Perekonomian
- Telah menyelenggarakan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada pihak eksternal yakni Kementerian/Lembaga terkait melalui media komunikasi online

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penyusunan siaran pers dipublikasikan melalui website Kemenko Perekonomian dengan tujuan dapat diakses masyarakat umum dan tanpa membutuhkan biaya sehingga dapat memaksimalkan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, tim Kemenko Perekonomian juga melakukan kunjungan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus agar dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas. Akomodasi yang digunakan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi juga telah diminimalkan dengan menggunakan tiket pesawat yang harganya lebih terjangkau.

CAPAIAN IKU 2.2.**Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional**

Pada tahun 2022, telah ditetapkan target Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sebesar 75% dari 42 (empat puluh dua) dokumen analisis kebijakan. Meski demikian, hingga akhir 2022, dokumen analisis kebijakan yang telah terealisasi adalah 42 dokumen atau 100%. Dengan demikian, berdasarkan perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, maka capaian kinerja pada IKU ini adalah 133%.

Adapun dengan ringkasan dari 42 dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Bahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Triwulan I

- Pertemuan Bapak Menko dengan *Secretary of Trade and Industry, Philippines* pada 21 Januari 2022
- Acara *Leaders Retreat* Indonesia-Singapura pada 25 Januari 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan *Australian Minister for Agriculture and Northern Australia* pada 27 Januari 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan Duta Besar Selandia Baru di Jakarta pada 2 Februari 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan *Vice President of World Bank for East Asia and Pacific* pada 10 Februari 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan *President of COP26* pada 16 Februari 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan Sekretaris Jenderal OECD pada 17 Februari 2022
- Acara *Ministerial Meeting the First Joint Committee on Economic Cooperation Republic of Indonesia – Republic of Korea* pada 22 Februari 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan *Second Minister for Trade and Industry, Singapore* pada 16 Maret 2022

- Pertemuan Bapak Menko dengan Minister for National Development, Singapore pada 23 Maret 2022

Triwulan II

- Pertemuan Bapak Menko dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok pada 12 April 2022
- Acara *World Economic Forum* pada 22-26 Mei 2022
- Acara Hannover Messe pada 27-29 Mei 2022
- Acara *Asia Tech X Summit* pada 31 Mei-1 Juni 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan Duta Besar Ukraina di Jakarta pada 7 Juni 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan *Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina* pada 13 Juni 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan *Deputy Chief Executive Officer* Temasek Foundation pada 26 Juni 2022

Triwulan III

- Pertemuan Bapak Menko dengan Amcham Indonesia pada 20 Juli 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan *Member of Board of Directors Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN)* pada 21 Juli 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan *Vice Minister for International Affairs, Minister of Economy, Trade and Industry (METI) of Japan*
- Pertemuan Bapak Menko dengan Delegasi Komisi Luar Negeri, Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Majelis Tinggi Parlemen Republik Perancis
- Pertemuan Bapak Menko dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang pada 3 September 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan Delegasi EU-ASEAN Business Council
- Pertemuan Bapak Menko dengan Dubes RI untuk Korea Selatan pada 1 September 2022
- Pertemuan Bapak Menko dengan Dubes Amerika Serikat di Indonesia pada 23 Agustus 2022
- Acara *Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting*

- Acara B20-G20 *Dialogue: Trade and Investment* pada 23 September 2022
 - Acara *Ministerial Conference on Women Empowerment (MCWE)* pada 24 Agustus 2022
 - Acara B20-G20 *Dialogue: Woman in Business Action Council* pada 23 Agustus 2022
 - Acara B20-G20 *Dialogue: Integrity and Compliance Task Force* pada 18 Agustus 2022
 - Acara *The High-Level Forum on Trade, Investment, and Industry Side Event Trade, Investment, and Industry Working Group* pada 26 Juli 2022
 - Acara *the Y20 Summit* pada 22 Juli 2022
 - Acara *the W20 Summit* pada 21 Juli 2022
2. *Policy Brief* tentang Pemanfaatan Indonesia-Korea CEPA terhadap Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyampaikan beberapa hal, antara lain latar belakang kerja sama Indonesia dan Korea, proses perundingan Indonesia Korea CEPA, cakupan dan manfaatnya, serta kesimpulan dan rekomendasi.
3. *Policy Brief* tentang Analisa Target Peningkatan Nilai Perdagangan Dua Arah Indonesia dengan Selandia Baru Senilai NZD 4 Miliar
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyampaikan hal-hal mencakup kondisi anomali terkait dengan target nilai perdagangan, potensi peningkatan ekspor produk Indonesia, dan rekomendasi untuk peningkatan nilai perdagangan dua arah.
4. *Policy Brief* tentang Strategi Indonesia untuk Mencapai *Net Zero Emission Economy* melalui *Coal Phasing Out* dengan Dukungan Amerika Serikat
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyampaikan isu terkait perubahan iklim. Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, berdasarkan permasalahan tersebut telah ditarik kesimpulan dan rekomendasi pada *Policy Brief* tersebut.

5. *Policy Brief* tentang Optimalisasi Implementasi Travel Bubble Indonesia-Singapura

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi antara lain (i) regulasi karantina bagi pelancong dari Singapura; (ii) biaya tes PCR yang tidak seragam; (iii) kapasitas tes PCR di Bandar Bintan Telani Ferry Terminal di Lagoi, Bintan dan di Nongsapura Ferry Terminal di Nongsa, Batam; (iv) pembukaan akses perlintasan laut antara Indonesia dan Singapura; (v) pembukaan akses *cruise ship* antara Indonesia dan Singapura; dan (vi) menjaga keamanan pelancong dan masyarakat di wilayah *travel bubble* dari penyebaran virus Covid-19. *Policy Brief* yang disusun sebagai upaya dalam menjawab tantangan tersebut.

6. *Policy Brief* tentang Analisa terhadap Penurunan Jumlah Impor Sapi Asal Australia dan Negara Alternatif di Kawasan Amerika sebagai Sumber Pemasukan Sapi

- Dengan mempertimbangkan biaya logistik, FTA, dan kesehatan hewan, Australia masih menjadi opsi terbaik sebagai negara sumber pemasukan sapi bakalan untuk memenuhi permintaan masyarakat untuk daging segar. Berdasarkan proyeksi *Meat & Livestock* Australia, populasi sapi Australia akan kembali normal pada tahun 2023. Sembari menunggu pemulihan populasi Australia, selama satu atau dua tahun ke depan Pemerintah RI dapat mencari alternatif pemasukan sapi dari negara-negara di Amerika Latin, yang merupakan produsen sapi terbesar di dunia.
- Berdasarkan hasil analisis di atas, negara di kawasan Amerika yang paling memungkinkan sebagai negara pemasok untuk sapi bakalan adalah Meksiko, karena telah ditetapkan bebas PMK tanpa vaksinasi. Terdapat 9 (sembilan) *register premises* pada unit usaha Meksiko yang disetujui untuk *health protocol* Kementan.
- Sebagai alternatif lain, Pemerintah RI dapat mengimpor daging beku dari Uruguay, Paraguay, Argentina, dan Brazil, mengingat negara-negara tersebut belum sepenuhnya bebas dari PMK tanpa vaksinasi.

7. *Policy Brief* tentang Meningkatkan Daya Saing Nasional dalam Rangka Mempersiapkan Implementasi Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)
 - Persetujuan RCEP yang diinisiasi oleh Indonesia mulai berlaku pada 1 Januari 2022, namun Indonesia belum dapat mengimplementasikannya mengingat masih dalam proses pengesahan (ratifikasi) dengan parlemen. Ratifikasi Persetujuan RCEP perlu dipercepat agar Pemerintah Indonesia dapat segera memetik manfaat RCEP terutama integrasi ke dalam *Regional Value Chain* (RVC) serta tidak menjadi negara terakhir yang meratifikasi Persetujuan RCEP
 - Pada sektor perdagangan barang, sebagian besar produk yang dikomitmenkan Indonesia dalam RCEP merupakan produk unggulan yang berdaya saing di pasar ekspor dengan kekuatan daya saing lebih besar dari negara anggota RCEP lainnya, kecuali RRT. Namun demikian, produk-produk tersebut masih didominasi oleh produk primer atau barang mentah.
 - Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memitigasi dampak dan merealisasikan manfaat RCEP. Rencana aksi jangka pendek perlu difokuskan untuk sektor-sektor industri prioritas yang dapat ditentukan dengan pendekatan kesiapan industri, industri pemenang, dan/atau industri potensial.
 - Pendekatan *whole-of-government* perlu dilakukan dalam penyusunan dan implementasi rencana aksi dengan melibatkan tidak hanya K/L terkait tetapi juga kelompok bisnis, sebagai penerima manfaat utama dari Persetujuan RCEP
8. Penyusunan *Indonesia's Position Paper on Plenary Session IMT-GT Strategic Planning Meeting (SPM)* berisi narasi Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan perencanaan strategis tahunan IMT-GT tahun 2022. Adapun isi pokok evaluasi dan arahan SO untuk rencana kerja WG tahun 2022.

9. Penyusunan *Position paper on BIMP-EAGA Senior Official Meeting/ Strategic Planning Meeting 2022* berisi narasi Ketua Delegasi Indonesia untuk pertemuan perencanaan strategis tahunan BIMP-EAGA 2022. Dokumen menganalisa pemanfaatan kerjasama BIMP-EAGA bagi Indonesia dan evaluasi implemmtasi tahun 2021 untuk posisi Indonesia dalam pertemuan tersebut.
10. Penyusunan bahan *Chairmans Notes at 41st High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (The 41st HLTF-EI)* berisi pidato Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional selaku *chair HLTF-EI*. Adapun isi pokok adalah terkait perkembangan pembahasan agenda HLTF-EI ke-41 yang berisi perkembangan penyelesaian *PED Cambodia 2022*, ASEAN Comprehensive Economic Framework, 4IR and Digital Transformation, Framework for Circular Economy, Concept Note on Carbon Neutrality, and Development of ASEAN Post 2025 Vision, dan agenda lainnya.
11. Penyusunan Bahan Narasi Pidato pada *Discussion Future Collaboration Opportunities Between Indonesia and Singapore in Support of Indonesia's 2022 G20 Presidency and 2023 ASEAN Chairmanship*
12. Penyusunan *APEC Economy Policy Report 2022: Reducing Carbon Emission through Joint Crediting Mechanism in Indonesia*
13. Telaah staf tentang Industri TPT Nasional Menghadapi Persaingan Global dengan Mesin Tua: Tantangan Bagi Indonesia
14. Bahan Presentasi Pembahasan *Draft Zero Scorecard Plan of Action RI-ROK* Pilar Kerja Sama Ekonomi
15. *Policy Brief* tentang Proposal Kebijakan Deforestasi Uni Eropa dan Pengaruhnya terhadap Komoditas Ekspor Indonesia ke Uni Eropa
 - Proposal regulasi DFSC UE akan berdampak setidaknya pada 5 komoditas Indonesia (kalapa sawit, kayu, kopi, kakao, dan karet) dan

terdapat kemungkinan perluasan cakupan komoditas dan ekosistem dalam guliran proposal regulasi ini

- Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 sehingga izin pembukaan lahan perkebunan dari hutan primer/gambut sudah tidak lagi diperbolehkan semenjak 2019. Namun, UE telah menentukan cut-off date untuk dimundurkan lebih awal menjadi 31 Desember 2019, Pemri merasa cut-off date perlu diterapkan pada saat EIF dan tidak berlaku surut. UE harus mengakui kemajuan signifikan Pemri dalam menangani deforestasi dan pemberlakuan surut merupakan sinyal yang tidak bersahabat
- Kiranya Pemri dapat menyuarakan concern terkait proposal DFCS UE dalam berbagai fora internasional, khususnya terhadap pendekatan UE dalam menyusun kebijakan unilateral dan protektif yang menggunakan justifikasi lingkungan sebagai hambatan perdagangan
- Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik dengan K/L terkait maupun dengan pihak UE untuk merumuskan Langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil dalam rangka mengamankan akses pasar komoditas ekspor Indonesia di UE

16. *Policy Brief* tentang Analisa Potensi dan Manfaat Pembentukan Indonesia-Mercosur (IM-CEPA) pada Perdagangan Barang untuk Indonesia

- Analisa RCA dan CMSA menunjukkan bahwa untuk pasar MERCOSUR, Indonesia memiliki list komoditas yang memiliki keunggulan komparatif, komoditas dengan permintaan tinggi, dan komoditas yang berpotensi untuk dapat ditingkatkan nilai ekspornya. List tersebut dapat menjadi request-offer Indonesia dalam perundingan IMCEPA
- Mercosur diperkirakan akan mengalami slow functioning mode karena dampak ekonomi global dan default Argentina. Sehubungan dengan hal tersebut, prospek FTA IndonesiaMERCOSUR dapat dilanjutkan dengan catatan sebagai berikut:
 - Pendekatan FTA adalah complementary trade

- Perlu dipetakan adanya sektor yang sensitif bagi Mercosur (agroindustri dan otomotif).
 - Perlu dilakukan pendekatan khusus kepada Argentina yang lebih protektif terhadap industri nasional.
 - Rekomendasi kebijakan pada jangka pendek dan menengah yang dapat ditempuh Indonesia pada Kawasan MERCOSUR mencakup joint venture, penjajakan counter trade, triangular cooperation dan kerjasama teknis
17. Telaahan tentang Importasi Daging Sapi dari India Diduga Menjadi Salah Satu Penyebab Munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
 18. Bahan presentasi Indonesia-Korea *Relations on Trade, Investment, and Infrastructure Development*
 19. Kertas posisi Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-28, terdiri dari kertas posisi: *National Secretariat Meeting, JBC Meeting, Advisory Committee Meeting, Senior Official Meeting, Chief Ministers' and Governors' Forum, Ministerial Retreat, Ministerial Meeting*
 20. Penyusunan bahan *Chairman's Notes at The 42nd High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (The 42nd HLTF-EI)*. Berisi *Chairman's Notes* yang disiapkan untuk Deputi Bidang Koordinasi selaku *chair HLTF-EI*. Adapun isi pokok adalah terkait perkembangan pembahasan agenda HLTF-EI ke-41 yang berisi perkembangan penyelesaian *PED Cambodia 2022, ASEAN Comprehensive Economic Framework, 4.0 Industrial Revolution and Digital Transformation, Framework for Circular Economy, Concept Note on Carbon Neutrality, Development of ASEAN Post 2025 Vision*, dan agenda
 21. *Indonesia's Position Paper at 2022 Second APEC Economic Committee Meeting (EC2) Plenary*. Isi isi pokok adalah terkait perkembangan program kerja FotC CLG (perkembangan kuesioner, *policy dialogue*, dan rencana pengajuan *Concept Note* sebagai tindak lanjut program kerja FotC CLG),

perkembangan IAP Indonesia, implementasi AEPR 2022, penyampaian bersedia menjadi AEPR 2023 Core Team, serta penyelenggaraan Policy Dialogue dengan tema Sustainable Corporate Governance Practices.

22. Bahan *Congratulatory Remarks* Menko Perekonomian pada *National Foundation Day* Korea
23. Bahan Presentasi dalam acara *China Indonesia Economic and Trade Cooperation Exchange Meeting*
24. *Policy Brief* Dampak Konflik Rusia - Ukraina terhadap Pasokan Bahan Pupuk ke Indonesia
25. Pembahasan Tindak Lanjut Komitmen Indonesia dalam Kerja Sama Perdagangan dengan Ukraina yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden RI
26. Bahan Masukan Rangkaian Kegiatan Presiden RI di *KTG G7* dan *Partner Countries*, Elmau, Jerman
27. Perkembangan Realisasi Komitmen Investasi UEA melalui *INA Sovereign Wealth Fund*
28. Laporan Peningkatan Perdagangan dan Ekspor Produk UMKM/Kerajinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Kawasan Timur Tengah dan Potensi Kerja Sama Energi Baru Terbarukan (EBT)
29. Inisiasi Penyelenggaraan *Business Matching and Matchmaking* Kawasan Afrika Secara Virtual Tahun 2023
30. Kegiatan *Indonesia – Germany Economic & Business Forum* dalam rangka Sinergi Agenda Presidensi G20 Indonesia – Presidensi G7 Jerman dan Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI – Jerman.
31. *Policy Brief* tentang Dampak Kebijakan Larangan Tenaga Kerja Anak Terhadap Perdagangan RI – Amerika Serikat (AS) dan Upaya Penanganan Isu Pekerja Anak di Indonesia

Pada 28 September 2022, *The Bureau of International Labor Affairs* (ILAB) yang merupakan unit kerja dari *United States Department of Labor* (US.DOL) telah menerbitkan “*2022 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor*”. Pada laporan tersebut terdapat beberapa komoditas/ produk ekspor Indonesia ke AS yang mempekerjakan anak kecil. Komoditas/ produk ekspor tersebut antara lain *footwear, gold, rubber, tin dan tobacco*.

Kriteria baru yang diusulkan dalam RUU Generalized System of Preferences (GSP) dan *Miscellaneous Tariff Bill Modernization Act of 2021* dan laporan US. DOL tersebut berpotensi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS. Hal ini perlu diantisipasi mengingat AS merupakan tujuan ekspor utama terbesar kedua bagi Indonesia setelah RRT.

Untuk mengetahui analisa yang lebih lengkap terkait besarnya potensi dampak kebijakan TVPRA AS terhadap perdagangan Indonesia termasuk produk-produk yang diperkirakan terdampak, telah dilakukan Analisa Dampak Kebijakan Larangan Tenaga Kerja Anak Terhadap Perdagangan RI- Amerika Serikat (AS) dan Upaya Penanganan Isu Pekerja Anak di Indonesia.

Usulan rekomendasi kebijakan ditempuh Indonesia terkait isu pekerja anak pada dapat dikaitkan dengan Kerjasama internasional dalam bidang Technical Assistance and Capacity Building (TACB), peran Indonesia sebagai ASEAN Chairmanship 2023, posisi bersama dalam kerangka IPEF dan implementasi G20 *Bali Declaration*.

32. *Policy Brief* tentang Potensi Perdagangan Indonesia - Fiji dalam Mendorong Peningkatan Ekspor dalam Kondisi Disrupsi Global

Pembentukan PTA Indonesia-Fiji, dapat mendorong peningkatan ekspor Indonesia melalui upaya penurunan tarif atas produk-produk potensial Indonesia yang dibutuhkan di negara Fiji. Ke depannya perlu dipertimbangkan untuk menindaklanjuti dengan kerja sama yang lebih tinggi (*incremental*) agar dapat dinegosiasikan terkait dengan hambatan non tarif yang ada.

Sebaiknya Indonesia me-request produk-produk dari Fiji yang dibutuhkan sebagai bahan baku Industri Indonesia yang berorientasi ekspor. Perlu penentuan realitas target yang akan dicapai dengan adanya timeline yang diikuti dengan langkah-langkah (*plan of action*) sehingga tujuan pembentukan PTA dapat dicapai sesuai waktu yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Berkaitan dengan menjadikan Fiji sebagai hub dalam perdagangan dengan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan, Pemri dapat mendorong entitas bisnis di Indonesia untuk melakukan outbound investment serta membangun fasilitas produksi pada beberapa sektor strategis di Fiji dengan memanfaatkan fasilitas *rules of origin* (RoO) yang dimiliki oleh Fiji dengan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan atau ke negara di mana Fiji terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas.

Secara politis, mengingat Fiji merupakan Leader Country di kawasan Pasifik, di mana pada lanskap kerja sama geopolitik mayoritas negara dengan kekuatan besar seperti China, Amerika, Australia, Selandia Baru berlomba memberi pengaruh terhadap Fiji dan cenderung suara Fiji didengar oleh negara besar tersebut. Sehingga negara-negara lainnya di kawasan pasifik senantiasa melihat dan mendengar apa yang dilakukan/ disuarakan oleh Fiji, sehingga penguatan kerja sama Indonesia - Fiji akan memberikan hal positif bagi Indonesia dalam upaya meminimalisir isu-isu separatist Papua.

33. Penyusunan bahan posisi Indonesia pada *Ministerial Interface Meeting 2022 on Sustainable Development Agenda Under the ASEAN Economic Community* dan ASEAN Economic Community Council ke-21
34. Penyusunan pidato dan butir wicara Presiden RI pada *APEC Economic Leaders' Meeting* dan penyusunan pidato Menko Perekonomian pada *APEC Leaders' Retreat Session 2*

35. Penyusunan pidato dan butir wicara Presiden RI pada KTT IMT-GT ke-14
36. Penyusunan bahan dan pidato Menko Perekonomian pada PTM BIMP-EAGA ke-25
37. *Drafting G20 Leaders' Declaration*
38. Penyusunan RKepsesmenko tentang Sekretariat Sherpa G20 Indonesia
39. Penyusunan RKepsesmenko tentang Sekretariat JCM Indonesia
40. Laporan Pertemuan KTT G20 di Bali kepada Presiden RI
41. Laporan Pelaksanaan Sherpa G20 Indonesia
42. Laporan Kegiatan JCM di Indonesia.

Dengan realisasi penyelesaian Analisis Kebijakan yang telah mencapai 100% dari 42 dokumen dibandingkan dengan target kinerja adalah 75% pada tahun 2022, maka Capaian Kinerja pada IKU 2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah 133,3%

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2022 yang telah mencapai 133,3%, maka Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sangat optimis dapat meraih capaian kinerja lebih baik lagi pada periode kinerja tahun berikutnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Dalam proses pencapaian realisasi kinerja persentase penyelesaian analisis kebijakan bidang ekonomi kerja sama ekonomi internasional ditemukan beberapa kendala, seperti adanya keterbatasan akses pegawai untuk mendapatkan data ter-update yang dapat mendukung analisis dalam *Policy Brief*, diperlukan data dan alat analisa yang lebih komprehensif agar *Policy Brief* memberikan analisis dan rekomendasi yang tajam. Meskipun begitu, hal-hal

tersebut tidak terlalu berdampak bagi terselesainya seluruh target dari IKU ini, sehingga seluruh target 42 dokumen analisis kebijakan dapat tercapai.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di dalam proses pelaksanaan serta penyelesaian 42 target dokumen analisis kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, pejabat fungsional Analis Kebijakan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia yaitu akses internet dari kantor dan dapat melakukan publikasi *policy brief* di situs web resmi Deputi VII yaitu di www.deputi7.ekon.go.id/ secara bebas dan tanpa biaya apapun.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam mencapai kinerja pada IKU 2.2 tidak diperlukan penggunaan anggaran. Hal ini dikarenakan proses penyusunan dokumen analisis kebijakan memanfaatkan sumber daya individu dan sumber daya yang telah tersedia yaitu akses internet dari kantor. Sehingga, dapat memaksimalkan efisiensi penggunaan anggaran.

3. Sasaran Strategis Ketiga

Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Baik

Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada perspektif *learning and growth* dan merupakan turunan dari sasaran strategis perspektif *learning and growth* level Kementerian yakni terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang profesional, inovatif dan berintegritas. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung efektivitas pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.

Tata kelola adalah suatu proses kebiasaan, kebijakan dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

CAPAIAN IKU 3.1.

Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Indeks tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah serangkaian statistik/penilaian yang menggambarkan:

- a) Persentase ASN yang memenuhi ketentuan Jam Pelajaran (JP);
- b) Nilai Evaluasi SAKIP;
- c) Persentase nilai Penilaian Mandiri Pemenuhan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- d) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Kemudian nilai akhir untuk menentukan posisi indeks adalah akumulasi nilai sub indikator ke 1 (satu) ditambah dengan nilai sub indikator ke 2 (dua) ditambah dengan nilai sub indikator ke 3 (tiga) serta ditambah dengan nilai sub indikator ke 4 (empat) sehingga diperoleh nilai akhir. Apabila sudah diperoleh nilai akhir, selanjutnya nilai tersebut dikonversi menjadi nilai 1-4 sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, yaitu:

- a) Sangat Baik (4), rentang nilai 85 – 100 (Indeks 4 dari 4)
- b) Baik (3), rentang nilai 75 – 84 (Indeks 3 dari 4)
- c) Buruk (2), rentang nilai 65 – 74 (Indeks 2 dari 4)
- d) Sangat Buruk (1), rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)

Adapun indeks tata kola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) sub indikator adalah 93,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19 Rincian Indeks Tata Kelola

No.	Sub Indikator Indeks Tata Kelola	Realisasi Capaian
1	Persentase Pemenuhan JP	96,47 %
2	Persentase Pemenuhan nilai SAKIP	83,46 %
3	Persentase Pemenuhan nilai PMPRB	93,74 %
4	Persentase Pemenuhan Kualitas Pelaksanaan Anggaran	99,92 %
Nilai Akhir		93,39 %
Konversi Nilai berdasarkan Kategori Rentang Nilai 85-100		4 (Sangat Baik)

Lebih lanjut penjelasan per sub indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase ASN di Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang memenuhi ketentuan Jam Pelajaran (JP).

Pada tahun 2022, pemenuhan Jam Pelajaran pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terealisasi sebesar 96,47%. Pemenuhan persentase JP tersebut tercapai berdasarkan rata-rata dari realisasi capaian JP dari masing-masing Keasdepan yaitu capaian Asdep Kerja Sama Asia sebesar 82,35%, capaian Asdep Kerja Sama Eropa, Afrika dan Timur Tengah sebesar 100%, capaian Asdep Kerja Sama Amerika dan Pasifik sebesar 100%, capaian Asdep Kerja Sama Regional dan Subregional sebesar 100%, capaian Asdep Kerja Sama Multilateral sebesar 100%.

Adapun JP tersebut tercapai dengan mengikuti FGD/ pelatihan/ seminar/ konferensi/ sarasehan/ sosialisasi, *workshop*/ lokakarya maupun *benchmarking* di mana hal ini merupakan alat untuk mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai.

2. Pemenuhan Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada periode evaluasi tahun 2021, nilai akhir implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebesar 83,46 dengan kategori “A” atau **Memuaskan**. Adapun rincian nilai per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.20 Rincian Nilai Per Komponen SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	40%	36%
2.	Pengukuran Kinerja	40%	32,50%
3.	Pelaporan Kinerja	20%	14,46%
Total Nilai			83,46

3. Pemenuhan Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Nilai PMPRB adalah nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*. Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB pada komponen Pengungkit baik Pemenuhan maupun Reform berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB).

Persentase pemenuhan nilai PMPRB tahun 2022 pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sebesar 93,74% atau 34,03 dari 36,30. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,59% atau 0.94 dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai sebesar 91,15% atau 33,09.

Adapun rincian PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Rincian Nilai Per Komponen RB

Komponen/ Sub Komponen		Bobot	Indeks RB	
			2021	2022
A.	Pengungkit	36,30	33,09	34,03
I	PEMENUHAN	14,60	13,46	13,70
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	2,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,88	1,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40	1,40
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,31	2,31
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,02	2,02
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,85	1,97
II	REFORM	21,70	19,63	20,32
1	Manajemen Perubahan	3,00	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	3,75	2,63	2,94
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,50	1,50
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,30	3,69
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	3,75
TOTAL PENGUNGKIT		36,30	33,09	34,03
Persentase Pemenuhan Nilai PMPRB = (Indeks RB/Bobot) x100%			91,15%	93,74%

4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional.

Realisasi yang dapat dimanfaatkan pada tahun 2022 dari pagu anggaran Rp. 56,634,177,000 (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) adalah sebesar Rp. 56,589,065,763 (Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau terserap 99,92% dari pagu anggaran

Adapun rincian lebih detail adalah sebagai berikut:

- Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Amerika dan Pasifik, sebesar Rp. 1,361,953,043,-
- Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Asia:
 - Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia, sebesar Rp. 1,361,564,604,-
 - Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy VII, sebesar Rp. 446,720,911,-
 - Layanan Dukungan Kegiatan Deputy VII, sebesar Rp. 2,275,453,348,-
- Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah, sebesar Rp. 1,360,897,581,-
- Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Multilateral, sebesar Rp. 46,589,557,991,-
- Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Regional dan Sub Regional, sebesar Rp. 3,192,918,285,-

Realisasi anggaran per kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran 2022

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Penyesuaian	Realisasi Anggaran	%	SISA
1.	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Amerika Pasifik	1,361,958	1,361,953,043	100%	4,957
2	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Asia				
	Rekomendasi Kebijakan Bidang KSE Asia	1,361,958,000	1,361,564,604	99,97%	393,396
	Layanan Program dan Tata Kelola di Deputy VII	446,778,000	446,720,911	99,99%	57,089
	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy VII	2,277,139,000	2,275,453,348	99,93%	1,685,652
3	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	1,361,959,000	1,360,897,581	99,92%	1,061,419
4	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Multilateral	46,629,981,00	46,589,557,991	99,91%	40,423,009
5	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Regional dan Sub Regional	3,194,404,000	3,192,918,285	99,95%	1,485,715
TOTAL		56,634,177,000	56,589,065,763	99,92%	47,247,374

Dengan realisasi pemenuhan seluruh sub indikator yang telah mencapai 93,39% maka apabila dikonversikan ke dalam indeks tata Kelola yang baik, maka masuk ke dalam kategori 4 atau Sangat Baik. Hal ini apabila dibandingkan dengan target kinerja yaitu 3 dari 4, maka Capaian Kinerja pada IKU 3.1. Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah 133,3%

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2022 yang telah mencapai 133,3%, maka Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sangat optimis dapat meraih capaian kinerja lebih baik lagi pada periode kinerja tahun berikutnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan capaian kinerja pada IKU ini, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan nilai indeks tata Kelola yang baik di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional telah melakukan beberapa program kegiatan pada tahun 2022 antara lain adalah:

1. Keikutsertaan ASN pada FGD Pemetaan Potensi Kerja Sama Pengembangan Industri Baja di Indonesia

Telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022 telah dilaksanakan dan diikuti oleh para pegawai/ASN di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

2. Dialog kinerja melalui rapat Pimpinan

Telah dilaksanakan secara rutin setiap minggu dan dihadiri oleh seluruh Asisten Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional serta Kepala Bidang Program dan Tata Kelola. Pembahasan secara khusus terkait dengan laporan kinerja dan evaluasi serta rencana kerja dan koordinasi kinerja dalam periode mingguan. Selain itu, dibahas juga isu-isu internal Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan kondisi terkini terkait dengan kondisi ekonomi internasional.

3. Rapat persiapan pembangunan WBK di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Telah dilaksanakan pada 24 Maret 2022 dan dihadiri oleh perwakilan Tim RB unit kerja.

4. Rapat pembahasan realisasi anggaran triwulan I

Telah dilaksanakan rapat internal di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional guna membahas penggunaan anggaran. Realisasi anggaran per Triwulan I mencapai 17,25%.

5. Dialog Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Telah dilaksanakan dialog kinerja, rapat penyusunan materi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 dan penyusunan informasi *Global Crisis Response Group* pada 11-12 Mei 2022.

6. Rapat pembahasan realisasi anggaran triwulan II

Telah dilaksanakan rapat internal di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional guna membahas penggunaan anggaran. Realisasi anggaran per triwulan II mencapai 43,86%.

7. Rapat pembahasan realisasi anggaran triwulan III

Telah dilaksanakan rapat internal di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional guna membahas penggunaan anggaran. Realisasi anggaran per triwulan III mencapai 73,18%.

8. Penyelenggaraan Kegiatan oleh Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Deputi VII

Telah diselenggarakan Pelatihan Dasar-dasar Teknik Keprotokolan pada 30 November 2022 dan Pelatihan Dasar-dasar Teknik Negosiasi/Perundingan pada 1 Desember 2022.

9. Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Orkestra Diplomasi dalam ASEAN, G20, dan APEC: Optimalisasi Modalitas pada tanggal 30 November 2022

10. Rapat Pimpinan pembahasan capaian kinerja dan rencana kerja

Telah diselenggarakan rapat pembahasan capaian kinerja TA 2022 dan rencana kerja TA 2023 pada 26 Desember 2022

11. Rapat pembahasan realisasi anggaran triwulan IV

Telah dilaksanakan rapat internal di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional guna membahas penggunaan anggaran. Realisasi anggaran per triwulan III mencapai 99,92%

12. Penyampaian laporan kinerja

Telah disampaikan laporan kinerja tahun 2022 kepada Menko Perekonomian melalui ND AK.03/596/D.VII.M.EKON/12/2022 pada 30 Desember 2022 perihal Laporan Akhir Tahun Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Telah menggunakan metode hybrid untuk melaksanakan kegiatan seperti rapat, pelatihan, sosialisasi atau seminar apabila tidak memungkinkan dilaksanakan keseluruhan secara fisik
- Telah melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan pegawai dan pejabat di masing-masing unit Eselon II dalam menyusun perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja baik secara fisik maupun virtual melalui media komunikasi online
- Telah memonitor penggunaan anggaran yang selaras dengan program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui aplikasi SAKTI dan melakukan pelaporan melalui aplikasi e-Monev.

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan metode *hybrid* dalam melaksanakan kegiatan rapat, pelatihan, atau seminar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit dan tetap mencapai *output* yang ditargetkan. Selain itu, koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di masing-masing unit Eselon II juga telah memaksimalkan penggunaan media komunikasi *online* seperti *WhatsApp* dan *Zoom Meeting* untuk meminimalkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan rapat tatap muka.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran

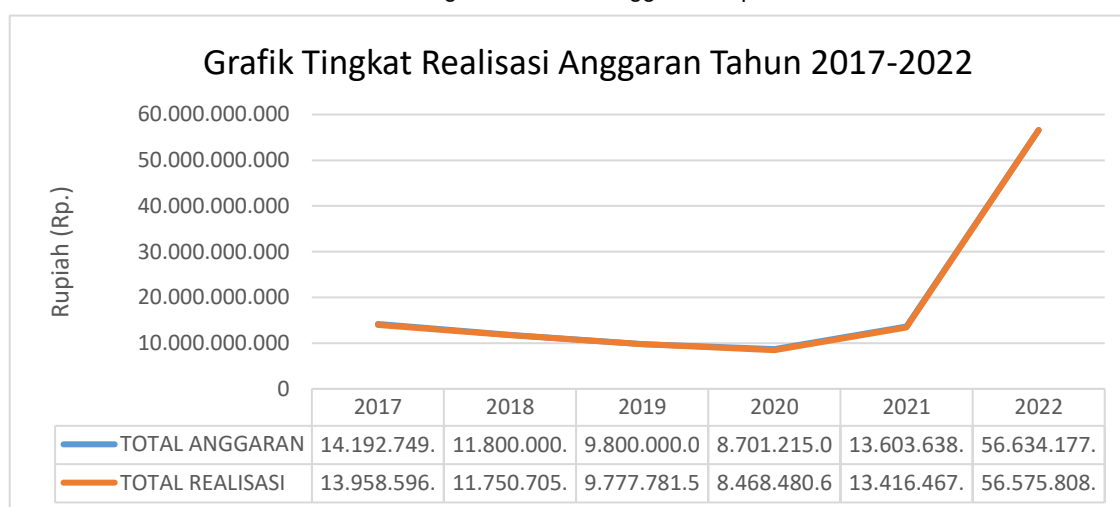
Pada tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendapat Pagu DIPA sebesar Rp 56.634.177.000 (lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2022 yang dimanfaatkan adalah sebesar Rp 56.575.808.563 (lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) atau terserap 99,90%. Dengan demikian, berdasarkan dari sasaran yang ditargetkan, penggunaan anggaran telah dapat diwujudkan dengan baik.

Berikut ini adalah tabel dan grafik tingkat realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional pada tahun 2017 hingga 2022:

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Deputi VII 2017 – 2022

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL ANGGARAN	14.192.749.000	11.800.000.000	9.800.000.000	8.701.215.000	13.603.638.000	56.634.177.000
TOTAL REALISASI	13.958.596.938	11.750.705.344	9.777.781.544	8.468.480.637	13.416.467.969	56.575.808.563

Grafik 3.1 Tingkat Realisasi Anggaran Deputi VII 2017-2022



Rincian realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. **Pagu Anggaran tahun 2022** adalah sebesar Rp. 56.634.177.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Asia & Layanan Kedeputan, sebesar Rp 4.085.875.000 ,-
 - b. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Amerika dan Pasifik, sebesar Rp 1.361.958.000,-
 - c. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah, sebesar Rp 1.361.959.000,-
 - d. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Regional dan Sub Regional, sebesar Rp 3.194.404.000,-
 - e. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Multilateral sebagai penyelenggara G20, sebesar Rp 46.629.981.000,-
2. **Realisasi Anggaran** per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 56.575.808.563 atau sebesar 99,90% dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Asia & Layanan Deputi, sebesar Rp 4.074.491.763,-
 - b. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Amerika dan Pasifik, sebesar Rp 1.361.953.043,-
 - c. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah, sebesar Rp 1.360.897.581,-
 - d. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Regional dan Sub Regional, sebesar Rp 3.192.918.285,-
 - e. Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Multilateral sebagai penyelenggara G20, sebesar Rp 46.589.557.891,-

Berikut ini adalah tabel dan grafik tingkat realisasi anggaran masing-masing Keasdepan di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional pada tahun 2017 hingga 2022:

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Per Keasdepan Tahun Anggaran 2022

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI	
			ANGGARAN (RP)	%
1	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Asia	4.085.875.000	4.074.491.763	99,72%
2	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Amerika Pasifik	1.361.958.000	1.361.953.043	100,00 %
3	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah	1.361.959.000	1.360.897.581	99,92%
4	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Regional dan Sub Regional	3.194.404.000	3.192.918.285	99,95%
5	Koordinasi Kebijakan Bidang KSE Multilateral	46.629.981.000	46.589.557.891	99,91%
Total		56.634.177.000	56.575.808.563,00	99,90%

Sementara itu anggaran dan realisasi belanja per-output Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.25 Anggaran dan Realisasi PerOutput Tahun Anggaran 2022

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa
Kegiatan 2510 (Asdep Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik)	1.361.958.000	1.361.953.043	100,00%	4.957
Output ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik)	1.038.666.000	1.038.662.296	100,00%	3.704
Output ABA.002 (Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Amerika Pasifik)	153.007.000	153.006.665	100,00%	335
Output ABA.003 (Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan)	104.053.000	104.052.082	100,00%	918
Output ABA.004 (Rekomendasi Penyelesaian Kasus Sengketa Perdagangan Bilateral)	66.232.000	66.232.000	100,00%	0
Kegiatan 2511 (Asdep Kerja Sama Ekonomi Asia & Layanan Kedeputian)	4.085.875.000	4.074.491.763	99,72%	11.383.237

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa
Kegiatan 2511 (Kerja Sama Ekonomi Asia)	1.361.958.000	1.352.317.504	99,29%	9.640.496
Output ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia)	689.366.000	679.922.668	98,63%	9.443.332
Output ABA.002 (Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Asia)	197.524.000	197.501.685	99,99%	22.315
Output ABA.003 (Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan)	475.068.000	474.893.151	99,96%	174.849
Kegiatan 2511 (Layanan Dukungan Manajemen Internal)	2.723.917.000	2.722.174.259	99,94%	1.742.741
Output EAC.001 (Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional)	446.778.000	446.720.911	99,99%	57.089
Output EAC.002 (Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional)	2.277.139.000	2.275.453.348	99,93%	1.685.652
Kegiatan 2512 (Asdep Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah)	1.361.959.000	1.360.897.581	99,92%	1.061.419
Output ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah)	737.239.000	736.369.384	99,88%	869.616
Output ABA.002 (Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Eropa, Afrika dan Timur Tengah)	180.146.000	180.080.401	99,96%	65.599
Output ABA.003 (Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan)	444.574.000	444.447.796	99,97%	126.204
Kegiatan 2513 (Asdep Kerja Sama Ekonomi Multilateral)	46.629.981.000	46.585.547.891	99,90%	44.433.109
Output ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral)	818.190.000	808.350.191	98,80%	9.839.809
Output ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Implementasi JCM)	145.900.000	141.417.511	96,93%	4.482.489

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa
Output ABA.003 (Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia pada Forum Internasional)	4.660.000	4.156.500	89,20%	503.500
Output ABA.004 (Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Sherpa Track Indonesia pada Forum Presidensi G20)	45.661.231.000	45.631.623.689	99,94%	29.607.311
Kegiatan 2514 (Asdep Kerjasama Regional dan Sub Regional)	3.194.404.000	3.192.918.285	99,95%	1.485.715
Output ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional)	1.520.160.000	1.519.872.728	99,98%	287.272
Output ABA.002 (Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Internasional)	29.871.000	29.800.200	99,76%	70.800
Output ABA.003 (Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional)	1.644.373.000	1.643.245.357	99,93%	1.127.643
Realisasi Deputi VII	56.634.177.000	56.575.808.563	99,90%	58.368.437

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran (CKK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Pengukuran Efisiensi dapat diketahui dari aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Keterangan:

E	: Efisiensi
PAKi	: Pagu Anggaran Keluaran i
RAKi	: Realisasi Anggaran Keluaran i
CKi	: Capaian Keluaran i

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Saat ini proses penilaian pada aplikasi SMART DJA sedang berlangsung, sehingga belum dapat dihitung (N/A) berapa tingkat efisiensi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pencapaian kinerja di tahun 2022.

Namun berdasarkan hasil perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam pencapaian kinerja di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26 Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2022

No	Output	Capaian Keluaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisaasi (Rp)
1	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	5	Rp1.361.958.000	Rp1.361.953.043
2	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia/Sekretaris Deputi	7	Rp4.085.875.000	Rp4.074.491.763
3	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	4	Rp1.361.959.000	Rp1.360.897.581
4	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	5	Rp46.629.981.000	Rp46.589.557.891
5	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	5	Rp3.194.404.000	Rp3.192.918.285
TOTAL		26	Rp56.634.177.000	Rp56.579.818.563
Efisiensi Penggunaan Anggaran				1,03%

Dengan demikian, dapat dihitung bahwa capaian efisiensi adalah sebesar **1,03%**. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 deputi VII berhasil melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), serta mencapai target atas setiap keluaran (*output*) yang diperjanjikan, dengan mengoptimalkan besaran pagu anggaran yang tersedia.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia



DEPUTI VII
Kerja Sama Ekonomi Internasional
Kementerian Bidang Perekonomian

4 EVALUASI KINERJA



4 EVALUASI KINERJA

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Salah satu bentuk perencanaan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional periode tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kebijakan bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional yang berkualitas serta penata kelolaan deputy bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional yang baik.

Dalam proses Reformasi Birokrasi, suatu perencanaan kinerja penting untuk dilakukan evaluasi secara periodik. Evaluasi perencanaan kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk melihat secara komprehensif tentang kondisi obyektif suatu perencanaan kinerja dengan implementasinya serta dibandingkan dengan perencanaan tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi perencanaan kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional melakukan pemetaan berbagai permasalahan yang menjadi isu aktual tentang keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah perencanaan kinerja secara komprehensif dan obyektif serta dapat memberikan usulan guna meningkatkan perbaikan berkelanjutan (*continuing improvement*).

Berikut ini adalah tabel perbandingan perencanaan dan realisasi/capaian dari Renstra 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2020, 2021 dan 2022:

Tabel 4.1 Perbandingan Perencanaan dan Realisasi, Capaian dari Renstra 2020-2024 dan PK TA 2020, 2021, 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN IKU (%)	STATUS
I	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional					
1.1	Persentase <i>market share</i> ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia	Renstra 2022	65,5 - 67,5 %	69,2%	101,8%	Melebihi Ekspektasi
		PK 2022	66-68%	69,2%	101,8%	
		PK 2021	65,5 - 67,5 %	66,3%	100%	
		PK 2020	65-67 %	65,2%	100%	
1.2	Jumlah kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral) yang disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian	Renstra 2022	6	16	100%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		PK 2022	17	16	94%	
		PK 2021	8	8	100%	
		PK 2020	6	6	100%	
1.3	Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara/ Menteri di forum ekonomi internasional yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	Renstra 2022	2	2	100%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2022	2	2	100%	
		PK 2021	2	2	100%	
		PK 2020	2	2	100%	
1.4	Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan	Renstra 2022	23	25	100%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		PK 2022	26	25	96%	
		PK 2021	21	21	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN IKU (%)	STATUS
	Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian	PK 2020	16	16	100%	
1.5	Persentase ratifikasi/ perjanjian kerja sama ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian.	Renstra 2022	5	5 dari 6	100%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2022	80-90%	83%	100%	
		PK 2021	6	6	100%	
		PK 2020	5	5	100%	
II	Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif					
2.1	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Renstra 2022	100%	100%	100%	Melebihi Ekspektasi
		PK 2022	3 dari 4	4 dari 4	133%	
		PK 2021	100%	100%	100%	
		PK 2020	100%	100%	100%	
2.2	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Internasional	PK 2022	75%	100%	133%	Melebihi Ekspektasi
III	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional					
3.1.	Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	PK 2022	3 dari 4	4 dari 4	133%	Melebihi Ekspektasi
	a. Persentasi ASN di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi. *Per 2022 menjadi: Persentase ASN di Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang	Sub Komponen PK 2022	75%	96,47%	128%	
		Renstra 2022	77%	96,47%	125%	
		PK 2021	70%	66,87	95%	
		PK 2020	75%	35,09%	46,79%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN IKU (%)	STATUS
	memenuhi ketentuan JP ASN					
	b. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.	Sub Komponen PK 2022	83	83,46	100%	
		Renstra 2022	87	83,46	96%	
		PK 2021	85	83,08	97,74%	
		PK 2020	85	81,14	95,8%	
	c. Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.	Sub Komponen PK 2022	80%	93,74%	117%	
		Renstra 2022	87%	93,74%	107,7%	
		PK 2021	85%	91,15%	107%	
		PK 2020	85%	75,41%	85%	
	d. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.	Sub Komponen PK 2022	92%	99,92%	109%	
		Renstra 2022	92%	99,92%	109%	
		PK 2021	90%	97,75%	108,61%	
		PK 2020	90%	98,7%	109,67%	

Berdasarkan data perbandingan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target-target yang telah ditetapkan pada perencanaan tahun 2022 dapat terealisasi dengan 3 (tiga) catatan realisasi yaitu belum memenuhi ekspektasi, memenuhi ekspektasi, dan melebihi ekspektasi. Selain perbandingan perencanaan dengan realisasi capaian kinerja, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan serta perubahan pada perencanaan baik pada Renstra Deputy 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputy 2022.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait evaluasi pelaksanaan serta perubahan perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional:

A.1. Evaluasi Pelaksanaan serta Perubahan pada Renstra Deputy 2020-2024

Isu yang ditangani oleh Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional bersifat dinamis. Untuk dapat mengakomodir perkembangan perekonomian terkini serta meningkatkan keandalan sumber daya manusia, diusulkan perubahan Renstra tingkat Kedeputan. Beberapa hasil evaluasi dan usulan perubahan terhadap Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Evaluasi Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 2020-2024

No.	IKU	Target					Satuan	Evaluasi	Rekomendasi
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	Sasaran Strategis I: Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional								
1.1.	Persentase <i>market share</i> ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia	66-67	65,5-67,5	66-68	66,5-68,5	67-69	Persentase	Pada tahun 2022, indikator Persentase <i>market share</i> ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia telah dikaji ulang oleh Bapak Deputy. Beliau menyampaikan agar mulai perencanaan tahun 2023, indikator <i>market share</i> diganti menjadi dampak FTA yang telah /PTA/CEPA/ Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia agar kesepakatan kerjasama internasional yang telah dilaksanakan lebih dapat terlihat dampaknya.	Pada perencanaan tahun 2023, Indikator persentase <i>market share</i> agar diganti menjadi "Persentase Dampak FTA/PTA/CEPA/ Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra".
1.2.	Jumlah kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral) yang disepakati	6	7	6	8	4	Kesepakatan	Pada tahun 2022, terdapat penambahan target capaian kesepakatan, karena semakin tahun jumlah kerja sama ekonomi internasional yang disepakati bertambah dari target pada Renstra 6 kesepakatan, menjadi 17 kesepakatan pada PK 2022. Begitu juga pada perencanaan tahun 2023, disebabkan jumlah kerja sama ekonomi internasional yang disepakati bertambah, maka terdapat penambahan target dari 8 menjadi 14 kesepakatan.	Pada perencanaan tahun 2023, dilanjutkan dengan penambahan jumlah target Renstra menjadi 14 kesepakatan.

No.	IKU	Target					Satuan	Evaluasi	Rekomendasi
		2020	2021	2022	2023	2024			
1.3.	Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi Kemenko Perekonomian	5	8	13	14	15	Ratifikasi (Kumulatif)	Meskipun pada tahun 2022, satuan target berubah menjadi persentase range capaian yaitu 80-90%. Hal ini karena menyesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Deputy Tahun 2022. Namun untuk perencanaan tahun 2023, masih sesuai dengan keadaan terkini, yaitu satuan target tetap Jumlah Ratifikasi yang terselesaikan.	Pada perencanaan tahun 2023, dilanjutkan dengan satuan target pada Renstra yaitu tetap berupa Jumlah Ratifikasi yang terselesaikan
1.4.	Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral	16	21	23	23	21	Kesepakatan	Meskipun pada tahun 2022, terdapat penambahan target capaian kesepakatan, karena semakin tahun jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian bertambah dari 23 menjadi 26. Namun untuk perencanaan tahun 2023, masih sesuai dengan keadaan terkini, yaitu jumlah target tetap 23 kesepakatan.	Pada perencanaan tahun 2023, dilanjutkan dengan jumlah target sesuai Renstra yaitu 23 kesepakatan.
1.5.	Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara/ Menteri di forum ekonomi internasional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian	2	3	2	3	2	Kesepakatan	Masih sesuai dengan keadaan terkini.	Pada perencanaan tahun 2023 dilanjutkan sesuai target pada Renstra 2023
2.	Sasaran Strategis II: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif								
2.1.	Persentase rekomendasi kebijakan dalam kerja sama ekonomi internasional (Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) yang diterima Menko Perekonomian	100	100	-	-	-	Persentase	IKU "Persentase Rekomendasi Kebijakan dalam Kerja Sama Ekonomi Internasional (Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) yang diterima Menko Perekonomian" belum menunjukkan penilaian atas (1) kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan <i>stakeholder</i> terkait yang merupakan tupoksi dari Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional serta (2) Peran dari Jabatan Fungsional dalam mencapai IKU Deputy.	Pada perencanaan tahun 2023, dilanjutkan sesuai dengan perubahan Sasaran Program dan IKU di tahun 2022.
	Berubah menjadi: Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang	-	-	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	Sehingga sejak tahun 2022, Sasaran program diubah menjadi "Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif".	

No.	IKU	Target					Satuan	Evaluasi	Rekomendasi
		2020	2021	2022	2023	2024			
	Kerja Sama Ekonomi Internasional								
2.2.	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	-	-	75	75	75	Persentase	IKU juga di <i>breakdown</i> menjadi 2, yaitu: 2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional (target: baik [3 dari 4]) 2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional (Target 75%)	
3	Sasaran Strategis III: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang baik								
	Persentase ASN dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi	75	75	77	77	77	Persentase	Sebelumnya IKU terhenti di Eselon I. Namun sejak tahun 2022, telah dilakukan <i>cascading</i> kepada Eselon II. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II juga telah menggunakan <i>Balance Score Card</i> (BSC). Dengan demikian perspektif Learning and Growth diturunkan kepada Eselon II dengan rincian sebagai berikut: - Sub komponen "Persentase ASN dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi" berubah menjadi, "Persentase ASN yang memenuhi ketentuan Jam Pelajaran (JP)" pada perencanaan 2022 - Selain itu, berdasarkan surat dari Kemenpan Nomor: B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi RB Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik RB, bahwa pmprrb sudah tidak lagi menjadi salah satu model evaluasi rb di tahun 2023, maka Renstra 2023 tidak akan mencantumkan lagi PMPRRB sebagai salah sub komponen perhitungan Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Baik. Sehingga per 2022, IKU telah disederhanakan dari 4 menjadi 1 IKU, yaitu: "Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional"	Pada perencanaan tahun 2023, dilanjutkan sesuai dengan perubahan IKU di tahun 2022.
	Nilai SAKIP Deputy	85	85	87	87	87	Nilai		
	Persentase Pemenuhan Nilai PMPRRB Deputy	85	85	87	87	87	Nilai		
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy	90	90	92	92	92	Persentase		
3.1.	Berubah menjadi: Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	-	-	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks		

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi, maka usulan Renstra Perubahan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Perubahan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 2023-2024

No.	IKU	Target		Satuan
		2023	2024	
1	Sasaran Strategis I: Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional			
1.1.	Persentase Dampak FTA/PTA/CEPA/ Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra	30%	30%	Persentase
1.2.	Jumlah kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral) yang disepakati	14	4	Kesepakatan
1.3.	Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi Kemenko Perekonomian	3	15	Ratifikasi (Kumulatif)
1.4.	Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral	23	21	Kesepakatan
1.5.	Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara/ Menteri di forum ekonomi internasional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian	3	2	Kesepakatan
2.	Sasaran Strategis II: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif			
2.1	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
2.2.	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	75	75	Persentase
3.	Sasaran Strategis III: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang baik			
3.1.	Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4	3 dari 4	Indeks

- Bagian yang berubah dari Renstra sebelumnya ditandai warna kuning

A.2. Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2022

Berikut ini adalah tabel evaluasi Perjanjian Kinerja 2022 beserta evaluasi dan rekomendasi:

Tabel 4.4. Evaluasi pada Perjanjian Kinerja 2022

No.	Sasaran Program	IKU	Target	Realisasi	Evaluasi	Rekomendasi
Perspektif: Stakeholder						
1	Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1. Persentase <i>market share</i> ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia	66-68%	69,2%	• IKU akan lebih relevan jika langsung menghitung dampak dari FTA/PTA/CEPA/ Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra • Target tercapai	IKU diubah pada PK 2023 menjadi "Persentase Dampak FTA/PTA/CEPA/ Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra".
		1.2. Jumlah kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral) yang disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian	17	16	• IKU masih sesuai dengan Renstra • Terdapat 1 target yang tidak tercapai	IKU dilanjutkan pada PK 2023
		1.3. Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara/ Menteri di forum ekonomi internasional yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2	2	• IKU masih sesuai dengan Renstra • Target tercapai	IKU dilanjutkan pada PK 2023
		1.4. Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian	26	25	• IKU masih sesuai dengan Renstra • Terdapat 1 target yang tidak tercapai	IKU dilanjutkan pada PK 2023

No.	Sasaran Program	IKU	Target	Realisasi	Evaluasi	Rekomendasi
		1.5. Persentase ratifikasi/ perjanjian kerja sama ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian	80-90% (dari 6 ratifikasi)	83% (tercapai 5 dari 6 ratifikasi)	• IKU masih sesuai dengan Renstra • Target tercapai • Ratifikasi yang telah selesai diharapkan dapat diimplementasikan untuk dapat segera menghasilkan dampak pada perekonomian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sebaiknya ditambahkan <i>wording <u>implementasi</u></i> pada IKU ini.	IKU dilanjutkan pada PK 2023 menjadi: Jumlah Ratifikasi dan Implementasi Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
Perspektif: Internal Business Process						
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif	2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4	4 dari 4	• IKU masih sesuai dengan Renstra Perubahan 2022 • Target tercapai	IKU dilanjutkan pada PK 2023
		2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Internasional	75%	100%	• IKU masih sesuai dengan Renstra Perubahan 2022 • Target tercapai	IKU dilanjutkan pada PK 2023
Perspektif: Learning and Growth						
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3.1. Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4	4 dari 4	• IKU masih sesuai dengan Renstra Perubahan 2022 • Target tercapai	IKU dilanjutkan pada PK 2023

- Bagian yang berubah dari PK sebelumnya ditandai warna **kuning**

Adapun beberapa perencanaan yang belum memenuhi ekspektasi di PK 2022 adalah pada IKU 1.2 yang mengalami penurunan menjadi 94% dibandingkan capaian di tahun 2021 yang memenuhi ekspektasi 100%. Hal ini karena terdapat 1 (satu) kerja sama yang belum dapat disepakati dari 17 target kesepakatan, yaitu kerja sama Indonesia Pakistan *Trade in Goods Agreement* dan Indonesia Bangladesh PTA dimana hingga saat ini, Pakistan belum memberikan *counter draft* yang disebabkan oleh kondisi dalam negeri Pakistan yang menghadapi krisis ekonomi dan politik. Sementara itu kerja sama IB-PTA belum dapat tercapai

karena pihak Pemerintah Indonesia belum dapat memberikan tambahan *request* pos tarif yang diminta oleh Bangladesh terkait dengan industri TPT.

Selanjutnya indikator kinerja yang belum memenuhi ekspektasi lainnya adalah pada IKU 1.4. yang mengalami penurunan menjadi 96% dibandingkan capaian di tahun 2021 yang memenuhi ekspektasi 100%. Hal ini karena kondisi politik dalam negeri di Timor Leste yang sedang tidak stabil akibat adanya pemilihan Presiden.

Terlepas dari perencanaan target PK 2022 yang mengalami penurunan seperti pada IKU 1.2 dan IKU 1.4, di sisi lain terdapat peningkatan signifikan melebihi ekspektasi pada capaian kinerja PK 2022, yaitu pada 4 (empat) IKU, yaitu IKU 1.1, IKU 2.1, IKU 2.2, dan IKU 3.1 dimana capaian lebih dari 100%.

- **IKU 1.1. Persentase *market share* ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/PTA/CEPA terhadap Total Ekspor Indonesia** yang mengalami pencapaian kinerja lebih dari 100% yaitu 101,8% dikarenakan realisasi kinerja mencapai 69,2% dibandingkan dengan target range persentase antara 66-68% pada tahun 2022.
- **IKU 2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional** yang mengalami pencapaian kinerja lebih dari 100% yaitu 133% dikarenakan realisasi kinerja mencapai nilai indeks 4 dibandingkan dengan target 3 dari 4 pada tahun 2022.
- **IKU 2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Internasional** yang mengalami pencapaian kinerja lebih dari 100% yaitu 133% dikarenakan realisasi kinerja mencapai 100% dibandingkan dengan target penyelesaian 75% pada tahun 2022.
- **IKU 3.1. Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional** yang mengalami pencapaian kinerja lebih dari 100% yaitu 133% dikarenakan realisasi kinerja mencapai nilai indeks 4 dibandingkan dengan target 3 dari 4 pada tahun 2022.

Lebih lanjut evaluasi terhadap perencanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pada Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

- Sebagian besar Rencana Aksi pada Sasaran Strategis 1 dapat terlaksana dengan baik.
- **Pada IKU 1.1 Persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia** terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 101,8% yaitu 69,2% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 yaitu 66-68%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yang sebesar 66,3%, maka realisasi 69,2% tahun 2022 meningkat sebesar 2,9%. Hal ini merupakan tanggung jawab ke deputian untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja kedepannya.
- **Pada IKU 1.2 Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian** terdapat satu Rencana Aksi yang tidak dapat terlaksana yaitu Kesepakatan pada SOM Trilateral RI - Timor Leste – Australia. Rencana Aksi ini tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya faktor eksternal, dimana hal ini karena kondisi politik dalam negeri di Timor Leste yang sedang tidak stabil akibat adanya pemilihan Presiden. Meskipun begitu, secara keseluruhan target telah tercapai 25 dari 26 sehingga tercapai Capaian Kinerja sebesar 96%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 yang mencapai 100%, maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 96% mengalami penurunan sebesar 0,4%. Hal ini, tentunya menjadi pengingat untuk ke deputian agar tidak lengah dan mampu mempertahankan performa kinerja agar target rencana aksi dapat terlaksana sesuai harapan dan dapat meningkatkan prestasi kinerja kedepannya.

- **Pada IKU 1.3 Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian** semua target telah terpenuhi dengan baik dengan Capaian Kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 yang juga mencapai 100%, maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% mengalami konsistensi prestasi. Hal ini merupakan tanggung jawab ke deputian untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja kedepannya.
- **Pada IKU 1.4 Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian** terdapat satu Rencana Aksi yang tidak dapat terlaksana yaitu lanjutan negosiasi Preferensial Perdagangan Barang antara RI – Pakistan (IP-TIGA) dan RI – Bangladesh (IB-PTA). Rencana Aksi ini tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya faktor eksternal, dimana Pakistan masih meminta waktu untuk melakukan koordinasi secara internal. Meskipun begitu, secara keseluruhan target telah tercapai 16 dari 17 sehingga tercapai Capaian Kinerja sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 yang mencapai 100%, maka capaian kinerja tahun 2022 yang sebesar 94% mengalami penurunan sebesar 0,6%. Hal ini, tentunya menjadi pengingat untuk ke deputian agar tidak lengah dan mampu mempertahankan performa kinerja agar target rencana aksi dapat terlaksana sesuai harapan dan dapat meningkatkan prestasi kinerja kedepannya.
- **Pada IKU 1.5 Persentase ratifikasi/ perjanjian kerja sama ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian** terdapat satu Rencana Aksi yang tidak dapat tercapai hingga keluarnya Peraturan Presiden (PERPRES) pada ratifikasi Implementasi ASEAN *Trade in Services Agreement* (ATiSA). Sehingga realisasi dari 6 target pada rencana aksi, tercapai 5 Ratifikasi, atau sebesar 83%. Meski demikian, target kinerja pada Perjanjian Kinerja Deputi adalah *range* penyelesaian ratifikasi 80-90%, sehingga dengan realisasi 83% maka Capaian Kinerja Deputi pada IKU ini telah memenuhi ekspektasi, yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun

2021 yang mencapai 100%, maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% mengalami konsistensi prestasi. Hal ini merupakan tanggung jawab ke deputian untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja kedepannya.

Hambatan

- Pelaksanaan Rencana Aksi pada Sasaran Strategis 1, dapat terlaksana bukan tanpa hambatan, dimana faktor eksternal khususnya pihak Pemerintahan dari *counterpart* tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Selain itu pembatasan pertemuan secara fisik yang sempat berlaku di awal tahun juga membuat banyak pertemuan yang mengalami *reschedule*.
- Meskipun demikian dengan ketersediaan teknologi yang memadai, maka kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara virtual.

2. Evaluasi pada Sasaran Strategis 2:

Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif

- Seluruh target kinerja pada Sasaran Strategis 1 dapat terlaksana dengan baik, capaian kinerja dapat tercapai 133,33% melebihi ekspektasi dimana target kinerja pada PK adalah 100%.
- **Pada IKU 2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional** capaian kinerja adalah 4 dari 4 (sangat baik) atau mencapai 133,33% atau melebihi target sebesar 33,33% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 yaitu indeks 3 dari 4 (baik). Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 yang mencapai 100%, maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 133,33% mengalami peningkatan prestasi. Hal ini merupakan tanggung jawab Deputian untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja kedepannya.

- **Pada IKU 2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Internasional** realisasi penyelesaian adalah 100%, hal ini melebihi target 2022 sebesar 75%, sehingga capaian kinerja menjadi 133,33%. IKU ini adalah IKU yang baru muncul pada PK Tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Meski demikian, dengan capaian yang melebihi target kinerja hal ini menjadi tanggung jawab Kedeputian untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja kedepannya.

Hambatan

- Pelaksanaan Rencana Aksi pada Sasaran Strategis 2, dapat terlaksana bukan tanpa hambatan, dimana pandemi COVID 19 menyebabkan koordinasi dengan K/L terkait atau *counterpart* asing tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka. Akan tetapi, dengan ketersediaan teknologi yang memadai, maka kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara virtual.
- Penyusunan dokumen analisis kebijakan yang sebagian besar dilakukan dengan metode *team work* juga sempat mengalami kendala koordinasi dalam proses penyelesaian penyusunannya.
- Meskipun demikian dengan ketersediaan teknologi yang memadai, maka kegiatan tetap dapat dilaksanakan meskipun terkadang dilaksanakan secara virtual maupun fisik.

3. Evaluasi pada Sasaran Strategis 3:

Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Baik.

- Seluruh target kinerja pada Sasaran Strategis 3 dapat terlaksana dengan baik.
- **Pada IKU 3.1. Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional**, realisasi kinerja adalah 4 dari 4 (sangat baik), hal ini melebihi target 2022 yaitu 3 dari 4 (baik). Sehingga capaian kinerja menjadi 133,33%.

- Realisasi kinerja tersebut merupakan gabungan dari 4 (empat) sub indikator, yaitu (1) Persentase pemenuhan Jam Pelajaran; (2) Persentase pemenuhan nilai SAKIP; (3) Persentase pemenuhan nilai PMPRB; dan (4) Persentase pemenuhan Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

➤ **Sub Indikator Pertama**

Pada pemenuhan Jam Pelajaran tahun 2022 telah tercapai realisasi sebesar 96,47%. Realisasi ini jika dibandingkan dengan Target Kinerja 75%, maka capaian kinerja pada sub indikator ini melebihi ekspektasi yaitu mencapai 128%. Sementara itu, capaian ini belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2021 karena sub indikator ini merupakan target yang baru ada pada PK 2022. Meski demikian, dengan capaian yang sudah di atas 100% maka hal ini menjadi tanggung jawab Kedeputian untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan Jam Pelajaran oleh seluruh pegawai pada tahun kedepan.

➤ **Sub Indikator Kedua**

Pada pemenuhan nilai SAKIP 2022 telah tercapai realisasi 83,46. Realisasi ini jika dibandingkan dengan Target Kinerja 83, maka capaian kinerja pada sub indikator ini sesuai ekspektasi yaitu mencapai 100%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada PK 2021 yang sebesar 83,08, maka capaian kinerja 2022 ini meningkat sebesar 0,38%. Dengan capaian nilai SAKIP yang sudah optimal, hal ini menjadi tanggung jawab Kedeputian untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP kedepannya.

➤ **Sub Indikator Ketiga**

Pada pemenuhan nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 2022 telah tercapai realisasi 93,74%. Realisasi ini jika dibandingkan dengan Target Kinerja 80%, maka capaian kinerja pada sub indikator ini melebihi ekspektasi yaitu mencapai 117%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada PK 2021 yang sebesar 91,15%, maka capaian kinerja 2022 ini meningkat sebesar 2,59%. Dengan peningkatan

pada capaian tersebut, hal ini menjadi tanggung jawab Kedeputian untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai PMPRB kedepannya.

➤ **Sub Indikator Keempat**

Pada pemenuhan Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah tercapai realisasi 99,92 %. Realisasi ini jika dibandingkan dengan Target Kinerja 92%, maka capaian kinerja pada sub indikator ini melebihi ekspektasi yaitu mencapai 109%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada PK 2021 yang sebesar 97,75%, maka capaian kinerja 2022 ini meningkat sebesar 2,17%. Dengan peningkatan pada capaian tersebut, hal ini menjadi tanggung jawab Kedeputian untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional kedepannya.

- Dari hasil penjumlahan ke 4 (empat) sub indikator di atas, maka muncul nilai akhir realisasi capaian yaitu 93,39%. Sehingga berdasarkan konversi nilai indeks melalui kategori rentang nilai antara 85-100%, maka capaian 93,39% tersebut masuk ke dalam kategori nilai indeks 4 dari 4 (sangat baik). Capaian kinerja ini apabila dibandingkan dengan Target kinerja pada tahun 2022 yaitu 3 dari 4, maka Capaian Kinerja 4 dari 4 melebihi ekspektasi sebesar 33,33% yaitu 133,33%.
- **Capaian nilai indeks tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional pada IKU 3.1** ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 tidak bisa dilakukan, karena pada tahun 2021, target kinerja bukan merupakan nilai indeks. Meski demikian, dengan capaian yang telah sangat baik yaitu 4 dari 4, maka hal ini menjadi tanggung jawab Kedeputian untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja kedepannya.

Hambatan

- Pelaksanaan Rencana Aksi pada Sasaran Strategis 3, dapat terlaksana bukan tanpa hambatan, dimana terdapat beberapa kali terjadi *missed communication* antara pegawai yang bekerja di bawah bidang Program dan Tata Kelola dengan pegawai yang bekerja di bawah Keasdepan, terutama dalam hal menyusun laporan kinerja maupun laporan monitoring dan evaluasi PMPRB unit eselon I.
- Namun hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik atas arahan pimpinan yang jelas. Sehingga tidak mempengaruhi hasil akhir capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 ini.

Demikian beberapa catatan dari evaluasi terhadap perencanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2022. Meski terdapat beberapa hambatan, dengan adanya bantuan dan arahan serta dukungan yang nyata dari para pimpinan, maka hal-hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik, sehingga Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tetap dapat meningkatkan prestasi kerjanya di atas target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan performa dan komitmen Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional untuk menyusun perencanaan kinerja yang lebih baik dan terukur, bahkan jika memungkinkan dapat melampaui prestasi yang telah diraih pada tahun 2022 di masa mendatang.

A.3. Rekomendasi Arah Kebijakan PK 2023 (Sasaran, Indikator, Target dan Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil evaluasi PK 2022 sebelumnya, maka usulan PK Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2023 disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 4.5. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Perspektif: Stakeholder			
1.	Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1 Persentase Dampak FTA/PTA/CEPA/Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra	30%
		1.2 Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	23
		1.3 Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	13
		1.4 Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	3
		1.5 Jumlah Ratifikasi dan Implementasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	4
Perspektif: Internal Business Process			
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif	2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4
		2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	75
Perspektif: Learning and Growth			
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4

Pada penyusunan dokumen perencanaan pada Perjanjian Kinerja 2023 turut ditambahkan informasi tentang hubungan kinerja *crosscutting* antar bidang di lingkungan internal Kemenko Perekonomian, khususnya pada setiap indikator kinerja yaitu:

Tabel 4.6. *Cross Cutting* dengan Unit Kerja Internal Kemenko Perekonomian

Indikator Kinerja Utama	Cross Cutting
1.1. Persentase Dampak FTA/PTA/CEPA/Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra	• Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan • Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
1.2. Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	• Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan; • Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; • Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi; • Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; • Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; • Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; • Sekretariat Kemenko Perekonomian; • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
1.3. Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	• Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan; • Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; • Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi; • Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; • Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; • Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; • Sekretariat Kemenko Perekonomian; • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
1.4. Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	• Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; • Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi; • Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; • Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
1.5. Jumlah Ratifikasi dan Implementasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	• Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; • Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; • Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; • Sekretariat Kemenko Perekonomian.

Selain itu, dalam rangka mencapai seluruh target kinerja pada Perjanjian Kinerja 2023 di atas, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional turut didukung dengan rencana kebutuhan anggaran Rp 15.819.060.000,-. Rencana kebutuhan anggaran ini berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional T.A. 2023. Lebih lanjut tentang rencana kebutuhan anggaran untuk masing-masing unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Rencana Kebutuhan Anggaran pada Unit Kerja Eselon II T.A. 2023

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	Rp 1.500.000.000
2.	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	Rp 4.500.000.000
3.	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	Rp 1.900.000.000
4.	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Rp 1.500.000.000
5.	Koordinasi Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional	Rp 6.419.060.000
JUMLAH		Rp 15.819.060.000
Lima Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah		

Namun sehubungan dengan arahan Sesmenko Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui ND No. PR.2.2/231/SES.M.EKON/12/2022 tentang Penyampaian *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 pada tanggal 20 Desember 2022 bahwa sesuai dengan arahan Presiden dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, maka Presiden melanjutkan kebijakan Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) pada Pelaksanaan APBN 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka besaran *Automatic Adjustment* pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.8. Besaran *Automatic Adjustment* Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional T.A. 2023

Kode Keg	Nama Kegiatan	2023	Adjustment (7,66 %)	Saldo
2510	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik	1.500.000.000	114.900.000	1.385.100.000
2511	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Asia	4.500.000.000		
	Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia	1.500.000.000	114.900.000	1.385.100.000
	Layanan Deputi-Protakel	500.000.000	38.300.000	461.700.000
	Layanan Deputi-Kegiatan Deputi	2.500.000.000	191.094.004	2.308.905.996
2512	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	1.900.000.000	145.540.000	1.754.460.000
2513	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan	1.500.000.000	114.900.000	1.385.100.000
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional	6.419.060.000	491.699.996	5.927.360.004
Jumlah Pagu Anggaran		15.819.060.000	1.211.334.000	14.607.726.000

Selain menyusun Perjanjian Kinerja dan rencana kebutuhan anggaran pada tahun anggaran 2023, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional juga menyusun beberapa rekomendasi arah kebijakan Rencana Aksi 2023. Berikut ini adalah Rekomendasi Arah kebijakan Rencana Aksi 2023:

1. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi secara periodik yang mencakup analisis keberhasilan dan status pelaksanaan Rencana Aksi dan solusi alternatif atas Rencana Aksi yang tidak dilakukan.

2. Memanfaatkan Rencana Aksi untuk mengarahkan dan mengorganisasikan kegiatan dengan menjadikan target-target kinerja dalam rencana aksi sebagai acuan capaian output-output kegiatan dan dasar untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan.
3. Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan untuk menyesuaikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Menyampaikan hasil analisis dan kesimpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program atau rencana aksi dalam Laporan Kinerja Triwulanan.
5. Rencana Aksi alternatif atas Rencana Aksi yang gagal/terlaksana dengan perubahan akan disertai dengan alasan mengapa Rencana Aksi tersebut gagal dilaksanakan dan/ atau terlaksana dengan perubahan.
6. Laporan Kinerja Triwulanan diselaraskan dengan evaluasi program yang dilaporkan kepada Menteri melalui rapat pimpinan.
7. Dokumen Laporan Kinerja akan dipublikasikan dalam media/portal resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan Rekomendasi Arah kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya, maka Rencana Aksi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2023 dapat diuraikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 4.9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Persentase dampak FTA/PTA/CEPA/ Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra	30%	Mendorong peningkatan pemanfaatan kesepakatan FTA/PTA/CEPA/ Kesepakatan Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap total perdagangan Indonesia	Mengumpulkan dan mengolah data perdagangan internasional Indonesia dengan Negara Mitra pada triwulan I	Mengumpulkan dan mengolah data perdagangan internasional Indonesia dengan Negara Mitra pada triwulan II	Mengumpulkan dan mengolah data perdagangan internasional Indonesia dengan Negara Mitra pada triwulan III	Mengumpulkan dan mengolah data perdagangan internasional Indonesia dengan Negara Mitra pada triwulan IV
		Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	23	Meningkatkan kerja sama ekonomi internasional	- Penyelenggaraan SOM JCEC RI - ROK - Penyelenggaraan MM JCEC RI – ROK ke-2 - Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SEOM Indonesia-Australia - Penyelenggaraan <i>the 11th Ministerial Meeting of CPOPC 2023</i> - Pertemuan HLTf ke-43 - Penyusunan Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN (AECC dan AEM)	- Rapat Koordinasi Persiapan <i>Vice Ministerial Meeting Public Private Dialogue Track 1.5: Japan-Indonesia</i> - Penyelenggaraan <i>Public and Private Track 1.5: Japan-Indonesia</i> ke-2 - Penyelenggaraan SEOM Indonesia-Australia - Penyelenggaraan <i>Board Meeting Prospera Phase II</i> - Pelaksanaan SKB ke-13 RI-Rusia - Partisipasi Indonesia sebagai <i>Official Partner Country Hannover Messe 2023</i>	- Penyelenggaraan SOM 6 WG RI-Singapura ke-11 - Rapat Koordinasi 6 WG RI-Singapura untuk persiapan MM 6 WG RI-Singapura - Penyelenggaraan MM 6 WG RI-Singapura ke - 13 - Penyusunan <i>draft joint report to leader</i> - Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan ETIMM Indonesia-Australia - Pelaksanaan ETIMM Indonesia-Australia - Rapat Koordinasi Persiapan AEC Council Meeting ke-22	- Penyelenggaraan SOM Committee on Cooperation on Digital Economy RI-China - Penyelenggaraan SOM JCEC RI-Kazakhstan - Pertemuan Working Groups for AEC Post-2025 - Penyusunan bahan posisi Indonesia dalam PTM BIMP-EAGA ke-26 - Pelaksanaan PTM BIMP-EAGA ke-26 - Penyusunan Matriks Tindak Lanjut Arahan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					• Pertemuan Working Groups for AEC Post-2025 • Penyusunan matriks tindak lanjut arahan Menteri dalam PTM BIMP-EAGA ke-25 • Penyusunan Matriks Tindak Lanjut Arahan Menteri dalam PTM IMT-GT ke-28 • Rangkaian Pertemuan SPM <i>Plenary Session</i>/SOM BIMP-EAGA • Rangkaian Pertemuan SPM <i>Plenary Session</i>/SOM IMT-GT • Pertemuan APEC EC ke-1 2023 • Rapat Koordinasi Internal G20 • Rapat Koordinasi Eksternal G20 • Pertemuan Sherpa G20 ke-2 2023	• Pertemuan Working Groups for AEC Post-2025 • Koordinasi penyelesaian <i>pending matters</i> implementasi berbagai arahan Menteri terkait PTM IMT-GT • Pelaksanaan Pertemuan SOM BIMP-EAGA-ROK	• Pertemuan AEC Council ke-22 dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-42 dan ke-43 • Pertemuan HLTF ke-44 • Penyusunan Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN (AECC dan AEM) • Pertemuan Working Groups for AEC Post-2025 • Koordinasi penyelesaian <i>pending matters</i> implementasi berbagai arahan Menteri terkait PTM BIMP-EAGA • Penyusunan bahan posisi Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-29 • Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-29 • Pelaksanaan Pertemuan SOM IMT-GT ke-30 • Pelaksanaan Pertemuan SOM-IMT GT -India • Pertemuan APEC EC ke-2 2023	• Menteri dalam PTM IMT-GT ke-29 • Pelaksanaan Pertemuan SOM BIMP-EAGA ke-31 • Rapat Koordinasi Internal G20 • Rapat Koordinasi Eksternal G20 • Pertemuan Sherpa G20 ke-1 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
							• Rapat Koordinasi Internal G20 • Rapat Koordinasi Eksternal G20 • Pertemuan Sherpa G20 ke-3 2023 • Pertemuan Sherpa G20 ke-4 2023	
		Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	13	Mendorong peningkatan nilai perdagangan dan investasi	• Perundingan ke-4 ICA-CEPA • IPEF Senior Officials' Meeting/ Technical-Level Negotiating - Perundingan Pilar I, II, III, dan IV • Perundingan Indonesia-EU CEPA Putaran ke-13	• Rapat Koordinasi Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-India • Perundingan ke-5 ICA-CEPA • Pelaksanaan SOMTIF RI-NZ • Pelaksanaan 1st Technical Working Group IF-PTA • IPEF Senior Officials' Meeting/ Technical-Level Negotiating - Perundingan Pilar I, II, III, dan IV • IPEF Ministerial Meeting • Perundingan Indonesia-EU CEPA Putaran ke-14 • Perundingan Indonesia-Mauritius PTA Putaran ke-4 • Perundingan upgrading ASEAN-India FTA • Perundingan upgrading	• Penyelenggaraan JCM GR IJEPA • Rapat Koordinasi Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-India • Perundingan ke-6 ICA-CEPA • Perundingan ke-1 RI-Mercosur CEPA • IPEF Senior Officials' Meeting/ Technical-Level Negotiating - Perundingan Pilar I, II, III, dan IV • Perundingan Indonesia-EU CEPA Putaran ke-15 • Perundingan upgrading ASEAN-India FTA • Perundingan upgrading ASEAN-China FTA	• Penyusunan Rekomendasi Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-India Perundingan ke-7 dan ke-8 ICA-CEPA • IPEF Senior Officials' Meeting/ Technical-Level Negotiating - Perundingan Pilar I, II, III, dan IV • IPEF Ministerial Meeting • Perundingan Indonesia-EU CEPA Putaran ke-16

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						ASEAN-China FTA • Rapat Komite Bersama JCM 2023		
		Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	3		- Identifikasi pending matters dari arahan Kepala Negara dalam KTT IMT-GT sebelumnya - Identifikasi pending matters dari arahan Kepala Negara dalam KTT BIMP-EAGA sebelumnya - Pertemuan Sherpa G20 ke-2 2023	- Identifikasi potensi dan possible deliverable yang akan diangkat Indonesia dalam KTT IMT-GT - Identifikasi potensi dan possible deliverable yang akan diangkat Indonesia dalam KTT BIMP-EAGA	- Rapat koordinasi persiapan rangkaian KTT IMT-GT - Rapat koordinasi penyusunan intervensi Presiden - Rapat koordinasi masukan dalam Joint Statement KTT IMT-GT - Pelaksanaan pertemuan KTT IMT-GT - Rapat koordinasi persiapan rangkaian KTT BIMP-EAGA - Rapat koordinasi penyusunan intervensi Presiden - Rapat koordinasi masukan dalam Joint Statement KTT BIMP-EAGA - Pelaksanaan pertemuan KTT BIMP-EAGA - Pertemuan Sherpa G20 ke-3 2023 - Pertemuan Sherpa G20 ke-4 2023 - KTT G20 2023	- Rapat koordinasi pembahasan pending matters dalam tindak lanjut arahan Presiden pada KTT IMT-GT - Rapat koordinasi pembahasan pending matters dalam tindak lanjut arahan Presiden pada KTT BIMP-EAGA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Jumlah Ratifikasi dan Implementasi Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	4	Rekomendasi dalam proses penyelesaian ratifikasi dan implementasi kesepakatan	- Rapat Koordinasi Persiapan Ratifikasi Indonesia-UAE CEPA - Permohonan Anggota Panitia Antar Kementerian - Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden AFAFIST - Pelaksanaan negosiasi proposal kerja sama ekonomi dalam kerangka Implementing Arrangement IKCEPA dengan Pihak Korea	- Proses dan Monitoring Ratifikasi Indonesia-UAE CEPA - Rapat Koordinasi Anggota PAK Menyusun Dokumen Pendukung Ratifikasi (Naskah Akademik, Naskah Terjemahan, Rancangan Peraturan Presiden) - Pengesahan Rancangan Peraturan Presiden AFAFIST - Penyelenggaraan <i>Committee on Economic Cooperation</i> IK-CEPA 2023	- Proses dan Monitoring Ratifikasi Indonesia-UAE CEPA - Finalisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden - Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Protocol MNP	- Proses dan Monitoring Ratifikasi Indonesia-UAE CEPA - Paraf Menteri persetujuan Rancangan Peraturan Presiden - Pengesahan Rancangan Peraturan Presiden Protocol MNP
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4	- Monitoring dan evaluasi kebijakan kerja sama ekonomi internasional - Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan	Rapat koordinasi pembahasan kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain Posisi Pemri atas kasus sengketa	Rapat koordinasi pembahasan kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain Posisi Pemri atas kasus sengketa	Rapat koordinasi pembahasan kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain Posisi Pemri atas kasus sengketa DS477/478 untuk Pertemuan Reguler Dispute Settlement Body (DSB) dan	Rapat koordinasi pembahasan kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain Posisi Pemri atas kasus sengketa DS477/478 untuk Pertemuan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	Internasional yang Efektif			kerja sama ekonomi internasional	DS477/478 untuk Pertemuan Reguler Dispute Settlement Body (DSB) dan pertemuan bilateral AS dan SB, Normalisasi Appellate Body dalam rangka Penyelesaian Sengketa DS484, rapat koordinasi dengan Sectoral Bodies di bawah pilar ekonomi, finalisasi concept note PED Indonesia, penyelesaian rencana aksi implementasi perjanjian RCEP, koordinasi dan penyusunan rencana aksi pelaksanaan proyek yang didanai BKCF alokasi tahun 2021 dan 2022, penyusunan rencana aksi pelaksanaan IMT-GT Flagship Project, penyusunan	DS477/478 untuk Pertemuan Reguler Dispute Settlement Body (DSB) dan pertemuan bilateral AS dan SB, komoditi ekspor di Kawasan Indonesia Timur melalui Pelabuhan Internasional Makassar, Pengesahan daftar proposal pada tingkat SO BIMP-EAGA – ROK • Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain hasil kerja sama dalam forum / kesepakatan Indonesia dengan negara di Kawasan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, implementasi PED, implementasi rencana aksi RCEP, proyek kerja sama JCM	pertemuan bilateral AS dan SB, pending matters implementasi IMT-GT Flagship Project • Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain kerja sama RI-AS di sektor kesehatan dalam rangka pembangunan arsitektur kesehatan global, kerja sama peternakan Indonesia-New Zealand, hasil kerja sama dalam forum / kesepakatan Indonesia dengan negara di Kawasan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, implementasi PED, implementasi rencana aksi RCEP, proyek kerja sama JCM	Reguler Dispute Settlement Body (DSB) dan pertemuan bilateral AS dan SB, capaian target 2023 dalam implementasi rencana aksi pelaksanaan IMT-GT Flagship Project, Rekomendasi dalam Trade Policy Review/Joint Statement Initiative WTO • Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain hasil kerja sama dalam forum / kesepakatan Indonesia dengan ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur, pemanfaatan SKA Form IC- CEPA dan GSP, hasil kerja sama dalam forum / kesempatan Indonesia dengan negara di Kawasan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah,

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					program kerja APEC Corporate Law Governance (CLG) Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait isu kerja sama ekonomi internasional antara lain hasil relokasi industri sebagai dampak perang dagang AS-RRT, Bioteknologi IPEF, hasil kerja sama dalam forum / kesepakatan Indonesia dengan negara di Kawasan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, proyek kerja sama JCM	lanjut investasi Australia dalam sektor Kesehatan Sebagai Implementasi IA-CEPA dan Concrete Deliverable G20, fasilitasi iradiasi, hasil kerja sama dalam forum / kesepakatan Indonesia dengan negara di Kawasan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, implementasi kerja sama ekonomi ASEAN, implementasi PED, implementasi rencana aksi RCEP, implementasi rencana aksi pelaksanaan IMT-GT Flagship Project, proyek kerja sama JCM		implementasi kerja sama APEC dan Sub Regional, implementasi PED, implementasi rencana aksi RCEP, proyek kerja sama JCM
		Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi	75	Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper/Monograf	Pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta Penyusunan Karya	Pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta Penyusunan Karya	Pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta Penyusunan Karya	Pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta Penyusunan Karya

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Kerja Sama Ekonomi Internasional		Kebijakan tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf, dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional	Tulis Kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Telaahan Staf dan Advokasi Kebijakan) atau Karya Tulis Ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah) tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional • Publikasi Karya Tulis Kedinasan maupun Ilmiah tentang Kerja Sama Ekonomi Internasional
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	3 dari 4	- Pengembangan an kompetensi ASN Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui pemenuhan Jam Pelajaran - Monitoring implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama	- Rapat Pimpinan terkait perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional - Coaching kepada pejabat Eselon II - Pelaporan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	- Rapat Pimpinan terkait perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional - Coaching kepada pejabat Eselon II - Pelaporan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	- Rapat Pimpinan terkait perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional - Coaching kepada pejabat Eselon II - Pelaporan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	- Penyelenggaraan <i>capacity building</i> bagi ASN Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional - Coaching kepada pejabat Eselon II - Rapat Pimpinan terkait perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional - Pelaporan realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				Ekonomi Internasional Monitoring dan evaluasi terkait perencanaan hingga realisasi anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional				Kerja Sama Ekonomi Internasional

B. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Kemenko Perekonomian Nomor: PW.04.01/18/INS.M.EKON/01/2023 tentang Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2022 pada tanggal 11 Januari 2023, Inspektorat telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 dengan tujuan antara lain: a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Definisi SAKIP sendiri adalah sebuah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. Evaluasi AKIP ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh unit kerja (Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014).

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP berdasarkan Permenko No.15 Tahun 2021 meliputi kegiatan evaluasi terhadap 3 (tiga) hal utama, yaitu:

- 1) Perencanaan kinerja;**
- 2) Pengukuran kinerja;**
- 3) Pelaporan kinerja.**

Evaluasi AKIP untuk komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap implementasi SAKIP sampai dengan tahun 2022, sedangkan komponen Pelaporan Kinerja dilakukan terhadap implementasi SAKIP di tahun 2021.

1. Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2021 diperoleh nilai total sebesar 83.46 dengan kategori “A” atau Memuaskan. Adapun rincian berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Evaluasi SAKIP Deputy VII 2021

NO	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	40%	Keberadaan (8%) Kualitas (12%) Pemanfaatan (20%)	36,00
2	Pengukuran Kinerja	40%	Keberadaan (8%) Kualitas (12%) Pemanfaatan (20%)	32,50
3	Pelaporan Kinerja	20%	Keberadaan (4%) Kualitas (6%) Pemanfaatan (10%)	14,96
TOTAL NILAI				83.46

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,38% dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai sebesar 83.08. Lebih lanjut, berikut ini hasil evaluasi atas implementasi AKIP tahun 2021:

a. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2021 adalah 36,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.11. Komponen Perencanaan Kinerja

No.	Uraian	Nilai
Perencanaan Kinerja (40%)		36,00
I	Keberadaan (8%)	8,00
II	Kualitas (12%)	11,33
III	Pemanfaatan (20%)	16,67

Dari nilai tersebut, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, yaitu:

- Dokumen Perencanaan Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) di internal unit kerja;
- Setiap pegawai belum berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan karena Sasaran Kerja Pegawai (SKP) belum disusun untuk tahun 2022;
- Kinerja individu masih belum selaras dengan kinerja organisasi karena Perjanjian Kinerja (PK) hanya baru disusun sampai level eselon IV/subkoordinator.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2021 adalah 32,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12. Komponen Pengukuran Kinerja

No	Uraian	Nilai
Pengukuran Kinerja (40%)		32,50
I	Keberadaan (8%)	8,00
II	Kualitas (12%)	12,00
III	Pemanfaatan (20%)	12,50

Dari nilai tersebut, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dari pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, yaitu:

- Beberapa Capaian IKU belum dijadikan sebagai dasar pemberian insentif/disinsentif dan promosi atau kenaikan/penurunan peringkat. Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- Pengukuran kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- Belum terdapat informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- Pegawai dalam unit kerja belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2021 adalah 14,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.13. Komponen Pelaporan Kinerja

No	Uraian	Nilai
Pelaporan Kinerja (20%)		14,96
I	Keberadaan (4%)	3,20
II	Kualitas (6%)	5,09
II	Pemanfaatan (10%)	6,67

Dari nilai tersebut, Inspektorat memberikan beberapa hal dari evaluasi AKIP yang masih perlu disempurnakan, yaitu:

- Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu;
- Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan mengenai analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional sebagai *benchmark* kinerja;
- Dokumen Laporan Kinerja masih belum lengkap dalam memberikan info tentang efisiensi sumber daya dalam mencapai kinerja;
- Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai dalam unit kerja;

- Informasi dalam Laporan Kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- Informasi dalam Laporan Kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- Informasi dalam Laporan Kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- Informasi dalam Laporan Kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

2. Rekomendasi Inspektorat untuk Menyempurnakan AKIP Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tersebut, Inspektorat memberikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan dalam menyempurnakan AKIP Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional ke depannya sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) di internal unit kerja;
- b. Menyusun SKP tepat waktu di awal tahun sehingga setiap pegawai mempunyai komitmen mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menerapkan aturan tentang pemberian *reward and punishment* untuk internal Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- d. Menggunakan hasil pengukuran kinerja secara triwulan yang telah dilakukan sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja berikutnya;
- e. Memberikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- f. Menyampaikan dokumen Laporan Kinerja secara tepat waktu sesuai dengan yang disepakati;
- g. Meningkatkan partisipasi pegawai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja;

- h. Menyusun dokumen Laporan Kinerja berisi info tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- i. Menggunakan informasi dalam Laporan Kinerja untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
- j. Menggunakan informasi dalam Laporan Kinerja untuk melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- k. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- l. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Selain memberikan rekomendasi-rekomendasi yang penting untuk dilakukan, Inspektorat juga menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional atas kesediaan dalam memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi AKIP Tahun 2021. Disamping hal tersebut, Inspektorat juga mengapresiasi atas tindakan perbaikan-perbaikan praktik kerja, baik yang telah dilaksanakan, maupun hingga proses evaluasi berakhir.

3. Tindak Lanjut Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional atas Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP dan rekomendasi Inspektorat untuk menyempurnakan AKIP, maka terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan di tindaklanjuti untuk semakin meningkatkan performa implementasi SAKIP di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun berikutnya antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut pada Perencanaan Kinerja

- Berdasarkan penilaian pada Komponen Perencanaan Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendapat nilai 36 dari nilai maksimal 40%. Meskipun nilai tersebut sudah cukup tinggi, namun pada sub komponen pemanfaatan masih perlu ditingkatkan lagi.
- Pada dokumen Perencanaan Kinerja 2023 akan ditambahkan informasi tentang hubungan kinerja *crosscutting* antar bidang di lingkungan internal Kemenko Perekonomian.
- Setiap pegawai diwajibkan untuk dapat mencapai kinerja yang telah direncanakan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2023.
- Akan dibuat dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2023 per individu, dimulai dari PK pimpinan tertinggi yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sampai pada level staf pelaksana.
- Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berkomitmen untuk terus mempertahankan performa dalam hal penyusunan Perencanaan Kinerja baik dan berkesinambungan antara perencanaan strategis dengan Perencanaan Kinerja Tahunan.
- Dengan demikian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berjanji untuk terus menindaklanjuti dan mengikuti setiap arahan maupun petunjuk yang diberikan oleh Kemenpan RB maupun Biro Perencanaan Kemenko Perekonomian tentang bagaimana menyusun perencanaan kinerja yang baik sesuai harapan bersama.

2. Tindak Lanjut pada Pengukuran Kinerja

- Berdasarkan penilaian pada Komponen Pengukuran Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendapat nilai 32,50 dari nilai maksimal 40%. Meskipun nilai tersebut sudah cukup tinggi, namun pada sub komponen pemanfaatan masih perlu ditingkatkan lagi.
- Hasil pengukuran capaian kinerja (IKU) akan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.
- Pengukuran kinerja akan dimaksimalkan untuk digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
- Pada penyusunan Laporan Kinerja akan ditambahkan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- Akan diselenggarakan *coaching clinic* tentang penilaian AKIP agar seluruh pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional seluruhnya dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berkomitmen untuk dapat meningkatkan performa dalam hal pengukuran kinerja yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan nilai SAKIP, tetapi juga untuk meningkatkan pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja internal Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.
- Dengan demikian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berjanji untuk terus berkoordinasi dengan baik kepada *stakeholder* terkait pengukuran kinerja baik di kalangan internal maupun eksternal kantor Kemenko Perekonomian.

3. Tindak Lanjut pada Pelaporan Kinerja

- Berdasarkan penilaian pada Komponen Pelaporan Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendapat nilai 14,96 dari nilai maksimal 20%. Meskipun nilai tersebut sudah cukup baik, namun pada sub komponen pemanfaatan masih perlu ditingkatkan lagi.
- Pada periode penyampaian Laporan Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional akan menyampaikan dokumen tersebut tepat waktu sesuai dengan yang disepakati
- Pada penyusunan Laporan Kinerja akan ditambahkan analisis dan evaluasi tentang perbandingan realisasi kinerja Deputi dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional sebagai *benchmark* kinerja.
- Pada penyusunan Laporan Kinerja akan ditambahkan analisis tentang efisiensi sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Informasi pada Laporan Kinerja akan dimanfaatkan dalam proses penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.
- Informasi pada Laporan Kinerja akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja berikutnya.
- Informasi pada Laporan Kinerja akan dimanfaatkan dalam proses penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja berikutnya.
- Informasi pada Laporan Kinerja akan dimanfaatkan dalam proses penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja berikutnya.
- Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja akan melibatkan seluruh unit kerja eselon II di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional untuk menumbuhkan kepedulian seluruh pegawai dalam unit kerja.
- Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berkomitmen untuk meningkatkan performa terutama dalam hal pelaporan kinerja yang bertujuan tidak hanya untuk

meningkatkan nilai SAKIP, tetapi juga untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi kinerja yang lebih baik pada masa mendatang.

C. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA

Peningkatan kinerja (*performance improvement*) tidak lepas dari sebuah pencapaian hasil itu sendiri. Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana unit kerja dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa misi suatu unit kerja itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka rencana aksi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting.

Selain itu penting juga untuk menyusun rencana aksi tentang peningkatan kinerja tahun berikutnya. Sehingga melalui rencana aksi peningkatan kinerja tersebut dapat dijadikan panduan dalam melakukan langkah-langkah perbaikan secara sistematis dan mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan unit kerja selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan performa capaian kinerja tahun 2022, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyusun rencana aksi peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

1) Meningkatkan kapasitas pegawai Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui *Capacity Building*.

Melalui penyelenggaraan program *capacity building*, pelatihan, hingga FGD, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai. Melihat antusias pegawai dalam mengikuti setiap program pelatihan yang diselenggarakan, maka untuk tahun kerja berikutnya Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional akan terus menyelenggarakan beberapa program pengembangan kompetensi pegawainya antara lain pelatihan manajemen kinerja pegawai, kegiatan *team building*, hingga *Neuro Linguistic Programming* (NLP).

NLP sendiri berawal dari sebuah gagasan bahwa ada hubungan antara proses neurologis, bahasa (*linguistic*) dan pola perilaku yang bersumber dari pengalaman (program). Dengan mempelajari hubungan-hubungan tersebut, individu secara efektif bertransformasi dari cara lama mereka dalam merasakan, berfikir, dan berperilaku, menjadi bentuk baru dan jauh

lebih membantu dalam komunikasi manusia (Huehls, 2010; Seyhener, 2011). Tujuan pelatihan ini adalah penerima manfaat memiliki strategi yang baik dalam menghadapi stres dan membangun persepsi yang lebih positif pada pegawai di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

2) Meningkatkan pemahaman pegawai Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tentang Evaluasi AKIP melalui *Coaching Clinic*

Berkenaan dengan keluarnya Permenko No.15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2021 dari Inspektorat, maka dirasa penting untuk dapat diselenggarakan *coaching clinic* tentang ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP. Terutama terkait 3 (tiga) hal utama yaitu Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja sesuai dengan Permenko No.15 Tahun 2022.

3) Menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui pemberian *reward and punishment*

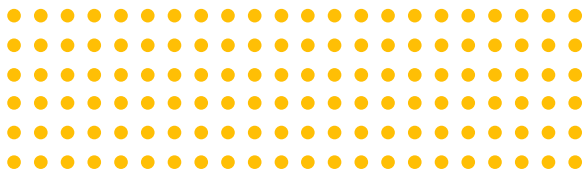
Reward efektif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. Jika seorang pegawai kinerjanya unggul atau menghasilkan manfaat besar bagi unit kerja, sangat dianjurkan agar diberi penghargaan. Penghargaan bisa berupa pemberian Plakat atau Souvenir Penghargaan secara simbolis. Dalam hal ini *reward* akan diberikan kepada tim kerja dari masing-masing unit kerja Keasdepan yang berhasil mengupload Laporan Kinerja triwulanan tepat waktu. Hal ini karena sepanjang tahun 2022, penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan selalu melebihi tenggat waktu yang diberikan. Sehingga pemberian *reward* ini akan memberikan semangat pegawai untuk menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu.

Punishment akan diberikan kepada pegawai kepada pegawai yang lalai akan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya agar timbul rasa malu, jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. *Punishment* dapat berupa Surat Teguran dari pimpinan langsung sesuai dengan aturan Undang-Undang ASN yang berlaku.

4) Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui Dialog Kinerja secara periodik

Dialog kinerja sangat penting dalam rangka meningkatkan keterlibatan seluruh pimpinan bersama seluruh pegawai dalam mencapai tujuan dan target kinerja serta meningkatkan transparansi dan memberikan pembinaan pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

5 PENUTUP



5 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum, capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional (Deputi VII) selama tahun 2022 telah memenuhi NKO 119,2% yang berarti Memenuhi Ekspektasi dari seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak Perjanjian Kinerja Deputy VII 2022. Meskipun dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Deputy VII 2022 terdapat 1 Sasaran Strategis yang belum mencapai 100% yaitu Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Tapi di lain sisi terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang mendapat nilai NKO 133,33% atau memenuhi ekspektasi, yaitu Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif, dan Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. Sehingga secara keseluruhan, melalui pencapaian kinerja sebesar 119,2%, maka Deputy VII telah Memenuhi Ekspektasi kinerja sesuai dengan kontrak kinerja tahun 2022.

Deputi VII mempunyai fungsi untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi internasional. Dalam melaksanakan kegiatannya tidak hanya tergantung dari kesiapan Kementerian/Lembaga pemerintah dan swasta Indonesia, namun juga sangat tergantung pada kegiatan negara mitra kerja sama, oleh sebab itu rencana kegiatan yang disusun di awal tahun juga perlu mempertimbangkan kesediaan negara mitra.

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama ekonomi internasional antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan, serta perbaikan regulasi yang mendukung program-program penguatan dan peningkatan investasi bidang-bidang strategis. Selain itu, perlu ditingkatkannya kegiatan sosialisasi, agar *stakeholder* lebih memahami dan dapat memanfaatkan peluang kerjasama internasional.

Peningkatan kerjasama dengan negara mitra berdampak pada peningkatan indikator ekonomi terutama pada total perdagangan Indonesia dengan negara mitra. Upaya Deputy VII untuk meningkatkan indikator ekonomi dilakukan dengan mempererat kerjasama ekonomi dengan negara mitra maupun dalam lingkup kerjasama bilateral, regional, sub regional dan multilateral, melalui *agreement*, *agreed minutes*, *MOU*, *Joint Statement* yang dilakukan sesuai tahapan kerja sama internasional yang berlaku umum. Dengan melaksanakan tahapan proses kerjasama ekonomi yang telah dilakukan, dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait, dalam bentuk rapat koordinasi antar kementerian/lembaga, sosialisasi, *focus group discussion* (FGD) serta monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Deputy VII senantiasa berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja melalui upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi, sebagai bagian untuk mewujudkan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

B. HARAPAN DAN TINDAK LANJUT

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu perangkat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh bidang ke Deputi VII dan *stakeholder* terkait dalam menghadapi tantangan di tahun 2022. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja sebaiknya terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas.

Untuk itu, beberapa rencana aksi tindak lanjut perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja kedepannya, antara lain:

1. Meningkatkan peran dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan terkait kerja sama ekonomi internasional;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kesepakatan kerja sama ekonomi internasional;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan dalam diklat-diklat terkait tugas dan fungsi Deputi VII, guna mendukung efektivitas kinerja pegawai;
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan hingga Pelaporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Laporan Kinerja Deputi VII ini diharapkan dapat memberikan informasi atas capaian kinerja dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang akan berdampak positif dalam peningkatan daya saing perekonomian Indonesia.

C. RENCANA PERTEMUAN TINGKAT DEPUTI, MENTERI DAN PRESIDEN TAHUN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	JADWAL	LOKASI	LEVEL KEGIATAN
1	Forum PPDT 1.5 RI-Jepang	Januari	Jakarta	Deputi
2	Opening Session of the 16th IMT-GT SPM	Januari	Virtual	Deputi
3	IPEF <i>Virtual Meeting</i>	Januari	Virtual	Deputi
4	<i>Technical Prep Site Visit</i> Hannover Messe	Januari	Hannover - Jerman	Deputi
5	<i>The 22nd CIMT Advisory Committee Meeting</i>	Februari	Virtual	Deputi
6	<i>IPEF Senior Officials' Meeting and technical-level Negotiating Round</i> (for Pillars II-IV only)	Februari	India	Deputi
7	<i>IMT-GT High Level Investors Forum on The New Ocean Energy Economy</i> (MARES-TA)	Februari	Malaysia	Deputi
8	BIMP-EAGA <i>Strategic Planning Meeting</i>	Februari	Brunei Darussalam	Deputi
9	Pertemuan HLTF-EI ke 43	Maret		Deputi
10	AZEC Ministerial Meeting	Maret	Tokyo (TBC)	Menko
11	<i>IPEF Senior Officials' Meeting And Technical-Level Negotiating Round 2</i>	Maret	Bali (TBC)	Deputi
12	Leaders Retreat RI - Singapura	Maret	Singapura	Presiden
13	Dialog PPD RI-Jepang	Maret	Jepang	Deputi
14	<i>The 2nd Joint Committee on Economic Cooperation</i> RI-Korea (JCEC)	Maret	Korea Selatan	Menko/Deputi
15	<i>The 16th IMT-GT SPM</i>	Maret	Bangkok, Thailand	Deputi
16	<i>The 2nd Sherpa Meeting</i> India G20 Presidency	Maret	Kochi, India	Deputi
17	Partner Country Hannove Messe 2023	April	Hannover - Jerman	Menko
18	Penandatanganan <i>JDol Joint Economic and Investment Committee</i> (JEIC) RI - Jerman	April	Hannover - Jerman	Menko
1919	<i>Senior Economic Officials Meeting</i> (SEOM) RI-Australia	April	Australia	Deputi
20	IPEF <i>Virtual Meeting</i>	April	Virtual	Deputi
21	<i>Senior Officials' Preparatory Meeting for the 15th IMT-GT Summit</i>	April	Virtual	Deputi
22	WG <i>Trade Investment and Industry</i> RI-Rusia	Mei	Moskow	Deputi
23	<i>IPEF Senior Officials' Meeting And Technical-Level Negotiating Round 3</i>	Mei	TBD	Deputi
24	G7 Summit (invitee)	Mei	Hiroshima, Japan	Presiden/Menko/Deputi
25	<i>IPEF Ministerial Meeting</i>	Mei	Detroit, MI, USA	Menko
26	<i>SO Preparatory Meeting for 15th IMT-GT Summit</i>	Mei	Labuan Bajo	Deputi
27	<i>SO Preparatory Meeting for 15th BIMP-EAGA Summit</i>	Mei	Labuan Bajo	Deputi
28	<i>The 22nd ASEAN Economic Community Council</i>	Mei	Labuan Bajo	Menko
29	<i>The 42nd ASEAN Summit</i>	Mei	Labuan Bajo	Presiden
30	<i>The 15th IMT-GT Summit</i>	Mei	Labuan Bajo	Presiden
31	<i>The 15th BIMP-EAGA Summit</i>	Mei	Labuan Bajo	Presiden

NO	NAMA KEGIATAN	JADWAL	LOKASI	LEVEL KEGIATAN
32	Board Meeting Prospera	Juni	Jakarta	Deputi
33	IPEF Virtual Meeting	Juni	Virtual	Deputi
34	The 4th BIMP-EAGA - ROK Senior Officials Meeting	Juni	Seoul, Korea	Deputi
35	Economic Trade and Investment Ministerial Meeting (ETIMM) RI-Australia	Juni	Australia	Menko
36	The 3rd Sherpa Meeting India G20 Presidency	Juli	Hampi, India	Deputi
37	Pertemuan HLTF-EI ke 44	Juli	Lombok	Deputi
38	The 11th Senior Official Meeting (SOM) of 6 Working Group (WG) Indonesia - Singapore	Juli	Singapura	Deputi
39	IPEF Senior Officials' Meeting And Technical-Level Negotiating Round 4	Juli	TBD	Deputi
40	SKB ke-13 RI-Rusia	Juli	Virtual	Menko
41	SOM Joint Commission on Economic Cooperation (JCEC) RI-Kazakhstan	Agustus	Kazakhstan	Deputi
42	The 13th Ministerial Meeting (MM) of 6 Working Group (WG) Indonesia - Singapore	Agustus	Jakarta	Menko
43	IPEF Virtual Meeting	Agustus	Virtual	Deputi
44	APEC High Level Structural Reform Senior Official Meeting	Agustus	Seattle, Washington, USA	Deputi
45	CIMT Review Committee Meeting: Preparation on 23rd CIMT Advisory Committee Meeting	Agustus	Virtual	Deputi
46	SO Preparatory Meeting for Ministerial Meeting	Agustus	Indonesia (TBC)	Deputi
47	The 23rd CIMT ACM	Agustus	Indonesia (TBC)	Deputi
48	The 4th Sherpa Meeting India G20 Presidency	September	Delhi, India	Deputi
49	The 23rd ASEAN Economic Community Council	September	Bali	Menko
50	The 44th ASEAN Summit and Related Summit	September	Bali	Presiden, Menko, Deputi
51	KTT G20 India	September	Delhi, India	Presiden, Menko, Deputi
52	IPEF Senior Officials' Meeting And Technical-Level Negotiating Round 5	September	TBD	Deputi
53	Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-29	September	Kepulauan Riau	Menko
54	IPEF Senior Officials' Meeting And Technical-Level Negotiating Round 6	Oktober	TBD	Deputi
55	IPEF Senior Officials' Meeting And Technical-Level Negotiating Round	November	TBD	Deputi
56	IPEF Ministerial Meeting	November	San Francisco, USA	Menko
57	APEC Economic Leaders' Week (AELW)	November	San Francisco, USA	Presiden
58	The 31st BIMP-EAGA Senior Officials Meeting	November	Brunei Darussalam	Deputi
59	The 26th BIMP-EAGA Ministerial Meeting	November	Brunei Darussalam	Menko
60	IPEF Virtual Meeting	Desember	Virtual	Deputi
61	The 1st Sherpa Meeting Brazil G20 Presidency	Desember	TBC	Deputi



6 REFERENSI



6 REFERENSI

- Huehls, Frances. 2010. *Literature review*. International Journal of Educational advancement. Vol 10. 48-55.
- Seyhener, Lidy. 2011. *Time Line Therapy. An Advanced Technique from The Science of Neuro Linguistic Programming*. Australian Journal of Clinical Hypnotherapy and Hypnosis. 31. 1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Negara-Negara EFTA
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique*)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Fourth Protocol to Amend the Asean Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Keempat Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020–2024
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

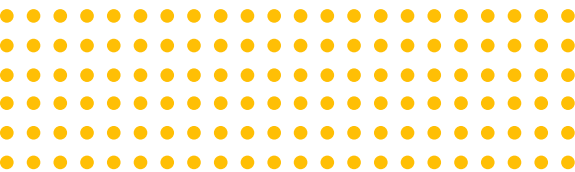
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan Ketentuan Penerbitan Deklarasi Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2021 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA
- Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Periode Tahun 2020-2024
- Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2023
- Nota Dinas Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PW.04.01/18/INS.M.EKON/01/2023 tentang Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2021



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia



LAKIP 2022



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, 10710
www.ekon.go.id | www.deputi7.ekon.go.id